

Bab 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) yang mempunyai visi “Terciptanya pembinaan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi yang dinamis dengan peran aktif seluruh potensi nasional” melakukan 3 (tiga) fungsi pokok di bidang penyelenggaraan pos dan telekomunikasi nasional, yaitu : pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Fungsi pengaturan meliputi kegiatan yang bersifat umum dan teknis operasional yang antara lain diimplementasikan dalam bentuk pengaturan perizinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.

Fungsi pengawasan merupakan suatu fungsi dari Ditjen Postel untuk memantau dan mengawasi seluruh kegiatan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi agar tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi pengendalian merupakan fungsi yang bertujuan memberi pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, termasuk juga agar penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang penyelenggaraan pos dan telekomunikasi dapat dilaksanakan dengan baik.

Ketiga fungsi di atas merupakan penjabaran dari fungsi penetapan kebijakan yang dimiliki oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Menteri yang salah satu ruang lingkupnya adalah di bidang pos dan telekomunikasi. Fungsi penetapan kebijakan merupakan fungsi strategis yang dimiliki oleh Menteri dalam hal perumusan perencanaan dasar strategis dan perencanaan dasar teknis pos dan telekomunikasi nasional. Dengan demikian, maka pengaturan pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Ditjen Postel mengacu kepada kebijakan yang telah ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Ditjen Postel selama ini selalu berusaha untuk dapat mengimplementasikan semua kebijakan

Menteri Komunikasi dan Informatika di bidang pos dan telekomunikasi dengan baik, sehingga penyelenggaraan pos dan telekomunikasi nasional dapat dinikmati oleh rakyat banyak dan tidak terbatas pada masyarakat di kota-kota besar saja.

Pada akhir tahun 2010 ini menjadi momentum yang khusus terkait keberadaan Ditjen Pos dan Telekomunikasi. Selain baru saja merayakan Hari Bakti Pos dan Telekomunikasi yang ke 65. Pada tahun 2010 ini juga menjadi tahun terakhir keberadaan Ditjen Pos dan Telekomunikasi sebagai suatu unit kerja di Kementerian Pos dan Telekomunikasi. Setelah beberapa kali berganti induk Departemen/Kementerian (Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika), pada akhir tahun 2010 ini justru Ditjen Pos dan Telekomunikasi yang harus dimekarkan.

Tuntutan perkembangan sektor pos dan khususnya telekomunikasi yang sangat pesat dan cepat dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan beban kerja dari Ditjen Pos dan Telekomunikasi menjadi sangat besar untuk ditanggung oleh sebuah Direktorat Jenderal. Apalagi perkembangan sektor telekomunikasi juga semakin tidak menunjukkan batas yang jelas dengan sektor lain seperti telematika, penyiaran dan sebagainya terkait dengan pemanfaatan frekuensi. Perangkat telekomunikasi juga semakin berkembang dan penggunaannya juga semakin beragam. Pada sisi yang lain, beban kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menjadi induk Ditjen Pos dan Telekomunikasi, hampir 75%-nya anggaran belanja Kementerian Komunikasi dan Informatika berada di Ditjen Pos dan Telekomunikasi. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ditjen Pos dan Telekomunikasi dimekarkan menjadi dua Direktorat Jenderal yaitu **Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI)** dan **Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI)**. Dengan terbentuknya dua Direktorat Jenderal ini, maka berakhir pula kelembagaan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan tugas pokok serta fungsinya beralih ke dua Ditjen yang baru terbentuk.

1.2. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan buku data statistik ini adalah merangkum, menyusun dan menganalisa data statistik dalam lingkup bidang pos dan telekomunikasi, sehingga khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat menggunakannya sebagai bahan dalam menentukan kebijakan dan umumnya *stakeholder* dapat melihat, menganalisa dan menggunakan data – data statistik yang tersedia dalam buku ini.

1.3. Metode Penyusunan

1.3.1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penyusunan data statistik bidang pos dan telekomunikasi Semester II Tahun 2010 ini dilakukan dengan beberapa cara. Penggunaan beberapa alternatif cara ini dilakukan untuk mengoptimalkan proses pengumpulan data sehingga data yang terkumpul bisa maksimal dan penyajian data lebih lengkap. Alternatif cara yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

- (a). Membuat format tabel kebutuhan data untuk penyajian dan analisis data yang disampaikan dan dikumpulkan dari dan kepada unit kerja terkait di Ditjen Postel;
- (b). Mendapatkan data langsung (jemput bola) dari sumber data seperti data dari PT. Pos Indonesia, Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, Asperindo dan Badan Pusat Statistik (BPS);
- (c). Memanfaatkan data yang tersedia, termasuk yang masih dalam format data mentah (*raw data*) untuk kemudian dilakukan pengolahan untuk penyajian data statistik;
- (d). Memanfaatkan data yang sudah dipublikasikan oleh instansi terkait maupun *stakeholder* seperti data dari publikasi BPS, *annual report* dari operator seluler dan publikasi lain yang terkait.

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan tersebut, kemudian disusun format penyajian data yang sama untuk masing-masing data meskipun jenis data yang didapatkan berbeda.

1.3.2. Metode Penyajian Data

Data yang dikumpulkan kemudian dilakukan penyusunan tabel baik langsung maupun melalui pengolahan data terlebih dahulu dalam bentuk format data yang sama untuk

penyajian data statistik bidang pos dan telekomunikasi. Penyajian data dalam buku Data Statistik Bidang Pos dan Telekomunikasi Semester II Tahun 2010 ini dilakukan dalam bentuk :

- (1) Statistik deskriptif frekuensi, yaitu penyajian data-data frekuensi/jumlah dari indikator-indikator data statistik yang dipilih untuk masing-masing bidang/unit kerja;
- (2) Statistik komposisi/proporsi, yaitu penyajian data proporsi dari masing-masing variabel dari indikator yang ada terhadap total nilai indikator;
- (3) Statistik trend, yaitu penyajian yang menunjukkan kecenderungan arah perkembangan dari indikator yang dipilih, untuk menunjukkan trend atas variabel tersebut dari waktu ke waktu.

Penyajian data dilakukan dalam format tabel frekuensi maupun dalam bentuk grafik/diagram (*chart*). Grafik/diagram yang dimunculkan dalam penyajian data dalam bentuk diagram batang, diagram *pie* dan diagram grafik trend.

1.4. Ruang lingkup

Dalam penyusunan buku ini, tim penulis membatasi ruang lingkup untuk data – data internal Ditjen Postel sampai 31 Desember Tahun 2010, dan untuk data – data *yang bersifat query harian* terdapat data sampai 11 Januari 2011. Data yang disajikan meliputi data tahunan maupun data bulanan. Ruang lingkup dalam penyajian buku Data Statistik Semester II Tahun 2010 Bidang Pos dan Telekomunikasi ini meliputi :

- (1) Statistik kepegawaian dan sumber daya manusia Ditjen Postel dan transformasinya ke Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- (2) Statistik peraturan/regulasi terkait bidang Pos dan Telekomunikasi;
- (3) Statistik sarana dan produksi perposan, termasuk jasa titipan;
- (4) Statistik telekomunikasi (internal dan *stakeholder*);
- (5) Statistik pengelolaan spektrum frekuensi radio dan monitoring frekuensi;
- (6) Statistik sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi;
- (7) Statistik kelembagaan internasional;



- (8) Statistik Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang meliputi data bidang pengujian perangkat; data bidang Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan dan data monitoring spektrum frekuensi radio.
- (9) Statistik peran ekonomi dibidang pos dan telekomunikasi.

1.5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyajian Data Statistik Bidang Pos dan Telekomunikasi Semester II Tahun 2010 ini berasal dari berbagai sumber yang sudah disetujui dan dapat digunakan untuk keperluan publikasi. Data yang digunakan berasal dari :

- (1) Unit kerja di lingkup eks Ditjen Postel seperti Setditjen SDPPI, Direktorat di lingkungan Ditjen SDPPI, UPT di lingkungan Ditjen SDPPI (Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Monitoring Spektrum Frekuensi Radio), Direktorat Pos, Direktorat Telekomunikasi, Direktorat Pengendalian PPI serta UPT di Ditjen PPI (BP3TI / sebelumnya Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan);
- (2) *Stakeholder* terkait Bidang Pos dan Bidang Datakom dari PT. Pos Indonesia;
- (3) *Quarterly Report* kuartal IV tahun 2010 yang dipublikasikan di kuartal I tahun 2011 dari beberapa operator telekomunikasi;
- (4) Badan Pusat Statistik, berupa data yang sudah dipublikasikan dalam buku statistik maupun belum disajikan dalam format buku;
- (5) Nota Keuangan dari Kementerian Keuangan;
- (6) Asperindo, untuk sumber data produksi jasa ekspres dan logistik.

Penyajian buku Data Statistik Bidang Pos dan Telekomunikasi Semester II tahun 2010 dapat diunduh di website resmi kelembagaan dengan alamat www.postel.go.id.

1.6. Manfaat Penyusunan Buku

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan buku statistik ini ini adalah:

- (1) Memberikan informasi yang terkini data – data yang terdapat dalam ruang lingkup bidang pos dan telekomunikasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika dan data – data *stakeholder* yang telah disusun secara sistematis, jelas dan ringkas;
- (2) Memberi informasi bagi masyarakat, sehingga masyarakat umum dapat mempergunakan data – data statistik bidang Pos dan Telekomunikasi untuk masing – masing keperluan.

Bab 2

Profil

2.1. Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika

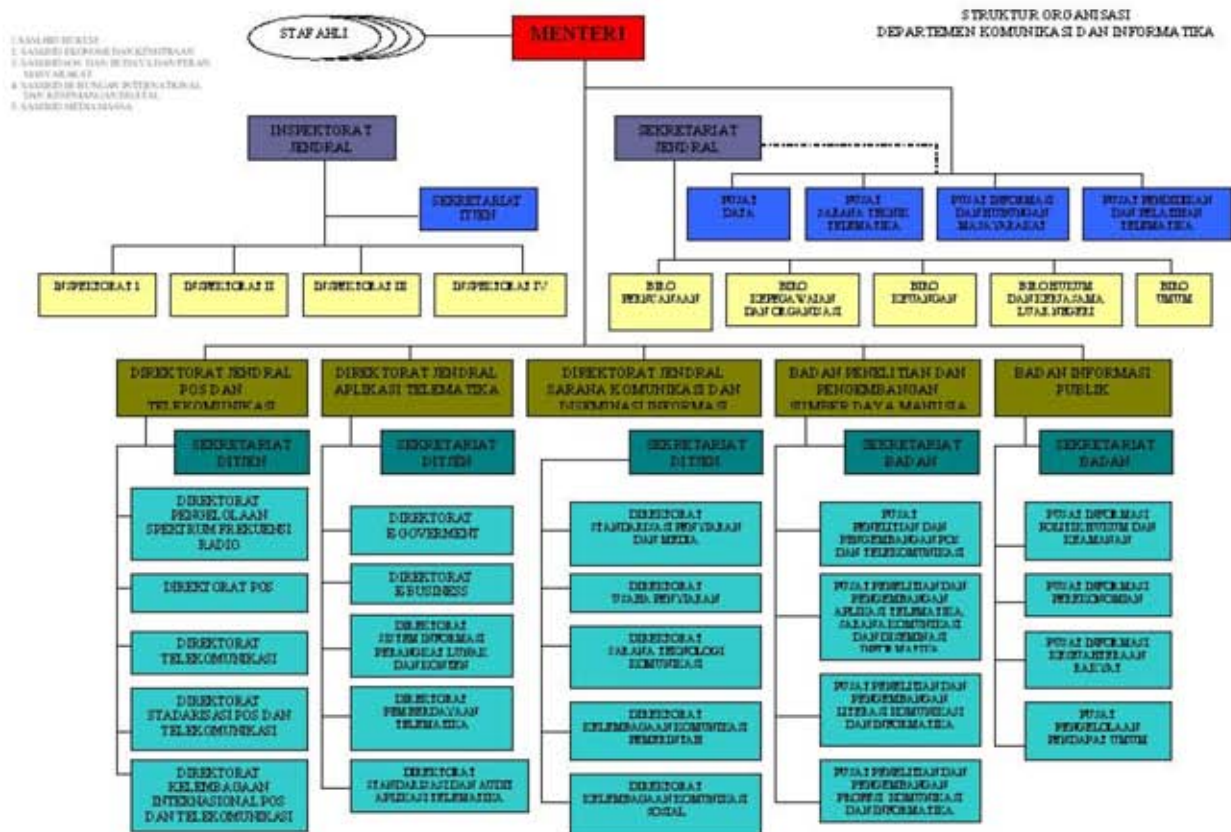
Pada tahun 2008 struktur organisasi dan tata kerja pada Kementerian Komunikasi dan Informatika terbentuk melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 25/PER/M.KOMINFO/07/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika. Tugas pokok dari Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- (1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika;
- (2) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- (4) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Komunikasi dan Informatika di daerah; dan
- (5) Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Untuk mendukung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, pada awalnya struktur Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri dari empat Direktorat Jenderal dan Dua Badan. Direktorat Jenderal yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika dan Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi. Sementara dua badan yang ada adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Badan Informasi Publik. Struktur Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai

dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 25/PER/M.KOMINFO/07/2008 adalah sebagai berikut

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Permen Kominfo No. 25/PER/M.KOMINFO/07/2008



2.2. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

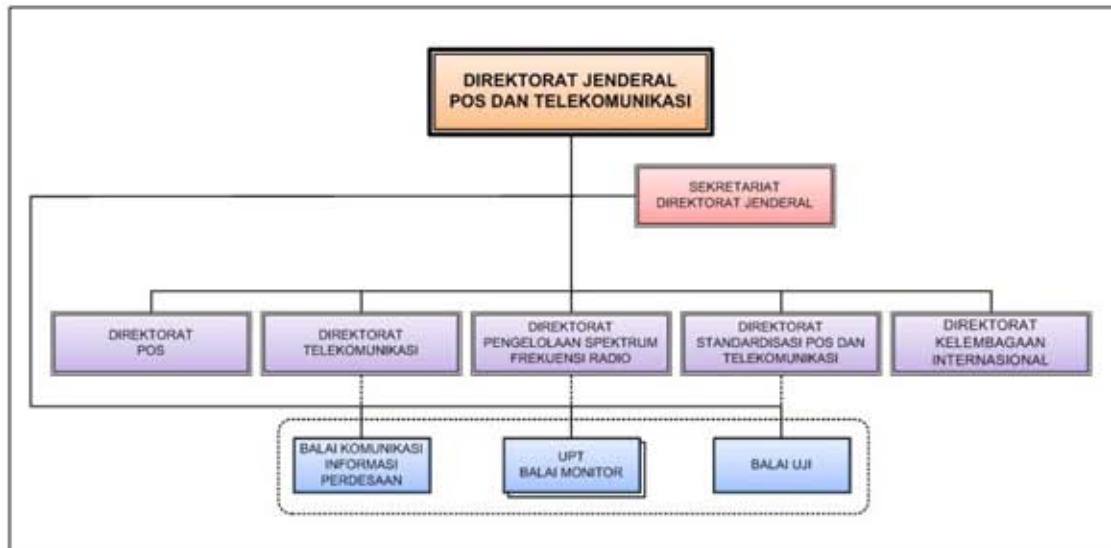
Bidang pos dan telekomunikasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika pada awalnya ditangani oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang dibentuk dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 25/PER/M.KOMINFO/07/2008. Adapun struktur Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi terdiri dari

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
- (2) Direktorat Pos;
- (3) Direktorat Telekomunikasi;
- (4) Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio;
- (5) Direktorat Standardisasi Pos dan Telekomunikasi;
- (6) Direktorat Kelembagaan Internasional;

(7) Unit Pelaksana Teknis :

1. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi;
2. Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan;
3. Balai/Loka/Pos Monitoring Spektrum Frekuensi Radio.

Gambar 2.2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi



Visi dari Ditjen Pos dan Telekomunikasi adalah “Terciptanya pembinaan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi yang dinamis dengan peran aktif seluruh potensi nasional”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Ditjen Pos dan Telekomunikasi memiliki beberapa misi yaitu

- (a) Meningkatkan kualitas pengaturan dan sumber daya manusia;
- (b) Meningkatkan pemerataan pelayanan ke seluruh pelosok nusantara;
- (c) Meningkatkan iklim usaha dan peran serta masyarakat;
- (d) Meningkatkan jenis dan kualitas pelayanan jasa;
- (e) Mendorong optimalisasi penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan yang tepat guna;
- (f) Meningkatkan pembinaan potensi pos dan telekomunikasi.

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi berwenang merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang pos dan telekomunikasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyiapan perumusan kebijaksanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika di bidang pos, telekomunikasi, informatika, spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi;
- (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi;
- (3) Perumusan standardisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi;
- (4) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan internasional di bidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi;
- (5) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- (6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

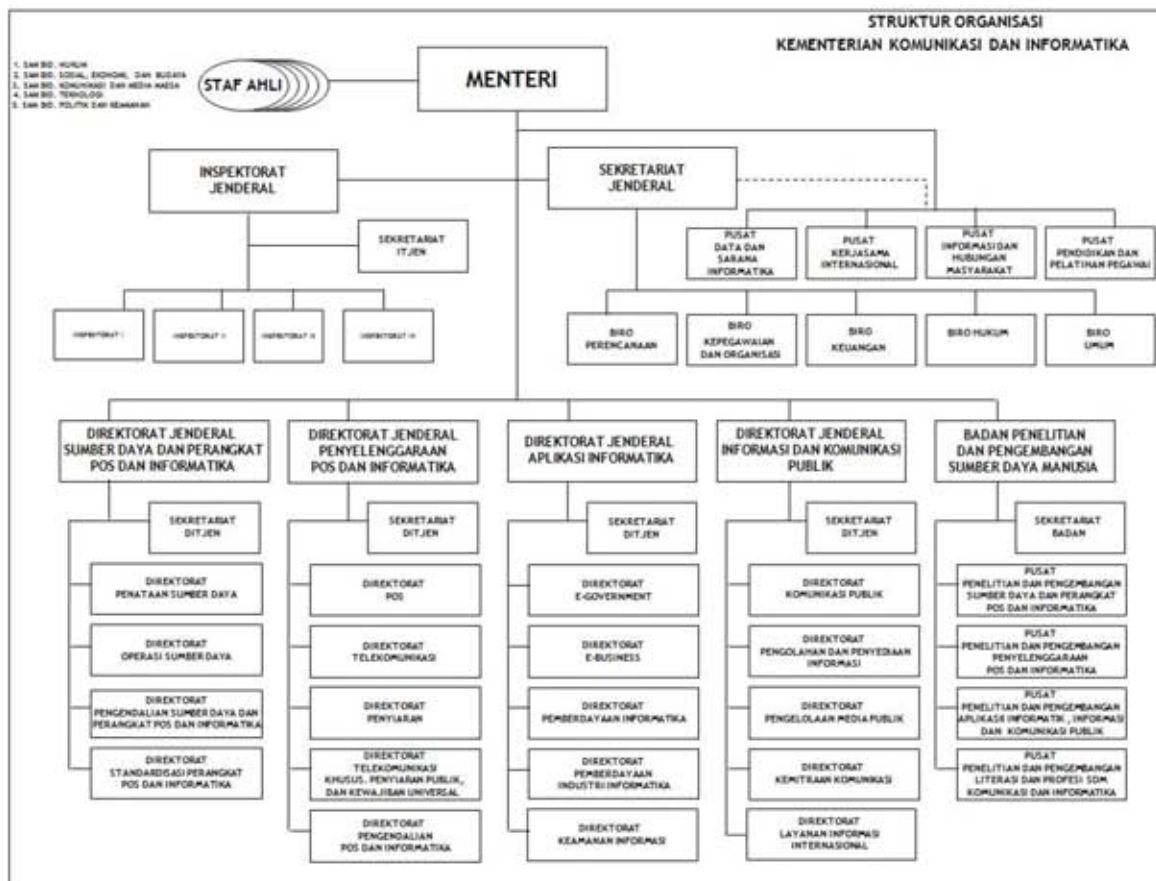
Selama ini, Ditjen Postel menjalankan 3 (tiga) fungsi pokok di bidang penyelenggaraan pos dan telekomunikasi nasional, yaitu: pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Fungsi pengaturan meliputi kegiatan yang bersifat umum dan teknis operasional yang antara lain diimplementasikan dalam bentuk pengaturan perijinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan pos dan telekomunikasi. Fungsi pengawasan merupakan suatu fungsi dari Ditjen Postel untuk memantau dan mengawasi seluruh kegiatan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi agar tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi pengendalian merupakan fungsi yang bertujuan memberi pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, termasuk juga agar penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang penyelenggaraan pos dan telekomunikasi dapat dilaksanakan dengan baik.

2.3. Restrukturisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan teknologi dan industri bidang pos dan telekomunikasi yang semakin tinggi dan cepat, pemerintah melakukan restrukturisasi dalam struktur organisasi dan tata kerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 17/PER/M-KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika dilakukan restrukturisasi

organisasi di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam struktur Kementerian Komunikasi dan Informatika hasil restrukturisasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri dari satu Sekretariat Jenderal, empat Direktorat Jenderal, satu Inspektorat Jenderal dan Satu Badan. Empat Direktorat Jenderal yang ada adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, dan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Satu Badan setingkat eselon satu adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia. Struktur organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika hasil dari restrukturisasi adalah seperti ditunjukkan pada gambar 2.3.

Gambar 2.3. Struktur Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika sesuai Permen Kominfo No. 17/PER/M-KOMINFO/10/2010



2.4. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

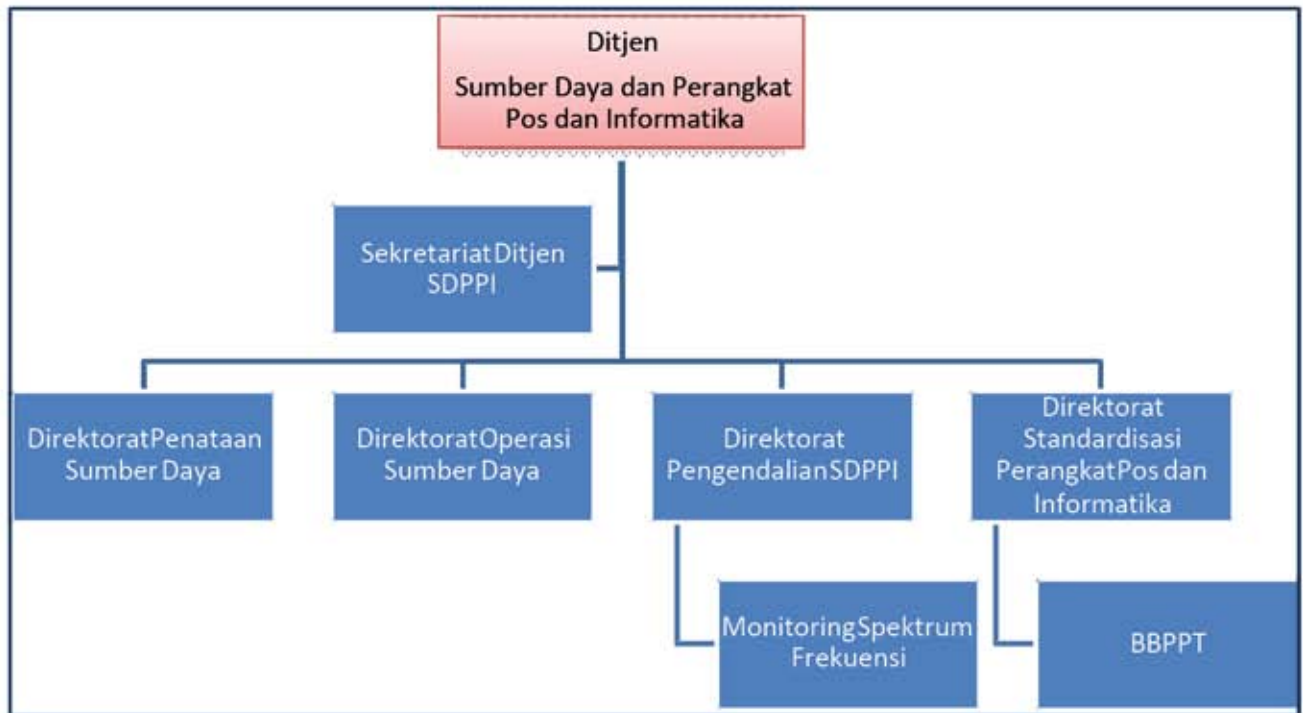
Salah satu Direktorat Jenderal pada struktur Kementerian Komunikasi dan Informatika hasil restrukturisasi yang terbentuk adalah Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI). Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah Ditjen yang terbentuk dari hasil pemekaran Ditjen Pos dan Telekomunikasi yang dimekarkan menjadi dua Ditjen. Satu Ditjen lain adalah Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Kedua Ditjen inilah yang banyak mengambil alih tugas pokok dan fungsi dari Ditjen Pos dan Telekomunikasi dalam struktur Kementerian Pos dan Komunikasi.

2.4.1. Struktur Organisasi Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika adalah unit kerja baru setingkat eselon satu yang menjalankan sebagian besar tugas pokok dan fungsi dari Ditjen Pos dan Telekomunikasi. Organisasi Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Penataan Sumber Daya;
3. Direktorat Operasi Sumber Daya;
4. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; dan
5. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika;
6. Unit Pelaksana Teknis, yaitu :
 - a. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.
 - b. Balai Monitoring Spektrum Frekuensi, yang terdiri dari Balai/Loka/Pos Monitoring Spektrum Frekuensi tersebar di 35 lokasi.

Gambar 2.4. Struktur Organisasi Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika



2.4.2. Tugas dan Fungsi Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- (1) Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- (2) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya dan Perangkat pos dan informatika;
- (3) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika; dan
- (4) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

2.4.3. Sekretariat Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

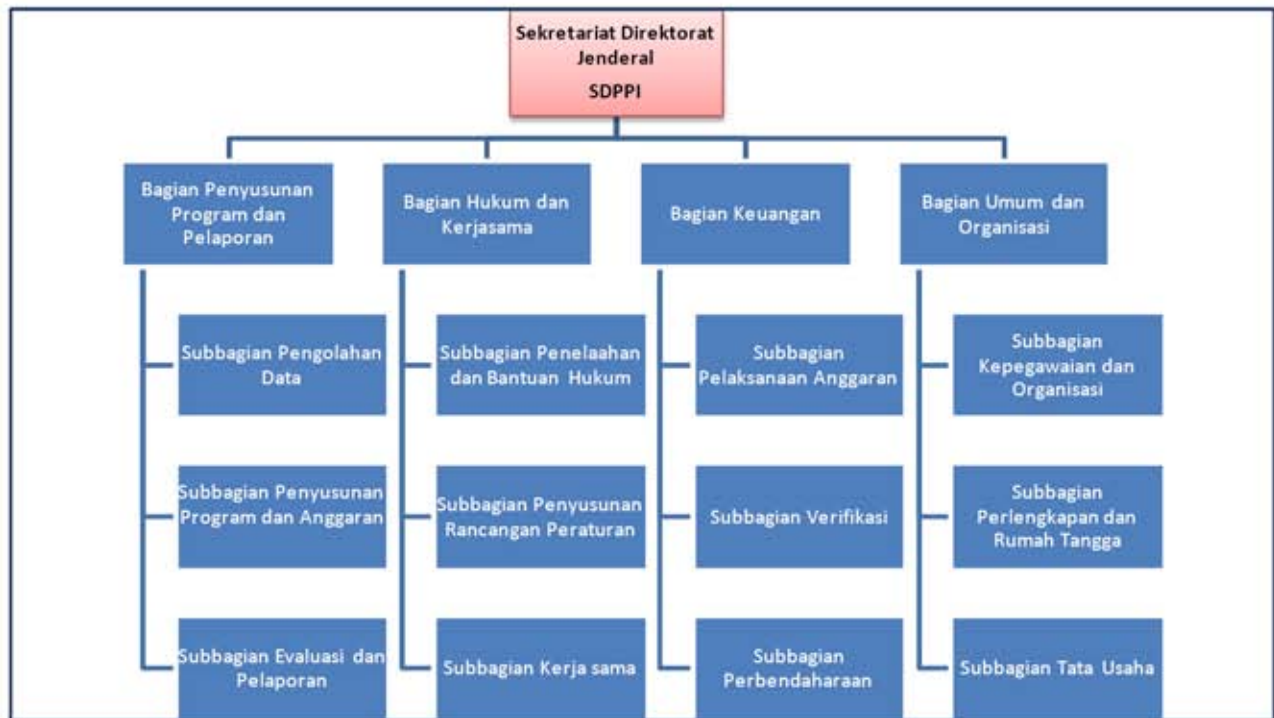
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- (1) Koordinasi dan penyusunan rencana, program anggaran, dan administrasi bantuan
- (2) Teknik luar negeri, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- (3) Koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- (4) Koordinasi dan penyiapan telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan bantuan dan penyuluhan hukum di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- (5) Koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- (6) Pengelolaan urusan keuangan di lingkungan direktorat jenderal;
- (7) Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, perlengkapan, rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan direktorat jenderal.

Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
- b. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Umum dan Organisasi

Gambar 2.5. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal SDPPI



2.4.4. Direktorat Penataan Sumber Daya

Direktorat Penataan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan sumber daya. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Penataan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi:

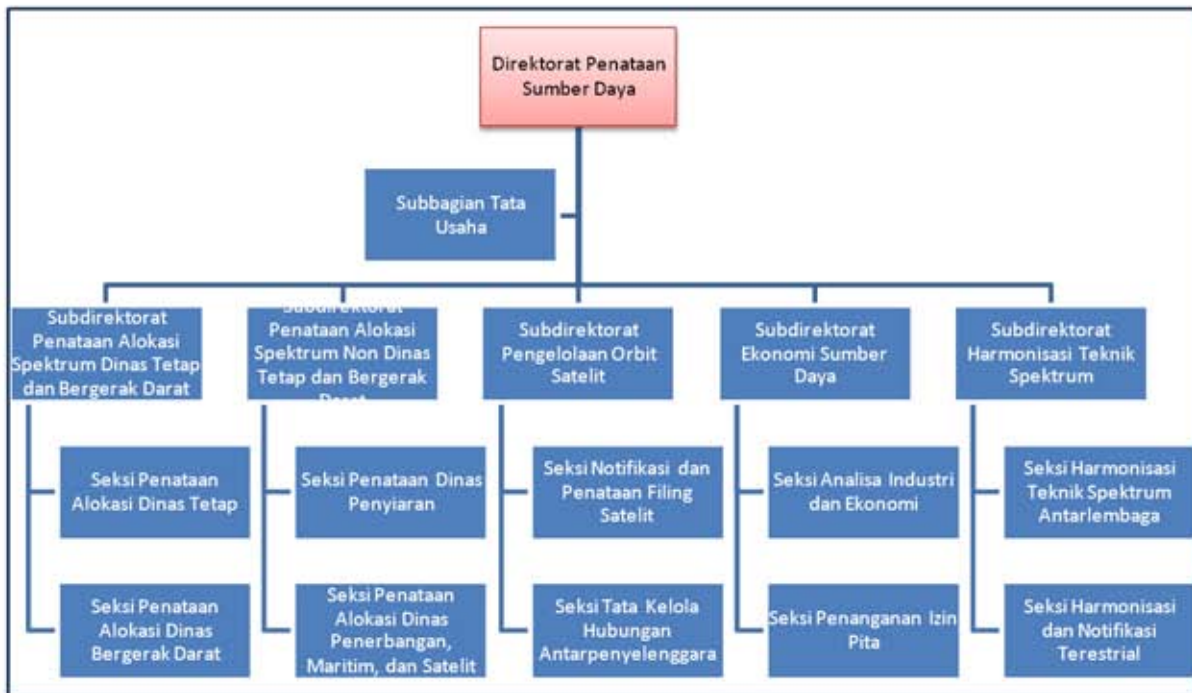
- (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan sumber daya;
- (2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan sumber daya;
- (3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penataan sumber daya;
- (4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan sumber daya; dan
- (5) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga direktorat.

Organisasi Direktorat Penataan Sumber Daya terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
- b. Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat;

- c. Subdirektorat Pengelolaan Orbit Satelit;
- d. Subdirektorat Ekonomi Sumber Daya;
- e. Subdirektorat Harmonisasi Teknik Spektrum; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Gambar 2.6. Struktur Organisasi Direktorat Penataan Sumber Daya



2.4.5. Direktorat Operasi Sumber Daya

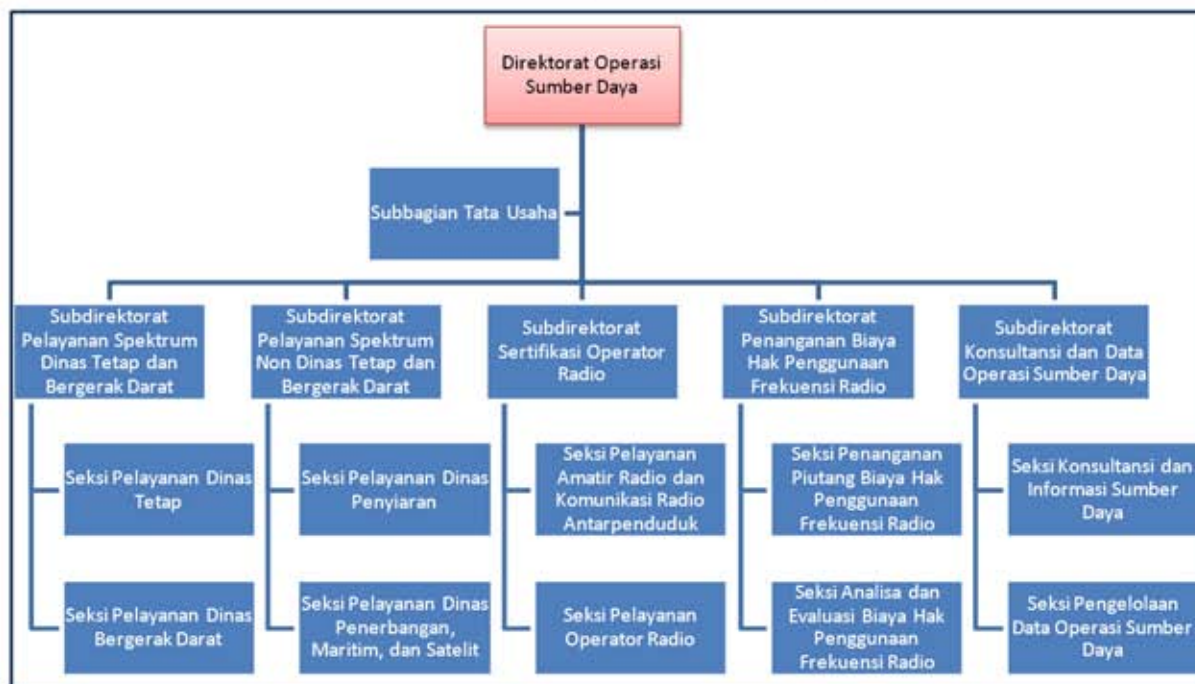
Direktorat Operasi Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang operasi sumber daya. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Operasi Sumber Daya menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang operasi sumber daya;
- (2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang operasi sumber daya;
- (3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang operasi sumber daya;
- (4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang operasi sumber daya;
- (5) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga direktorat.

Organisasi Direktorat Operasi Sumber Daya terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pelayanan Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
- b. Subdirektorat Pelayanan Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
- c. Subdirektorat Sertifikasi Operator Radio;
- d. Subdirektorat Penanganan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;
- e. Subdirektorat Konsultasi dan Data Operasi Sumber Daya; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Gambar 2.7. Struktur Organisasi Direktorat Operasi Sumber Daya



2.4.6. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

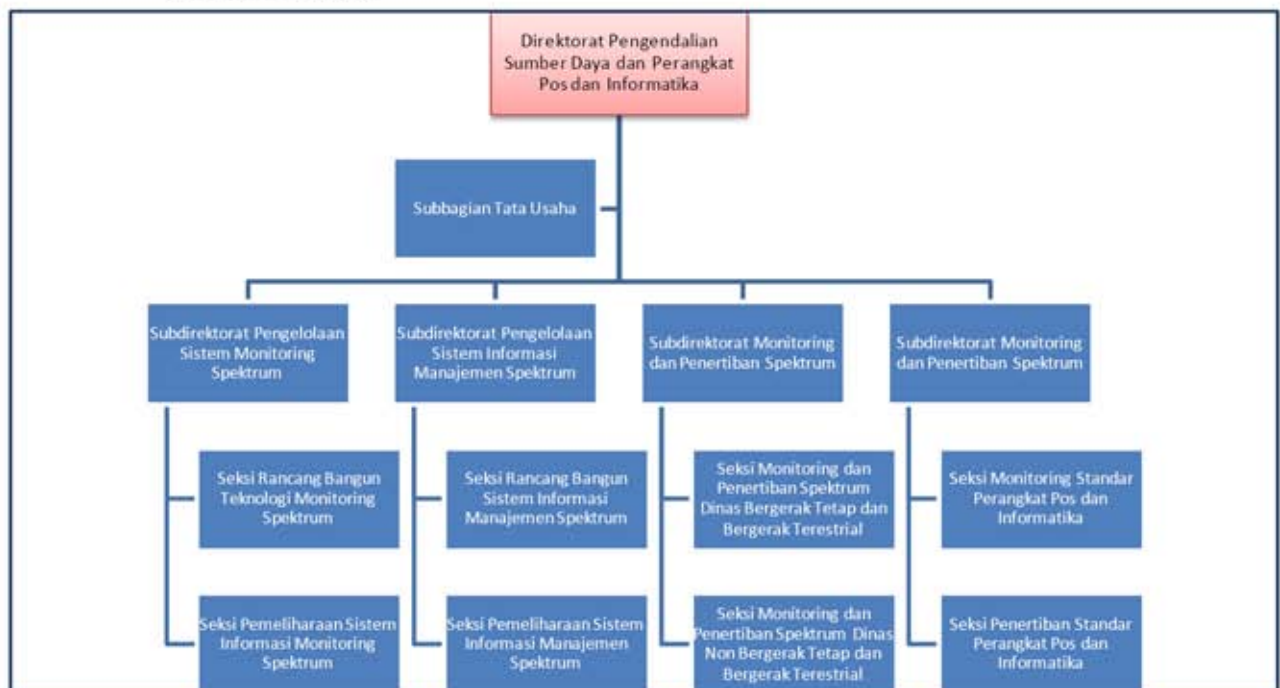
- (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika;

- (2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- (3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- (4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika; dan
- (5) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum;
- b. Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum;
- c. Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Spektrum;
- d. Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos dan Informatika; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Gambar 2.8. Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika



2.4.7. Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

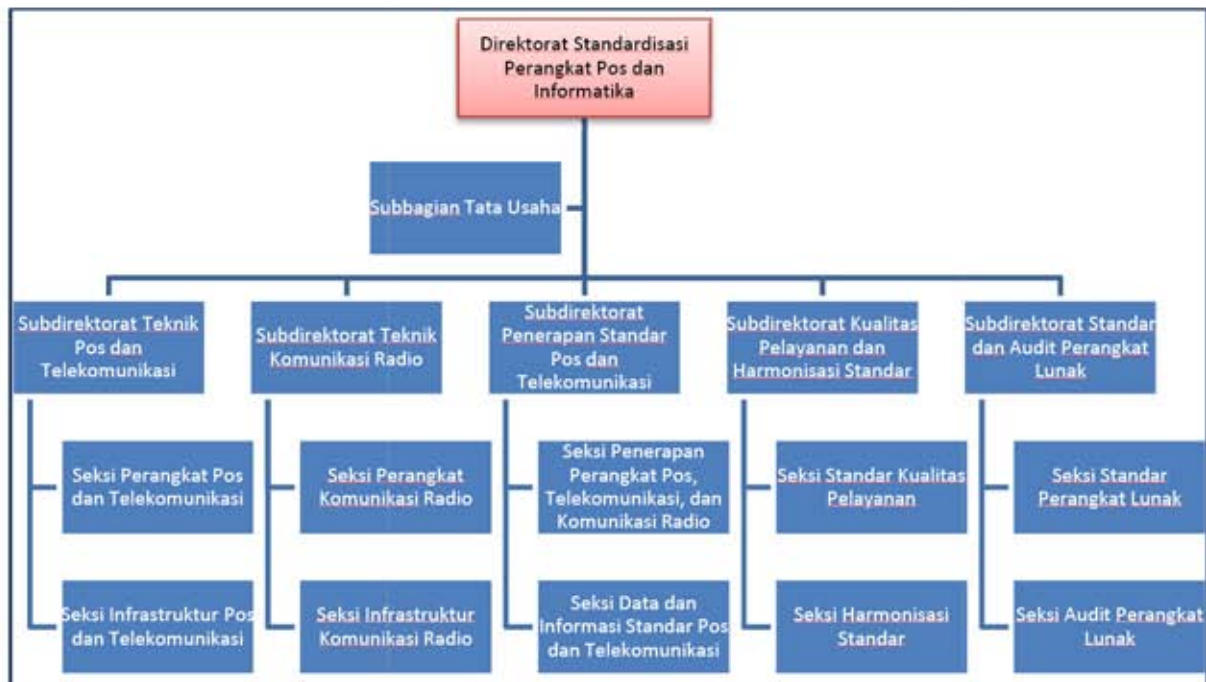
Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi perangkat pos dan informatika. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Standardisasi Perangkat Pos Dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi perangkat pos dan informatika;
- (2) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perangkat pos dan informatika;
- (3) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perangkat pos dan informatika;
- (4) Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi perangkat pos dan informatika; dan
- (5) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga direktorat.

Organisasi Direktorat Standardisasi Pos dan Informatika terdiri atas:

- a. Subdirektorat Teknik Pos dan Telekomunikasi;
- b. Subdirektorat Teknik Komunikasi Radio;
- c. Subdirektorat Penerapan Standar Pos dan Telekomunikasi;
- d. Subdirektorat Kualitas Pelayanan dan Harmonisasi Standar;
- e. Subdirektorat Standar dan Audit Perangkat Lunak; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Gambar 2.9. Struktur Organisasi Direktorat Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika



2.4.8. Unit Pelaksana Teknis

2.4.8.1. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT)

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20/PER/M.KOMINFO/4/2007 tanggal 30 April 2007.

Peranan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dalam proses Pengujian alat/perangkat telekomunikasi melakukan pengujian antara lain:

- (1) Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Radio;
- (2) Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Non Radio;
- (3) *Electromagnetic Compatibility* Alat/Perangkat Telekomunikasi;
- (4) Pelayanan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi;
- (5) Jasa Penyewaan Alat.

(5)(6)

Dari perkembangan jumlah alat dan perangkat telekomunikasi yang beredar di Indonesia yang semakin meningkat dan dirasakan kebutuhannya oleh masyarakat, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi secara terus menerus mengembangkan kemampuannya baik infrastruktur maupun sumber daya manusia.

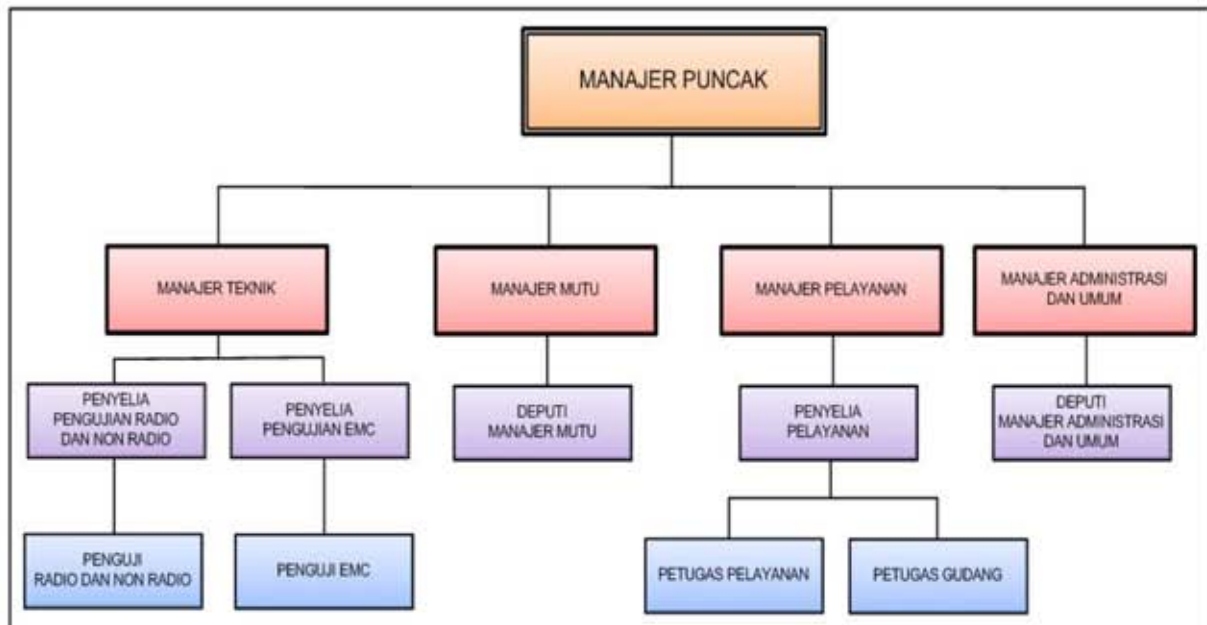
Untuk menjamin mutu pengujian dan kompetensi laboratorium yang lebih baik, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang mengacu pada ISO-17025:2005 dan telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) LP-112-IDN sejak tahun 2001.

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dalam melaksanakan pengujian alat/perangkat telekomunikasi mengacu pada Spesifikasi Teknis Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (*Technical Specification Regulation*), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Acuan Internasional seperti ISO, ETSI, RR, ITU, IEC sehingga mampu melindungi dan menjaga kualitas alat/perangkat telekomunikasi serta menjamin bahwa alat/perangkat telekomunikasi yang digunakan atau beredar di Indonesia benar-benar sesuai dengan persyaratan teknis.

Dengan misi menjadi laboratorium pengujian bertaraf internasional, BBPPT mempunyai misi untuk :

- (1) Meningkatkan kualitas pengujian perangkat telekomunikasi;
- (2) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- (3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- (4) Mendukung tumbuh kembangnya industri telematika dalam negeri;
- (5) Meningkatkan peran serta kerjasama nasional dan internasional bidang laboratorium;
- (6) Meningkatkan ruang lingkup (inovasi) layanan jasa laboratorium;
- (7) Mendukung penerapan standar wajib bagi perlindungan keselamatan, keamanan, dan kesehatan.

Gambar 2.10. Struktur Organisasi Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi



Tugas pokok Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah melaksanakan pengujian alat/perangkat telekomunikasi. Fungsi Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah :

- (1) Penyusunan rencana dan program di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi;
- (2) Pelaksanaan pelayanan administrasi pengujian alat/perangkat telekomunikasi;
- (3) Pelaksanaan analisa evaluasi sistem mutu pelayanan dan pengujian alat/perangkat telekomunikasi;
- (4) Pelaksanaan pengujian dan pemeliharaan alat/perangkat telekomunikasi, *electromagnetic compatibility* (EMC), dan kalibrasi;
- (5) Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dilengkapi dengan sarana pendukung berupa:

- (1) Laboratorium Pengujian Perangkat Radio;
- (2) Laboratorium Pengujian Perangkat Berbasis Kabel;
- (3) Laboratorium Pengujian EMC;
- (4) Laboratorium Kalibrasi.

Jenis layanan pengujian yang dilayani oleh laboratorium-laboratorium di lingkungan BBPPT adalah :

- (1) Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Radio;
- (2) Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Non Radio;
- (3) Pengujian *Electromagnetic Compatibility* Alat/Perangkat Telekomunikasi;
- (4) Pelayanan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi;
- (5) Jasa Penyewaan Alat.

2.4.8.2. Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- (2) Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan/monitor spektrum frekuensi radio;
- (3) Pelaksanaan kalibrasi dan perbaikan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- (4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
- (5) Koordinasi monitoring spektrum frekuensi radio;
- (6) Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio;
- (7) Pelayanan/pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
- (8) Pelaksanaan evaluasi dan pengujian ilmiah serta pengukuran spektrum frekuensi radio.

Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio di klasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu :

- (1) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I
- (2) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II
- (3) Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio
- (4) Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Bab 3

Bidang Kepegawaian

Statistik bidang kepegawaian ini menggambarkan jumlah dan komposisi pegawai di Ditjen Pos dan Telekomunikasi pada semua unit kerja yang ada didalamnya (Kantor Pusat dan UPT). Statistik ini juga menggambarkan perkembangan jumlah pegawai tersebut dari tahun ke tahun untuk menunjukkan respon dari sisi perangkat pegawai untuk menjalankan fungsi regulasi mengingat perkembangan di bidang pos dan telekomunikasi yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir dan melibatkan banyak pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Bagaimanapun, perkembangan pada industri pos dan telekomunikasi harus diikuti dengan kemampuan pengaturan yang lebih baik sehingga perkembangannya dapat sesuai dengan arah yang diinginkan serta sejalan dengan kepentingan publik. Salah satu unsur perangkat pengaturan ini adalah pegawai di instansi pemerintah yang menjalankan fungsi regulator dalam penyelenggaraan pos dan telekomunikasi di Indonesia. Kondisi dan komposisi kepegawaian dalam satu unit kerja menggambarkan daya dukung yang dimiliki oleh unit kerja tersebut dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kondisi dan komposisi tersebut juga mencerminkan kemampuan pelayanan yang seharusnya dapat dilakukan oleh unit kerja tersebut, termasuk unit-unit kerja di dalam lingkup Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel).

3.1. Jumlah Pegawai

Sampai tahun 2010, jumlah pegawai di Ditjen Pos dan Telekomunikasi total telah berjumlah 1520 pegawai. Jumlah ini meningkat cukup tajam dibanding tahun sebelumnya dengan penambahan sebanyak 124 pegawai atau meningkat sebesar 8,9% dibanding tahun sebelumnya. Penambahan jumlah pegawai pada tahun 2010 ini merupakan yang terbanyak kedua setelah tahun 2008 yang meningkat hingga 12,8%. Peningkatan jumlah pegawai pada tahun 2010 ini merupakan hasil rekrutmen pegawai baru yang dilakukan pada tahun 2010 ini untuk merespon kebutuhan sumberdaya manusia di lingkungan Ditjen Pos dan



Telekomunikasi mengingat beban kerja yang semakin besar sejalan dengan perkembangan bidang pos dan telekomunikasi. Penambahan jumlah pegawai ini juga untuk mengantisipasi kemungkinan pemekaran unit kerja yang menangani bidang pos dan telekomunikasi ini mengingat beban kerja dan tanggungjawab yang sangat besar dari Ditjen Pos dan Telekomunikasi sehingga dipertimbangkan perlu dimekarkan menjadi lebih dari satu unit kerja lain setingkat Ditjen.

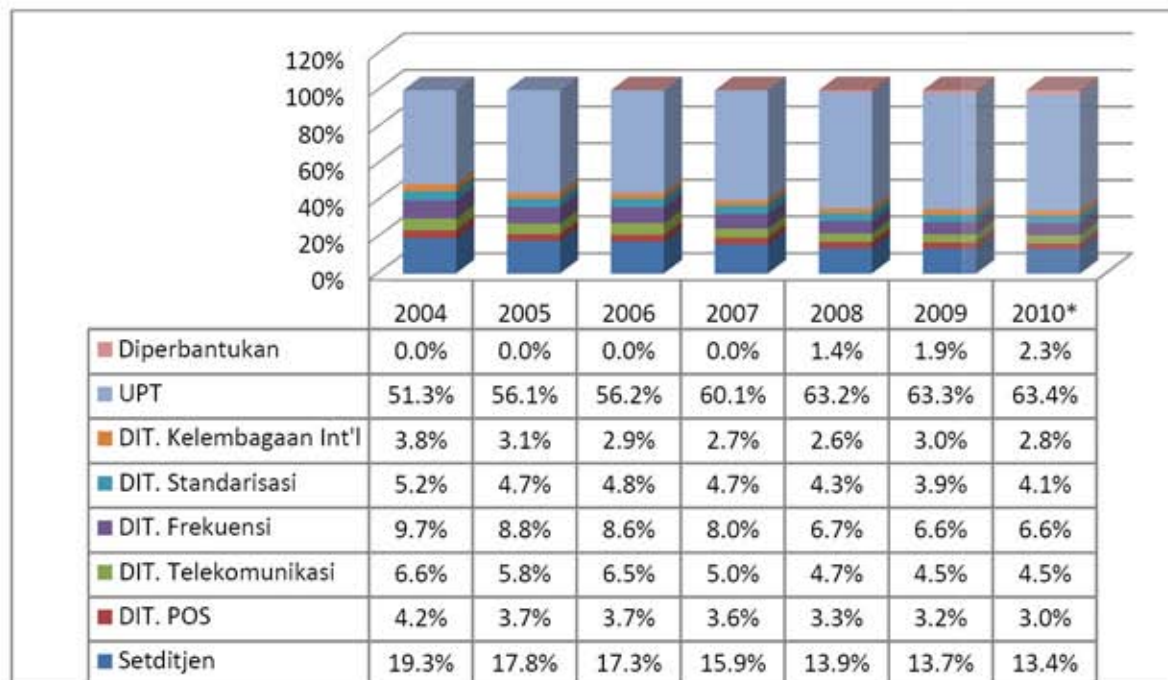
Tabel 3.1 Perkembangan jumlah pegawai Ditjen Postel tahun 2005 –2010.

No	Unit Kerja	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Setditjen	193	185	184	184	191	204
2	DIT. POS	40	40	41	44	45	45
3	DIT. Telekomunikasi	63	69	58	62	63	68
4	DIT. Frekuensi	96	92	92	89	92	100
5	DIT. Standarisasi	51	51	54	57	54	62
6	DIT. Kelembagaan Int'l	34	31	31	34	42	43
7	UPT	609	600	694	838	883	963
8	Pegawai Diperbantukan	0	0	0	18	26	35
	Jumlah	1.086	1.068	1.154	1.326	1.396	1.520

Komposisi pegawai di Ditjen Postel menurut unit kerja menunjukkan bahwa proporsi terbesar dari pegawai di Ditjen Postel adalah yang ditempatkan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Ditjen Pos dan Telekomunikasi. Sampai tahun 2010, proporsi jumlah pegawai di Ditjen Pos dan Telekomunikasi yang berada di UPT mencapai 63,4%. Meskipun proporsinya hanya meningkat 0,1% dibanding tahun sebelumnya, namun proporsi ini menunjukkan trend yang terus meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya seperti ditunjukkan oleh grafik pada gambar 3.1. Proporsi yang besar dari pegawai Ditjen Pos dan Telekomunikasi yang ditempatkan di UPT ini karena jumlah UPT yang cukup banyak terutama untuk UPT yang memiliki tugas monitoring penggunaan frekuensi (UPT Balai/Loka/Pos Monitoring Frekuensi) yang keberadaannya tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Proporsinya yang terus meningkat juga disebabkan adanya penambahan beberapa UPT monitoring frekuensi yang baru untuk menjangkau wilayah yang lebih luas seperti di Tahuna dan Sorong. Sementara untuk UPT lain seperti Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan juga mengalami peningkatan jumlah pegawai.

Proporsi terbanyak kedua adalah pada unit kerja di Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Pos dan Telekomunikasi yang pada tahun 2010 proporsinya mencapai 13,4%. Berbeda dengan UPT, proporsi pegawai di Setditjen ini justru mengalami penurunan dari 19,3% pada tahun 2004, menurun menjadi 15,9% pada 2007 dan hanya 13,4% pada tahun 2010. Dari sisi jumlah, sebenarnya pegawai di Setditjen ini juga mengalami peningkatan, namun peningkatannya relatif rendah dibanding unit kerja lain seperti UPT dan Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio yang mengalami peningkatan cukup tinggi.

Gambar 3.1. Proporsi pegawai Ditjen Postel menurut unit kerja tahun 2004 - 2010



3.2 Tingkat Pendidikan

Perkembangan jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan di Ditjen Pos dan Telekomunikasi juga menunjukkan semakin banyaknya jumlah pegawai dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi sejalan dengan peningkatan jumlah pegawai ini. Peningkatan terbesar terjadi untuk pegawai dengan jenjang pendidikan sarjana (S1) yang meningkat dari 517 pada tahun 2009 menjadi 597 pada tahun 2010 atau meningkat sebesar 15,5%. Peningkatan ini terutama berasal dari rekrutmen pegawai yang berlangsung pada 2010 yang



sebagian besar berpendidikan Sarjana. Dibandingkan lima tahun sebelumnya (2005), jumlah pegawai yang berpendidikan Sarjana ini telah meningkat sebesar 92,6%.

Peningkatan yang signifikan juga terjadi untuk pegawai dengan jenjang pendidikan pascasarjana strata 2 / S2 (Magister/Master). Meskipun pada tahun 2010 ini jumlah pegawai berpendidikan S2 ini hanya meningkat 3,6%, namun jika dibandingkan dengan kondisi lima tahun sebelumnya, jumlah pegawai berpendidikan S2 telah meningkat sebesar 104,8%. Pada tahun 2010 justru terjadi penurunan pegawai untuk jenjang pendidikan Doktoral (S3) yang semula sebanyak 4 orang menjadi hanya 3 orang karena adanya mutasi pegawai. Peningkatan jumlah pegawai dengan jenjang pendidikan lebih tinggi dan mulai menurunnya proporsi jumlah pegawai berpendidikan Diploma ke bawah menunjukkan upaya dari Ditjen Pos dan Telekomunikasi untuk terus memperbaiki kualitas sumberdaya manusia untuk mengikuti beban kerja dan tanggungjawab yang semakin besar.

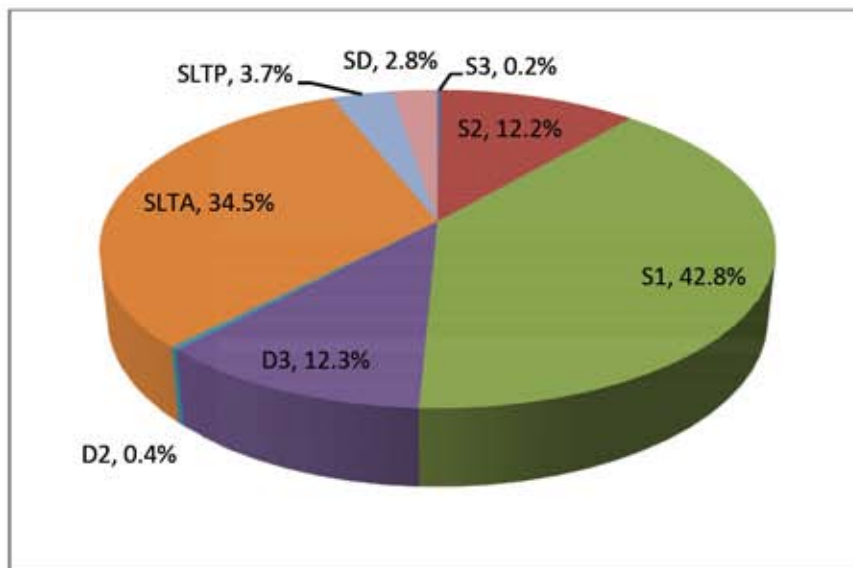
Tabel 3.2 Perkembangan jumlah pegawai Ditjen Postel menurut tingkat pendidikan.

Tahun	S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	Jumlah*
2005	1	83	310	101	11	516	41	23	1.086
2006	1	122	383	92	6	424	39	24	1.091
2007	1	135	440	116	6	422	33	23	1.176
2008	2	149	489	153	5	450	44	34	1.326
2009	4	164	517	160	5	455	49	40	1.394
2010	3	170	597	171	5	481	52	39	1.518

*) Tidak termasuk tenaga Dokter

Sejalan dengan peningkatan tersebut, komposisi pegawai di Ditjen Pos dan telekomunikasi saat ini juga menunjukkan lebih banyaknya pegawai berpendidikan Diploma 3 keatas. Proporsi terbesar adalah pegawai untuk jenjang S1 sebesar 42,8% diikuti oleh pegawai dengan jenjang pendidikan SLTA sebesar 34,5%. Namun secara total, jumlah pegawai dengan jenjang pendidikan diploma 3 keatas proporsinya sudah mencapai 67,5%, Hal ini berarti bahwa lebih dari 2/3 pegawai di Ditjen Pos dan Telekomunikasi sudah memiliki jenjang pendidikan diploma 3 ke atas.

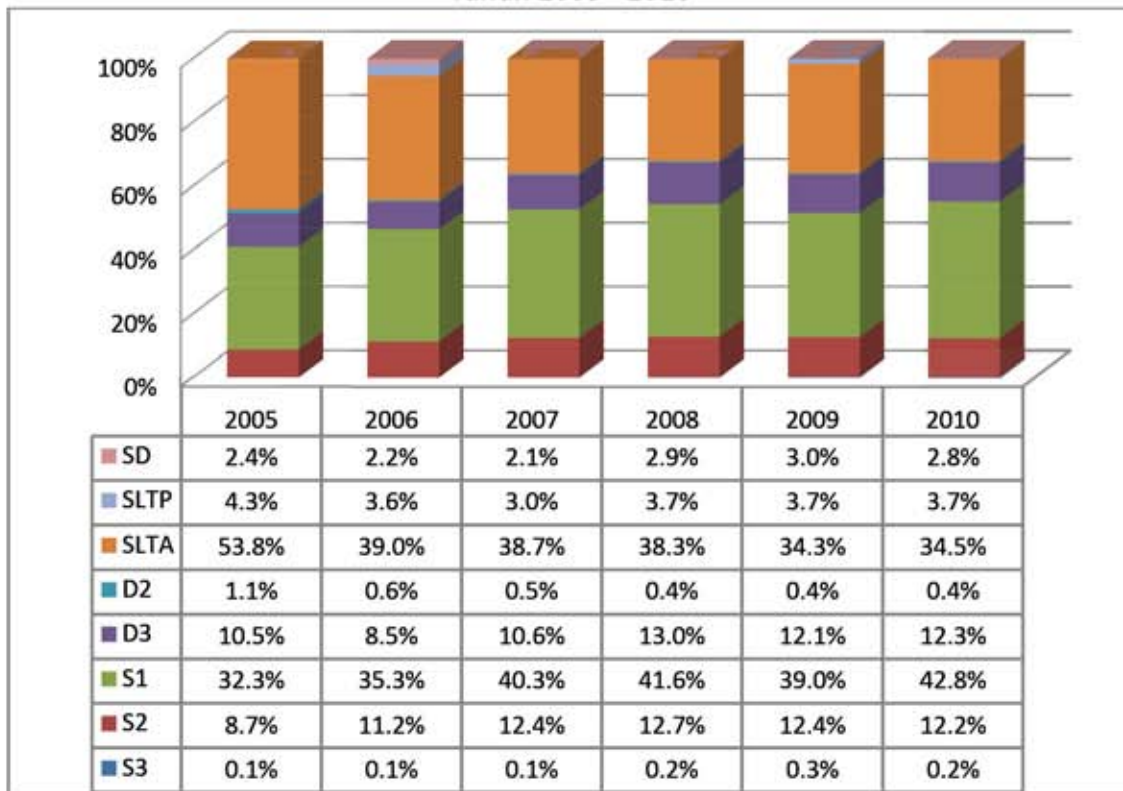
Gambar 3.2 Komposisi pegawai Ditjen Postel menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2010



Trend peningkatan jumlah pegawai dengan pendidikan Diploma 3 keatas juga ditunjukkan dengan semakin meningkatnya proporsi pegawai pada kelompok ini seperti ditunjukkan pada gambar 3.3. Jika pada tahun 2005 jumlah pegawai dengan pendidikan SMA masih mencapai 53,8% atau lebih dari separuhnya, pada tahun 2010 proporsinya hanya tinggal 34,5%. Sebaliknya jumlah pegawai dengan pendidikan Sarjana yang pada tahun 2005 proporsinya baru mencapai 32,3%, pada tahun 2010 telah mencapai 42,8%. Demikian pula dengan pegawai berpendidikan Diploma 3 dan Strata 2 yang semula belum mencapai 10%, namun pada tahun 2010 masing-masing sudah mencapai lebih dari 12%.

Peningkatan beban dan tanggungjawab fungsi pengaturan dan fasilitator dalam bidang pos dan telekomunikasi sejalan dengan perkembangan industri pos dan telekomunikasi mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas SDM di Ditjen Pos dan Telekomunikasi dengan meningkatkan proporsi pegawai dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Gambar 3.3. Perkembangan Komposisi pegawai Ditjen Postel menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2005 - 2010



3.2.1 Pegawai Setditjen Pos dan Telekomunikasi

Peningkatan jumlah pegawai serta komposisi pegawai dengan jenjang pendidikan lebih tinggi juga terjadi pada unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Pos dan Telekomunikasi yang menjadi pengendali kegiatan di Ditjen Pos dan Telekomunikasi. Pada tahun 2010 ini terjadi peningkatan jumlah pegawai sebesar 5,7% atau sebanyak 11 orang. Khusus untuk pegawai dengan jenjang pendidikan sarjana, peningkatan jumlah pegawainya bahkan mencapai 17,4% atau sebanyak 12 orang. Sementara untuk pegawai dengan jenjang pendidikan S2 dan S3 justru mengalami penurunan jumlah. Pegawai Setditjen Pos dan Telekomunikasi dengan jenjang pendidikan S2 dan S3 berkurang masing-masing sebanyak dua orang. Penambahan dan pengurangan pegawai menurut jenjang pendidikan ini berasal dari rekrutmen pegawai baru dan terjadinya mutasi antar unit kerja. Jika dibandingkan dengan kondisi lima tahun sebelumnya, pegawai dengan pendidikan sarjana di Setditjen Pos dan Telekomunikasi telah meningkat sebanyak 58,8%. Sebaliknya pegawai dengan jenjang pendidikan SLTA telah menurun sebanyak 28,8%.

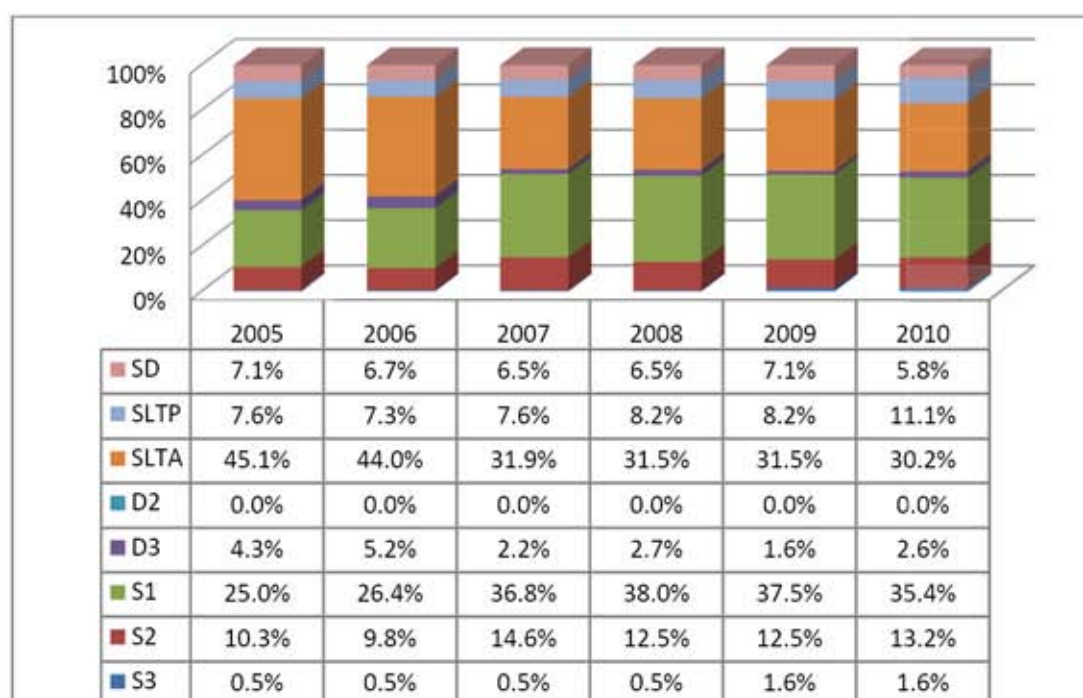
Tabel 3.3 Perkembangan jumlah pegawai Setditjen Postel menurut tingkat pendidikan

Tahun	S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	Jumlah*
2005	1	19	51	10	0	85	14	13	193
2006	1	27	68	4	0	59	14	12	185
2007	1	23	70	5	0	58	15	12	184
2008	3	23	69	3	0	58	15	13	184
2009	3	25	69	5	0	57	21	11	191
2010	1	23	81	6	0	61	19	11	202

*) Tidak termasuk tenaga Dokter

Penambahan pegawai yang terjadi pada tahun 2010 ini juga menjadikan pergeseran komposisi pegawai di Setditjen Pos dan Telekomunikasi menurut tingkat pendidikan. Sebagaimana pola yang terjadi pada total pegawai, komposisi pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA juga semakin menurun dari 45,1% dari total pegawai Setditjen Pos dan Telekomunikasi pada tahun 2005, menurun menjadi hanya 30,2%. Sementara proporsi pegawai dengan jenjang pendidikan Sarjana meningkat dari hanya 25% pada 2005 menjadi 35,4% pada 2010. Peningkatan proporsi juga terjadi pada pegawai dengan jenjang pendidikan Strata 2 dan Strata 3.

Gambar 3.4. Perkembangan Komposisi pegawai Setditjen Postel menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2005- 2010



3.2.2 Pegawai Direktorat di Ditjen Pos dan Telekomunikasi

Sementara untuk pegawai pada unit kerja direktorat-direktorat di Ditjen Pos dan Telekomunikasi juga menunjukkan peningkatan. Namun pada unit kerja yang terdiri dari lima direktorat ini, peningkatan hanya terjadi untuk jenjang pendidikan S1 dan satu orang pada jenjang pendidikan Diploma 3. Secara total, jumlah pegawai di 5 Direktorat Ditjen Pos dan Telekomunikasi meningkat sebanyak 7,3% dibanding tahun sebelumnya atau sebanyak 22 pegawai. Sementara pada pegawai dengan jenjang pendidikan Sarjana, peningkatannya mencapai 15,9% atau meningkat sebanyak 24 pegawai. Pegawai pada jenjang pendidikan lain justru mengalami penurunan meskipun sedikit yaitu pada jenjang pendidikan SLTA yang berkurang 2 pegawai dan jenjang pendidikan Strata 2 yang berkurang 1 pegawai.

Tabel 3.4 Jumlah pegawai Direktorat di Ditjen Pos dan Telekomunikasi menurut tingkat pendidikan

No	Tahun	S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	2005	0	46	112	19	2	100	4	1	284
2	2006	0	70	119	13	1	58	4	1	266
3	2007	0	78	134	13	1	63	4	1	294
4	2008	0	69	142	17	1	51	3	3	286
5	2009	1	66	151	19	1	53	2	3	296
6	2010	1	65	175	20	1	51	2	3	318

Perubahan jumlah pegawai akibat rekrutmen dan mutasi antar unit kerja ini juga menggeser komposisi pegawai menurut jenjang pendidikan di lima direktorat di Ditjen Pos dan Telekomunikasi. Bahkan jika dibandingkan dengan kondisi lima tahun sebelumnya (tahun 2005), pergeseran komposisi yang terjadi cukup signifikan. Pegawai dengan jenjang pendidikan SLTA di lima direktorat ini menurun tajam proporsinya dari 35,2% pada tahun 2005 menjadi hanya tinggal 16% pada tahun 2010. Penurunan jumlah pegawai dengan jenjang pendidikan SLTA di lima direktorat ini sejak tahun 2005 hingga 2010 memang telah mencapai hampir 50%. Sementara proporsi pegawai di Direktorat di Ditjen Pos dan Telekomunikasi meningkat dari 39,4% pada tahun 2005 menjadi 55% pada tahun 2010 atau telah lebih dari separuh pegawai di Direktorat telah memiliki jenjang pendidikan Sarjana. Dalam lima tahun terakhir, jumlah pegawai dengan pendidikan Sarjana di Direktorat di Ditjen Pos dan Telekomunikasi ini telah meningkat sebesar 56,3% dengan peningkatan rata-

rata 7,9% per tahun. Proporsi pegawai dengan jenjang pendidikan Strata 2 (pascasarjana) juga meningkat secara perlahan dari 16,2% pada tahun 2005 menjadi 20,4%. Sebagaimana komposisi pegawai pada Sekretariat Ditjen Pos dan Telekomunikasi, pegawai di Direktorat juga didorong untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya untuk mengantisipasi perkembangan teknologi khususnya di bidang telekomunikasi yang semakin pesat dan industri pos dan telekomunikasi yang berkembang sangat jauh.

Gambar 3.5. Perkembangan Komposisi pegawai Direktorat di Ditjen Postel menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2005-2010



3.2.3. Komposisi Kepegawaian Hasil Restrukturisasi

Keluarnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 17/PER/M-KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dengan semua unit kerja di bawahnya dimekarkan menjadi dua Direktorat Jenderal baru. Salah satu Direktorat jenderal yang terbentuk adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI). Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika inilah yang akan melanjutkan penyusunan buku statistik pada periode berikutnya. Ditjen SDPPI terdiri dari empat Direktorat yaitu Direktorat Penataan Sumber Daya, Direktorat Operasi Sumber Daya, Direktorat Pengendalian Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), dan

Direktorat Standarisasi dan 2 UPT. Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di Ditjen SDPPI adalah UPT Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dan UPT Monitoring Spektrum Frekuensi yang tersebar 35 lokasi di seluruh Indonesia.

Jumlah pegawai Ditjen SDPPI saat ini adalah 1351 orang plus dua orang tenaga dokter dengan rincian seperti pada tabel 3.5. Dari data tersebut terlihat bahwa diluar UPT dan Setditjen, jumlah pegawai terbesar ada di Direktorat Operasi Sumber Daya, diikuti oleh Direktorat Standarisasi. Namun secara umum tidak terdapat perbedaan yang mencolok dalam jumlah pegawai antar Direktorat.

Tabel 3.5 Jumlah pegawai Direktorat Jenderal SDPPI menurut tingkat pendidikan

No	Unit Kerja	S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Setditjen	0	19	64	8	0	60	9	10	170
2	Dit. Penataan Sumber Daya	0	14	33	1	0	6	1	0	55
3	Dit. Operasi Sumberdaya	1	21	33	7	0	11	0	0	73
4	Dit. Pengendalian SDPPI	0	11	30	3	1	9	2	0	56
5	Dit. Standarisasi	0	12	40	3	0	8	1	0	64
6	UPT	0	52	317	145	5	358	32	24	933
JUMLAH		1	129	517	167	6	452	45	34	1351

Bab 4

Bidang Regulasi

Jumlah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh suatu instansi pemerintah mencerminkan fungsi dari instansi tersebut sebagai regulator pada bidangnya dimana peraturan tersebut merupakan kebijakan dari Pemerintah yang digunakan sebagai acuan bagi para pelaku industri (*stakeholder*) di bidang pos dan telekomunikasi. Hal ini ditunjukkan oleh Ditjen Pos dan Telekomunikasi sebagai regulator pada bidang pos dan telekomunikasi dengan menerbitkan perangkat peraturan dalam bidang Pos dan Telekomunikasi di Indonesia. Adapun perangkat peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan dalam bidang pos dan telekomunikasi merupakan sebagai tindakan Pemerintah dalam melaksanakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Perkembangan yang cepat dan sangat pesat khususnya dalam bidang teknologi informatika menuntut Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi untuk selalu mengantisipasi dengan mempersiapkan perangkat peraturan yang sesuai.

Perangkat peraturan yang dikeluarkan untuk mengatur dan mengawasi serta mengendalikan operasional di bidang pos dan telekomunikasi ini meliputi peraturan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Pos dan Telekomunikasi serta Surat Edaran Menteri. Dalam lima tahun terakhir, cukup banyak peraturan yang dikeluarkan dalam rangka pengaturan, pengawasan serta pengendalian kegiatan bidang pos dan telekomunikasi, khususnya yang bersifat teknis.

4.1 Undang-Undang

Pada tahun 2010 tidak ada Undang-Undang yang dikeluarkan terkait dengan pengaturan bidang pos dan telekomunikasi. Undang-Undang terakhir yang dikeluarkan terkait bidang pos dan telekomunikasi ini adalah Undang-Undang No. 38 tahun 2009 tentang Pos yang mengantisipasi perkembangan yang pesat dalam bidang perposan khususnya dalam bidang



jasa titipan. Meskipun demikian, dalam rentang tiga tahun terakhir sebenarnya ada beberapa Undang-Undang yang bersinggungan dengan bidang pos dan telekomunikasi meskipun tidak terkait langsung seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tabel 4.1 Statistik Undang-Undang menurut Bidang.

NO.	JENIS PERATURAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010	JUMLAH
1	PERPOSAN	0	0	0	0	1	0	1
2	TELEKOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0
3	FREKUENSI	0	0	0	0	0	0	0
4	STANDARDISASI	0	0	0	0	0	0	0
5	BIDANG LAIN-LAIN	1	0	0	0	0	0	1

4.2 Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah merupakan tindak lanjut pelaksanaan dari Undang-Undang. Peraturan Pemerintah terkait bidang pos dan telekomunikasi yang dikeluarkan tahun 2010 hanya 1 (satu) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penyelenggaraan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika. Peraturan Pemerintah ini merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 yang mengatur mengenai pengenaan besaran tarif yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Bidang Pos dan Telekomunikasi..

Tabel 4.2 Statistik Peraturan Pemerintah menurut Bidang.

NO.	JENIS PERATURAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010	JUMLAH
1	PERPOSAN	0	0	0	0	0	0	0
2	TELEKOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0
3	FREKUENSI	0	0	0	0	0	0	0
4	STANDARDISASI	0	0	0	0	0	0	0
5	BIDANG LAIN-LAIN	1	0	0	0	1	1	3

4.3 Peraturan Presiden

Pada tahun 2010 hanya dikeluarkan 1 (satu) Peraturan Presiden yang terkait dengan pengaturan Bidang Pos dan Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.3. Peraturan Presiden yang dikeluarkan pada tahun 2010 adalah Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Final Acts Universal Postal Union as the Result of the 24 Geneva Congress, Swiss 2008* (Akta-Akta Akhir Perhimpunan Pos Sedunia Sebagai Hasil Kongres ke 24 di Jenewa, Swiss 2008). Peraturan Presiden tersebut merupakan pengesahan/ratifikasi terhadap Akta-Akta Akhir hasil kongres UPU di Jenewa, Swiss, dimana Indonesia sebagai Negara anggota UPU (Universal Postal Union) wajib untuk melakukan ratifikasi, sehingga Indonesia dapat melakukan penyelenggaraan kegiatan perposan internasional.

Tabel 4.3 Statistik Peraturan Presiden menurut Bidang.

NO.	JENIS PERATURAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010	JUMLAH
1	PERPOSAN	0	1	0	3	0	1	5
2	TELEKOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0
3	FREKUENSI	0	0	0	0	0	0	0
4	STANDARDISASI	0	0	0	0	0	0	0
5	BIDANG LAIN-LAIN	0	0	0	0	1	0	1

4.4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Untuk pengaturan yang lebih teknis dan merupakan kebijakan terkait di bidang Pos dan Telekomunikasi diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Pada tahun 2010 Sebanyak 17 Peraturan Menteri Kominfo telah dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pada tahun 2010 paling banyak adalah pada bidang telekomunikasi dan bidang frekuensi. Sekitar 53% Peraturan Menteri yang dikeluarkan pada tahun 2010 adalah Peraturan Menteri yang terkait dengan kegiatan bidang telekomunikasi. Sementara sekitar 29% adalah Peraturan Menteri yang terkait dengan pengaturan frekuensi. Komposisi ini sejalan dengan total Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang telah dikeluarkan dalam enam tahun terakhir. Dari tahun 2005 sampai 2010, dari total Peraturan Menteri yang telah dikeluarkan, hampir 60% adalah yang terkait dengan bidang Telekomunikasi dan 28,3% adalah Peraturan Menteri yang terkait dengan bidang frekuensi.

Sementara untuk bidang pos dan standarisasi masing-masing hanya ada satu Peraturan Menteri yang dikeluarkan pada tahun 2010.

Tabel 4.4 Statistik Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (klarifikasi).

NO.	JENIS PERATURAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010	JUMLAH
1	PERPOSAN	1	0	0	0	0	1	2
2	TELEKOMUNIKASI	10	11	5	16	8	9	59
3	FREKUENSI	2	5	2	0	14	5	28
4	STANDARDISASI	1	0	0	2	3	1	7
5	BIDANG LAIN-LAIN	0	0	1	0	1	1	3

Peraturan Menkominfo yang dikeluarkan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :

No	Peraturan Menteri	Bidang
1.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi	Telekomunikasi
2.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/PER/M.KOMINFO/02/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi	Telekomunikasi
3.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 06/PER/M.KOMINFO/05/2010 tentang Layanan Pos Universal	Pos
4.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 09/PER/M.KOMINFO/06/2010 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (<i>Fundamental Technical Plan National</i> 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional	Telekomunikasi
5.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 13/PER/M.KOMINFO/08/2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (<i>Master Plan</i>) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Radio Siaran FM (<i>Frequency Modulation</i>)	Frekuensi
6.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 14/PER/M.KOMINFO/09/2010 tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Belanja Operasional (Operational Expenditur/Opex) pada Penyelenggaraan Telekomunikasi	Standarisasi
7.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 16/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet	Telekomunikasi
8.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:	Telekomunikasi

No	Peraturan Menteri	Bidang
	19/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 48/PER/M.KOMINFO/09/2010 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan	
9.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 20/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan	Telekomunikasi
10.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 21/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Penyediaan Nusantara <i>Internet Exchange</i> untuk Layanan Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan	Telekomunikasi
11.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 23/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	Telekomunikasi
12.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 24/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 19/PER.M.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Indonesia	Frekuensi
13.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 25/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio	Frekuensi
14.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 26/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perencanaan Penggunaan Pita Frekuensi Radio (<i>Band Plan</i>) pada Pita Frekuensi Radio 300 MHz untuk Sistem Komunikasi Radio Konvensional dan <i>Studio-Transmitter Link</i>	Frekuensi
15.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 27/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Pengalihan Urusan Proses, Penerbitan Izin, dan Sertifikasi di Bidang Komunikasi dan Informatika	Standarisasi
16.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 28/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Pengalihan Urusan Penagihan dan/atau Pemingutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Komunikasi dan Informatika	Keuangan (Lain-lain)
17.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 29/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet	Telekomunikasi



4.5. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika

Untuk Keputusan Menteri, sepanjang tahun 2010 ada beberapa Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika pada bidang Pos dan Telekomunikasi. Namun Keputusan Menteri tersebut ada yang bersifat internal dan eksternal, Keputusan Menteri yang bersifat eksternal ini adalah keputusan yang terkait dengan pengaturan pada bidang frekuensi yaitu Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Momor 03/KEP/M.KOMINFO/02/2010 tentang Penetapan Bank Indonesia Rate untuk Perhitungan Biaya Hak Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio 2,1 Ghz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2010. Dimana Keputusan Menteri tersebut digunakan sebagai acuan dalam perhitungan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi. Sekitar 58,3% Keputusan Menteri yang dikeluarkan antara tahun 2006-2010 adalah Keputusan Menteri yang terkait dengan bidang frekuensi dan 30,6% adalah Keputusan Menteri yang terkait dengan bidang telekomunikasi

Tabel 4.5 Statistik Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika.

NO.	JENIS PERATURAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010	JUMLAH
1	PERPOSAN	0	0	0	0	0	0	0
2	TELEKOMUNIKASI	0	3	2	3	3	0	11
3	FREKUENSI	0	7	1	1	11	1	21
4	STANDARDISASI	0	0	0	0	0	0	0
5	BIDANG LAIN-LAIN	0	0	0	0	4	0	4

4.6. Peraturan Dirjen Pos dan Telekomunikasi

Instrumen pengaturan dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Pos dan Telekomunikasi relatif cukup banyak dikeluarkan pada tahun 2010. Sepanjang tahun 2010 dikeluarkan 11 peraturan Dirjen Pos dan Telekomunikasi. Peraturan Dirjen yang dikeluarkan adalah 11 Peraturan Dirjen yang terkait dengan bidang standarisasi. Secara total dari tahun 2005-2010, Peraturan Dirjen yang paling banyak dikeluarkan juga Peraturan Dirjen yang terkait dengan pengaturan standarisasi. Sebanyak 38 Peraturan Dirjen atau sekitar 74,5% merupakan Peraturan yang dikeluarkan terkait dengan bidang standarisasi, sementara Peraturan Dirjen yang terkait dengan telekomunikasi hanya 8 buah (15,7%) dan peraturan Dirjen yang terkait dengan kegiatan pos hanya 1 buah (2%)

Tabel 4.6. Statistik Peraturan Dirjen Postel menurut Bidang.

NO.	JENIS PERATURAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010	JUMLAH
1	PERPOSAN	0	0	0	1	0	0	1
2	TELEKOMUNIKASI	2	4	2	0	0	0	8
3	FREKUENSI	1	0	0	0	1	0	2
4	STANDARDISASI	8	4	2	11	2	11	38
5	BIDANG LAIN-LAIN	0	1	0	1	1	0	3

Peraturan Dirjen Postel yang dikeluarkan pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :

No	Peraturan Dirjen	Bidang
1.	Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 65/DIRJEN/2010 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Handset Iridium	Standarisasi
2.	Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 233/DIRJEN/2010 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Broadband Wireless Access (BWA) pada pita frekuensi radio 5,8 Ghz	Standarisasi
3.	Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 306/DIRJEN/2010 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Terminal untuk Aplikasi Komunikasi Data Land Mobile Portable dan Aplikasi Maritim dengan Menggunakan Satelit Inmarsat Generasi 4	Standarisasi
4.	Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 370/DIRJEN/2010 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi untuk Pesawat Telepon Seluler Global System for Mobile Communication	Standarisasi
5.	Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 82/DIRJEN/2010 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Media Gateway Controller	Standarisasi
6.	Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 84/DIRJEN/2010 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Wavelength Division Multiplexing (WDM)	Standarisasi
7.	Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 223/DIRJEN/2010 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Digital Loop Carrier (DLC)	Standarisasi
8.	Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 277/DIRJEN/2010 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Key Telephone System (KTS)	Standarisasi
9.	Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 313/DIRJEN/2010 tentang Pengelompokan Alat dan Perangkat Telekomunikasi untuk Keperluan Sertifikasi	Standarisasi
10.	Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 382/DIRJEN/2010 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi IP PBX	Standarisasi
11.	Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 397/DIRJEN/2010 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi Media Converter	Standarisasi

4.7 Keputusan Bersama Menteri Kominfo

Sepanjang tahun 2010, tidak ada peraturan dalam bentuk Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Produk hukum Keputusan Bersama dalam bidang pos dan telekomunikasi ini memang tidak banyak dikeluarkan karena terkait dengan kementerian lain sehingga biasanya tidak khusus menyangkut bidang pos dan telekomunikasi. Sejak tahun 2005, baru dikeluarkan dua Keputusan Bersama Menteri Kominfo dalam bidang pos dan telekomunikasi ini.

Tabel 4.7 Statistik Keputusan Bersama Menteri Kominfo menurut Bidang.

NO.	JENIS PERATURAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010	JUMLAH
1	PERPOSAN	0	0	0	0	1	0	1
2	TELEKOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0
3	FREKUENSI	1	0	0	0	0	0	1
4	STANDARDISASI	0	0	0	0	0	0	0
5	BIDANG LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0

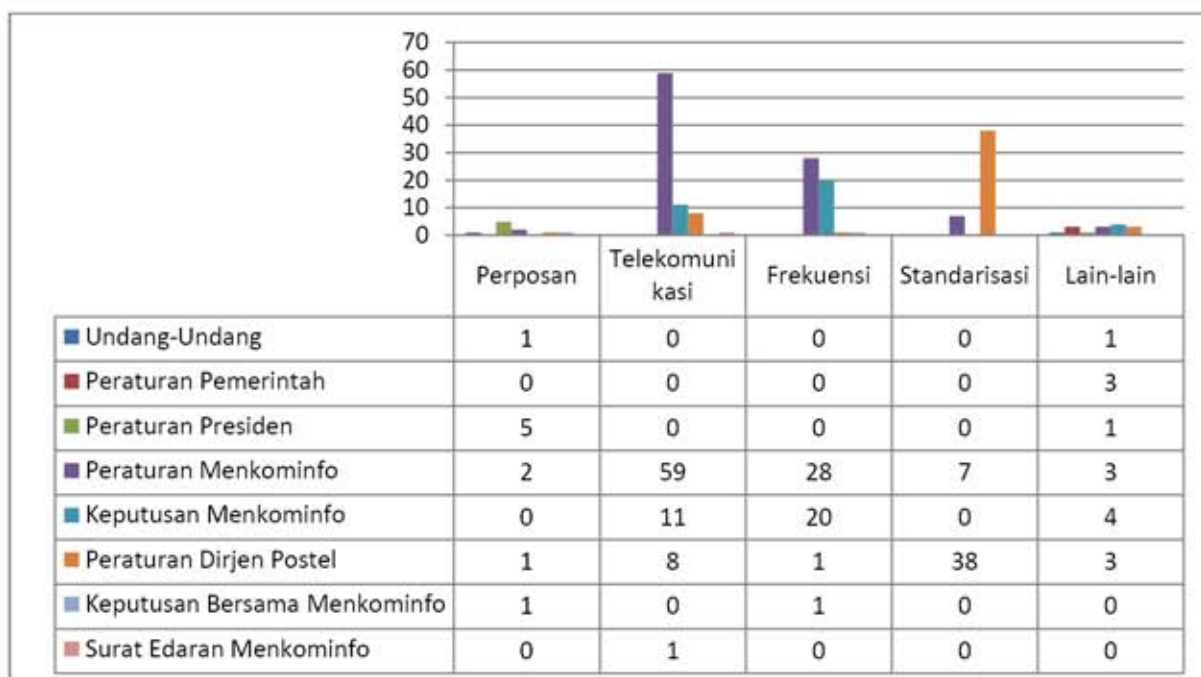
Sejak tahun 2005 sampai dengan 2010, untuk semua jenis regulasi pada semua bidang, secara kumulatif telah dikeluarkan 199 peraturan pada bidang Pos dan Telekomunikasi. Dari berbagai jenis peraturan tersebut, peraturan dalam bentuk Peraturan Menteri Kominfo adalah jenis peraturan yang paling banyak dikeluarkan. Sebanyak 99 Peraturan Menteri Kominfo (atau 49,7% dari total) telah dikeluarkan dalam selang waktu tersebut, diikuti oleh peraturan dalam bentuk Peraturan Dirjen Pos dan Telekomunikasi yang jumlahnya mencapai 51 buah (25,6%).

Tabel 4.8. Jumlah produk regulasi yang dikeluarkan pada periode 2005 - 2010

Jenis Peraturan	Perposan	Telekomunikasi	Frekuensi	Standarisasi	Lain-lain	JUMLAH
Undang-Undang	1	0	0	0	1	2
Peraturan Pemerintah	0	0	0	0	3	3
Peraturan Presiden	5	0	0	0	1	6
Peraturan Menkominfo	2	59	28	7	3	99
Keputusan Menkominfo	0	11	20	0	4	35
Peraturan Dirjen Postel	1	8	1	38	3	51
Keputusan Bersama Menkominfo	1	0	1	0	0	2
Surat Edaran	0	1	0	0	0	1
JUMLAH	10	79	50	45	15	199

Jika dilihat dari bidang kerjanya, maka peraturan yang paling banyak dikeluarkan adalah peraturan yang terkait dengan bidang telekomunikasi yang jumlahnya mencapai 79 peraturan (39,7% dari total) dari tahun 2005 sampai 2010. Peraturan bidang lain yang juga cukup banyak dikeluarkan adalah peraturan yang terkait dengan bidang frekuensi sebanyak 50 peraturan (25,1%) dan peraturan yang terkait dengan bidang standarisasi sebanyak 45 peraturan (22,6%).

Gambar 4.1. Jumlah produk regulasi yang dikeluarkan pada periode 2005- 2010

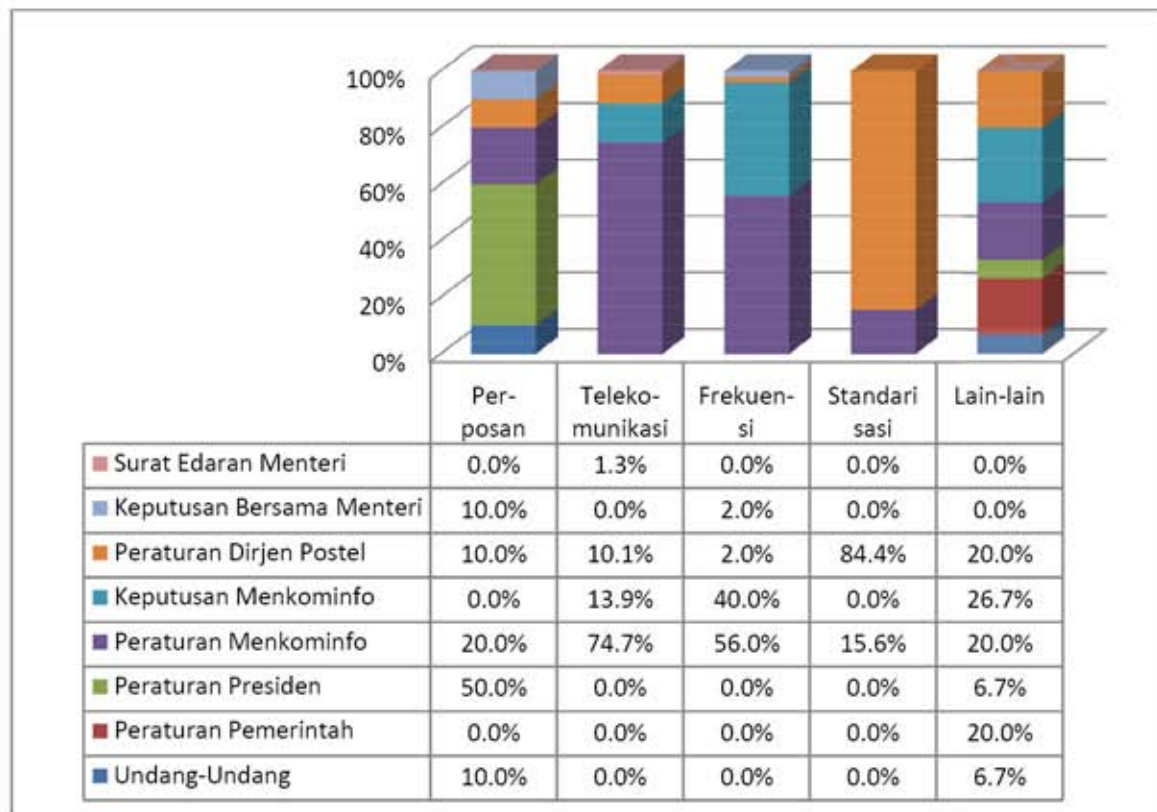


Peraturan paling sedikit dikeluarkan adalah peraturan pada bidang pos yang hanya 5% dari total peraturan yang dikeluarkan selama 2005-2010. Namun demikian, diantara dua undang-undang yang dikeluarkan pada periode waktu tersebut, salah satunya adalah undang-undang di bidang perposan.

Peraturan yang terkait dengan bidang telekomunikasi, paling banyak juga peraturan dalam bentuk Peraturan Menteri Kominfo. Sekitar 74,7% peraturan yang dikeluarkan dalam bidang telekomunikasi adalah dalam bentuk Peraturan Menteri Kominfo dan hanya 13,9% yang dalam bentuk Keputusan Menteri Kominfo serta 10,1% dalam bentuk Peraturan Dirjen Pos dan Telekomunikasi. Untuk peraturan pada bidang frekuensi, proporsi terbanyak juga dalam bentuk Peraturan Menteri Kominfo (56%) diikuti oleh Keputusan Menteri Kominfo

(40%). Namun untuk peraturan dalam bidang standarisasi, paling banyak justru dalam bentuk Peraturan Dirjen Pos dan Telekomunikasi. Hal ini terkait dengan penetapan standar atas perangkat telekomunikasi yang diuji.

Gambar 4.2. Komposisi produk regulasi yang dikeluarkan menurut bidang dan jenis peraturan pada periode 2005- 2010



Bab 5

Bidang Pos

Penyusunan data statistik bidang pos tahun 2010 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kondisi bidang perposan yang meliputi pos dan jasa titipan di Indonesia serta perkembangannya dalam lima tahun terakhir (2005-2010) dan secara khusus menganalisis kondisi perposan pada tahun 2010. Data yang disajikan meliputi sarana dan peralatan bidang perposan, pelayanan pos, fasilitas pelayanan pos dan jangkauan pelayanan pos, produksi pos dan jasa titipan sampai tahun 2010. Penyajian data ini juga mencoba menunjukkan kinerja PT. Pos dalam memberikan pelayanan perposan kepada masyarakat Indonesia. Khusus untuk analisis statistik jasa titipan/pengiriman ekspres juga menyajikan perkiraan pasar dari jasa titipan serta pangsa pasar antar pelaku usaha jasa titipan ekspres. Penyajian data ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang perkembangan dan kinerja bidang perposan dan logistik di Indonesia.

5.1 Ruang Lingkup

Untuk penyajian statistik pos ini, data diperoleh dari Kantor Pusat PT. Pos Indonesia (selanjutnya disebut PT. Pos) terutama divisi proses dan antaran dan divisi data dan informasi. Sedangkan data jasa titipan diperoleh dari masing-masing propinsi yang datanya telah dikumpulkan di Direktorat Pos. PT. Pos terdiri atas 11 Wilayah Usaha Pos (Wilpos), dimana setiap Wilpos meliputi propinsi sebagai berikut:

- | | | |
|----------------|---|---|
| 1. Wilpos I | : | Daerah Istimewa Aceh dan Sumatera Utara |
| 2. Wilpos II | : | Sumatera Barat dan Riau |
| 3. Wilpos III | : | Bengkulu, Jambi, Lampung dan Sumatera Selatan |
| 4. Wilpos IV | : | Daerah Khusus Ibukota Jakarta |
| 5. Wilpos V | : | Jawa Barat |
| 6. Wilpos VI | : | Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta |
| 7. Wilpos VII | : | Jawa Timur |
| 8. Wilpos VIII | : | Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur |
| 9. Wilpos IX | : | Kalsel, Kalteng, Kaltim dan Kalbar |
| 10. Wilpos X | : | Sulsel, Sultra, Sulteng dan Sulut |
| 11. Wilpos XI | : | Maluku dan Irian Jaya |



Untuk jasa pengiriman ekspres, data juga diperoleh dari Asosiasi Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (ASPERINDO) dan telah digunakan juga untuk analisis oleh USAID dan Bank Dunia.

Ruang lingkup data yang disajikan dalam statistik perposan tahun 2010 ini meliputi :

1. Banyaknya Kantor Pos di seluruh Indonesia pada tahun 2010 yang terdiri dari Kantor Pos, Kantor Pos Cabang Kabupaten, Kantor Pos Cabang Dalam Kota, Kantor Pos Cabang Luar Kota, Loker Ekstensi, Pelayanan Pos Bergerak, Pelayanan Pos Lainnya, serta Fasilitas Pos Lainnya.
2. Realisasi produksi surat pos yang meliputi:
 - 2.1. Surat Pos Dalam Negeri
 - a). Surat Pos Standar
 - 1). Biasa
 - 2). Tercatat
 - 3). Perlakuan Khusus
 - b). Surat Pos Prioritas
 - 1). Surat Pos Kilat
 - 2). Surat Pos Kilat Khusus Produk Regional
 - 3). Surat Pos Perlakuan Khusus
 - 2.2. Surat Pos Luar Negeri
 - a). Surat Pos Standar
 - 1). Biasa
 - 2). Tercatat
 - b). Surat Pos Prioritas
 - 1). Express Mail Service (EMS)
 - 2). Speedpost
 - 3). Expresspost
 - c). Surat Pos Luar Negeri Lainnya
 - 2.3. Realisasi Produksi PT. (Persero) Pos Indonesia lainnya
 - a). Paket Pos
 - b). Wesel Pos
 - c). Giro dan Cek Pos
3. Jumlah penyelenggara jasa titipan dan produksinya.
4. Produksi dan Perkiraan Permintaan Pasar Jasa Ekspres Indonesia menurut Jenis.

5.2 Konsep dan Definisi

Karena bidang pos dan jasa titipan mengandung banyak sekali istilah, berikut ini disampaikan penjelasan berupa definisi dari terminologi yang digunakan. Definisi ini diantaranya berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.

1. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.
2. Kiriman adalah satuan komunikasi tertulis, surat elektronik, paket, logistik atau uang yang dikirim melalui penyelenggara pos.
3. Penyelenggara pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos.
4. Kantor Pos adalah Unit Pelayanan Teknis dalam penyelenggaraan jasa perposan, terdiri dari:
 - a. Kantor Pos adalah Unit Pelaksana Teknis yang menyediakan jasa, pos dan giro secara lengkap dan pelayanannya dilakukan oleh PT. Pos Indonesia.
 - b. Kantor Pos Cabang Kabupaten adalah unit usaha PT. Pos Indonesia disuatu kota yang bertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran serta eksploitasinya kepada kantor pos yang berada di kota tersebut.
 - c. Kantor Pos Cabang Dalam Kota adalah fasilitas pelayanan pos di ibukota kecamatan yang belum ada kantor posnya, bertempat di kantor kecamatan atau tempat lain di ibukota kecamatan itu yang disediakan oleh pemerintah daerah dan diselenggarakan oleh pegawai pemerintah daerah.
 - d. Kantor Pos Cabang Luar Kota adalah unit usaha PT. Pos Indonesia di luar kota yang bertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran serta eksploitasinya kepada Kantor Pos.
5. Locket Ekstensi adalah sarana, pelayanan pos berbentuk loket yang disediakan oleh PT. Pos Indonesia yang lokasinya di luar kantor pos.



6. Pelayanan Pos Bergerak adalah terdiri dari:
 - a. Pos Keliling Kota (M) adalah penyediaan jasa pos bergerak di tempat tertentu dalam kota secara tetap dan teratur dengan menggunakan mobil atau kendaraan bermotor roda empat.
 - b. Pos Keliling Desa (PKD) adalah kegiatan penyediaan jasa pos yang bergerak dari desa ke desa secara tetap dan teratur dengan menggunakan kendaraan roda dua.
 - c. Pos Pemasaran Keliling (Pos Sarling) adalah unit pelayanan pos bergerak yang melaksanakan tugasnya secara tetap dan teratur dari pintu ke pintu (door to door) dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua.

7. Pelayanan Pos Lainnya, adalah terdiri dari:
 - a. Waralaba adalah unit pelayanan pos yang diselenggarakan oleh pihak ketiga berdasarkan kerjasama bagi hasil dengan PT. Pos.
 - b. Rumah Pos adalah unit pelayanan pos yang berlokasi di unit pemukiman transmigrasi yang dikelola oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Kanwil/Kandep Transmigrasi dan diberi bimbingan dan panjar kerja berupa benda pos dan materai (BPM) dari PT. (Persero) Pos Indonesia.
 - c. Agen Pos adalah unit pelayanan pos yang dikelola pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia berdasarkan perjanjian kerja sama dan berkedudukan di kota.
 - d. Agen Pos Desa adalah unit pelayanan pos yang dikelola pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia berdasarkan perjanjian kerja sama dan berkedudukan di desa.
 - e. Agen Pos Koperasi adalah unit pelayanan pos yang dikelola pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia berdasarkan perjanjian kerja sama dan berkedudukan di desa.
 - f. Depo BPM adalah sarana pelayanan pos yang diselenggarakan oleh pihak tertentu atas ijin yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia untuk melakukan penjualan benda pos dan materai sesuai dengan harga nominal.
 - g. Pos Serba adalah sarana pelayanan pos dengan tampilan menarik yang menyediakan layanan, baik yang berkaitan maupun tidak berkaitan dengan

layanan pos. Pengelolanya adalah pegawai PT. Pos Indonesia yang diberi tugas atau pihak lain berdasarkan perjanjian kerja sama. Lokasi pos serba diruang kantor pos atau tempat lain yang ditunjuk.

- h. Pos Desa adalah fasilitas fisik pelayanan di luar ibukota kecamatan yang belum ada kantor pos, bertempat di kantor desa/kelurahan atau tempat lain di luar ibukota kecamatan yang disediakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan diselenggarakan oleh pegawai perangkat pemerintah desa kelurahan.
 - i. Kantor Pos Desa adalah unit pelayanan pos di desa kelurahan.
 - j. Warpos Kesra adalah fasilitas pelayanan pos yang diselenggarakan oleh paguyuban keluarga sejahtera.
 - k. Pos Sekolah adalah fasilitas pelayanan pos di sekolah sekolah untuk keperluan para siswa dan sekolah, yang dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh kepala sekolah dengan mengikut sertakan organisasi resmi atau koperasi siswa dibawah pembinaan dan bimbingan kepala sekolah dan kepala kantor pos.
8. Fasilitas Pos Lainnya, adalah terdiri dari:
- a. Kotak Pos adalah kotak berkunci yang disediakan oleh PT. Pos Indonesia, dipasang pada dinding kantor pos atau tempat lain yang disediakan untuk disewa oleh masyarakat yang menginginkan kiriman untuknya disampaikan melalui kotak pos itu. Tiap tiap kotak pos diberi nomor urut tersendiri.
 - b. Tromol Pos adalah kotak atau wadah lain yang terkunci, disediakan di kantor pos oleh pemakai jasa pos yang menginginkan kiriman untuknya disampaikan melalui kotak pos atau wadah itu. Tromol pos dapat juga digunakan untuk pengeposan kiriman.
 - c. Bis Surat adalah kotak surat milik PT. Pos Indonesia yang disediakan bagi masyarakat sebagai tempat untuk memasukkan surat pos yang akan dikirim.
 - d. Peti Pos adalah kotak yang disusun dan terdiri dari 16 sampai 20 kotak yang terkunci yang ditempatkan di tempat tempat umum seperti pusat pertokoan, rumah susun dan lain lain sebagai sarana mempermudah pengantar pos menyampaikan kiriman pos.



9. Sentral Giro

- a. Sentral Giro (SG) adalah unit pelaksana teknis yang bertindak sebagai pusat penyelenggaraan administrasi rekening giro pos dalam wilayah tertentu. Pada sentral giro ini disediakan juga loket pelayanan giro pos.
- b. Sentral Giro Gabungan (SGG) adalah unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan administrasi rekening giro pos dalam wilayah tertentu, yang digabungkan pada Kantor Pos, karena volume pekerjaan belum memenuhi syarat untuk berdiri sendiri. Pimpinannya dirangkap oleh Kepala Kantor Pos.
- c. Sentral Giro Gabungan Khusus adalah unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan administrasi rekening giro pos (khusus penerimaan setoran keuangan negara pajak) di kota tertentu yang digabungkan dengan kantor pos yang sekota dengan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) yang tidak ada Sentral Giro/ Sentral Giro Gabungannya.
- d. Sentral Pengelolaan Pos (SPP) adalah unit pelaksana teknis yang khusus mengadakan satu jenis pekerjaan berupa pengelolaan dan antaran surat pos.
- e. Kios Benda Pos dan Materai (KBPM) adalah sarana pelayanan pos berupa kios yang disertai tugas menjual benda pos dan meterai. Kios ini biasanya di halaman kantor pos atau sekitarnya.

10. Produksi Pos, adalah

- a. Surat adalah bagian dari komunikasi tertulis dengan atau tanpa sampul yang ditujukan kepada individu atau badan dengan alamat tertentu, yang dalam proses penyampaian dilakukan secara fisik
- b. Surat Pos adalah himpunan bagi surat, warkat pos, kartu pos, barang cetakan, surat kabar, sekogram dan bungkusan.
- c. Paket Pos adalah kemasan yang berisi barang dengan syarat syarat tertentu, seperti bentuk, ukuran dan berat yang dikirim melalui pos.
- d. Wesel Pos adalah sarana pelayanan pengiriman uang di dalam negeri dan ke luar negeri melalui pos yang paling sederhana dan ekonomis.
- e. Kiriman adalah satuan surat pos atau paket pos dalam proses pertukaran.
- f. Kiriman Pos adalah kantung atau wadah lain yang berisi himpunan surat pos dan atau paket pos untuk dipertukarkan.

- g. Giro Pos adalah sarana pelayanan lalu lintas uang dengan pemindahbukuan melalui pos.
 - h. Cek Pos adalah sarana pelayanan lalu lintas uang untuk pembayaran dengan cek melalui pos.
 - i. Barang Cetak adalah segala jenis publikasi yang dicetak pada kertas atau bahan termasuk, tetapi tidak terbatas pada buku, brosur, katalog, surat kabar dan majalah.
 - j. Express Mail Service (EMS) adalah pengiriman surat (termasuk dokumen) secara ekspres ke Luar negeri dengan angkutan udara. Tersedia jaminan ganti rugi atas keterlambatan atau kehilangan.
 - k. Pos Cepat Antar Kota Terbatas (Pos Patas) adalah pengiriman surat (termasuk dokumen) di dalam negeri dengan angkutan udara darat. Tersedia jaminan ganti rugi atas keterlambatan atau kehilangan.
 - l. Pos Kilat Khusus adalah pengiriman surat (termasuk dokumen) secara khusus dengan angkutan udara dan darat. Pengirim menerima bukti kirim, bukti terima dan ganti rugi atas keterlambatan atau kehilangan.
 - m. Pos Cepat Antar Kota (Pos Canta) adalah layanan pengiriman surat (termasuk dokumen) di dalam kota berikut jaminan ganti rugi atas keterlambatan atau kehilangan.
 - n. Surat Elektronik (Ratron) adalah layanan surat yang proses penyampaiannya kepada penyelenggara pos melalui elektronik atau berupa softcopy untuk disampaikan secara fisik kepada individu atau badan dengan alamat tertentu.
11. Jasa titipan adalah layanan jasa tertentu dari sektor pos yang diijinkan untuk diselenggarakan oleh perusahaan swasta.
- a. Barang cetakan adalah dokumen yang beratnya tidak melebihi 1 kg.
 - b. Paket adalah barang yang dikemas dalam bentuk paket.
 - c. Bungkusan kecil adalah paket yang beratnya tidak melebihi 1 kg.
 - d. Sekogram adalah paket yang beratnya sampai 7 kg dapat berupa dokumen.
 - e. Surat kabar adalah media cetak.
 - f. Koli adalah barang yang ditentukan biaya pengirimannya berdasarkan unit jumlah barang (koli).
 - g. Kg adalah barang yang ditentukan biaya pengirimannya berdasarkan unit berat dalam satuan kg.

12. Layanan Pos Universal adalah layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia.

5.3 Uraian Data Statistik Perposan

Data statistik kinerja perposan yang akan disajikan terdiri dari statistik sarana dan prasarana pos, statistik produksi pos, statistik bidang logistik, penerbitan perangko dan pelayanan universal bidang pos (*public service obligation*.) Sarana dan prasarana pos meliputi kantor pos menurut berbagai jenisnya, pelayanan pos bergerak, fasilitas pelayanan pos bergerak dan jangkauan pelayanannya. Sementara untuk produksi mencakup produksi surat dan paket, dalam negeri dan luar negeri. Statistik jasa titipan meliputi produksi jasa titipan dan keadaan usaha jasa titipan. Sementara statistik penerbitan perangko dan pelayanan universal bidang pos meliputi jumlah perangko yang diterbitkan dan jumlah kantor pos pelaksana pelayanan universal bidang pos. Uraian data statistik bidang perposan ini juga akan menganalisis kinerja dan jangkauan pelayanan dari PT Pos sebagai pelaku utama perposan di Indonesia.

5.3.1 Alat Pos

Pemaparan data dan informasi statistik alat dan sarana penunjang pos meliputi sebaran kantor pos menurut jenis dan lokasi (wilayah pos), Pelayanan pos lainnya menurut jenis pelayanan dan lokasi (wilayah pos dan pulau), pelayanan pos bergerak menurut jenis dan lokasi (wilayah pos), fasilitas pelayanan pos lainnya menurut jenis dan lokasi (wilayah pos) dan jangkauan pelayanan pos yang meliputi jangkauan pelayanan di kecamatan, desa dan lokasi transmigrasi. Data-data yang disajikan meliputi data lima tahun terakhir sampai dengan akhir tahun 2010.

5.3.1.1 Jumlah Kantor Pos

a. Perkembangan Jumlah Kantor Pos Tahun 2005- 2010

jumlah sarana pos dalam bentuk kantor pos mengalami peningkatan pada tahun 2010 meskipun hanya sebesar 0,3% dari tahun sebelumnya menjadi 3543 unit. Peningkatan ini merupakan kelanjutan dari peningkatan yang terjadi pada tahun sebelumnya yang mencapai 1,7% sebagai upaya PT. Pos untuk meningkatkan jangkauan layanannya. Peningkatan terutama terjadi untuk jenis Kantor Pos Cabang (Luar Kota) yang bertambah 8 unit atau meningkat sekitar 0,3%. Sementara untuk kantor pos cabang (kabupaten) yang pada tahun 2009 meningkat sampai 122% (107 unit), pada tahun 2010 hanya meningkat 1 unit seperti ditunjukkan tabel 5.1. Peningkatan yang besar untuk jenis kantor pos cabang (kabupaten) pada tahun 2009 merupakan dampak dari pemekaran wilayah yang banyak terjadi pada tahun sebelumnya sebagai dampak pelaksanaan otonomi daerah. Pemekaran wilayah dan terbentuknya banyak kabupaten baru direspon PT. Pos dengan menyediakan kantor pos cabang (kabupaten) untuk meningkatkan pelayanan perposan terutama pada daerah pusat pemerintahannya guna mendukung kelancaran fungsi pemerintahan di daerah.

Tabel 5.1 Perkembangan jumlah kantor Pos menurut jenisnya tahun 2005- 2010.

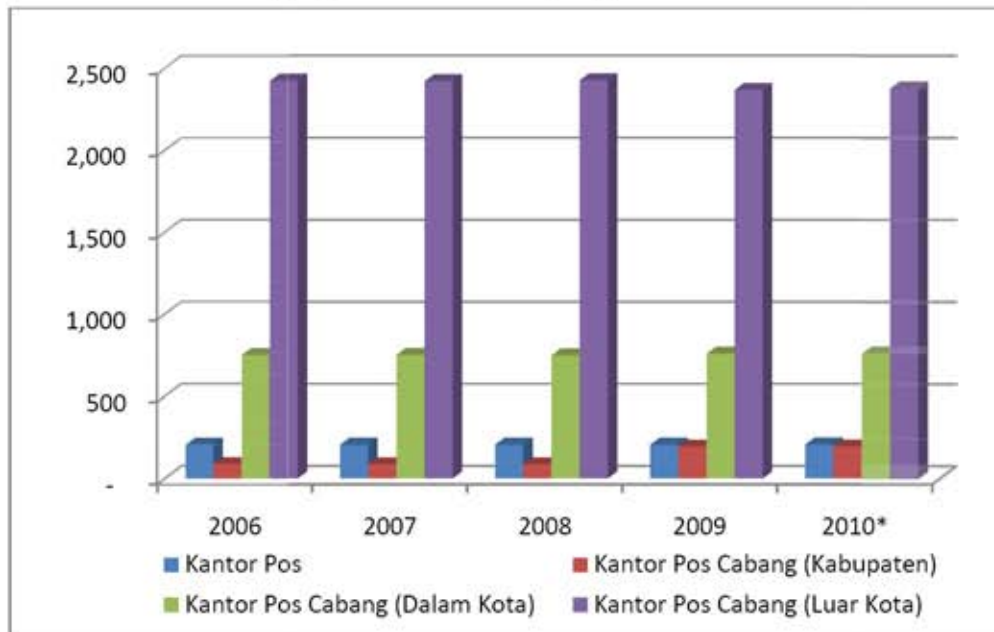
No	Jenis Kantor Pos	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kantor Pos	207	207	207	207	207	208
2	Kantor Pos Cabang (Kabupaten)	88	88	88	88	195	196
3	Kantor Pos Cabang (Dalam Kota)	760	755	754	751	761	762
4	Kantor Pos Cabang (Luar Kota)	2.433	2.425	2.422	2.427	2369	2.377
Jumlah		3.488	3.475	3.471	3.473	3.532	3.543

Sumber : PT. Pos Indonesia

Komposisi kantor pos menurut jenis yang tersedia untuk melayani masyarakat terlihat bahwa adalah kantor pos cabang (luar kota) menjadi jenis yang paling banyak tersedia dibanding jenis kantor pos lainnya. Sekitar 67,1% kantor pos yang tersedia pada tahun 2010 adalah untuk jenis kantor pos cabang (luar kota). Sementara untuk jenis kantor pos cabang (dalam kota) proporsinya hanya 21,5%. Namun penambahan untuk kedua jenis kantor ini pos ini tidak banyak dilakukan dalam lima tahun terakhir. Sementara untuk jenis kantor pos cabang (kabupaten) justru mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2009.

Penyediaan jumlah kantor pos cabang (luar kota) yang jauh lebih banyak sejalan dengan kondisi geografis Indonesia yang lebih banyak bukan merupakan wilayah pedesaan khususnya di luar Jawa. Bahkan wilayah di Jawa yang memiliki penduduk yang tinggi dan membutuhkan layanan perposan, sebagian besar wilayahnya juga masih merupakan wilayah pedesaan yang dijangkau melalui kantor pos cabang (luar kota) ini.

Gambar 5.1. Perkembangan jumlah Kantor Pos yang dikelola PT. Pos Tahun 2006 - 2010



b. Distribusi Jumlah Kantor Pos Tahun 2005 - 2010

Persebaran kantor yang tersedia antar wilayah pos menunjukkan tidak terjadi pergeseran distribusi kantor pos yang signifikan dalam enam tahun terakhir dimana Pulau Jawa masih menjadi daerah yang paling banyak memiliki sarana Kantor Pos. Jumlah kantor pos di Pulau Jawa yang berada di wilayah pos 4, 5, 6 dan 7 secara rata-rata lebih banyak dibanding wilayah pos lainnya an secara total juga jauh diatas wilayah lainnya. Ketika terjadi peningkatan jumlah kantor pos yang cukup signifikan pada tahun 2009, penambahan paling banyak juga terjadi di wilayah pos VI yang meliputi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Sehingga, meskipun di wilayah lain di Jawa tidak terjadi penambahan kantor pos, secara total penambahan paling banyak masih terjadi di pulau Jawa.

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa ketika pada wilayah pos lain tidak menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah kantor pos dan bahkan menunjukkan terjadinya penurunan, jumlah

kantor pos di wilayah pos di Pulau Jawa justru menunjukkan terjadinya peningkatan, kecuali untuk wilayah pos 5. Pada wilayah pos 4 dan 6, peningkatan jumlah kantor pos dari tahun 2005 sampai 2010 mencapai 10,9% dan 7,6%, sementara pada wilayah pos 5, justru terjadi penurunan sebesar 12,9% pada periode yang sama. Pada wilayah pos lain di luar Jawa juga menunjukkan kecenderungan menurunnya jumlah kantor pos meskipun tidak signifikan. Pada wilayah pos 3, jumlah kantor pos menurun sebesar 5% dari tahun 2005 sampai 2010. Sementara pada Wilayah Pos 1 penurunan terjadi sebesar 2,3% pada periode yang sama.

Tabel 5.2. Perkembangan jumlah kantor Pos menurut Wilpos tahun 2004 - 2010

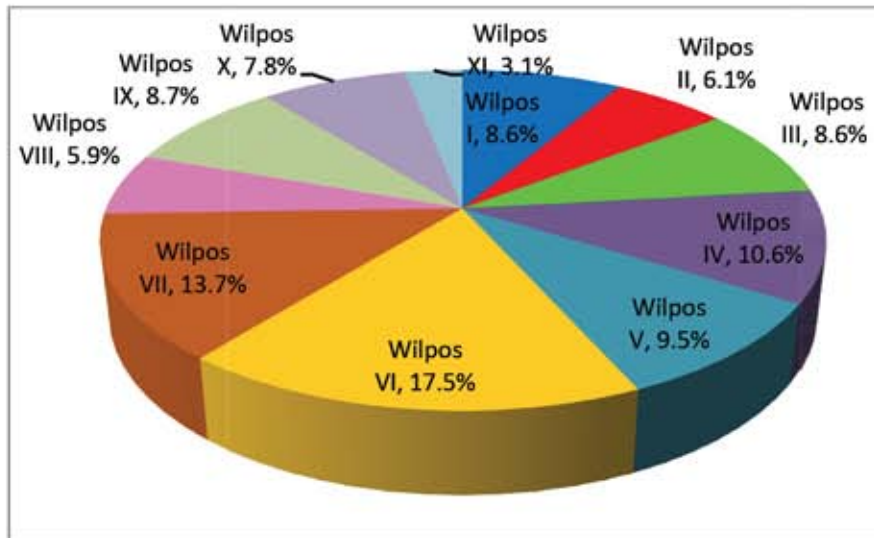
No.	Wilayah Pos	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	I	300	298	298	299	302	303
2	II	218	218	215	215	215	215
3	III	316	306	306	304	304	304
4	IV	331	375	375	374	374	375
5	V	383	338	338	334	334	337
6	VI	574	574	574	574	619	621
7	VII	485	484	484	484	484	486
8	VIII	207	205	206	207	207	208
9	IX	314	306	305	308	308	309
10	X	273	272	272	273	276	276
11	XI	109	99	99	101	109	109
Jumlah		3.510	3.475	3.472	3.473	3.532	3543

Sumber : PT. Pos Indonesia

Distribusi jumlah kantor pos menurut wilayah pos seperti terlihat pada gambar 5.2. menunjukkan bahwa proporsi terbesar kantor pos terdapat di wilayah pos VI yang meliputi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang mencapai 17,5%. Proporsi terbanyak berikutnya adalah di wilayah pos VII (Jawa Timur) dan wilayah pos IV yang meliputi DKI Jakarta dengan proporsi mencapai 13,7% dan 10,6%. Dari sebaran distribusi kantor pos ini terlihat bahwa sarana kantor pos masih terkonsentrasi di di Pulau Jawa. Jika di total, proporsi kantor pos untuk semua jenis yang berada di Jawa mencapai 51,3% dari total kantor pos yang tersedia, lebih atau separuh kantor pos yang ada di Indonesia berada di Pulau Jawa. Sementara proporsi kantor pos di Sumatera hanya mencapai 23,2% dari total kantor pos yang ada di Indonesia. Proporsi jumlah kantor pos yang terendah berada di wilayah Maluku dan Papua

dimana untuk wilayah yang cukup luas ini, proporsi penyediaan kantor pos hanya 3,1% dari total kantor pos yang ada di Indonesia.

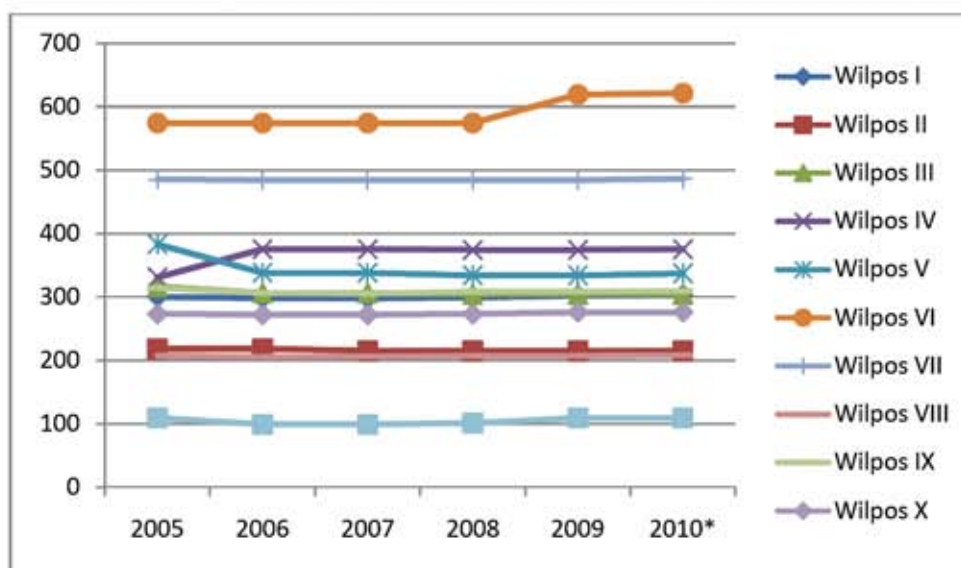
Gambar 5.2. Distribusi Kantor Pos (total) menurut Wilayah Pos Tahun 2010



Komposisi penyebaran kantor pos menurut wilayah pos menunjukkan bahwa jumlah kantor pos cenderung tinggi pada daerah dengan jumlah penduduk besar dan administratif pemerintahan (kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa) yang banyak. Faktor jumlah penduduk dan jumlah pemerintahan administratif ini lebih mempengaruhi distribusi kantor pos.

Pola fluktuasi perkembangan jumlah kantor pos seperti diperlihatkan oleh gambar 5.3 juga menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kantor pos hanya terjadi pada wilayah pos VI yang meliputi wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Jumlah kantor pos pada wilayah pos lainnya cenderung stabil dengan sedikit penurunan pada tahun 2006 untuk jumlah kantor pos di wilayah pos V. Sebaliknya pada tahun 2006 terjadi peningkatan jumlah kantor pos pada wilayah pos IV. Namun dalam tiga tahun terakhir, jumlah kantor pos pada semua wilayah pos kecuali wilayah pos VI cenderung tidak mengalami perubahan berarti.

Gambar 5.3. Trend perubahan jumlah Kantor Pos menurut Wilayah Pos 2005 - 2010



Distribusi kantor pos menurut jenis dan wilayah pos sampai tahun 2010 menunjukkan terjadinya perbedaan distribusi kantor pos menurut jenis. Untuk jenis kantor pos cabang (kabupaten), jumlah terbanyak kantor pos jenis ini terdapat di wilayah pos IV yang meliputi wilayah Jabotabek. Proporsi Kantor Pos Cabang (kabupaten) di wilayah Pos IV ini mencapai 56,8% dari total di seluruh Indonesia. Bahkan untuk jenis kantor pos ini di wilayah pos lain di Pulau Jawa, jumlahnya sangat sedikit. Sementara untuk jenis kantor pos, distribusinya cenderung merata diantara wilayah pos kecuali untuk wilayah pos VI dan VII yang jumlahnya sedikit lebih banyak.

Tabel 5.3. Sebaran Jumlah Kantor Pos menurut Jenis dan Wilayah Pos Tahun 2010

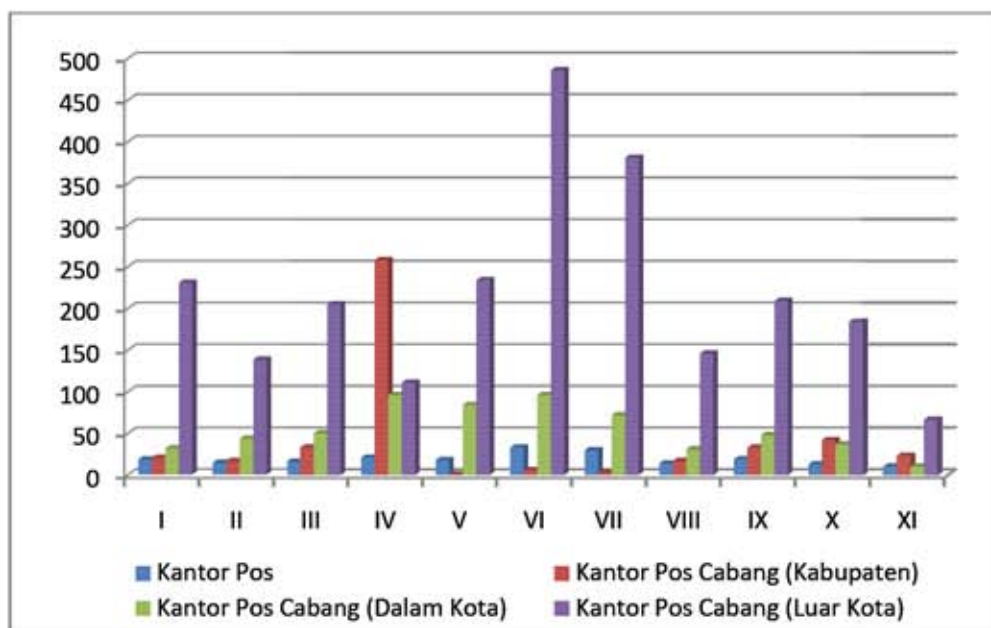
No	Jenis	Wilayah Pos											Jumlah
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	Kantor Pos	19	15	16	21	18	33	30	14	19	13	10	208
2	Kantor Pos Cabang (Kabupaten)	21	17	33	258	1	6	3	17	33	42	23	454
3	Kantor Pos Cabang (Dalam Kota)	32	44	50	96	84	96	72	31	48	37	10	600
4	Kantor Pos Cabang (Luar Kota)	231	139	205	111	234	486	381	146	209	184	66	2392
Jumlah		303	215	304	486	337	621	486	208	309	276	109	3654

Untuk jenis kantor pos cabang (dalam kota) jumlah terbesar terapat di wilayah-wilayah pos yang berada di Pukau Jawa khususnya wilayah pos IV, V dan VI. Proporsi kantor pos cabang dalam kota yang berada di pulau Jawa mencapai 58% dari total kantor pos cabang (dalam

kota). Sementara pada wilayah pos di luar pulau Jawa, jumlahnya tidak terlalu banyak dengan proporsi kurang dari 10% di masing-masing wilayah pos. Secara implisit, pola distribusi untuk kantor pos cabang (dalam kota) ini ditentukan oleh tingkat kepadatan penduduk dan kemajuan daerah secara merata di wilayah tersebut seperti ditunjukkan oleh wilayah-wilayah di Pulau Jawa. Gambar 5.4 menunjukkan pola persebaran jumlah kantor pos yang berbeda antara kantor pos yang relatif merata, kantor pos cabang (kabupaten) yang terkonsentrasi di wilayah pos IV dan kantor pos cabang (dalam kota) yang sedikit variatif antar wilayah pos.

Sementara untuk kantor cabang (luar kota) menunjukkan perbedaan yang signifikan antar wilayah pos dengan jumlah terbesar ada di wilayah pos VI dan VII. Total untuk kedua wilayah pos ini proporsi kantor pos cabang (luar kota) mencapai 36,2%, sementara untuk wilayah pos lainnya proporsinya kurang dari 10% untuk masing-masing wilayah. Bahkan untuk wilayah pos XI yang mencakup daerah-daerah di kawasan timur Indonesia, jumlahnya relatif sangat sedikit dengan proporsi hanya 2,8%. Untuk jenis kantor pos lainnya, proporsi jumlah kantor pos di wilayah pos ini juga sangat rendah.

Gambar 5.4. Perbandingan jumlah kantor Pos antar Wilpos Pos menurut jenis Tahun 2010



Jika dibandingkan dengan luas wilayahnya, wilayah Pos IV merupakan daerah dengan kepadatan sarana kantor pos paling tinggi. Hal ini terkait dengan penyediaan sarana kantor pos untuk melayani penduduk yang banyak dan kegiatan masyarakat, bisnis dan pemerintahan yang banyak terkonsentrasi di wilayah ini.

c. Cakupan Jangkauan Pelayanan Kantor Pos

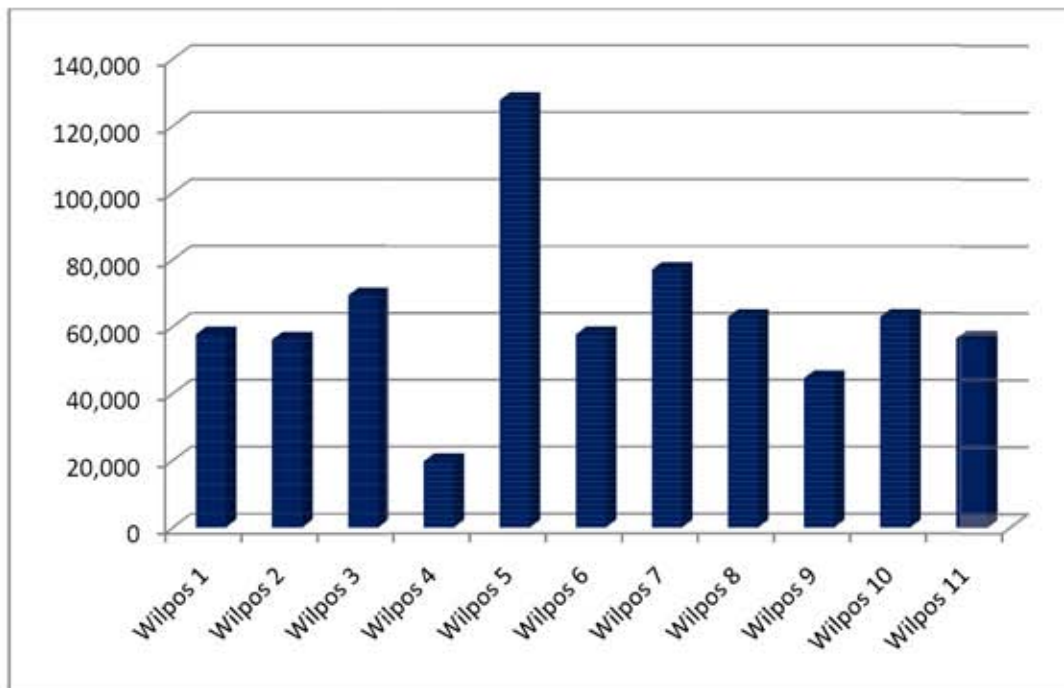
Cakupan pelayanan kantor pos menggambarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh setiap satu kantor pos. Jumlah penduduk di Jawa yang sangat tinggi menjadikan cakupan beban pelayanan kantor pos di wilayah ini masih cukup tinggi meskipun jumlah kantor pos terbesar juga berada di Pulau Jawa. Cakupan pelayanan kantor pos terbesar terdapat pada kantor pos di wilayah pos V yang meliputi wilayah Jawa Barat dan Banten dimana satu kantor pos di wilayah ini harus melayani lebih dari 127 ribu penduduk. Penambahan kantor pos di wilayah ini pada tahun 2010 telah cukup mengurangi beban cakupan pelayanan ini. Cakupan pelayanan terbesar berikutnya ada di wilayah pos VII yang mencakup wilayah Jawa Timur dan wilayah pos III (Sumatera bagian Selatan) dimana satu kantor pos harus melayani masing-masing lebih dari 77 ribu dan 69 ribu penduduk. Khusus untuk Jakarta, beban cakupan pelayanan penduduknya memang relatif rendah yaitu hanya sekitar 19 ribu karena jumlah kantor pos yang cukup banyak sementara jumlah penduduk totalnya tidak terlalu besar karena wilayahnya yang juga tidak besar

Untuk wilayah pos IX (Kalimantan) dan wilayah pos XI (Maluku dan Papua), meskipun jumlah kantor pos yang tersedia tidak banyak, namun beban cakupan pelayanan penduduknya juga tidak besar. Satu kantor pos di Kalimantan memiliki beban pelayanan sekitar 44,6 ribu orang sementara di Maluku dan Papua memiliki beban pelayanan sekitar 56,5 ribu orang. Hal ini disebabkan jumlah penduduk di kedua wilayah pos tersebut yang tidak sepadat di wilayah pos di Pulau Jawa, sementara wilayah geografisnya sangat luas. Gambar 5.5 juga menunjukkan beban cakupan pelayanan penduduk untuk kantor pos di wilayah pos di Sumatera juga tidak terlalu besar karena jumlah penduduk yang juga tidak terlalu berat.

Tabel 5.4. Cakupan dan Jangkauan pelayanan kantor pos menurut Wilayah Pos Tahun 2010

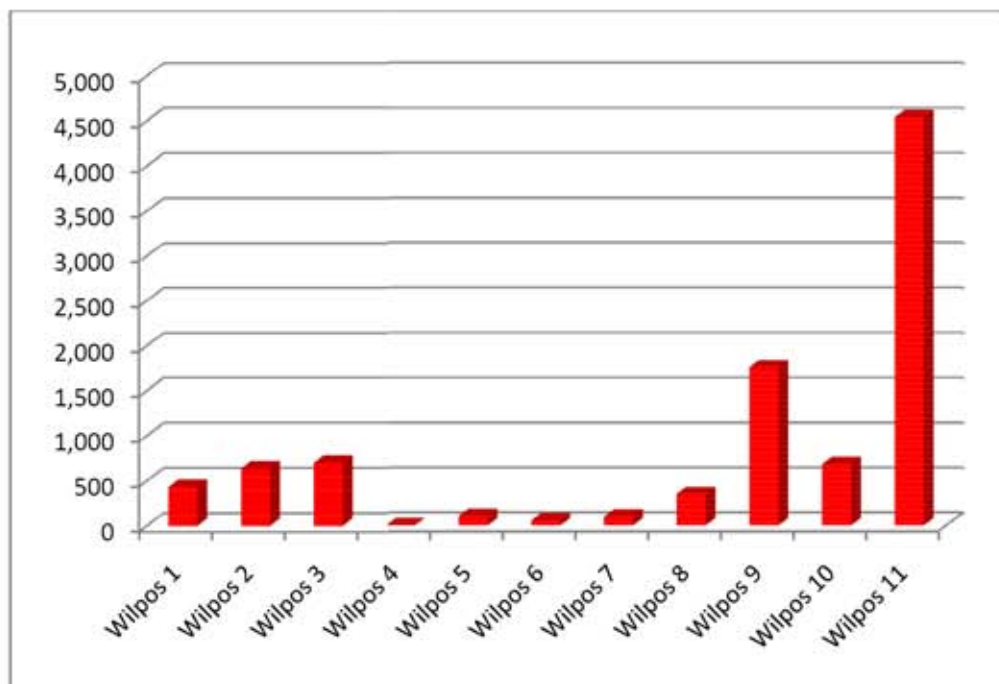
No.	Wilayah Pos	Cakupan penduduk per kantor pos	Jangkauan luas pelayanan per kantor pos (km ²)
1	I	57.679	432
2	II	56.114	638
3	III	69.375	699
4	IV	19.769	1,4
5	V	127.756	105
6	VI	57.714	58
7	VII	77.113	98
8	VIII	62.860	351
9	IX	44.621	1.761
10	X	62.941	683
11	XI	56.563	4.541

Gambar 5.5. Jumlah penduduk yang dilayani per satu kantor pos menurut Wilpos Tahun 2010



Jangkauan pelayanan menunjukkan rasio antara luas wilayah dengan jumlah kantor pos yang menggambarkan luas wilayah yang harus dilayani oleh setiap kantor pos yang ada. Sampai dengan tahun 2010, jangkauan luas pelayanan kantor pos yang paling besar justru terdapat di wilayah pos XI yang mencakup wilayah Maluku dan Papua dan wilayah pos IX yang mencakup wilayah Kalimantan. Jangkauan pelayanan yang luas di kedua wilayah pos ini disebabkan wilayah geografis di daerah ini yang sangat luas sementara jumlah sarana kantor pos yang ada hanya sedikit karena aktivitas kegiatan sosial, ekonomi dan pemerintahan yang harus dilyani juga belum banyak di wilayah ini. Satu kantor pos di wilayah Maluku dan Papua, harus melayani area seluas 4541 km² dan di wilayah Kalimantan, satu kantor pos harus melayani area seluas 1761 km². Jangkauan pelayanan yang paling kecil terdapat di wilayah pos IV (Jabotabek) dimana satu kantor pos hanya mencakup areal pelayanan seluas sekitar 1,4 km². Wilayah pos di Pulau Jawa juga memiliki jangkauan luas pelayanan yang kecil dimana satu kantor pos rata-rata hanya melayani areal seluas kurang dari 100 km² kecuali untuk wilayah pos V sebesar 105 km².

Gambar 5.6. Luas wilayah yang dilayani per satu kantor pos di tiap Wilayah Pos Tahun 2010



5.3.1.2. Pelayanan Pos Bergerak

Penyediaan sarana pos dalam bentuk Pelayanan Pos Bergerak merupakan upaya PT. Pos untuk memperluas jangkauan pelayanan pos dan mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan pos. Hal ini dilakukan dalam bentuk penyediaan sarana dalam bentuk Pos Keliling Kota, Pos Keliling Desa, dan Pos Pasar Keliling (Pos Sarling) yang dapat lebih menjangkau masyarakat terutama yang jauh dari sarana kantor pos dan jauh dari perkotaan. Dilihat dari jumlah unit, Pos Keliling Desa merupakan yang terbanyak hampir di semua wilayah, dibanding dengan bentuk pelayanan pos bergerak lainnya.

a. Komposisi dan Distribusi Pos Pelayanan Bergerak

Sampai dengan tahun 2010, pelayanan bergerak oleh PT Pos kepada penduduk telah dilayani oleh 2076 unit pos pelayanan bergerak dengan 3042 trayek dan 6317 terminal. Jumlah pelayanan bergerak ini relatif sama dengan tahun sebelumnya. Dari jenis pelayanan bergerak yang ada, paling banyak adalah pelayanan bergerak dalam bentuk pos keliling desa dengan jumlah 1600 unit pos keliling desa yang memiliki 2799 trayek dan 5862 terminal. Hal ini berarti bahwa setiap unit pos keliling desa, melayani sekitar 3-4 titik pelayanan. Sementara untuk pos keliling kota, tersedia sekitar 211 unit dengan jumlah pelayanan

sebanyak 455 titik atau sekitar dua titik pelayanan dilakukan oleh setiap unit pos keliling kota.

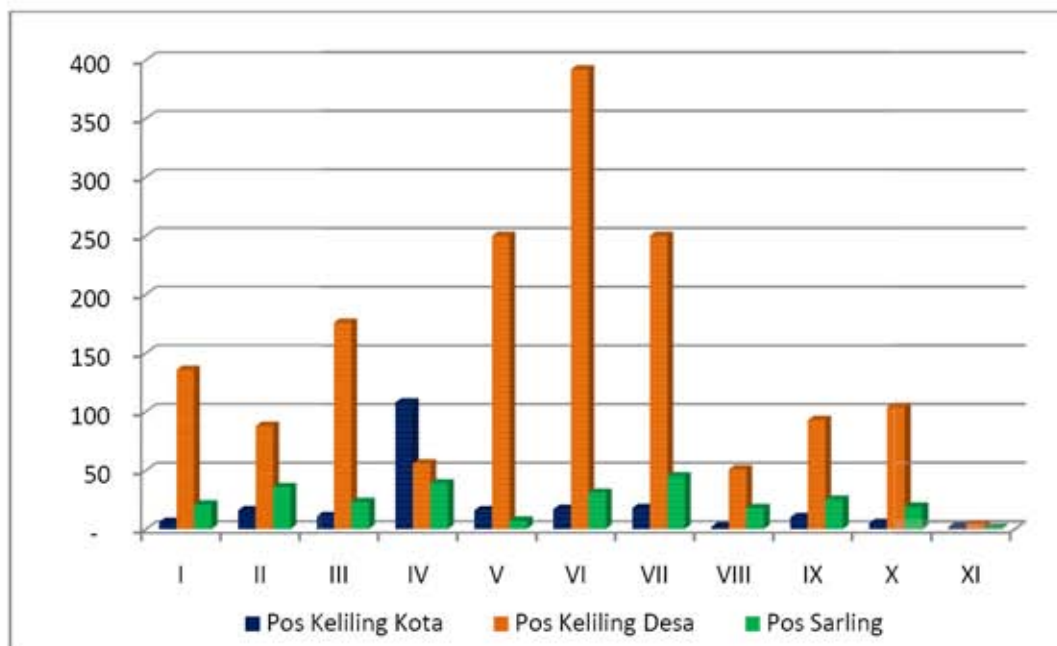
Jumlah unit pelayanan pos keliling desa yang lebih banyak daripada pos keliling kota dengan jumlah titik (terminal) pelayanan yang juga lebih banyak disebabkan wilayah Indonesia yang lebih banyak pedesaan serta akses ke kantor yang lebih sulit di daerah pedesaan. Dengan demikian dibutuhkan penyediaan layanan khusus yang lebih banyak di pedesaan melalui pelayanan pos bergerak. Untuk jenis Pos Sarling, jumlahnya baru mencapai 265 yang tersebar di seluruh wilayah pos. Jumlah ini masih lebih besar daripada pelayanan bergerak dalam bentuk Pos Keliling Kota.

Tabel 5.5. Sebaran Jumlah Pelayanan Pos Bergerak menurut Jenis dan Wilpos 2010

No	Pos Pelayanan Bergerak	Satuan	Wilayah Pos											Jumlah
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	Pos Keliling Kota	Unit	6	16	11	108	16	17	18	2	10	5	2	211
		Trayek	6	17	16	112	20	21	22	2	16	9	2	243
		Terminal	15	35	30	182	38	45	43	5	40	19	3	455
2	Pos Keliling Desa	Unit	136	88	176	56	250	392	250	51	93	104	4	1600
		Trayek	239	155	328	95	455	673	428	103	153	160	10	2799
		Terminal	440	446	546	212	1.014	1.432	919	211	285	329	28	5862
3	Pos Sarling	Unit	21	36	23	39	7	31	45	18	25	19	1	265
		Trayek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Terminal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Jumlah Pos Pelayanan Bergerak	Unit	163	140	210	203	273	440	313	71	128	128	7	2076
		Trayek	245	172	344	207	475	694	450	105	169	169	12	3042
		Terminal	455	481	576	394	1.052	1.477	962	216	325	348	31	6.317

Jika dilihat dari distribusi penyediaan pelayanan pos bergerak ini, persebaran penyediaan pos pelayanan bergerak ini sampai tahun 2010 ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa kecuali untuk Pos Sarling. Untuk jenis pos keliling desa, keberadaan unit pos keliling ini paling banyak berada di wilayah pos di pulau Jawa dengan terbanyak di wilayah pos VI, diikuti dengan wilayah pos V dan VII. Jumlah pos keliling desa di wilayah pos VI (Jawa tengah dan DIY) jumlahnya mencapai hampir 392 unit, sementara di wilayah pos V dan VII jumlahnya masing-masing 250 unit. Di Kawasan Tengah dan Timur Indonesia pos keliling desa relatif sangat sedikit yaitu kurang dari 100 unit di setiap wilayah pos-nya kecuali di wilayah pos X yang mencakup wilayah Sulawesi yang jumlahnya 104 unit.

Gambar 5.7. Distribusi Pelayanan Pos Bergerak antar Wilpos Pos menurut jenis Tahun 2010

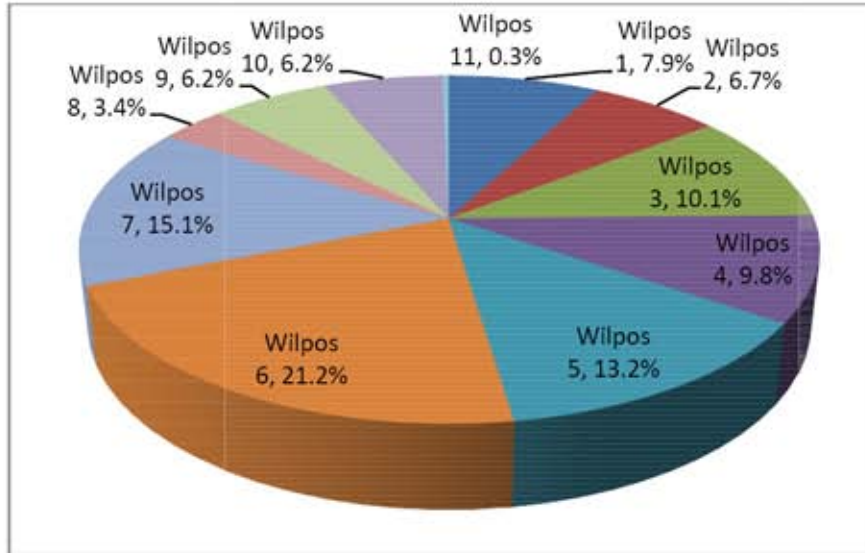


Untuk jenis pos keliling kota, jumlah terbesar berada di wilayah pos IV yang meliputi wilayah Jabodetabek dengan jumlah mencapai 108. Pada wilayah pos lainnya, jumlah pos keliling kota ini sangat kecil yaitu kurang dari 20 unit disetiap wilayah posnya. Hal ini dapat dipahami mengingat wilayah Pos IV merupakan daerah perkotaan, sementara wilayah pos lainnya masih lebih banyak daerah pedesaan sehingga konsentrasi penyediaan pos layanan bergerakanya lebih kepada pos keliling desa. Gambar 5.7 menunjukkan bahwa lokasi pelayanan pos bergerak masih banyak terkonsentrasi di pulau Jawa untuk semua jenis pelayanan pos bergerak. Untuk jenis pos keliling desa, keberadaan pelayanan pos bergerak terbanyak di wilayah pos VI, V dan VII. Sementara untuk pelayanan pos sarling paling banyak berada di wilayah pos IV, VII dan VI

Komposisi sebaran pos pelayanan bergerak menunjukkan proporsi pelayanan pos bergerak paling banyak terdapat di wilayah pos VI dengan proporsi mencapai 21,2% diikuti dengan wilayah pos VII dengan proporsi 15,1% dan wilayah pos V (13,2%). Proporsi keberadaan pelayanan pos bergerak di Pulau Jawa secara total proporsinya mencapai 59,2%, sementara di Sumatera proporsinya hanya mencapai 24,7%. Bahkan untuk kawasan timur Indonesia (wilayah pos XI), proporsi pelayanan pos bergerak proporsinya hanya 0,3%. Artinya

meskipun daerahnya sangat luas dan akses transportasi masih terbatas, namun keberadaan pelayanan pos bergerak untuk melayani penduduk di wilayah tersebut masih sangat kurang.

Gambar 5.8. Proporsi jumlah pelayanan pos bergerak antar Wilpos Tahun 2010



b. Cakupan dan Jangkauan Pelayanan Pos Bergerak

Cakupan pelayanan pos bergerak menunjukkan rasio jumlah penduduk terhadap jumlah pos pelayanan bergerak. Angka cakupan pos pelayanan bergerak ini menunjukkan jumlah penduduk yang dilayani oleh satu unit pos pelayanan bergerak. Fungsi dari pos pelayanan ini adalah untuk menjangkau pelayanan pos di daerah-daerah yang sulit menjangkau sarana kantor pos. Sehingga jumlah pelayanan pos bergerak diupayakan mampu melayani masyarakat secara efektif (cakupan pelayannya lebih kecil daripada sarana dalam bentuk kantor pos).

Kemampuan pelayanan dari sarana pelayanan pos bergerak yang digambarkan dengan cakupan pelayanan ini relatif hampir merata pada semua wilayah kecuali untuk wilayah pos 11. Cakupan pelayanan penduduk untuk setiap unit pelayanan pos bergerak di Wilayah Pos sampai 10 berkisar antara 47 ribu penduduk sampai 184 ribu penduduk. Cakupan pelayanan yang terkecil terdapat di Wilayah Pos IV yang meliputi wilayah Jabotabek. Cakupan pelayanan pos pelayanan bergerak yang kecil di wilayah pos IV ini disebabkan jumlah penduduknya yang tidak terlalu besar. Untuk wilayah pos V, meskipun penyediaan pos pelayanan bergerak yang dimiliki cukup banyak, namun beban pelayanan pos pelayanan bergerak-nya masih cukup besar. Satu unit pelayanan pos bergerak di wilayah pos V harus

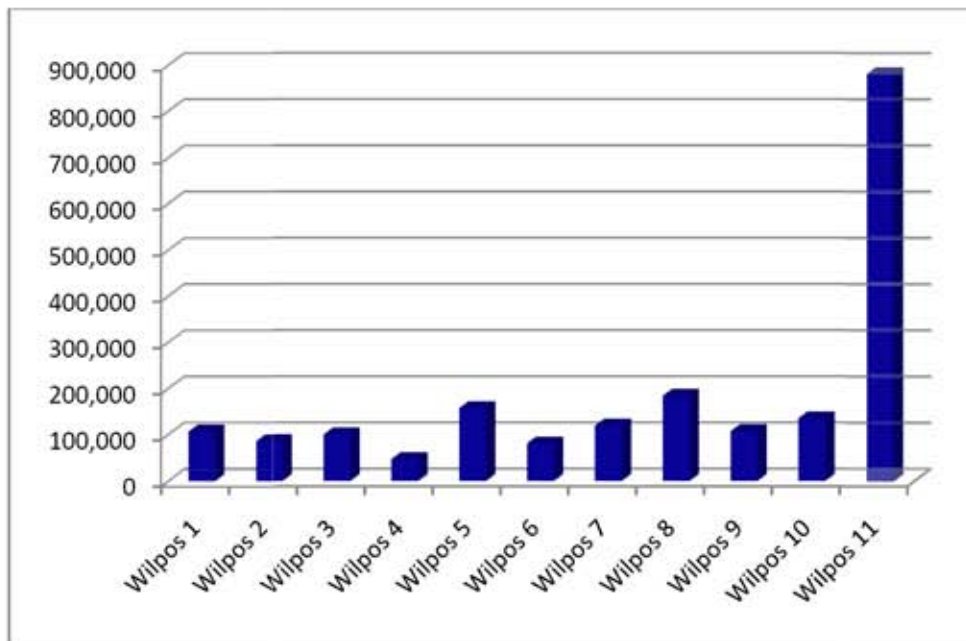
melayani hampir 200 ribu penduduk seperti ditunjukkan Tabel 5.6. dan Gambar 5.9 juga menunjukkan rendahnya penyediaan sarana pelayanan pos bergerak di wilayah pos XI dimana satu unit pelayanan pos bergerak harus melayani sekitar 880 ribu penduduk.

Tabel 5.6. Cakupan dan Jangkauan Pelayanan Pos Pelayanan bergerak Tahun 2010

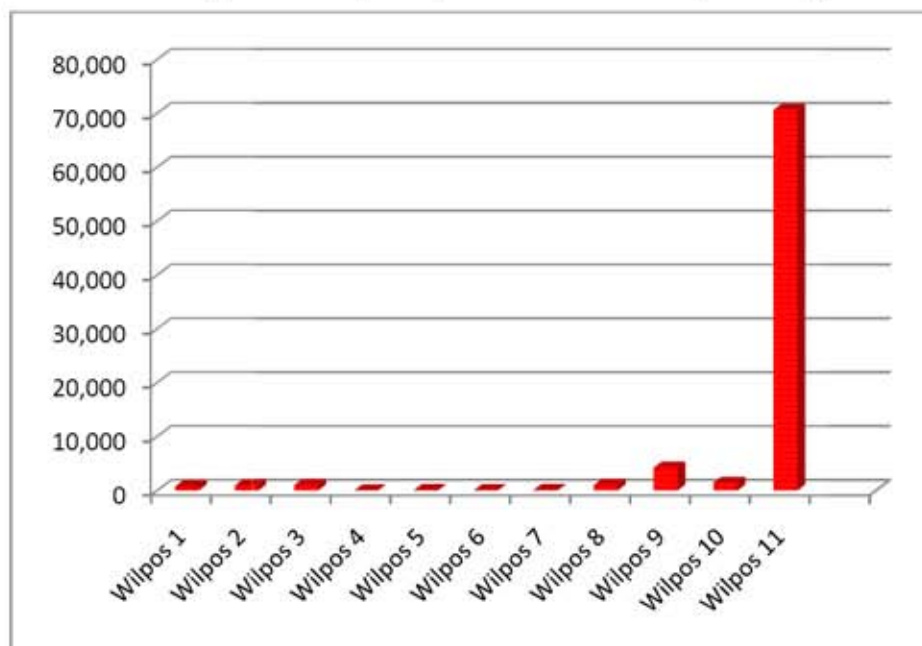
No.	Wilayah Pos	Cakupan penduduk per pos bergerak	Jangkauan luas pelayanan per pos bergerak (km ²)
1	I	107.218	803
2	II	86.175	980
3	III	100.428	1.012
4	IV	47.329	3
5	V	157.706	130
6	VI	81.455	82
7	VII	119.734	153
8	VIII	184.152	1.029
9	IX	107.717	4.251
10	X	135.717	1.473
11	XI	880.771	70.708

Jangkauan pelayanan pos pelayanan bergerak menggambarkan luas wilayah yang harus dilayani oleh satu unit pos pelayanan bergerak. Jangkauan pelayanan dari pelayanan pos bergerak di wilayah pos XI merupakan yang paling besar dan jauh lebih luas daripada wilayah pos lainnya seperti ditunjukkan pada gambar 5.10. Satu pelayanan pos bergerak di wilayah pos XI harus menjangkau areal pelayanan seluas lebih dari 70 ribu km². Sementara pada wilpos di pulau Jawa, hanya menjangkau pelayanan seluas kurang dari 155 km². Bahkan untuk wilpos IV (Jabodetabek), satu unit pelayanan pos bergerak hanya menjangkau pelayanan seluas 3 km² karena jumlah pelayanan pos bergeraknya yang relatif banyak dibanding luas areal pelayanannya. Pos pelayanan bergerak yang diharapkan dapat menjangkau penduduk yang sulit mengakses sarana kantor pos, ternyata jumlahnya masih sangat kurang untuk wilayah pos XI.

Gambar 5.9. Cakupan pelayanan penduduk pos pelayanan bergerak Tahun 2010



Gambar 5.10. Jangkauan Pelayanan per satu unit Pos Pelayanan Bergerak 2010



5.3.1.3. Pelayanan Pos Lainnya.

Salah satu bentuk pelayanan pos lainnya adalah dalam bentuk pelayanan pos lainnya yang bukan berbentuk kantor pos atau unit pelayanan pos khusus. Pelayanan pos lainnya ini meliputi pelayanan yang dilakukan melalui waralaba, rumah pos, agen pos, pos desa dan sebagainya untuk lebih mendekatkan pelayanan pos kepada penduduk. Terdapat 12 jenis

pelayanan pos lainnya yang disediakan dengan 11 jenis yang pelayanannya cukup aktif dan termanfaatkan.

a. Jumlah Pelayanan Pos Lainnya

Jumlah pelayanan pos lainnya pada tahun 2010 mengalami penurunan cukup tajam dibanding tahun sebelumnya, meskipun pada tahun-tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan. Penurunan jumlah pelayanan pos lainnya pada tahun 2010 mencapai 2,1% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan yang terjadi terutama untuk jenis rumah pos, pos desa dan kantor pos desa. Penurunan terbesar terjadi untuk pelayanan dalam bentuk rumah pos yang menurun sebesar 62,5% dibanding tahun sebelumnya. Sementara untuk jenis pelayanan pos lainnya, jumlahnya cenderung tetap dibanding tahun sebelumnya. Untuk rumah pos ini, penurunan juga baru terjadi pada tahun 2010 setelah pada tahun-tahun sebelumnya cenderung tetap.

Tabel 5.7. Perkembangan Pelayanan Pos Lainnya Tahun 2005- 2010

No	Pelayanan Pos Lainnya	Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Waralaba	7	7	7	23	23	23
2	Rumah Pos	368	368	368	368	368	138
3	Agenpos	1543	1543	1577	1573	1573	1573
4	Agenpos Desa	319	319	319	318	318	318
5	Agenpos Koperasi	428	428	428	427	427	427
6	Depo Bpm	5226	5226	5226	5220	5220	5220
7	Posserba	0	0	0	0	0	0
8	Pos Desa	2873	2827	2732	2723	2723	2649
9	Kantor Pos Desa	868	866	888	889	889	855
10	Warpos Kesra	1438	1438	1438	1426	1426	1426
11	Pos Sekolah	3291	3291	3291	3294	3294	3294
	Jumlah	16361	16313	16274	16261	16261	15923

Distribusi ketersediaan pelayanan pos lainnya menurut wilayah pos pada tahun 2010, seperti juga pada sarana pos lainnya menunjukkan penyediaan paling banyak masih terjadi di pulau Jawa. Tabel 5.8 menunjukkan jumlah pelayanan pos lainnya di wilpos di Pulau Jawa lebih dari 1500 unit di masing-masing wilayah pos. Bahkan untuk wilayah pos 6 dan wilayah pos 7 jumlahnya mencapai lebih dari 2000 unit. Distribusi pelayanan pos lainnya yang lebih

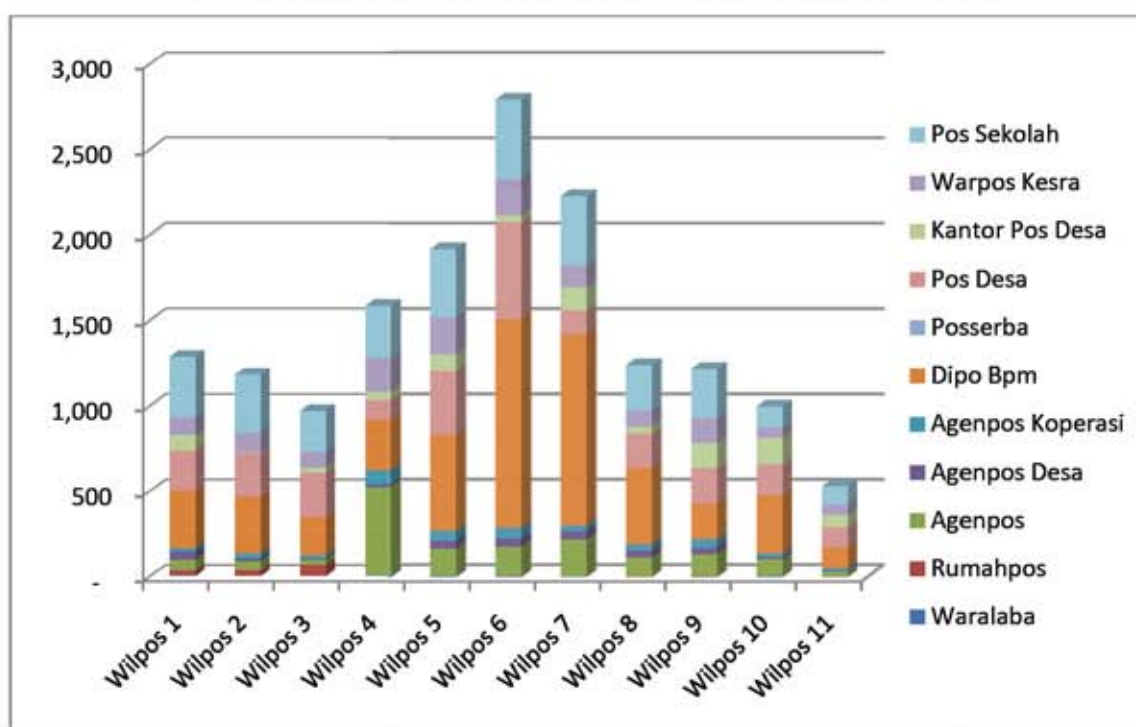
banyak di pulau Jawa terjadi hampir pada semua jenis pelayanan pos lainnya. Namun untuk jenis Kantor Pos Desa, meskipun di wilayah pos VII jumlahnya cukup banyak, proporsi untuk Kantor pos terbesar terdapat di wilayah pos IX dan wilayah pos X.

Tabel 5.8. Sebaran Jumlah Pelayanan Pos Lainnya menurut jenis dan Wilayah Pos Tahun 2010

No	Pelayanan Pos Lainnya	Wilayah Pos											Jumlah
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	Waralaba	5	1	-	6	3	3	1	-	1	3	-	23
2	Rumahpos	30	35	68	-	-	-	-	1	2	1	1	138
3	Agenpos	64	54	32	517	159	171	215	110	127	97	27	1.573
4	Agenpos Desa	46	17	7	15	45	47	49	40	37	12	3	318
5	Agenpos Koperasi	20	27	18	83	59	64	32	36	49	21	18	427
6	Depo Bpm	342	331	224	295	562	1.220	1.121	449	212	342	122	5.220
7	Posserba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pos Desa	232	255	259	117	375	568	140	199	207	180	117	2.649
9	Kantor Pos Desa	89	5	29	47	97	40	135	42	145	155	71	855
10	Warpos Kesra	101	118	91	200	218	213	127	93	147	59	59	1.426
11	Pos Sekolah	357	339	243	303	397	465	406	266	286	124	108	3.294
	Jumlah	1.286	1.182	971	1.583	1.915	2.791	2.226	1.236	1.213	994	526	15.923

Untuk jenis agen pos, jumlah agen pos di wilayah pos IV yang merupakan daerah perkotaan, menunjukkan jumlah yang jauh lebih besar daripada agen pos lainnya. Kebutuhan pelayanan pos yang sangat besar untuk mendukung kegiatan bisnis dan pemerintahan di wilayah pos IV yang merupakan pusat kegiatan ekonomi, bisnis dan pemerintahan, membuat peluang untuk pendirian agen pos ini melalui kerjasama dengan PT. Pos juga cukup besar. Faktor inilah yang menjadikan jumlah agen pos di wilayah pos IV ini jauh lebih besar daripada wilayah pos lainnya. Sementara untuk jenis rumah pos justru hanya tersedia di luar Jawa dan tidak ada di Pulau Jawa. Kondisi ini disebabkan pelayanan pos melalui rumah pos di pulau Jawa sudah dilayani oleh sarana pelayanan pos dalam bentuk lain yang banyak tersedia di Jawa dibandingkan di daerah lain. Sedangkan untuk jenis pos sekolah, tersebar hampir merata di semua wilayah pos karena penyelenggaraanya yang bekerjasama dengan sekolah yang keberadaannya juga relatif merata di seluruh daerah di Indonesia.

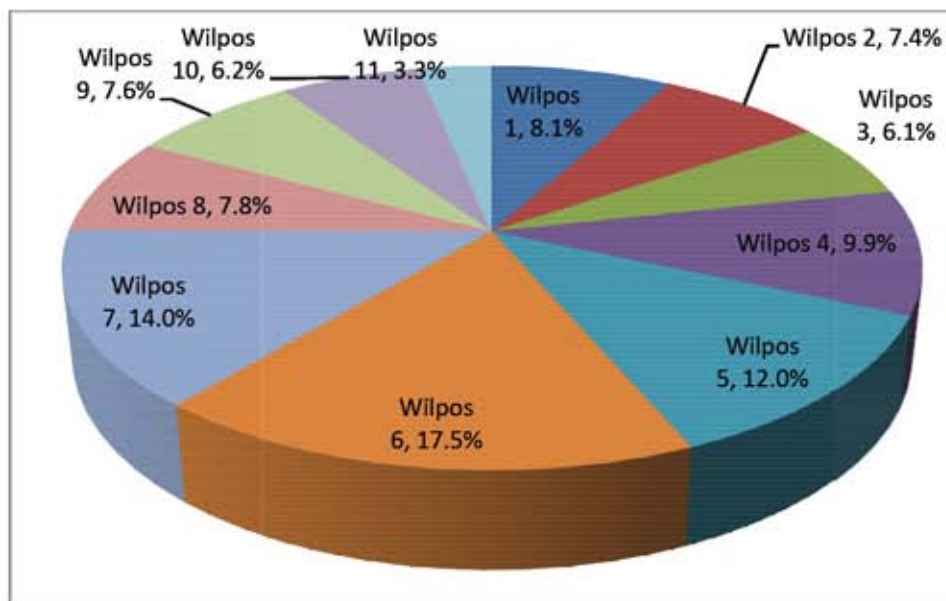
Gambar 5.11. Jumlah pelayanan pos lainnya antar Wilpos Tahun 2010



Distribusi pos pelayanan lainnya menurut wilayah pos seperti ditunjukkan pada gambar 5.12 menunjukkan bahwa untuk pelayanan pos lainnya juga masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Sekitar 53,5% pos pelayanan lainnya berada di Pulau Jawa, sementara di Sumatera proporsinya hanya mencapai 21,6%. Bahkan untuk wilayah pos XI yang memiliki wilayah yang luas dan tersebar, proporsi keberadaan pelayanan pos lainnya hanya 3,3% dari total pelayanan pos lainnya yang ada. Proporsinya penyediaan pelayanan pos lainnya yang masih lebih banyak terdapat di Pulau Jawa menunjukkan bahwa penyediaan sarana pelayanan pos lainnya masih lebih mempertimbangkan potensi pasar yang tercermin dari jumlah penduduk dan tingkat kemajuan dan dinamika sosial-ekonomi daerah.

Penyediaan sarana pelayanan pos lainnya masih lebih mempertimbangkan potensi pasar yang tercermin dari jumlah penduduk dan tingkat kemajuan dan dinamika sosial-ekonomi daerah.

Gambar 5.12. Proporsi pelayanan pos lainnya antar Wilpos Tahun 2010



Keberadaan pelayanan pos lainnya yang menonjol di Jawa terutama untuk jenis Dipo BPM mengingat jumlah penduduk di Jawa yang lebih banyak dan mendukung untuk penyelenggaraan Dipo BPM yang melibatkan kerjasama dengan unsur masyarakat. Di luar Jawa, keberadaan pelayanan pos lainnya yang cukup menonjol hanya di wilpos I (Sumatera bagian utara), wilpos VIII (Bali, Nusa tenggara) dan wilpos IX (Kalimantan). Bahkan keberadaan pelayanan pos lainnya di wilpos XI yang memiliki wilayah yang sangat luas dan tersebar justru paling sedikit. Hal ini diduga karena ketersediaan sarana pendukung yang masih kurang dan jarak antar penduduk yang jauh untuk mendukung penyediaan pelayanan pos lainnya.

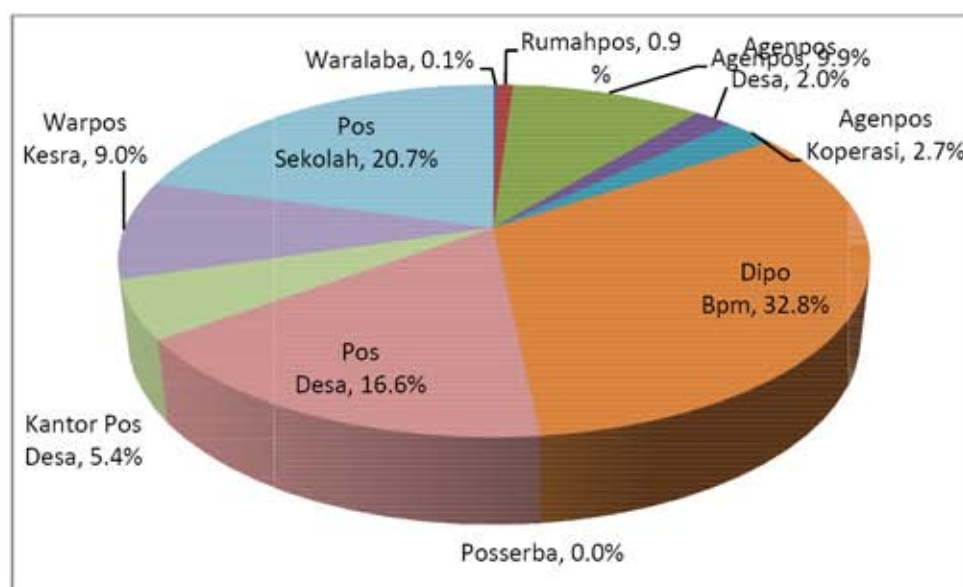
Persebaran pelayanan pos lainnya yang dominan di Jawa pada tahun 2010 ini juga terlihat dari distribusinya menurut pulau. Jumlah total pelayanan pos lainnya di pulau Jawa mencapai lebih dari 8000 unit, sementara di Sumatera mencapai hampir 3500 unit. Sedangkan di Sulawesi dan Maluku-Papua, jumlah total pelayanan pos yang tersedia hanya kurang dari 1000 unit. Untuk beberapa jenis pelayanan pos lainnya, tidak tersedia pelayanannya di wilayah Bali-Nusa Tenggara dan Maluku Irian yaitu untuk jenis Waralaba dan rumah pos.

Tabel 5.9. Sebaran Pelayanan Pos Lainnya menurut Jenis dan Pulau 2010

No	Pelayanan Pos Lainnya	Wilayah kepulauan						Jumlah
		Suma- tera	Jawa	Bali, NTB, NTT	Kaliman- tan	Sula- wesi	Maluku, Irian	
1	Waralaba	6	13	-	1	3	-	23
2	Rumahpos	133	-	1	2	1	1	138
3	Agenpos	150	1.062	110	127	97	27	1573
4	Agenpos Desa	70	156	40	37	12	3	318
5	Agenpos Koperasi	65	238	36	49	21	18	427
6	Depo Bpm	897	3.198	449	212	342	122	5220
7	Posserba	-	-	-	-	-	-	0
8	Pos Desa	746	1.200	199	207	180	117	2649
9	Kantor Pos Desa	123	319	42	145	155	71	855
10	Warpos Kesra	310	758	93	147	59	59	1426
11	Pos Sekolah	939	1.571	266	286	124	108	3294
	Jumlah	3.439	8.515	1.236	1.213	994	526	15923

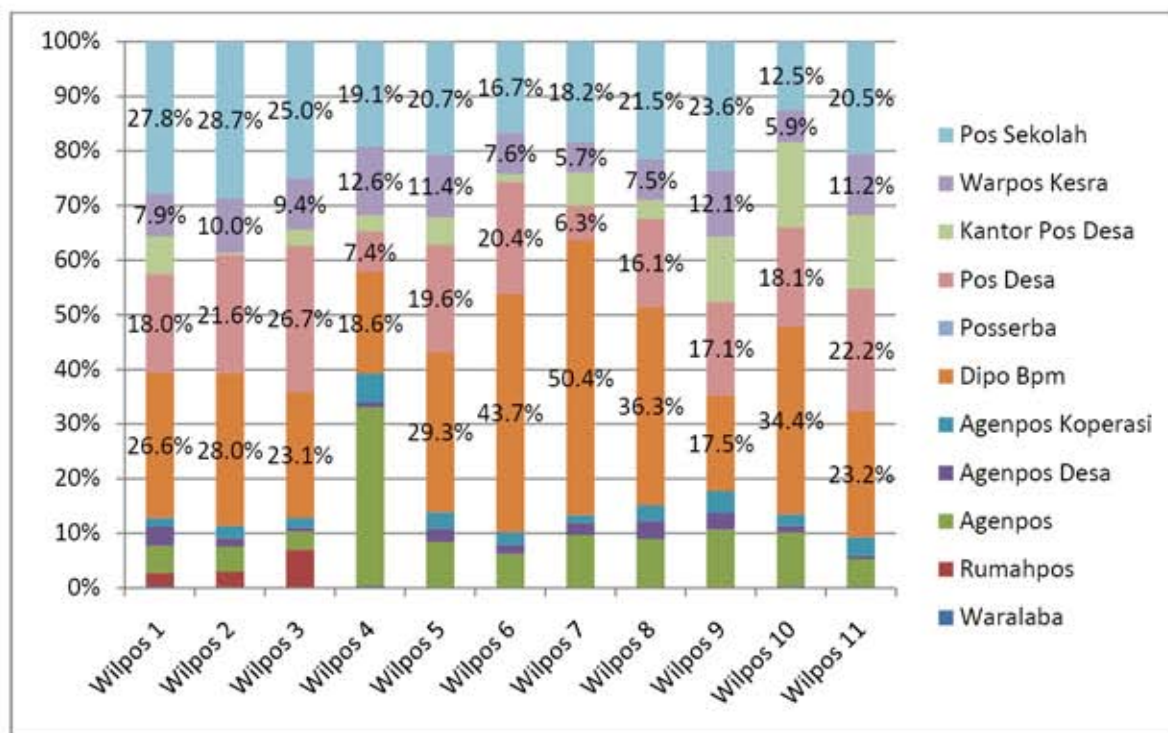
Distribusi pelayanan pos lainnya menurut jenis pelayanan seperti diperlihatkan gambar 5.13 dan 5.14 menunjukkan bahwa proporsi terbesar penyediaan pelayanan pos lainnya adalah untuk jenis Dipo BPM, diikuti pos sekolah dan pos desa. Proporsi Dipo Bpm mencapai 32% dari total pelayanan pos lainnya sementara untuk pos sekolah dan pos desa masing-masing mencapai 20,7% dan 16,6%. Besarnya proporsi Dipo Bpm sebagai salah satu jenis pelayanan pos lainnya karena sifat penyelenggaraan pelayanannya yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain sehingga memungkinkan penyediaanya pelayanan yang lebih banyak.

Gambar 5.13. Proporsi pelayanan pos lainnya menurut jenis 2010



Penyelenggaraan pelayanan Dipo BPM juga menjadi ajang wirausaha bagi masyarakat yang ingin terlibat dalam usaha penyediaan jasa pelayanan pos bagi konsumen pengguna layanan pos. Proporsi penyediaan Dipo BPM cukup besar hampir pada semua wilayah pos terutama untuk wilayah pos di pulau Jawa. Namun khusus untuk wilayah pos IV yang merupakan daerah perkotaan, proporsi pelayanan pos lainnya yang terbesar adalah untuk jenis agen pos. Sementara untuk wilayah pos di luar Jawa khususnya di kawasan timur Indonesia, proporsi pelayanan pos lainnya yang cukup signifikan adalah untuk jenis pos desa. Di wilayah pos XI yang meliputi Maluku dan Papua, proporsi penyediaan kantor pos desa bahkan hampir sama dengan Dipo BPM. Penyediaan sarana pelayanan pos yang proporsinya sangat rendah adalah untuk jenis waralaba, rumah pos dan agen pos desa. Kondisi ini terjadi jumlah pelayanan pos jenis tersebut yang memang juga tidak banyak karena pelayanannya yang sudah banyak dilakukan oleh bentuk sarana pos lain untuk menjangkau penduduk.

Gambar 5.14. Proporsi pelayanan pos lainnya menurut jenis dan Wilayah Pos 2010



b. Cakupan dan Jangkauan Pelayanan Pos Lainnya

Penyediaan sarana pelayanan pos lainnya untuk mendukung peningkatan pelayanan pos kepada masyarakat, relatif cukup efektif dalam menjangkau pelayanan kepada masyarakat.

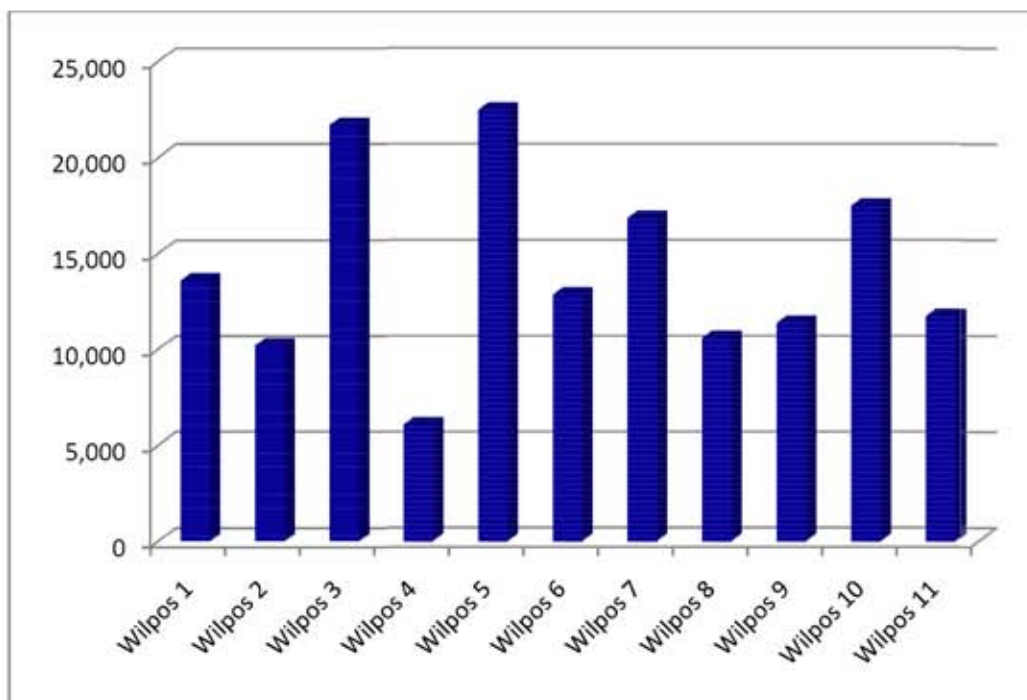
Hal ini ditunjukkan dengan cakupan pelayanan penduduk dan jangkauan pelayanan wilayah yang lebih kecil dibandingkan sarana pos lainnya. Artinya, dengan ketersediaan unit pelayanan yang banyak dan tersebar, beban kepadatan pelayanan dari pelayanan pos lainnya tidak besar. Demikian pula dengan jangkauan pelayanannya dimana pelayanan pos lainnya dimana satu pelayanan pos lainnya tidak perlu menjangkau wilayah yang terlalu luas.

Rasio antara jumlah penduduk dengan ketersediaan sarana pelayanan pos lainnya yang menunjukkan cakupan pelayanan menunjukkan nilai yang relatif kecil yaitu kurang dari 30 ribu. Bahkan untuk wilayah IV, cakupan layanan penduduknya menunjukkan satu unit pelayanan pos lainnya hanya melayani kurang dari 6000 penduduk. Beban cakupan pelayanan penduduk untuk pelayanan pos lainnya juga relatif tidak berbeda jauh antar wilayah pos. Tidak ada wilayah pos yang beban cakupan pelayanannya sangat besar dibanding wilayah pos lainnya. Untuk wilayah pos di pulau Jawa seperti wilayah pos V, VI atau VII yang memiliki jumlah penduduk besar, cakupan pelayannya kurang dari 23 ribu orang. Bahkan untuk wilayah pos V, beban cakupan pelayanan pos lainnya yang ada di wilayah tersebut hanya sekitar 1 ribu orang.

Tabel 5.10. Cakupan dan Jangkauan Pelayanan Pos Lainnya menurut Wilayah Pos 2010

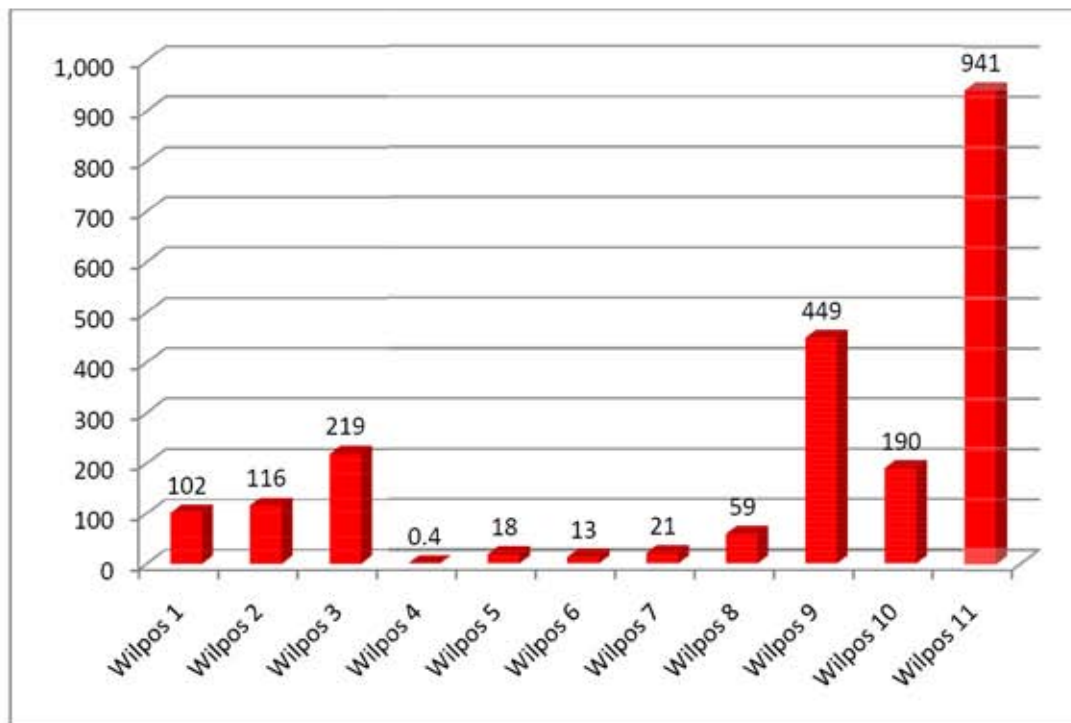
No.	Wilayah Pos	Cakupan penduduk per pos pelayanan lainnya	Jangkauan luas pelayanan per pos pelayanan lainnya (km ²)
1	I	13.590	102
2	II	10.207	116
3	III	21.720	219
4	IV	6.069	0,4
5	V	22.482	18
6	VI	12.841	13
7	VII	16.836	21
8	VIII	10.578	59
9	IX	11.367	449
10	X	17.477	190
11	XI	11.721	941

Gambar 5.15. Cakupan pelayanan pos lainnya menurut Wilayah Pos 2010



Untuk jangkauan luas pelayanannya yang diukur dari rasio luas wilayah dengan jumlah pelayanan pos lainnya, daerah-daerah di Kalimantan dan kawasan timur Indonesia masih menunjukkan jangkauan pelayanan yang besar. Jangkauan pelayanan paling luas terdapat di wilpos XI (Maluku dan Papua) dimana setiap unit pelayanan pos lainnya melayani wilayah seluas 941 km². Jangkauan wilayah pelayanan terluas kedua adalah di wilpos IX (Kalimantan) yang harus melayani wilayah seluas 449 km². Sementara untuk daerah-daerah di Jawa, jumlah unit pelayanan pos lainnya yang cukup banyak dan tersebar menjadikan jangkauan pelayanan untuk pelayanan pos lainnya ini tidak terlalu besar. Jangkauan pelayanan pos lainnya di pulau Jawa tidak ada yang lebih dari 20 km². Bahkan untuk wilayah pos IV yang mencakup wilayah Jabotabek, jangkauan pelayanannya hanya 0,4 km². Artinya setiap unit pelayanan pos lainnya hanya melayani wilayah seluas 0,4 km². Sementara untuk wilayah pos lainnya di pulau Jawa, jangkauan pelayanannya berkisar antara 31 km² sampai 21 km². Namun untuk wilayah pos di Sumatera dan Sulawesi, jangkauan pelayanannya masih cukup luas yaitu lebih dari 100 km². Bahkan di wilayah pos III yang mencakup Sumatera bagian Selatan, jangkauan pelayanan pos lainnya masih sekitar 219 km². Artinya satu unit pelayanan pos lainnya masih harus menjangkau layanan seluas 219 km².

Gambar 5.16. Jangkauan pelayanan pos lainnya menurut Wilayah Pos 2010



5.3.1.4. Fasilitas Pelayanan Pos Lainnya

Fasilitas pelayanan pos lainnya adalah fasilitas yang disediakan oleh PT. Pos untuk mendukung pelayanan perposan kepada masyarakat. Berbeda dengan sarana kantor pos, pelayanan pos bergerak dan pelayanan pos lainnya, fasilitas pelayanan ini lebih bersifat pasif dalam bentuk penyediaan fasilitas di tempat tertentu untuk dimanfaatkan penduduk. Bentuk dari fasilitas ini adalah kotak pos yang bisa disewa oleh individu atau badan hukum/usaha, tromol pos, bis surat dan peti pos, namun sangat membantu dalam pelayanan pos bagi penduduk.

Meskipun penyediaannya cukup efektif dalam menjangkau masyarakat dan bisanya melekat dengan sarana pos lainnya, namun dalam lima tahun terakhir tidak ada penambahan dari fasilitas pelayanan pos yang disediakan seperti terlihat pada tabel 5.11. Jumlah fasilitas pelayanan pos lainnya sama dengan tahun 2010 tidak ada penambahan maupun pengurangan dari tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini diduga terjadi karena pemanfaatan

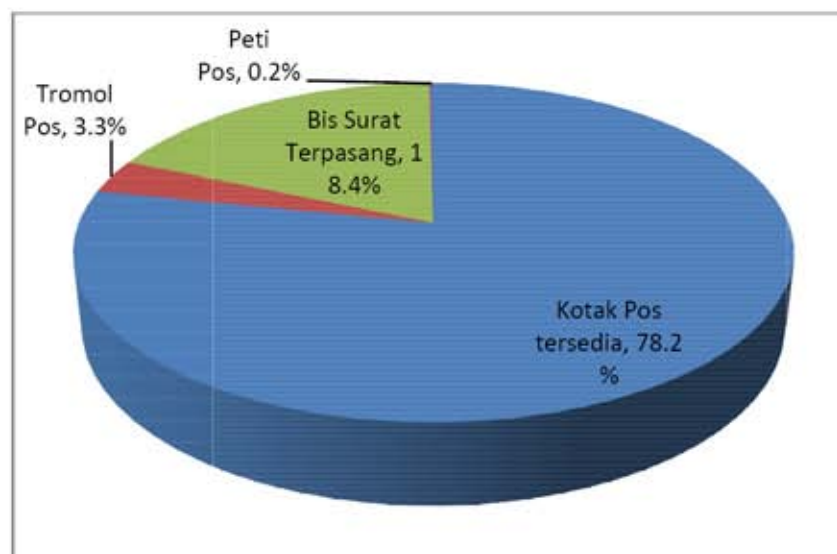
dari fasilitas pelayanan pos lainnya yang rendah atau karena sifat penyediaannya yang pasif sehingga tidak terlalu merespon kebutuhan.

Tabel 5.11. Perkembangan Jumlah Fasilitas Pelayanan Pos Lainnya 2005-2010

	Fasilitas Pos	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Kotak Pos tersedia	77.768	77.768	77.768	77.768	77.768	77.768
2	Kotak Pos Disewa	50.560	50.560	50.560	50.560	50.560	50.560
3	Tromol Pos	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
4	Bis Surat Terpasang	18.260	18.260	18.260	18.260	18.260	18.260
5	Peti Pos	199	199	199	199	199	199
	Jumlah	99.497	99.497	99.497	99.497	99.497	99.497

Dari sisi komposisi jenis fasilitas pelayanan lainnya yang disediakan, paling banyak adalah untuk layanan jenis kotak pos. Proporsi fasilitas layanan dalam bentuk kotak pos mencapai 78,2%. Sementara fasilitas pelayanan pos lainnya yang proporsinya terbesar kedua yaitu bis surat terpasang proporsinya hanya 18,4%. Bahkan untuk tromol pos yang banyak digunakan oleh instansi pemerintah, proporsinya hanya 3,3%. Besarnya proporsi kotak pos karena penyediaannya yang relatif mudah dan dalam satu kantor pos bisa tersedia beberapa kotak pos. Selain itu, fasilitas kotak pos ini juga banyak digunakan oleh perusahaan maupun instansi untuk komunikasi persuratan yang ditujukan ke perusahaan/instansi tersebut.

Gambar 5.17. Proporsi fasilitas pelayanan pos lainnya menurut jenis 2010



Persebarannya pada masing-masing wilayah pos menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas pelayanan pos lainnya juga masih terkonsentrasi di pulau Jawa khususnya di perkotaan. Tabel 5.12 yang memperlihatkan untuk jenis kotak pos, keberadaannya di wilayah pos IV yang meliputi wilayah Jabodetabek jumlahnya jauh lebih banyak dibanding daerah lainnya, meskipun luas geografis wilayah pos IV ini paling kecil dibanding wilayah pos lainnya. Fasilitas pos lainnya dalam bentuk peti pos, terbanyak juga berada di wilayah pos IV. Untuk jenis bis surat terpasang, penyediaannya di wilayah pos IV juga cukup banyak meskipun lebih sedikit daripada di wilayah pos VI dan wilayah pos VII. Jumlah kotak pos tersedia yang sangat besar di wilayah pos IV ini terkait dengan pemanfaatannya yang lebih banyak oleh perusahaan dan instansi yang juga banyak terkonsentrasi di wilayah pos IV ini.

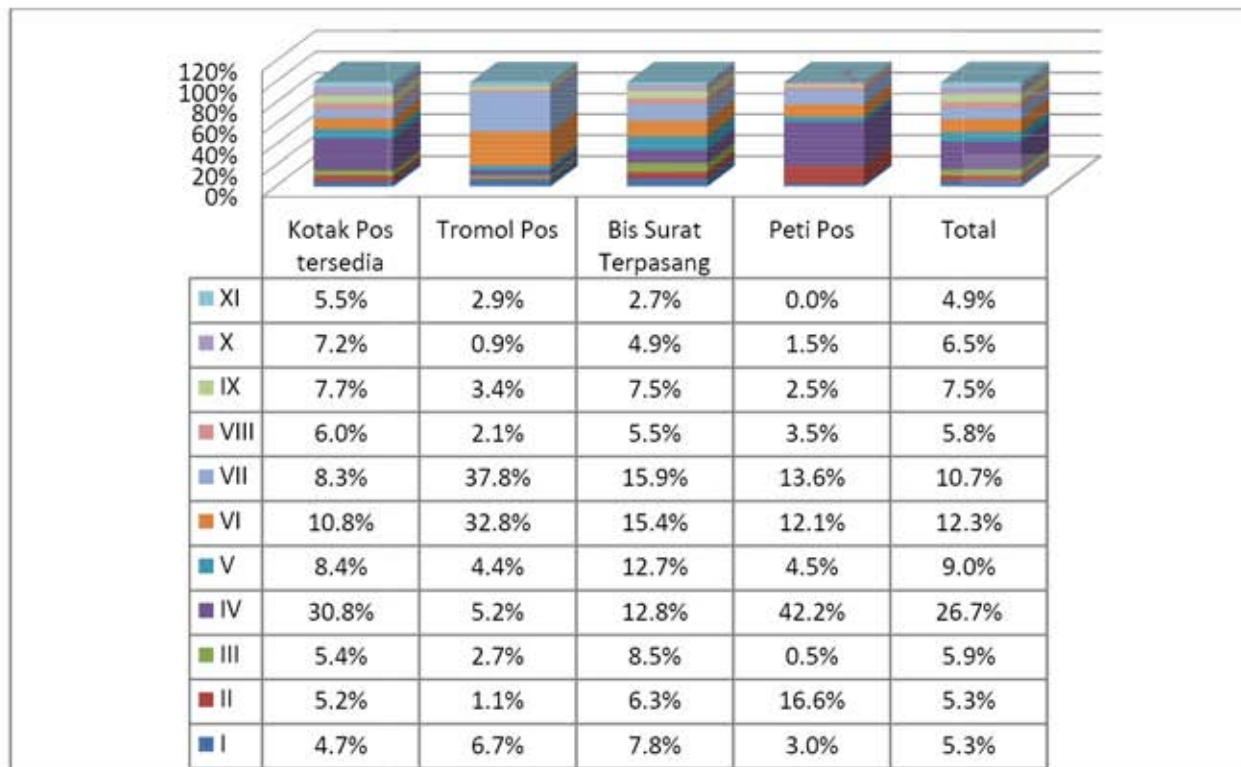
Tabel 5.12. Sebaran Jumlah Fasilitas Pelayanan Pos Lainnya menurut Wilayah Pos 2010

No	Pelayanan Pos Lainnya	Wilayah Pos											Jumlah
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	Kotak Pos tersedia	3.658	4.058	4.181	23.971	6.514	8.365	6.486	4.661	6.009	5.578	4.287	77.768
2	Kotak Pos Disewa	2.090	1.570	1.693	18.465	4.613	5.879	4.438	3.704	2.766	2.321	3.021	50.560
3	Tromol Pos	218	35	89	169	143	1.073	1.237	69	112	30	95	3.270
4	Bis Surat Terpasang	1.419	1.154	1.550	2.338	2.321	2.812	2.898	1.004	1.366	901	497	18.260
5	Peti Pos	6	33	1	84	9	24	27	7	5	3	-	199
	Jumlah *	5.301	5.280	5.821	26.562	8.987	12.274	10.648	5.741	7.492	6.512	4.879	99.497

*) tidak termasuk Kotak Pos Disewa

Besarnya proporsi penyediaan jenis-jenis fasilitas pelayanan pos lainnya di wilayah pos IV dan wilayah pos di Jawa lainnya terlihat pada gambar 5.18. Proporsi kotak pos tersedia di wilayah pos IV mencapai 30,8% dan untuk jenis peti pos proporsinya mencapai 42,2%. Sementara untuk jenis tromol pos, jumlah terbesar berada di wilayah pos VII (Jawa Timur) dan wilayah pos VI (Jawa Tengah dan DIY) dengan proporsi mencapai 37,8% dan 32,8%. Sedangkan di wilayah pos IV proporsinya hanya 5,2% untuk jenis bis surat terpasang, wilayah di pulau Jawa juga menjadi konsentrasi lokasi keberadaan bis surat terpasang yang tersebar hampir merata di empat wilayah pos yang ada. Untuk semua jenis fasilitas pelayanan pos lainnya, jumlah terbesar juga berada di wilayah pos IV dengan proporsi mencapai 26,7%. Jumlah terbesar berikutnya berada di wilayah pos VI dan VII dengan proporsi masing-masing 12,3% dan 10,7%.

Gambar 5.18. Sebaran fasilitas pelayanan pos lainnya menurut jenis Tahun 2010



Jika dilihat distribusinya menurut pulau besar, tabel 5.13 menunjukkan bahwa untuk semua jenis fasilitas pelayanan pos lainnya, keberadaannya masih terkonsentrasi di pulau Jawa. Distribusi jumlah total fasilitas pos lainnya menurut pulau menunjukkan persebaran yang sama dengan distribusi kotak pos tersedia. Jumlah fasilitas pelayanan pos lainnya yang berada di wilayah Jawa proporsinya mencapai 58,8% dari total fasilitas pelayanan pos yang ada. Sementara di Sumatera proporsi jumlah fasilitas pelayanan pos lainnya mencapai 16,5% , sedangkan di Maluku dan Papua hanya 4,9%. Untuk jenis bis surat terpasang, proporsi keberadaannya di Jawa mencapai 80,2%.

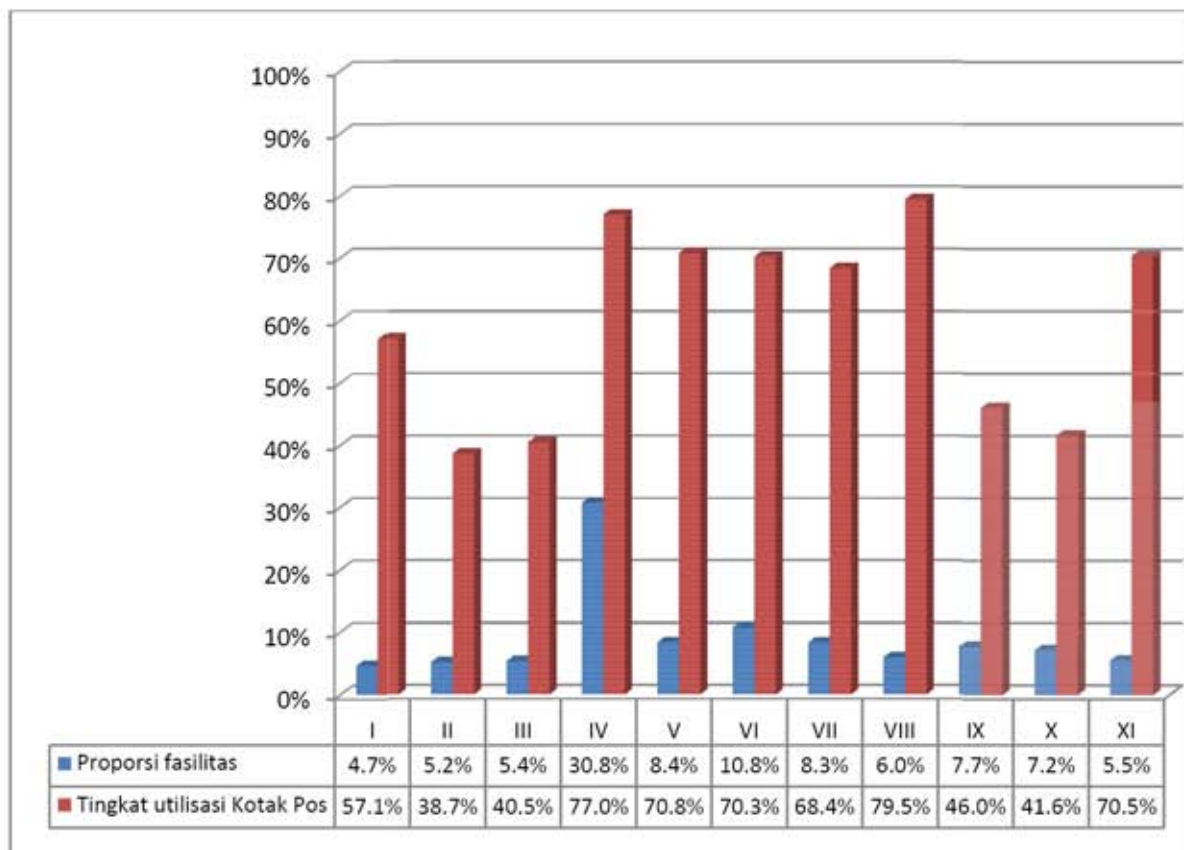
Tabel 5.13. Sebaran Jumlah Fasilitas Pelayanan Pos Lainnya menurut Pulau 2010

No	Fasilitas Pelayanan Pos Lainnya	Wilayah kepulauan						Jumlah
		Suma- tera	Jawa	Bali, NTB, NTT	Kaliman- tan	Sula- wesi	Maluku, Papua	
1	Kotak Pos tersedia	11.897	45.336	4.661	6.009	5.578	4.287	77.768
2	Kotak Pos Disewa	5.353	33.395	3.704	2.766	2.321	3.021	50.560
3	Tromol Pos	342	2.622	69	112	30	95	3.270
4	Bis Surat Terpasang	4.123	10.369	1.004	1.366	901	497	18.260
5	Peti Pos	40	144	7	5	3	-	199
	Jumlah *	16.402	58.471	5.741	7.492	6.512	4.879	99.497

*) tidak termasuk Kotak Pos Disewa

Khusus untuk fasilitas pelayanan pos lainnya dalam bentuk kotak surat, meskipun proporsi keberadaannya paling banyak terdapat di wilayah pos IV, tingkat utilisasi kotak pos (persentasi kotak pos yang disewa dibandingkan dengan kotak pos yang tersedia), paling tinggi juga justru berada di wilayah pos VIII (Bali-Nusa Tenggara), baru kemudian di wilayah pos IV. Tingkat pemanfaatan kota pos di wilayah pos VIII mencapai 79,5%, sementara di wilayah pos IV mencapai 77%.. Tingkat pemanfaatan kotak pos pada wilayah pos di pulau Jawa juga menunjukkan angka yang relatif tinggi. Sementara tingkat pemanfaatan kotak pos pada wilayah pos di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi justru menunjukkan angka yang relatif rendah. Hal yang menarik adalah bahwa tingkat pemanfaatan kotak pos di wilayah pos XI yang berada di kawasan timur indonesia justru cukup tinggi. Hal ini disebabkan juga karena jumlah kotak pos di wilayah pos ini juga relatif sedikit.

Gambar 5.19. Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Pos Lainnya menurut Wilpos 2010



5.3.2. Jangkauan Pelayanan Pos.

Analisis jangkauan pelayanan pos ini dilakukan untuk melihat tingkat jangkauan pelayanan pos dalam melayani penduduk melalui sarana pos yang tersedia di masing-masing tingkatan



melalui sarana fisik pos yang dimiliki berupa kantor pos, pelayanan pos bergerak dan pelayanan pos lainnya. Jangkauan pelayanan ini secara khusus menggambarkan tingkat jangkauan pada daerah bukan pusat pemerintahan kabupaten/kota atau pelayanan terhadap penduduk yang jauh dari pusat kota. Jangkauan pelayanan pos yang dilakukan oleh PT. Pos dapat dibagi menjadi tiga yaitu jangkauan pelayanan pos di Kecamatan, Jangkauan pelayanan pos di lokasi transmigrasi dan jangkauan pelayanan pos di Kelurahan/Desa.

a. Pelayanan Di Kecamatan

Upaya menjangkau pelayanan perposan kepada masyarakat di tingkat kecamatan dilakukan melalui Kantor Pos, Kantor Pos Cabang (Kabupaten, Dalam Kota, Luar Kota), Kantor Pos Desa dan Kantor Pos Keliling. Sejak tahun 2004, seluruh kecamatan yang ada di Indonesia telah terlayani oleh sarana kantor pos maupun pelayanan pos lainnya dan pelayanan pos bergerak. Jumlah kecamatan yang semakin banyak akibat sebagai dampak berlangsungnya pemekaran daerah telah dapat diikuti dengan peningkatan sarana pos yang ada untuk dapat melayani seluruh wilayah kecamatan.

Tabel 5.14 menunjukkan meskipun jumlah kecamatan meningkat, namun pelayanan oleh kantor pos juga meningkat khususnya melalui kantor pos cabang. Peningkatan pelayanan paling banyak dilakukan oleh Kantor Pos Cabang (kabupaten) yang pada tahun 2009 meningkat sampai 121,9% . Meskipun pada tahun 2010 pelayanan oleh kantor pos cabang dalam kota hanya meningkat 0,3%,namun karena jangkauan pelayanan oleh berbagai sarana pos yang ada telah cukup luas, seluruh kecamatan relatif sudah terjangkau pelayanan pos. Sehingga meskipun jumlah kecamatan meningkat dan pelayanan oleh kantor pos cabang (luar kota) dan kantor pos desa menurun, semua kecamatan tetap dapat terlayani.

Peningkatan pelayanan oleh kantor pos cabang (kabupaten) sedikit menggeser komposisi pelayanan oleh perangkat pos yang ada meskipun pelayanan di kecamatan paling banyak masih tetap dijangkau oleh kantor pos cabang luar. Sampai tahun 2010,pelayanan yang dijangkau oleh kantor pos cabang luar kota mencapai 55,7%. Proporsi ini menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 59,5%. Sementara pelayanan oleh kantor pos cabang (kabupaten) proporsinya meningkat dari 2,3% pda tahun 2005 menjadi 5% ada tahun 2010.

Pelayanan terbanyak kedua di kecamatan dijangkau oleh kantor pos desa yang pada tahun 2010 proporsinya mencapai 21,4%

Tabel 5.14. Perkembangan Jangkauan pelayanan Pos di Kecamatan 2005- 2010

No	Jangkauan Pelayanan	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah Kecamatan	3.790	3.791	3.823	3.896	3900	3.931
2	Dilayani Kp- I-VI (Kprk)	206	206	206	206	206	206
3	Dilayani Kp-VI-X Cab/Kab	88	88	88	88	195	196
4	Dilayani Kp-VI-X Cab/DK	289	285	286	292	292	299
5	Dilayani Kp-VI-X Cab/Lk	2.256	2.233	2.228	2.238	2136	2.191
6	Dilayani Kantor Pos Desa	853	852	873	875	874	843
7	Dilayani Pos Keliling Kota/Desa	98	127	142	197	197	196
8	Jumlah Kec. Dilayani	3.790	3.791	3.823	3.896	3900	3.931
9	Jumlah Kec. Belum Dilayani	0	0	0	0	0	0

Sebaran jangkauan pelayanan pos menurut wilayah pos juga menunjukkan bahwa jumlah kecamatan yang lebih banyak di pulau Jawa diikuti dengan pelayanan yang juga lebih banyak tersedia di pulau Jawa. Tabel 5.15 yang menunjukkan jangkauan pelayanan pos menurut wilayah pos menunjukkan bahwa pada semua wilayah pos, pelayanan untuk menjangkau wilayah kecamatan paling banyak dilakukan oleh kantor pos cabang (Luar Kota), diikuti dengan pelayanan oleh kantor pos desa. Namun untuk wilayah pos IV, pelayanan paling banyak berikutnya adalah oleh kantor pos cabang (dalam kota). Dari sebaran jangkauan pelayanan ini dapat dijelaskan mengapa ketersediaan perangkat pos dalam bentuk kantor pos maupun pelayanan pos lainnya lebih banyak terdapat di Jawa.

Tabel 5.15. Jangkauan Pelayanan Pos di Kecamatan di Wilayah Usaha Pos 2010

No	Jangkauan Pelayanan di Kecamatan	Wilayah Pos											JUM-LAH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	Jumlah Kecamatan	388	186	270	210	394	614	602	219	403	470	175	3.931
2	Dilayani Kp- I-VI (Kprk)	19	15	16	19	18	33	30	14	19	13	10	206
3	Dilayani Kp-VI-X Cab/Kab	21	17	33	-	1	6	3	17	33	42	23	196
4	Dilayani Kp-VI-X Cab/DK	20	26	24	62	36	52	34	9	11	22	3	299
5	Dilayani Kp-VI-X Cab/Lk	214	211	153	79	229	470	378	132	192	179	54	2.191
6	Dilayani Kantor Pos Desa	87	5	26	45	97	39	137	39	143	154	71	843
7	Dilayani Pos Keliling Kota/Desa	27	12	18	5	13	14	20	8	5	60	14	196
8	Jumlah Kec. Dilayani	388	186	270	210	394	614	602	219	403	470	175	3.931
9	Jumlah Kec. Belum Dilayani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dari jangkauan pelayanan pos oleh sarana pos yang ada dapat dijelaskan bahwa penyediaan sarana dan alat pos dalam bentuk kantor pos lebih mengikuti sebaran jumlah pemerintahan administratif (kabupaten, kecamatan, kelurahan/ desa)

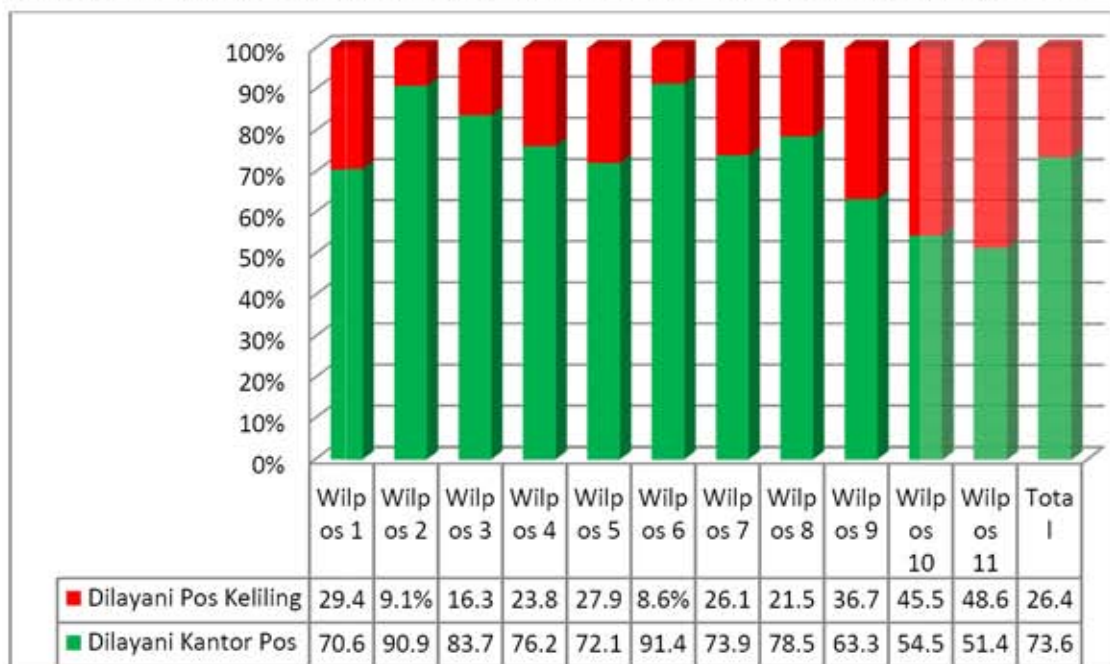
Gambar 5.20. Komposisi Jangkauan Pelayanan Pos di Kecamatan menurut Wilpos 2010



Dari gambar 5.29 terlihat bahwa pelayanan untuk menjangkau kecamatan yang dilakukan oleh kantor pos cabang (luar kota)/KPC-LK secara total proporsinya mencapai 55,7% dari total pelayanan. Pelayanan oleh KPC-LK yang paling besar proporsinya terjadi wilayah pos VI dan wilayah pos VII yaitu masing-masing sebesar 76,5% dan 62,8%. Sementara untuk luar Jawa, proporsi terbesar pelayanan oleh KPC-LK terdapat di wilpos VIII (Bali-Nusa Tenggara). Namun di kawasan timur Indonesia , pelayanan di kecamatan justru lebih banyak dilakukan oleh Kantor Pos Desa dengan proporsi mencapai 40,6%. Sementara pelayanan oleh KPC-LK di wilayah ini hanya sebanyak 30,9%. Hal ini disebabkan ketersediaan kantor pos di wilayah ini yang relatif lebih sedikit akibat wilayah administratif-nya yang juga tidak banyak sehingga lebih banyak dijangkau oleh kantor pos desa.

Perbandingan jangkauan pelayanan pos di kecamatan antara yang dilakukan oleh kantor pos dengan kantor pos keliling, pelayanan yang dilakukan oleh kantor pos masih lebih dominan dalam menjangkau wilayah kecamatan. Gambar 5.21 menunjukkan secara total proporsi pelayanan oleh kantor pos mencapai 73,6%. Hal ini disebabkan jumlah kecamatan yang masih lebih banyak terkonsentrasi di Jawa yang lebih banyak dilayani oleh kantor pos. Pelayanan oleh kantor pos terutama paling banyak dilakukan di wilayah pos di pulau Jawa. Proporsi terbesar pelayanan oleh kantor pos ini terbesar ada di wilayah pos 6 (Jawa Timur) dengan proporsi 91,4%. Namun proporsi terbesar kedua pelayanan di kecamatan oleh kantor pos justru terjadi di wilayah pos II (Sumatera bagian tengah). Proporsi pelayanan oleh kantor pos untuk menjangkau kecamatan yang relatif rendah terdapat pada wilpos di kawasan tengah dan timur Indonesia karena memang lebih banyak dilayani oleh kantor pos desa dan pos keliling

Gambar 5.21. Perbandingan pelayanan di kecamatan menurut pelayanan di wilayah pos 2010



b. Pelayanan di Lokasi Transmigrasi

Daerah transmigrasi menjadi salah satu pusat sasaran pelayanan oleh PT. Pos disamping daerah perkotaan dan pedesaan. Hal ini dilakukan dan dalam rangka mendukung program pemerintah sekaligus memberikan layanan bagi kawasan transmigrasi yang merupakan

kawasan pemukiman baru. Untuk menjangkau pelayanan di lokasi transmigrasi, selain menggunakan pelayanan pos melalui kantor pos dan pelayanan pos bergerak seperti pos keliling, pelayanan juga dilakukan melalui pelayanan pos lainnya seperti rumah pos dan agen pos desa. Lokasi yang jauh dan infrastruktur yang belum cukup baik serta kepadatan penduduk yang rendah menjadikan pelayanan pos lainnya dan pelayanan bergerak ini menjadi andalan untuk menjangkau pelayanan di lokasi transmigrasi.

Dibanding tahun-tahun sebelumnya yang relatif tidak mengalami perubahan, pada tahun 2010 terjadi penurunan lokasi transmigrasi sebanyak enam lokasi. Penurunan ini tidak mempengaruhi keterjangkauan pelayanan pos di lokasi transmigrasi dimana semua lokasi transmigrasi yang ada sudah terayani oleh pelayanan pos dari sarana pos yang tersedia. Pelayanan pos untuk lokasi transmigrasi ini paling banyak dilakukan oleh rumah pos dan pos keliling. Meskipun pada tahun 2010 pelayanan oleh rumah pos mengalami penurunan sebesar 11,5%, namun penurunan ini diikuti dengan peningkatan pelayanan oleh pos keliling sebesar 11,1% dan peningkatan pelayanan oleh agen pos desa (sebesar 128% atau 7 unit). Sehingga seluruh lokasi transmigrasi tetap dapat terlayani oleh sarana pos yang ada. Pergeseran sarana pos yang melayani ini terkait dengan perkembangan yang terjadi di lokasi transmigrasi seperti jumlah penduduk, dinamika masyarakat dan infrastruktur yang bertambah baik sehingga pelayanan dengan pos keliling dapat lebih efektif serta ada keterlibatan masyarakat dalam pelayanan pos melalui bentuk agen pos.

Tabel 5.16. Perkembangan Jangkauan pelayanan Pos di Lokasi Transmigrasi 2005 - 2010

No	Jangkauan Pelayanan	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah Lokasi Transmigrasi	951	951	951	951	951	945
2	Dilayani Kantor Pos Cab LK	243	243	243	243	243	243
3	Dilayani Kantor Pos Desa	6	6	6	6	6	6
4	Dilayani Pos Keliling	293	293	293	288	288	320
5	Dilayani Rumah Pos	404	404	404	407	407	360
6	Dilayani Agenpos Desa	5	5	5	7	7	16
7	Jumlah Lokasi Dilayani	951	951	951	951	951	945
8	Jumlah Lokasi Belum Dilayani	0	0	0	0	0	0

Untuk pelayanan oleh kantor pos yang proporsinya merupakan terbesar kedua, pelayanan lebih dominan dilakukan oleh kantor pos cabang luar kota (KPC-LK). Pelayanan di lokasi transmigrasi yang lebih banyak oleh kantor pos cabang luar kota dibanding jenis kantor pos

lain disebabkan lokasi transmigrasi yang banyak berada di luar kota di daerah kabupaten. Sedangkan pelayanan oleh kantor pos desa juga tidak banyak dilakukan karena lebih efektif dijangkau dengan pos keliling dan rumah pos.

Sebaran pelayanan di lokasi transmigrasi oleh sarana pos pada tahun 2010 menunjukkan pada pelayanan di lokasi transmigrasi hanya berlangsung di wilayah pos di luar Jawa. Jangkauan pelayanan pos dilokasi-lokasi tersebut menunjukkan adanya variasi dalam jenis sarana pos yang paling banyak melayani. Pada wilayah pos I, VIII, IX, dan X, pelayanan pos di lokasi transmigrasi paling banyak dilakukan oleh rumah pos dengan proporsi antara 40% sampai 65%. Sementara untuk wilayah pos II, III dan XI, pelayanan pos di lokasi transmigrasi paling banyak dilakukan oleh pos keliling dengan proporsi antara 38% sampai 51%. Bahkan untuk wilayah pos III, pelayanan pos di lokasi transmigrasi oleh kantor pos cabang luar kota juga signifikan dan lebih banyak daripada rumah pos. Hal ini diduga karena di wilayah pos III yang mencakup wilayah Sumatera bagian selatan cukup banyak pemerintahan administratif yang juga menjadi pertimbangan penyediaan kantor pos cabang.

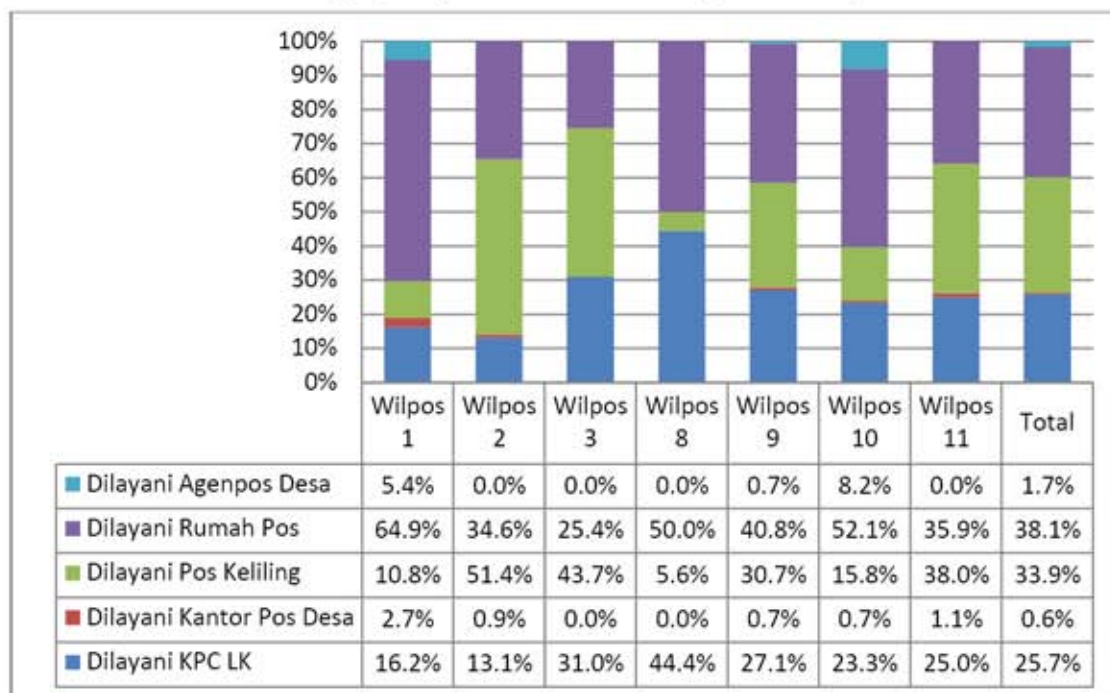
Tabel 5.17. Jangkauan Pelayanan Pos di Lokasi Transmigrasi di Wilayah Pos 2010

No	Jangkauan Pelayanan di Lokasi Transmigrasi	Wilayah Pos											JUM-LAH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	Jumlah Lokasi Transmigrasi	37	107	268	-	-	-	-	18	277	146	92	945
2	Dilayani Kantor Pos Cab LK	6	14	83	-	-	-	-	8	75	34	23	243
3	Dilayani Kantor Pos Desa	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	6
4	Dilayani Pos Keliling	4	55	117	-	-	-	-	1	85	23	35	320
5	Dilayani Rumah Pos	24	37	68	-	-	-	-	9	113	76	33	360
6	Dilayani Agenpos Desa	2	-	-	-	-	-	-	-	2	12	-	16
7	Jumlah Lokasi Dilayani	37	107	268	-	-	-	-	18	277	146	92	945
8	Jumlah Lokasi Belum Dilayan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gambar 5.22 menunjuk bahwa terdapat variasi proporsi pelayanan pos yang paling banyak dilakukan diantara wilayah pos yang ada. Pada wilayah pos I, VIII, IX dan X, proporsi paling besar pelayanan pos di lokasi transmigrasi dilakukan oleh rumah pos. Sementara pada wilayah pos II, III dan XI, pelayanan pos di lokasi transmigrasi proporsi terbesarnya dilakukan oleh pos keliling. Pelayanan pos yang lebih banyak dilakukan oleh pos keliling diduga terkait dengan luasnya wilayah lokasi transmigrasi yang harus dijangkau pelayanannya sehingga lebih efektif pelayannya dilakukan dengan menggunakan pos keliling desa. Hal yang menarik

adalah bahwa pelayanan di lokasi transmigrasi melalui kantor pos cabang luar kota cukup besar proporsinya di wilpos III dan VIII. Hal ini diduga terkait dengan lokasi transmigrasi yang tidak jauh dengan pusat pemerintahan di kabupaten atau kecamatan yang tersedia kantor pos cabang luar kota. Daerah-daerah pada wilpos I (Sumatera bagian Selatan) dan wilpos VIII (Bali-Nusa Tenggara) merupakan daerah yang terdapat lokasi transmigrasi yang relatif sudah berkembang baik.

Gambar 5.22. Perbandingan pelayanan di lokasi transmigrasi di Wilayah Pos Tahun 2010



c. Jangkauan Pelayanan di Desa.

Jangkauan pelayanan di desa oleh PT Pos dilakukan melalui berbagai unit pelayanan mulai dari pelayanan oleh kantor pos, pelayanan pos bergerak maupun pelayanan pos lainnya seperti pos desa, agen pos desa dan warpos. Upaya ini dilakukan karena jumlah desa yang sangat banyak sehingga perlu menggunakan beragam sarana pelayanan yang mungkin untuk menjangkau pedesaan.

Sampai dengan tahun 2010, proporsi kelurahan/desa yang sudah terjangkau pelayanan pos masih kurang dari 50%. Proporsi ini tidak mengalami peningkatan berarti sejak 2006. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun 2005, proporsi ini mengalami penurunan. Namun jika dilihat angka absolut jumlah desa yang terjangkau pelayanan pos, sebenarnya jumlah desa

yang sudah terlayani ini mengalami peningkatan sejak tahun 2006 meskipun dibanding tahun 2005 jumlahnya lebih rendah. Peningkatan jumlah desa sebagai dampak dari pemekaran daerah (kabupaten/kota) sejak tahun 2008 dapat direspon dengan peningkatan jangkauan pos ke desa-desa sehingga pencapaian desa yang terjangkau pelayanan pos tetap stabil dan tidak mengalami penurunan. Penambahan jumlah desa sebesar 3,4% pada tahun 2008 diikuti dengan penambahan sarana pos yang menjangkau desa. Pada periode yang sama juga terjadi peningkatan pelayanan oleh beberapa sarana pos untuk menjangkau pedesaan seperti oleh kantor pos cabang luar kota (KPC-LK) yang meningkat 14% dan pelayanan oleh kantor pos desa sebesar 36%.

Penurunan yang terjadi pada beberapa sarana pos dalam menjangkau pelayanan di desa seperti pelayanan oleh pos keliling desa yang menurun 2,5%, KPrk menurun 5,1% dan pos desa yang menurun 3,7% masih dapat diimbangi oleh peningkatan jumlah sarana pos lain untuk melayani pedesaan. Peningkatan dan penurunan sarana pos yang menjangkau pedesaan ini sebagian diduga terkait dengan pergeseran fungsi pelayanan yang menjangkau kelurahan/desa. Artinya pelayanan yang semula dilakukan misalnya oleh KPrk sebagian dialihkan pelayanannya menjadi oleh KPC-LK dan kantor pos desa atau pelayanan yang semula oleh pos desa bergeser ke pelayanan oleh agen pos desa.

Tabel 5.18. Perkembangan Jangkauan Pelayanan Pos di Kelurahan/Desa Tahun 2005 - 2010

No	Jangkauan Pelayanan	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Jumlah Kelurahan/Desa	68.298	68.298	68.298	70.629	70.629	70.629
2	Dilayani KPrk	6.045	6.045	6.045	5.705	5.705	5.705
3	Dilayani Kantor Pos Cabang Luar Kota	9.698	9.578	9.554	10.888	10.516	10.696
4	Dilayani Kantor Pos Desa	2.581	2.578	2.617	3.558	3.552	3.474
5	Dilayani Pos Keliling Desa	11.466	5.810	5.445	5.307	5.307	5.307
6	Dilayani Pos Desa	2.986	2.940	2.864	2.759	2.759	2.754
7	Dilayani Agenpos Desa	422	422	422	430	430	430
8	Dilayani Warpos Kesra	1.252	1.252	1.252	1.220	1.220	1.220
9	Jumlah Kel/Desa Terjangkau	34.450	28.625	28.199	29.867	29.489	29.586
10	% Kel/Desa Terjangkau	50,44	41,91	41,29	42,29	41,75	41,89
11	Jumlah Kel/Desa Belum Terjangkau	33.848	39.673	40.099	40.762	41.140	41.043
12	% Kel/Desa Belum Terjangkau	49,56	58,09	58,71	57,71	58,25	58,11



Meskipun jumlah sarana pelayanan pos yang menjangkau desa mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2008, namun proporsi jumlah kelurahan/desa yang terjangkau pelayanan pos hanya sedikit mengalami peningkatan. Sampai tahun 2010, proporsi kelurahan/desa yang terjangkau pelayanan pos di seluruh Indonesia baru mencapai 41,9% atau hanya meningkat 0,15% dibanding tahun sebelumnya. Bahkan dibanding pencapaian pada tahun 2004 yang mencapai lebih dari 50%, proporsi kelurahan/desa yang sudah terjangkau pelayanan pos ini masih lebih rendah. Secara implisit, ini menunjukkan peningkatan jumlah desa akibat pemekaran wilayah belum sepenuhnya dapat direspon dengan peningkatan sarana pos untuk meningkatkan jangkauan pelayanan pos di kelurahan/desa.

Sebaran jangkauan pelayanan pos di kelurahan/desa menurut wilayah pos seperti yang diperlihatkan oleh Tabel 5.19 menunjukkan terdapat variasi yang besar dalam tingkat keterjangkauan pelayanan pos di kelurahan/desa dan variasi jenis sarana pos yang menjangkau pelayanan pos di kelurahan/desa. Secara total, jangkauan pelayanan pos di kelurahan/desa paling banyak dilakukan oleh kantor pos cabang luar kota (KPCLK), diikuti oleh pelayanan melalui KPrk dan pos keliling desa. Penggunaan KPCLK sebagai sarana pos untuk menjangkau pelayanan pos di desa banyak dilakukan di sebagian besar wilayah pos yang ada. Namun untuk wilayah pos II dan terutama IV, pelayanan pos di kelurahan/desa lebih mengandalkan jangkauan pelayanan oleh KPrk. Sementara untuk wilayah pos V, pelayanan untuk menjangkau pedesaan justru paling banyak dilakukan melalui kantor pos keliling desa, baru kemudian melalui KPCLK. Dibandingkan wilayah pos lain, pada wilayah pos V keberadaan pos keliling desa memang cukup diandalkan untuk menjangkau pelayanan pos di desa, disamping juga karena jumlah pos keliling desa yang ada di wilayah pos V ini cukup banyak.

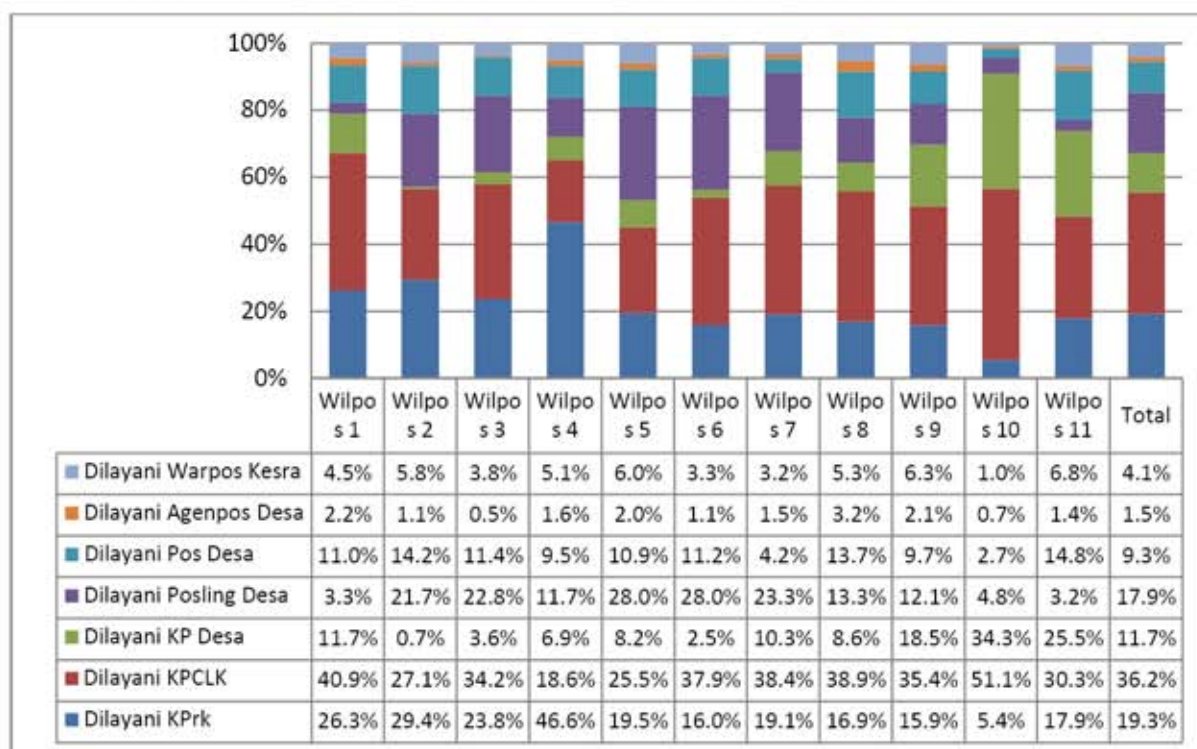
Tabel 5.19. Jangkauan Pelayanan Pos di Kelurahan/Desa di Wilayah Usaha Pos 2010

No	Jangkauan Pelayanan di desa	Wilayah Pos											JUM-LAH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	Jumlah Kelurahan/Desa	11334	4795	7176	2110	5244	8903	8379	2905	9588	7337	2858	70.629
2	Dilayani KPrk	592	602	570	655	710	818	753	254	374	221	156	5.705
3	Dilayani KPCLK	920	556	820	262	928	1936	1516	584	832	2078	264	10.696
4	Dilayani Kantor Pos Desa	264	15	87	97	297	126	408	129	435	1394	222	3.474
5	Dilayani Pos Keliling Desa	75	446	546	164	1018	1432	919	199	285	195	28	5.307
6	Dilayani Pos Desa	248	292	274	134	395	572	165	206	229	110	129	2.754
7	Dilayani Agenpos Desa	49	22	12	22	72	58	58	48	49	28	12	430
8	Dilayani Warpos Kesra	101	118	91	72	218	168	127	80	147	39	59	1.220
9	Jumlah Kel/Desa Terjangkau	2249	2051	2400	1406	3638	5110	3946	1500	2351	4065	870	29.586
10	% Kel/Desa Terjangkau	19,84	42,77	33,44	66,64	69,37	57,40	47,09	51,64	24,52	55,40	30,44	41,89
11	Jumlah Kel/Desa Belum Terjangkau	9085	2744	4776	704	1606	3793	4433	1405	7237	3272	1988	41.043
12	% Kel/Desa Belum Terjangkau	80,16	57,23	66,56	33,36	30,63	42,60	52,91	48,36	75,48	44,60	69,56	58,11

Gambar 5.23 yang menampilkan proporsi pelayanan pos di kelurahan/desa oleh masing-masing sarana pos di setiap wilayah pos sampai tahun 2010 menunjukkan bahwa hampir pada semua wilayah pos, proporsi terbesar pelayanan di kelurahan/desa adalah oleh KPCLK dengan kisaran proporsi antara 34% sampai dengan 51%. Namun untuk wilayah pos II dan IV proporsinya hanya 27,1% dan 18,6%. Proporsi terbesar pelayanan pos di kelurahan/desa di wilpos II dan wilpos IV adalah melalui KPrk dengan proporsi mencapai 29,4% di wilayah pos II dan 46,6% di wilayah pos IV. Proporsi pelayanan oleh KPrk di wilayah pos IV disebabkan oleh wilayahnya yang merupakan daerah perkotaan sehingga jangkauan pelayanan posnya banyak dilakukan oleh kantor pos yang ada di semua kecamatan.

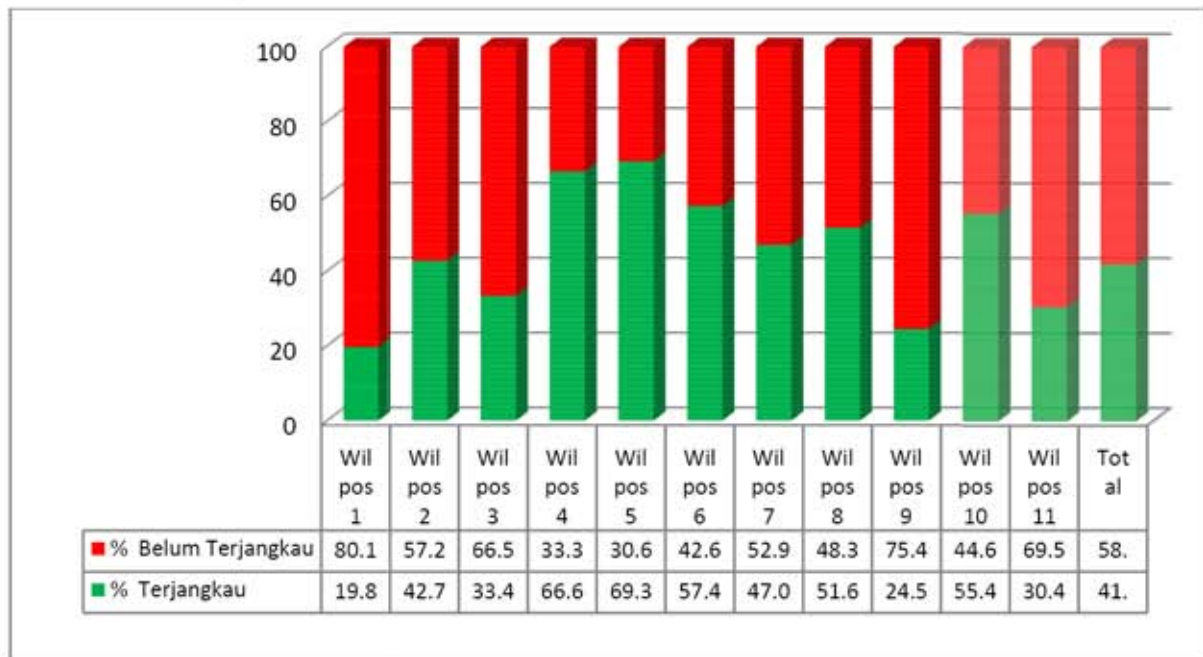
Proporsi jangkauan pelayanan pos di kelurahan/desa oleh kantor pos desa juga cukup besar pada wilayah pos X. Sementara pelayanan pos oleh pos keliling desa cukup signifikan proporsinya pada wilpos di pulau Jawa yaitu wilayah pos V, VI dan VII. Hal ini diduga terkait dengan penyediaan sarana pos dalam bentuk pos keliling desa yang memang lebih dominan di pulau Jawa dibanding daerah lainnya.

Gambar 5.23. Perbandingan pelayanan di kelurahan/desa di Wilayah Pos 2010



Dilihat dari proporsi keterjangkauan pelayanannya, wilayah pos V dan VI menjadi wilayah pos yang memiliki tingkat keterjangkauan pelayanan pos di desa yang paling tinggi. Di wilayah pos IV, jumlah desa yang terjangkau pelayanan pos mencapai 69,37%, sementara di wilayah pos IV, tingkat keterjangkauannya sudah mencapai 66,4%. Namun sebenarnya di wilayah pos IV ini semua daerah sudah terjangkau pelayanan pos melalui sarana kantor pos karena merupakan daerah perkotaan. Diluar kedua wilayah pos tersebut, wilayah pos VI dan VIII adalah wilayah pos yang tingkat keterjangkauan pelayanan pos di desanya sudah mencapai lebih dari 50%. Wilayah pos VI yang masih berada di pulau Jawa ternyata proporsi jumlah desa yang sudah terjangkau pelayanan pos-nya masih kurang dari 50%. Hal yang menarik adalah bahwa tingkat keterjangkauan pos di kelurahan/desa di wilayah pos XI yang relatif tertinggal (kawasan timur Indonesia) ternyata lebih tinggi daripada di wilayah pos I (Sumatera bagian Utara). Hal ini diduga terjadi karena jumlah kelurahan/desa di wilayah pos I jauh lebih banyak daripada wilayah pos XI dan masih banyaknya desa khususnya di NAD yang belum terjangkau layanan pos sebagai dampak dari konflik yang terjadi sebelumnya.

Gambar 5.24. Perbandingan Tingkat Keterjangkauan Pelayanan Pos di Kelurahan/Desa menurut Wilpos 2010



5.3.3. Produksi Pos PT. Pos Indonesia

Produksi perposan digambarkan dengan produksi (jumlah surat/paket) yang dilayani oleh PT. Pos dari mulai surat biasa sampai kilat khusus dalam negeri, paket biasa dan khusus dan pengiriman surat ke luar negeri (EMS dan Experess Post) dan paket pos luar negeri. Untuk surat dan paket pos dari luar negeri, akrena kesulitan data yang didapat, maka tidak masuk dalam pembahasan ini.

Produksi pos reguler ke dalam dan keluar negeri dari PT. Pos menunjukkan penurunan tajam pada tahun 2009 untuk hampir semua jenis seperti ditunjukkan pada Tabel 5.20. Hanya produksi untuk jenis pengiriman surat kilat khusus dalam negeri dan pos ekspres yang mengalami peningkatan. Penurunan paling tajam terjadi pada produksi surat biasa yang dalam periode 2006-2009 menurun rata-rata 56% per tahun. Sementara penurunan produksi surat kilat dan paket biasa yang juga menjadi andalan jasa PT. Pos, penurunannya pada periode yang sama mencapai 20,2% dan 55,5% per tahun. Untuk produksi pos ke luar negeri, jenis EMS mengalami penurunan paa periode 2007-2009 rata-rata 59,1%, meskipun pada tahun 2007 produksi EMS ini meningkat lebih ari 100%. Pola penurunan proiduksi yang tajam setelah terjadi peningkatan yang tinggi pada tahun 2007 juga terjadi untuk produksi pos luar negeri lainnya seperti Pos Express dan Paket pos biasa luar negeri.

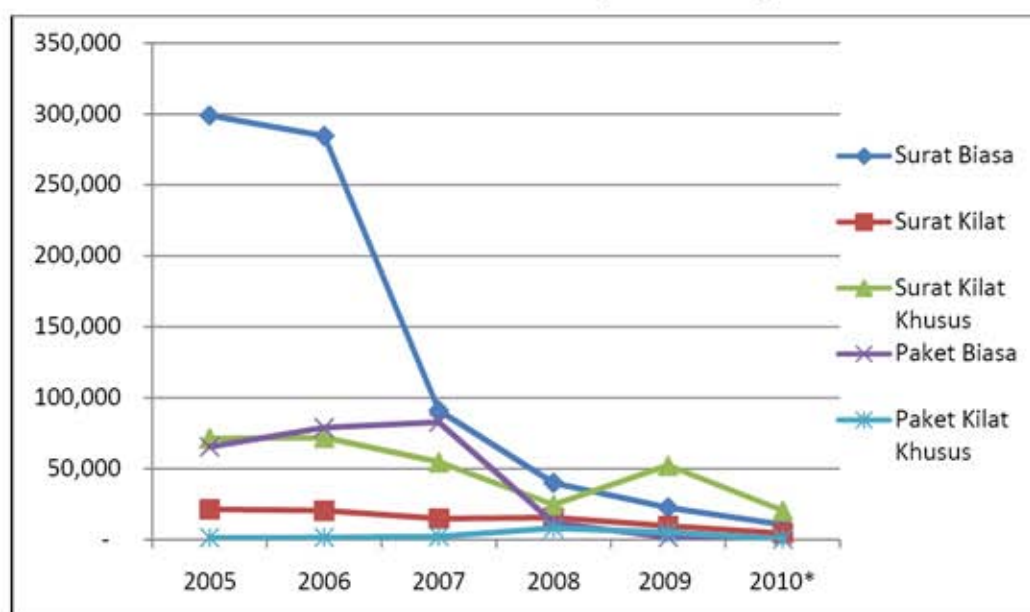
Tabel 5.20. Produksi Perposan Indonesia Tahun 2005- 2010

No.	Produksi Pos Reguler	Satuan	2005	2006	2007	2008	2009	2010*
1	Surat Biasa	ribu pucuk	298.967	284.473	91.038	39.925	22.527	10.483
	Surat Kilat	ribu pucuk	21.321	20.381	14.821	15.380	9.654	4.493
	Surat Kilat Khusus	ribu pucuk	71.255	71.834	54.600	24.380	52.153	20.402
	Paket Biasa	ribu pucuk	65.367	78.887	82.779	12.003	1.702	688
	Paket Kilat Khusus	ribu pucuk	1.472	1.557	2.221	8.050	5.156	471
2	Keluar Negeri							
	EMS	ribu pucuk	6.225	6.198	14.949	6.579	3.906	1.449
	Express Post	ribu pucuk	1.413	381	752	151	393	70
	Paketpos Biasa LN	ribu pucuk	2.434	2.234	3.021	494	16	5
	Paketpos Cepat LN	ribu pucuk	496	490	486	7	10	3

*Sampai 30 Juni 2010

Kecenderungan penurunan ini diperkirakan akan terus terjadi pada tahun 2010 mengingat produksi surat sampai dengan pertengahan tahun 2010 ini masih rendah terutama untuk beberapa jenis surat. Potensial penurunan terutama terjadi untuk jenis surat kilat khusus dan paket kilat khusus karena sampai semester I 2010 produksi masing-masing baru mencapai 39,1% dan 9,1% dari produksi tahun sebelumnya. Sementara untuk jenis surat lainnya pada surat dalam negeri produksinya juga belum mencapai 50% dari produksi tahun sebelumnya. Sehingga dengan trend yang ada, sangat mungkin produksi pada akhir tahun 2010 juga akan menurun dibanding tahun sebelumnya.

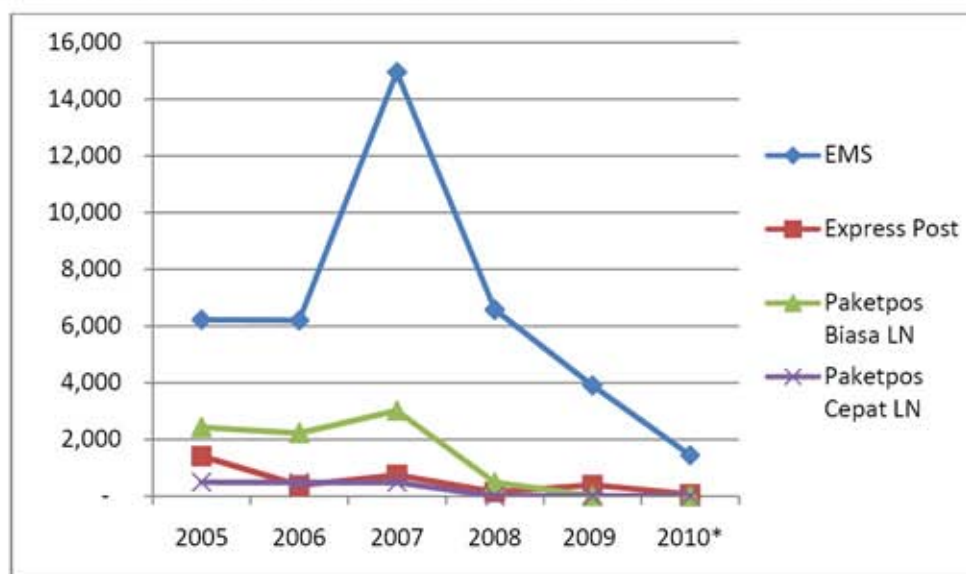
Gambar 5.25. Trend Produksi Surat ke Dalam negeri menurut jenis Tahun 2005-2010



Trend penurunan dan potensi penurunan produksi PT.Pos untuk terutama untuk jenis tertentu seperti Surat Kilat Khusus dan Paket Kilat Khusus diduga disebabkan oleh persaingan yang semakin ketat dalam industri jasa perposan dan pengiriman dokumen dengan semakin banyaknya perusahaan yang masuk ke industri ini. Apalagi saat ini semakin bias batas antara jasa logistik dengan jasa perposan dimana banyak perusahaan jasa logistik yang melayani juga jasa perposan dan pengiriman dokumen. Bahkan beberapa usaha jasa transportasi travel juga melayani jasa pengiriman dokumen. PT. Pos hanya mengandalkan keunggulan jaringan yang sampai ke pelosok desa dan daerah transmigrasi. Sementara untuk kecepatan pengantaran, konsumen cenderung memilih jasa dari perusahaan swasta terutama dari perusahaan yang sudah cukup dikenal. Kondisi itulah yang menyebabkan penurunan tajam terjadi pada jenis surat kilat khusus dan paket kilat khusus.

Untuk produksi pos luar negeri, kecenderungan penurunan bahkan terjadi untuk semua jenis surat dan paket. Penurunan paling tajam terjadi untuk produksi jenis EMS yang semula menjadi andalan produksi pos luar negeri dari PT. Pos. Faktor persaingan yang sangat ketat untuk pengiriman surat/dokumen yang mengandalkan kecepatan diduga berperan dalam penurunan produksi pos luar negeri ini. Konsumen cenderung lebih memilih jasa dari perusahaan lain khususnya yang memiliki jaringan internasional dan perusahaan asing untuk pengiriman paket dan surat luar negeri.

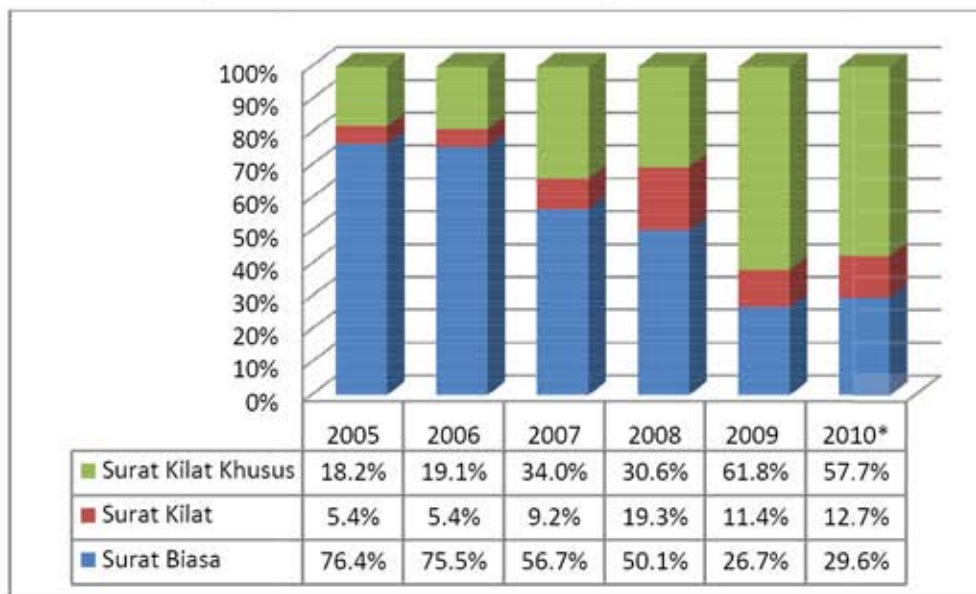
Gambar 5.26. Trend Produksi Surat ke Luar Negeri menurut jenis Tahun 2005- 2010



Komposisi produk yang dilayani PT. Pos untuk jenis surat menunjukkan terjadi pergeseran pangsa produksi dari jenis surat biasa ke surat kilat khusus. Produksi surat biasa yang semula proporsinya lebih besar pangsa produksi mencapai 75% sampai 2006, menurun tajam dan pada tahun 2009 pangsa produksi hanya tinggal 26,7%. Sebaliknya untuk jenis surat kilat khusus mengalami peningkatan dari hanya sekitar 5% pada 2005 dan 2006 menjadi paling besar pangsa yaitu 61,8% pada 2009. Pada tahun 2010, sampai semester I, komposisi produksi ini masih tidak berbeda banyak dengan komposisi produksi tahun 2009 dimana jenis surat kilat khusus lebih dominan dengan pangsa mencapai 57.7%.

Pergeseran pangsa produksi ini sebenarnya lebih menunjukkan bahwa jenis surat kilat khusus lebih mampu bersaing di pasar jasa pengiriman surat dan dokumen daripada surat biasa. Apalagi dengan penggunaan internet dalam pengiriman dokumen secara elektronik menyebabkan penggunaan surat biasa untuk dokumen juga mengalami penurunan secara global. Sementara untuk surat kilat khusus cenderung masih bisa bertahan karena masih dibutuhkan. Disamping itu kantor pos relatif lebih tersebar di semua daerah dan memiliki daya jangkau yang cukup luas untuk menjangkau sampai daerah pedesaan dan lokasi transmigrasi.

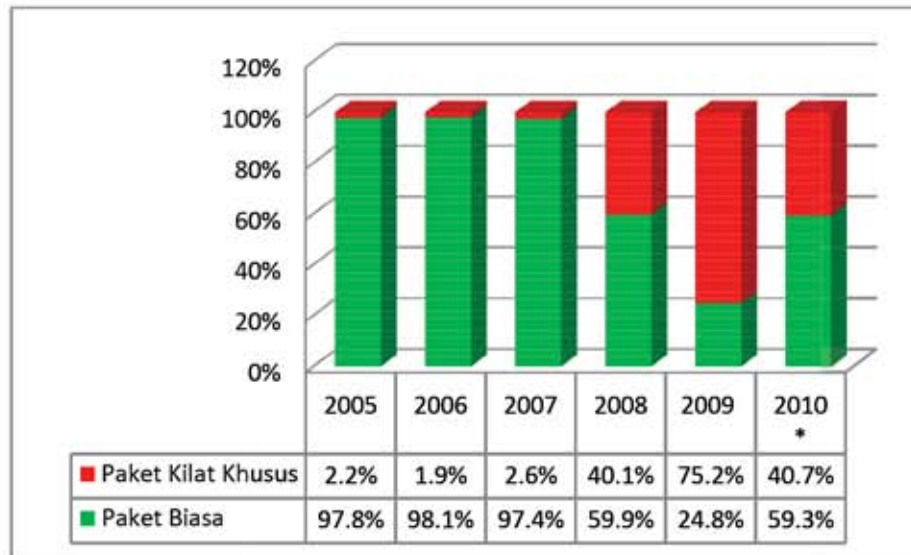
Gambar 5.27. Komposisi Produksi surat ke Dalam Negeri PT. Pos Indonesia 2005 - 2010



Sebagaimana produksi surat, pergeseran pangsa produksi juga terjadi untuk jenis paket dari paket biasa ke paket kilat khusus. Produksi paket kilat biasa yang semula sangat dominan

dan sampai 2007 pangsa produksinya mencapai 97,4%, menurun hingga tinggal 24,8% pada 2009. Sebaliknya untuk paket kilat khusus pangsa produksinya meningkat tajam dari 2,6% pada 2007 menjadi 75,2% pada 2009. Namun pada semester I 2010, pangsa produksi paket biasa kembali meningkat menjadi 59,3% dan lebih dominan daripada paket kilat khusus

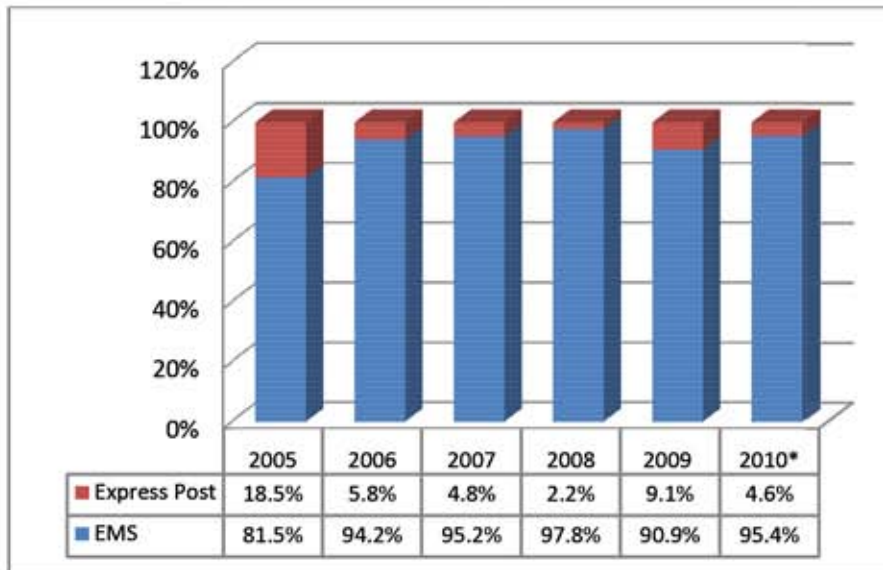
Gambar 5.28. Komposisi Produksi Paket Pos ke Dalam Negeri PT. Pos Indonesia 2005 – 2010*



Untuk produksi pos ke luar negeri tidak terjadi pergeseran pangsa produksi yang signifikan untuk produksi surat maupun paket ke luar negeri. Pergeseran pangsa produksi yang minor hanya terjadi untuk produksi pos ke luar negeri khususnya untuk EMS. Pangsa produksi EMS yang pada tahun 2005 sudah mencapai 81,5%, pada tahun 2009 semakin meningkat menjadi 90,9%. Bahkan pada semester I 2010 sudah mencapai 95,4%. Sebaliknya pangsa produksi pos ekspres semakin menurun dari 18,5% pada 2005 menjadi hanya 9,1% dan pada semester I 2010 bahkan hanya 4,6%. Namun kondisi ini terjadi dalam situasi dimana produksi untuk kedua jenis surat ke luar negeri tersebut mengalami penurunan.

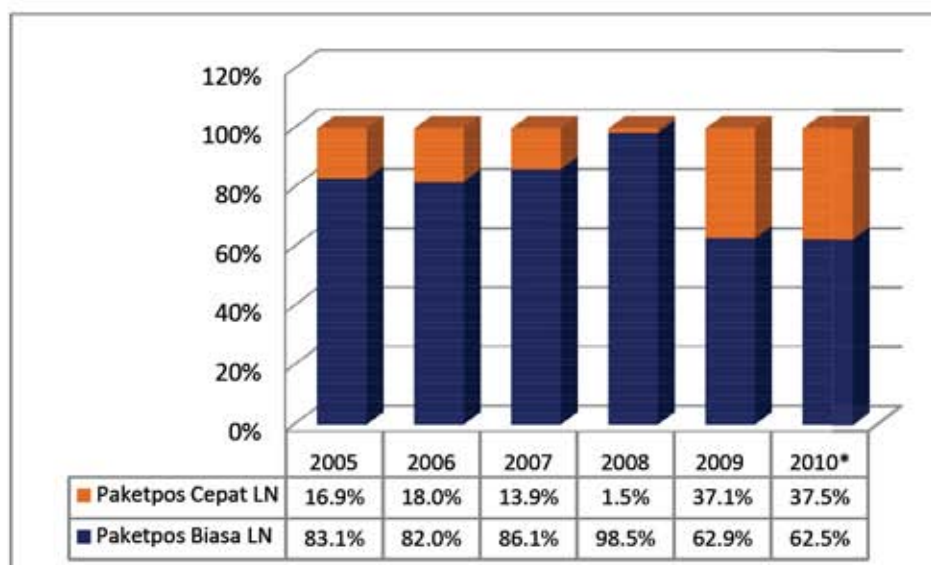
Persaingan yang ketat dalam industri perposan (pengiriman dokumen) menyebabkan terjadinya penurunan produksi PT. Pos yang tajam untuk jenis surat kilat khusus dan paket kilat khusus. Apalagi kini semakin bias antara jasa perposan dengan jasa logistik yang melayani pengiriman dokumen cepat.

Gambar 5.29. Komposisi Surat Pos ke Luar Negeri PT. Pos Indonesia 2005 - 2010



Untuk paket pos, pangsa produksi untuk paket pos cepat meningkat pesat dalam dua tahun terakhir dari 16,9% pada 2005 kemudian menurun hanya 1,5% dan meningkat kembali menjadi 37,1%. Peningkatan ini terus bertahan pada semester I 2010 dengan pangsa produksi mencapai 37,5%. Sementara untuk paket pos biasa, pangsa produksinya menurun dari 83,1% pada 2005 menjadi 62,9% pada tahun 2009. Namun patut diingat bahwa pergeseran pangsa produksi ini lebih disebabkan oleh penurunan produksi paket pos cepat luar negeri yang lebih kecil daripada penurunan pada paket pos biasa luar negeri yang menurun sangat tajam

Gambar 5.30. Komposisi Paket Pos ke Luar Negeri PT. Pos Indonesia 2005- 2010



5.3.4. Public Service Obligation (PSO) bidang Pos

Dalam rangka menjalankan misi tanggungjawab pelayanan universal, PT. Pos juga melaksanakan kegiatan tersebut dengan menjadikan sejumlah Kantor Pos Cabang Luar Kota (KPCLK)/Kantor Pos Layanan Publik Universal (KPLPU) untuk menjalankan pelayanan tersebut dengan dukungan bantuan PSO (public service obligation). Jumlah KPCLK/KPLPU yang mendapat bantuan PSO mengalami peningkatan dari tahun-ketahun sejalan dengan upaya meningkatkan keterjangkauan pelayanan pos kepada masyarakat melalui kantor pos. Namun peningkatan yang terjadi cenderung rendah karena peningkatan jumlah KPCLK/KPLPU yang diselenggarakan PT. Pos juga tidak banyak terjadi. Selain itu, sejak dimulainya program ini, jumlah KPCLK yang dijadikan KPLPU untuk menjalankan pelayanan ini sudah cukup besar. Setelah meningkat sebesar 0,4% pada tahun 2008 dan stagnan pada tahun 2009, jumlah KPCLK/KPLPU kembali meningkat sebesar 0,6% pada tahun 2010. Secara absolut, penambahan yang terjadi sebenarnya cukup banyak yaitu penambahan 13 KPCLK untuk menjalankan program pelayanan universal bidang pos.

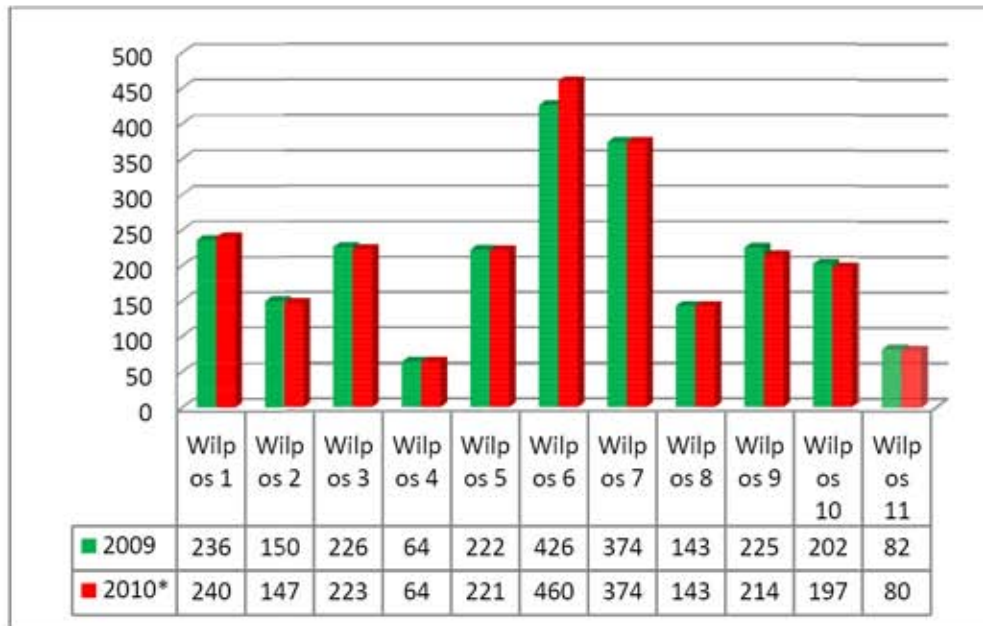
Tabel 5.21 Jumlah KPCLK/KPLPU dari tahun 2004 –2010.

No	Tahun	Jumlah KPC-LK
1	2004	2.341
2	2005	2.306
3	2006	2.341
4	2007	2.341
5	2008	2.350
6	2009	2.350
7	2010	2.363

Persebaran KPCLK/KPLPU yang mendapat bantuan penyelenggaraan PSO menunjukkan bahwa lokasi KPCLK/KPLPU yang menyelenggarakan PSO ini masih banyak terkonsentrasi di pulau Jawa dan tidak banyak mengalami pergeseran dari tahun 2009 ke 2010. Lokasi terbanyak KPCLK/KPLPU yang mendapat bantuan program PSO adalah di wilayah pos VI sebanyak 460 unit atau sekitar 19,1% dari total KPCLK yang menjalankan program PSO. KPCLK terbanyak berikutnya terdapat di wilayah pos VII sebanyak 374 unit atau sekitar 15,5%. Jumlah KPCLK/KPLPU program USO di wilayah pos VI ini mengalami peningkatan 8% dibanding tahun sebelumnya. Sebagian besar wilayah pos justru mengalami penurunan

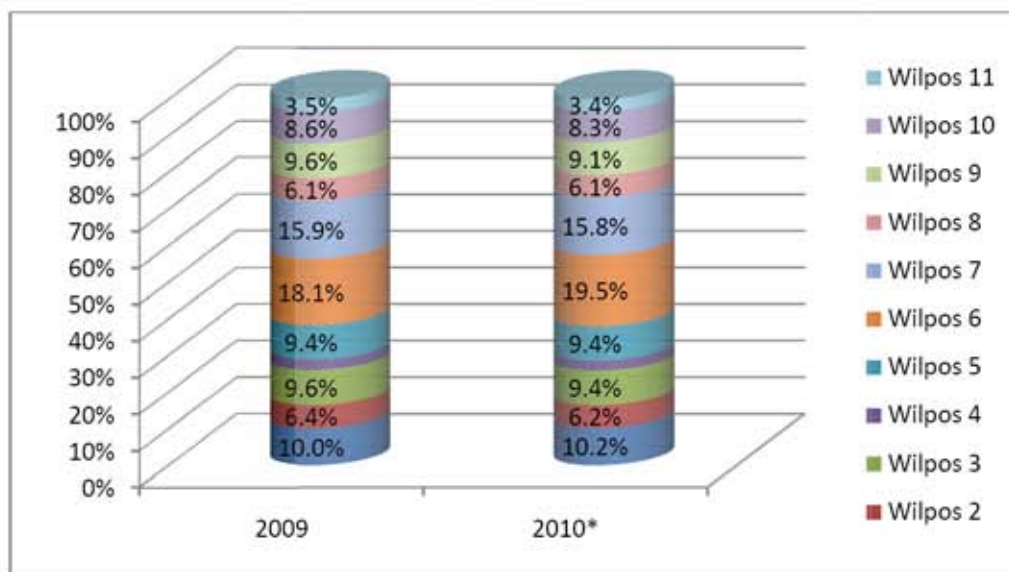
jumlah KPCLK/KPLPU yang menjadi program PSO di 2010 dengan penurunan terbesar terjadi di wilayah pos IX sebesar 4.9%

Gambar 5.31. Jumlah KPCLK Pelaksana Program PSO menurut Wilayah Pos 2009-2010



Peningkatan dan penurunan KPCLK/KPLPU penyelenggara PSO diantara wilayah pos hanya sedikit menggeser komposisi distribusi KPCLK/KPLPU penyelenggara PSO dari tahun 2009 ke 2010. Proporsi KPCLK/KPLPU penyelenggara PSO terbesar masih terdapat di wilayah pos 6 dengan proporsi mencapai 19,5% dan meningka dari tahun sebelumnya yang 18,1%. Sementara untuk wilayah pos 7 yang merupakan terbesar kedua, proporsinya sedikit menurun dari 15,9% menjadi 15,8%. Secara total proporsi KPCLK/KPLPU penyelenggara di pulau Jawa pada tahun 2010 mencapai 47,4%, sementara di Sumatera hanya 25,8%. Proporsi paling kecil terdapat di Kawasan Timur Indonesia (Maluku-Papua) yaitu hanya 3,4%. Dari sebaran distribusi ini secara implisit menyiratkan bahwa penetapan besaran dana program PSO untuk layanan pos masih didasarkan pada ketersediaan infrastruktur (KPCLK/KPLPU) yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan peningkatan pelayanan pos kepada masyarakat yang lebih luas.

Gambar 5.32. Distribusi KPCLK Penyelenggara PSO Tahun 2009-Tahun 2010



5.4. Bidang Jasa Titipan

5.4.1. Sebaran Penyelenggara Jasa Titipan

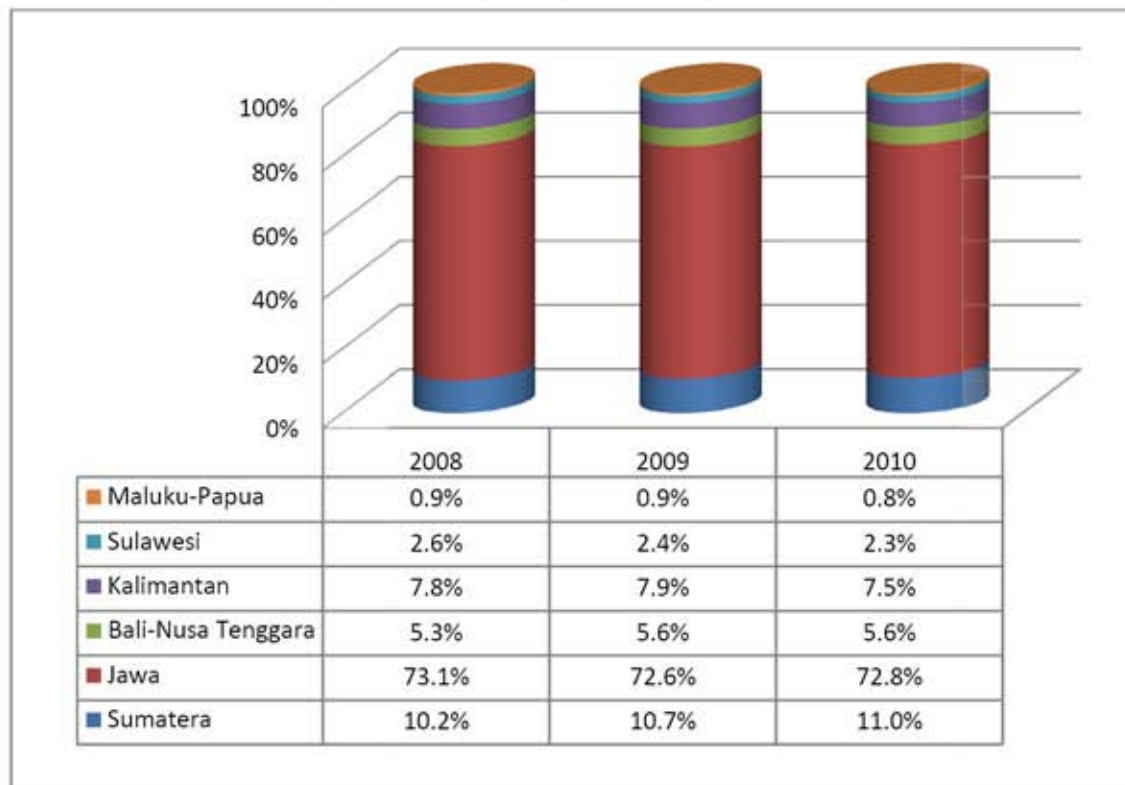
Perkembangan penyelenggara usaha jasa titipan di Indonesia menunjukkan jumlah yang terus meningkat dalam tiga tahun terakhir meskipun dengan peningkatan yang tidak terlalu besar. Wilayah geografis yang luas, jumlah penduduk yang besar dan ekonomi serta bisnis yang terus berkembang menjadikan Indonesia pasar yang sangat menarik dan potensial bagi industri jasa titipan. Sampai akhir tahun 2010, jumlah penyelenggara jasa titipan di Indonesia mencapai 735 buah. Jumlah ini meningkat 5% dibanding tahun sebelumnya atau 12% dibanding tahun 2008. Jika dilihat dari perkembangannya menurut pulau besar, peningkatan jumlah penyelenggara pada tahun 2010 ini paling banyak terjadi di Sumatera yang meningkat sebesar 8%. Namun jika dilihat peningkatannya secara absolut, penambahan paling banyak terjadi di Pulau Jawa sebanyak 27 perusahaan, namun persentase kenaikannya hanya 5,3%.

Tabel 5.22. Perkembangan Penyelenggara Jasa Titipan Menurut Pulau 2008 –2010

No	Propinsi	Jumlah		
		2008	2009	2010
1	Sumatera	67	75	81
2	Jawa	479	508	535
3	Bali, NTB, NTT	35	39	41
4	Kalimantan	51	55	55
5	Sulawesi	17	17	17
6	Maluku, Papua	6	6	6
Jumlah		655	700	735

Pola distribusi penyelenggara usaha jasa titipan menunjukkan bahwa penyelenggaraan usaha jasa titipan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jika dilihat sebarannya berdasarkan pulau, pada tahun 2010 proporsi penyelenggara jasa titipan di pulau Jawa mencapai 72,8% dari total usaha jasa titipan. Proporsi ini tidak banyak berubah sejak tiga tahun terakhir dimana pada tahun 2008 proporsinya juga sudah mencapai 73,1%. Proporsi terbanyak berikutnya adalah di Sumatera yang mencapai 11,2% diikuti oleh Kalimantan sebanyak 7,6%. Jawa sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan menjadi pasar yang menaik untuk tumbuhnya usaha jasa titipan. Apalagi kondisi infrastruktur di Jawa juga jauh lebih baik dibanding daerah lainnya. Hal yang menarik adalah proporsi jumlah penyelenggara usaha jasa titipan di Bali-Nusa Tenggara yang lebih besar daripada Sulawesi meskipun wilayahnya lebih sempit dan hanya terdiri dari tiga propinsi. Hal ini diduga terkait dengan banyaknya kegiatan pengiriman barang untuk memenuhi industri kerajinan dan pariwisata di kawasan Bali dan Nusa Tenggara disamping secara perekonomian, wilayah ini juga relatif lebih maju. Komposisi sebaran jumlah penyelenggara jasa titipan menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi dan pembangunan daerah lebih menentukan banyaknya penyelenggara jasa titipan daripada uas geografis wilayah.

Gambar 5.33. Proporsi Penyebaran Penyelenggara Jasa Titipan 2008 - 2010



Tabel 5.23 menunjukkan perkembangan penyelenggara jasa titipan menurut propinsi. Perkembangan sebaran penyelenggara jasa titipan juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan jasa titipan berkembang pada daerah-daerah dengan tingkat kemajuan ekonominya tinggi dan dinamika sosial ekonomi penduduknya juga berkembang baik. Di Sumatera misalnya, penyelenggara jasa titipan banyak berkembang di Sumatera Utara dan Kepulauan Riau yang memiliki kegiatan bisnis yang tinggi. Sementara di Kalimantan berkembang di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan yang juga daerah-daerah memiliki kegiatan bisnis pertambangan dan dengan sendirinya daerah perkotaannya berkembang pesat. Dari tabel 5.23 terlihat bahwa peningkatan jumlah penyelenggara jasa titipan paling banyak terjadi di Sumatera Barat, Riau, DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Tabel 5.23. Perkembangan Penyelenggara Jasa Titipan Menurut Propinsi 2008- 2010

No	Propinsi	Jumlah			No	Propinsi	Jumlah		
		2008	2009	2010			2008	2009	2010
1	NAD	4	4	4	18	NTB	13	14	14
2	Sumatera Utara	24	28	29	19	NTT	1	1	1
3	Riau	9	9	12	20	Kalimantan Tengah	2	2	2
4	Kepulauan Riau	12	14	14	21	Kalimantan Barat	23	24	24
5	Sumatera Barat	1	1	3	22	Kalimantan Selatan	13	15	15
6	Jambi	0	0	0	23	Kalimantan Timur	13	14	14
7	Bengkulu	2	2	2	24	Sulawesi Selatan	11	11	11
8	Sumatera Selatan	5	5	5	25	Sulawesi Utara	6	6	6
9	Bangka Belitung	0	0	0	26	Sulawesi Tengah	0	0	0
10	Lampung	10	12	12	27	Sulawesi Tenggara	0	0	0
11	DKI Jakarta	318	341	359	28	Gorontalo	0	0	0
12	Jawa Barat	60	63	68	29	Maluku	2	2	2
13	Banten	18	18	21	30	Maluku Utara	0	0	0
14	Jawa Tengah	29	29	30	31	Papua Barat	4	4	4
15	DI Yogyakarta	8	8	9					
16	Jawa Timur	46	49	48					
17	Bali	21	24	26	Jumlah		655	700	735

5.4.2. Produksi Jasa Titipan

Kegiatan penyelenggaraan jasa titipan yang sampai akhir tahun 2010 telah dilakukan oleh 735 perusahaan telah menghasilkan produksi dengan volume hampir 17 juta koli dan berat lebih dari 97 ribu ton. Jika dibandingkan produksi selama satu tahun pada tahun 2009, jumlah ini masih lebih kecil karena baru sekitar 58,3% dari volume produksi tahun 2009 atau



sekitar 49% dari berat produksi tahun 2009. Penurunan ini diduga masih dari ampak kelesuan ekonomi global yang terjadi yang menyebabkan pengiriman paket dan logistik secara nasional mengalami penurunan.

Tabel 5.24. Produksi Jasa Titipan PT. Pos Tahun 2010

NO	PROPINSI	PRODUKSI										JUMLAH	
		BARANG CETAKAN		PAKET		BUNGKUSAN KECIL		SEKOGRAM		SURAT KABAR			
		Koli	Kg	Koli	Kg	Koli	Kg	Koli	Kg	Koli	Kg	Koli	Kg
1	DI ACEH											0	0
2	SUMUT	6.361	55.587	4.370	51.869	1.165	33.025	0	0	754	19.046	12.650	159.527
3	RIAU											0	0
4	KEP/ RIAU	537.432	63.987	104.903	450.096	179.983	109.134	0	0	163	2.445	822.481	625.662
5	SUMBAR											0	0
6	JAMBI											0	0
7	BENGKULU											0	0
8	SUMSEL	832	1.176	13.468	95.522	88	88	0	0	0	0	14.388	96.786
9	BABEL											0	0
10	LAMPUNG	0	0	224.163	1.270.902	593.180	617.219	0	0	0	0	817.343	1.888.121
11	DKI JAKARTA	1.012.131	2.838.149	11.698.031	69.510.446	620.688	1.949.282	0	0	7.435	122.850	13.338.285	74.420.727
12	JABAR	19.509	81.284	285.185	4.051.159	59.844	91.144	0	0	6.288	9.921	370.826	4.233.508
13	BANTEN	808	854	248	11.708	406	921	0	0	0	0	1.462	13.483
14	JATENG	37.776	131.344	215.372	3.023.948	243.295	478.497	0	0	0	0	496.443	3.633.789
15	DI YOGYAKARTA	1.707	8.574	3.315	83.838	551	1.794	0	0	0	0	5.573	94.206
16	JATIM	17.425	72.073	584.971	8.737.691	57.634	287.307	221	552	0	0	660.251	9.097.623
17	BALI	29.515	42.692	89.556	142.112	29.352	104.075	3.421	11.992	552	0	152.396	300.871
18	NTB	10.174	16.808	54.339	942.131	3.492	9.732	0	0	0	0	68.005	968.671
19	NTT											0	0
20	KALTENG											0	0
21	KALBAR	2.438	4.512	21.014	73.072	3.026	5.224	0	0	0	0	26.478	82.808
22	KALSEL	56	56	354	5.044	390	390	0	0	0	0	800	5.490
23	KALTIM	9.186	15.871	35.445	236.254	2.761	8.899	0	0	0	0	47.392	261.024
24	SULSEL	30.210	396.177	135.299	520.450	189.606	263.150	0	0	120	180	355.235	1.179.957
25	SULUT	0	0	54.310	277.750	1.335	13.080	0	0	0	0	55.645	290.830
26	SULTENG											0	0
27	SULTRA											0	0
28	GORONTALO	1.601	3.528	5.146	6.934	1.879	3.790	0	0	0	0	8.626	14.252
29	SULBAR												
30	MALUKU	4.148	4.740	8.282	44.076	37.442	30.595	0	0	0	0	49.872	79.411
31	MALUKU UTARA											0	0
32	PAPUA BARAT	2.375	2.393	1.382	14.917	914	2.395	0	0	0	0		
33	PAPUA TENGAH												
34	PAPUA TIMUR											0	0
JUMLAH		1.723.684	3.739.805	13.539.153	89.549.919	2.027.031	4.009.741	3.642	12.544	15.312	154.442	17.304.151	97.446.746

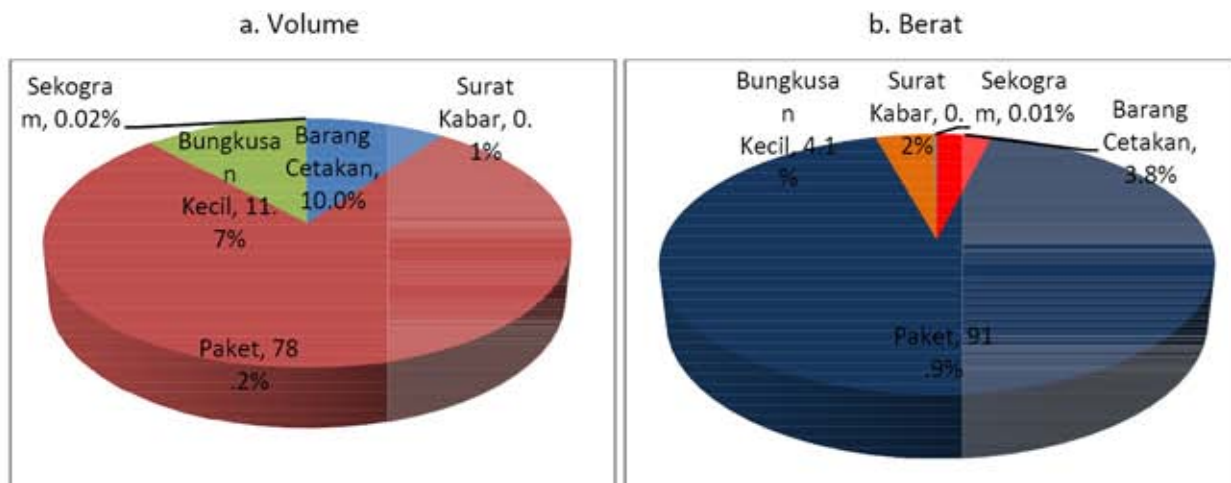
*) Data sampai 16 November 2010

Dari data produksi yang masuk, produksi jasa titipan pada tahun 2010 juga masih terkonsentrasi pada penyelenggara jasa titipan di pulau Jawa. Produksi tertinggi terdapat di Jakarta yang memiliki produksi jauh diatas propinsi lainnya dengan proporsi mencapai 45% dari volume total dan 37% dari berat total produksi. Posisinya sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan ekonomi dan bisnis menjadi faktor yang menyebabkan penggunaan jasa titipan di Jakarta jauh lebih besar sehingga produksinya juga lebih besar.. Namun produksi jasa titipan di Lampung juga cukup signifikan dan volumenya lebih tinggi dari propinsi lain termasuk di Jawa, meskipun dari sisi berat masih lebih rendah daripada produksi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Volume produksi jasa titipan di Lampung mencapai 4,6% dari total

volume produksi nasional, meskipun beratnya hanya mencapai 1,9% berat produksi nasional.

Dari sisi komposisi produksinya, pelayanan paket masih merupakan jenis produk yang paling banyak dilayani oleh penyelenggara jasa titipan dan jauh melebihi jenis barang lainnya. Proporsi produk berbentuk paket mencapai 78,2% dari total produksi, sementara yang berbentuk bungkusan kecil hanya mencapai 11,37% dan barang cetakan hanya 10%. Proporsi dari sisi berat produksi menunjukkan produksi berbentuk paket mencapai 91,9% dari total berat produksi jasa titipan tahun 2010. Sementara untuk bungkusan kecil proporsinya hanya 4,1% dari berat total dan barang cetakan hanya 3,8%.

Gambar 5.34. Proporsi Berat Produksi Jasa Titipan menurut Jenis Tahun 2010



Khusus untuk jasa ekspres, Indonesia merupakan pasar yang cukup potensial untuk usaha jasa pengiriman ekspres yang ditunjukkan oleh produksi yang terus meningkat. Tabel 5.25 menunjukkan produksi jasa ekspres yang terus meningkat dan berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh Asosiasi Perusahaan Pengiriman Ekspres Indonesia (ASPERINDO), permintaan untuk jasa ekspres ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun seperti terlihat pada Tabel 5.25. Dari data tersebut terlihat bahwa dalam beberapa tahun ke depan, pertumbuhan produksi total mencapai rata-rata 10% hingga 15% per tahun dengan permintaan terbesar masih untuk pengiriman paket.



Tabel 5.25. Produksi dan Perkiraan Permintaan Pasar Jasa Ekspres Indonesia menurut Jenis

Tahun	Dokumen	Paket
2004	536.737.431	1.495.197.130
2005	610.834.459	1.701.610.278
2006	669.552.537	1.865.098.495
2007	753.212.854	2.098.235.807
2008	843.598.396	2.350.024.104
2009	911.086.268	2.538.026.032
2010	1.002.194.895	2.791.828.635
2011	1.102.414.385	3.071.011.499
2012	1.223.679.967	3.408.822.764

*) berdasarkan data dan formulasi estimasi dari ASPERINDO

5.4.3. Penerbitan Izin Penyelenggara Jasa Titipan

Permintaan izin jasa titipan juga terus meningkat sejalan dengan semakin berkembangnya pasar industri logistik dan jasa titipan meskipun persaingan di industri ini juga semakin ketat. Meskipun jumlah penerbitannya masih fluktuatif dalam lima tahun terakhir, namun dalam dua tahun terakhir penerbitannya cukup banyak. Pada tahun 2010, telah diterbitkan 33 ijin. Jumlah ini menurun sebesar 26,7% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 45 ijin. Penurunan jumlah ijin penyelenggara jasa titipan ini yang terutama terjadi di DKI Jakarta, Jawa Timur dan Sumatera Utara. Sementara di Jawa barat justru terdapat penambahan jumlah ijin yang diterbitkan.

Dari sebaran daerah penerbitan ijinnya, penerbitan ijin penyelenggara jasa titipan paling banyak masih di Jakarta sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2010, jumlah penerbitan ijin penyelenggara jasa titipan di Jakarta mencapai 18 buah atau sekitar 54% tahun sebelumnya. Meskipun menurun dari tahun sebelumnya, penerbitan ijin di Jakarta masih tetap yang paling dominan, diikuti oleh Jawa Barat yang proporsinya mencapai 15,2%. Penerbitan ijin penyelenggaraan jasa titipan pada tahun 2010 ini hanya dikeluarkan di delapan propinsi yaitu DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Bali.

Tabel 5.26 Jumlah penerbitan izin penyelenggara jasa titipan tahun 2005 –2010.

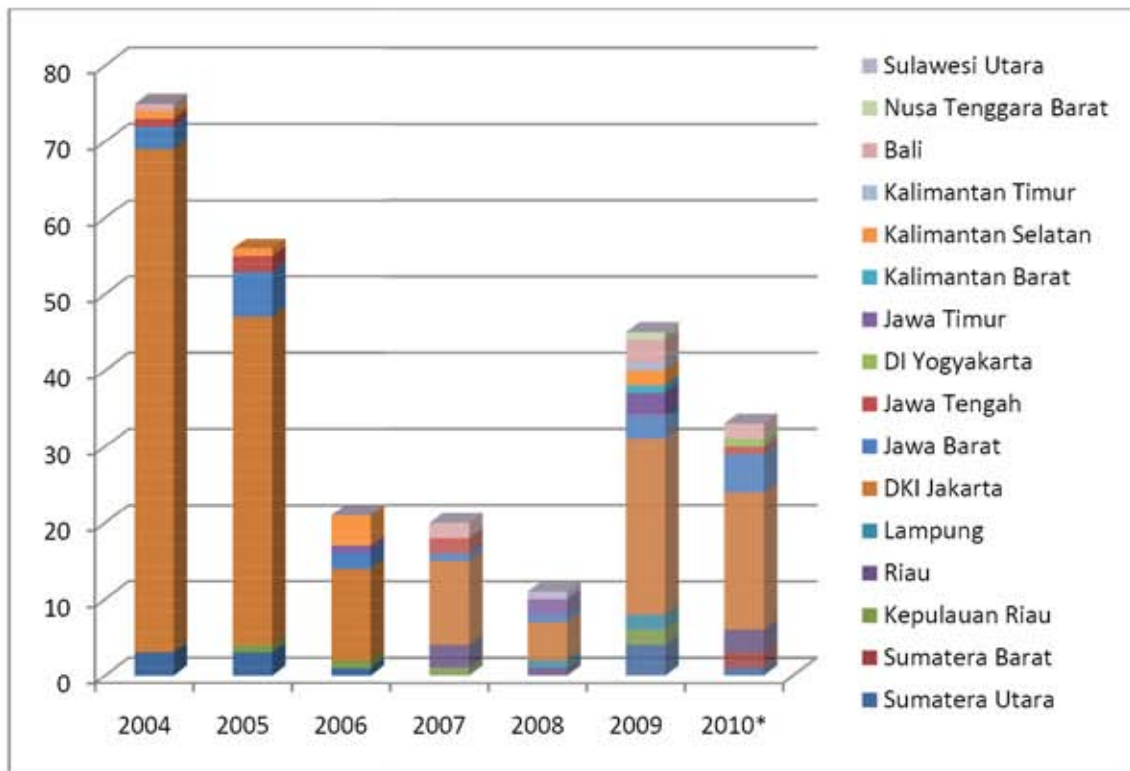
No	Propinsi	Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Sumatera Utara	3	1	0	0	4	1
2	Sumatera Barat	0	0	0	0	0	2
3	Kepulauan Riau	1	1	1	0	2	0
4	Riau	0	0	3	1	0	3
5	Lampung	0	0	0	1	2	0
6	DKI Jakarta	43	12	11	5	23	18
7	Jawa Barat	6	2	1	1	3	5
8	Jawa Tengah	2	0	2	0	0	1
9	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	1
10	Jawa Timur	0	1	0	2	3	0
11	Kalimantan Barat	0	0	0	0	1	0
12	Kalimantan Selatan	1	4	0	0	2	0
13	Kalimantan Timur	0	0	0	0	1	0
14	Bali	0	0	2	0	3	2
15	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	1	0
16	Sulawesi Utara	0	0	0	1	0	0
Jumlah		56	21	20	11	45	33

Jika dilihat sebarannya menurut pulau, penerbitan ijin penyelenggara jasa titipan selama ini memang lebih didominasi di Pulau Jawa. Pada tahun 2010 ini, sekitar 75% dari ijin yang diterbitkan adalah untuk penyelenggara jasa titipan di Pulau Jawa. Sisanya adalah untuk penyelenggaraan jasa titipan di Sumatera dan Bali. Jika pada tahun 2009 ada ijin yang diterbitkan untuk penyelenggaraan jasa titipan di Kalimantan, pada tahun 2010 ini tidak ada ijin yang diterbitkan di daerah tersebut.

Tabel 5.27. Jumlah Penerbitan izin penyelenggara Jasa Titipan menurut pulau 2005- 2010

No	Propinsi	Tahun					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	Sumatera	4	2	4	2	8	6
2	Jawa	51	15	14	8	29	25
3	Bali, Nusa Tenggara	0	0	2	0	4	2
4	Kalimantan	1	4	0	0	4	0
5	Sulawesi	0	0	0	1	0	0
6	Maluku+Papua	0	0	0	0	0	0
Jumlah		56	21	20	11	45	33

Gambar 5.35. Perkembangan Penerbitan Izin Penyelenggara Jasa Titipan menurut Jenis



5.5. Penerbitan Perangko

Statistik penerbitan perangko disajikan mulai tahun 2004 sampai dengan 2010 pada tabel 5.30. Jenis penerbitan perangko dalam penyajian data ini terbagi dua yaitu Perangko Nasional dan *Joint Issue Stamp (JIS)*. *Joint Issue Stamp* adalah perangko yang diterbitkan berdasarkan kerjasama dengan negara lain dan beredar di masing-masing negara. Tahun 2006 dengan Slovakia, Tahun 2007 dengan ASEAN dan China, serta tahun 2008 dengan Jepang. Pada tahun 2009, *joint -issue stamp* dilakukan bersama dengan Iran. Sedangkan Perangko Nasional adalah perangko yang diterbitkan dan beredar di Indonesia.

Tabel 5.28 Data penerbitan perangko Tahun 2004-2010

Tahun	Jumlah Seri		
	Nasional	Joint Issue Stamp (JIS)	Total
2004	11	0	11
2005	10	0	10
2006	8	1	9
2007	11	2	13
2008	16	1	17
2009	13	2	15
2010	12	1	13

Pada tahun 2010, seluruh perangko yang diterbitkan adalah perangko nasional dengan rincian 1 perangko definitif dan 12 perangko non definitif. Jumlah seri perangko yang diterbitkan sejak 2004 hingga 2010 menunjukkan adanya fluktuasi dalam penerbitan perangko dimana dalam 7 tahun terakhir, terbanyak diterbitkan pada tahun 2008. Penerbitan perangko ini biasanya terkait dengan momentum atau peringatan peristiwa tertentu yang dapat diabadikan dalam bentuk perangko. Oleh karena itu pada tahun yang banyak kegiatan atau event atau peristiwa tertentu, lebih banyak perangko diterbitkan

Tabel 5.29 Perangko yang Diterbitkan Tahun 2010

No	Jenis Perangko /Tanggal terbit	Tema	Seri
I	DEFINITIF		
1.	29 Maret 2010	Kebudayaan	Identitas (keris, wayang, batik)
II	NON DEFINITIF		
1.	6 Februari 2010	Astrologi	Shio Macan
2.	1 Mei 2010	Olahraga	Piala Dunia Afsl 2010
3.	5 Juni 2100	Lingkungan Hidup	Peduli Lingkungan
4.	3 Juli 2010	Sejarah	Sat Abad Muhammadiyah
5.	6 Juli 2010	Kebudayaan	Makanan Tradisional
6.	15 Juli 2010	Olahraga	Youth Olympic Games 2010
7.	17 Agustus 2010	Tokoh	Presiden dan Wakil Presiden
8.	25 September 2010	Sejarah	200 Tahun Kota Bandung
9.	27 September 2010	Join Issue Stamp	Indonesia-Belanda
10.	24 Oktober 2010	Fauna	Kehidupan laut
11.	5November 2010	Cinta Puspa/ Fauna Nusantara	Identitas Flora dan Fauna Propinsi
12.	13 Desember 2010	Identitas Daerah	Lambang Propinsi

Bab 6

Bidang Telekomunikasi

Pembangunan telekomunikasi di Indonesia telah memasuki babak baru dengan semakin berkembang pesatnya industri teknologi informasi. Jangkauan telepon seluler sudah mencapai seluruh propinsi di Indonesia dan sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia. Penyelenggara jasa telekomunikasi juga semakin banyak dengan semakin banyaknya jenis jasa telekomunikasi yang disediakan dari mulai telepon tetap, telepon bergerak, wireless telepon dan sebagainya. Komunikasi seluler juga hanya bukan komunikasi suara tapi juga sudah meluas kepada komunikasi data. Semakin sulit memisahkan antara kegiatan jasa telekomunikasi dengan aplikasi telekomunikasi. Pertumbuhan pengguna jasa telekomunikasi dan pelanggan telepon khususnya untuk telepon bergerak juga semakin tinggi dengan semakin banyaknya aplikasi yang melekat pada perangkat telekomunikasi.

Pertumbuhan sektor jasa telekomunikasi merupakan yang tertinggi dalam perekonomian nasional dibanding sektor-sektor lainnya. Kelompok transportasi dan komunikasi juga kini menjadi salah satu kelompok kebutuhan pokok yang digunakan dalam penghitungan inflasi. Perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat tidak dapat dipungkiri telah memberikan perubahan yang sangat mendasar dalam pengelolaan aktifitas bisnis. Jarak dan batas teritorial suatu negara tidak menjadi hambatan lagi dengan adanya teknologi telekomunikasi.

Perusahaan telekomunikasi di Indonesia telah menyediakan produk berupa jasa – jasa telekomunikasi, baik domestik maupun internasional. Jasa – jasa telekomunikasi yang ditawarkan meliputi sambungan tetap dan bergerak, komunikasi data dan sewa sambungan, dan berbagai jasa bernilai tambah.

6.1. Ruang Lingkup

Pembangunan pertelekomunikasian di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan jumlah telepon pengguna berbayar dan kualitas penyelenggaraan telekomunikasi. Peningkatan kesejahteraan masyarakat seiring dengan perkembangan telekomunikasi itu, dapat ditunjukkan oleh beberapa indikator yang dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan untuk menentukan strategi pembangunan yang terkait dengan pertelekomunikasian secara nasional maupun regional. Untuk mendukung keinginan ini, penyajian data telekomunikasi tentu merupakan suatu kebutuhan.

Ruang lingkup penyajian data telekomunikasi meliputi data dan statistik yang terkait dengan jasa penyelenggaraan telekomunikasi baik dari sisi operator, pelanggan, *revenue* dan pendapatan operator, satuan sambungan telekomunikasi sampai dengan program pengembangan telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah.

6.2. Konsep dan Definisi

Jasa-jasa penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia meliputi berbagai bentuk. Jasa-jasa tersebut secara rinci sebagai berikut :

- Jaringan telepon umum/*public switched telephone network*
 - Jasa pelanggan telepon / *telephone subscriber services*
 - Jasa interkoneksi operator telekomunikasi / *interconnection services to other telecommunication operators*
 - Interkoneksi jarak jauh internasional / *international long distance interconnection*
 - Interkoneksi sambungan tetap dan bergerak / *mobile and fixed cellular interconnection*
- Jasa sambungan bergerak / *mobile cellular services*
 - Jasa sambungan analog / *analog cellular services*
 - Jasa sambungan GSM / *GSM cellular services*
 - Jasa sambungan PCN / *PCN cellular services*
- Jasa satelit / *Satellite services*
- Jasa lainnya

- VSAT
- E-mail
- Kartu telepon /*calling cards*

Dalam perkembangan Jasa sambungan bergerak, terdapat beberapa nomor awal yang dimiliki oleh masing-masing operator yang ada. Di bawah ini daftar produk menurut nomor awal :

Nomor awal	Produk	Penyedia
0811	KartuHALO	Telkomsel
0812	SimPATI, KartuHALO	Telkomsel
0813	SimPATI, KartuHALO	Telkomsel
0814	Indosat 3,5G Broadband	Indosat (<u>IndosatM2</u>)
0815	<u>Mentari, Matrix</u>	<u>Indosat</u>
0816	Mentari, Matrix	Indosat
0817	XL Prabayar, XL Pascabayar	<u>XL</u> -Axiata
0818	XL Prabayar, XL Pascabayar	XL-Axiata
0819	XL Prabayar, XL Pascabayar	XL-Axiata
0828	Ceria	Sampoerna Telekom
0831	Solusi	Natrindo Telepon Seluler
0838	Axis	Natrindo Telepon Seluler
0852	Kartu As	Telkomsel
0853	Kartu As Fress	Telkomsel
0855	Matrix Auto	Indosat
0856	IM3	Indosat
0857	IM3	Indosat
0858	Mentari	Indosat
0859	XL Prabayar	XL-Axiata
0877	XL Prabayar	XL-Axiata
0878	XL Prabayar	XL-Axiata
0879	XL Prabayar	XL-Axiata
0881	Smart	Smart Telecom
0888	Fren	Mobile-8

0889	Mobi	Mobile-8
0898	3	Hutchison Charoen Pokphand Telecom
0899	3	Hutchison Charoen Pokphand Telecom

Untuk menciptakan interpretasi yang sama dari setiap pemakai data terhadap terminologi yang digunakan dalam penyajian data telekomunikasi ini, diberikan pengertian atas penggunaan beberapa terminologi yang digunakan, yang meliputi :

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
3. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
4. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
5. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
6. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
8. Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.
9. Kapasitas sentral telepon adalah banyaknya telepon yang tersedia yang telah terpasang dan siap untuk dipasarkan.



10. Telepon tersambung adalah banyaknya telepon yang telah tersambung dan siap untuk digunakan berkomunikasi.
11. Pelanggan atau pengguna adalah perseorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak.
12. Teledensitas adalah indikator yang menunjukkan jumlah satuan sambungan telepon per seratus penduduk.
12. Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation/USO) bidang Telekomunikasi adalah kewajiban pelayanan dari pemerintah di bidang telekomunikasi dalam rangka mendukung peningkatan akses dan keterjangkauan masyarakat terhadap jaringan telekomunikasi khususnya telepon.
13. Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) adalah wilayah-wilayah yang menjadi sasaran dari program USO dibidang telekomunikasi di seluruh Indonesia. Propinsi-propinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta menjadi wilayah sasaran kebijakan dan program USO oleh pemerintah yang dibagi dalam 11 WPUT dengan pembagian :

WPUT I	: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat
WPUT II	: Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung
WPUT III	: Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung
WPUT IV	: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah
WPUT V	: Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan
WPUT VI	: Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah
WPUT VII	: Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara
WPUT VIII	: Papua, Irian Jaya Barat
WPUT IX	: Maluku, Maluku Utara
WPUT X	: Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
WPUT XI	: Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur.

6.3. Statistik Telekomunikasi Indonesia.

6.3.1. Penyelenggara Telekomunikasi di Indonesia.

Perkembangan teknologi dalam bidang telekomunikasi telah mendorong industri telekomunikasi berkembang sangat pesat di Indonesia. Apalagi dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan wilayah geografis yang luas, Indonesia merupakan pasar yang potensial bagi industri di sektor telekomunikasi. Sehingga perkembangan teknologi yang bertemu dengan potensi yang besar ini telah memacu perkembangan sektor telekomunikasi dengan sangat pesat dalam 10 tahun terakhir.

Perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia ditandai dengan jumlah pelaku usaha maupun pelanggan layanan telekomunikasi yang terus meningkat. Namun berbeda dengan negara lain dimana pelaku usaha penyelenggara telekomunikasi tidak terlalu banyak, industri telekomunikasi di Indonesia ditandai dengan jumlah pelaku usaha penyelenggara telekomunikasi yang banyak. Hal ini tidak lepas dari kebijakan persaingan bebas yang diterapkan serta keterbukaan dalam penanaman modal di Indonesia termasuk dalam bidang telekomunikasi khususnya telekomunikasi seluler. Disisi lain, jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas dan berbentuk kepulauan merupakan pasar yang sangat potensial bagi industri telekomunikasi.

Jumlah penyelenggara telekomunikasi dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan untuk ketiga jenis penyelenggaraan yaitu penyelenggara jaringan tetap, jaringan bergerak maupun penyelenggara jasa telekomunikasi. Jumlah penyelenggara jaringan tetap pada tahun 2010 mengalami peningkatan dari 86 perusahaan pada tahun 2009 menjadi 91 perusahaan pada 2010, atau meningkat sebanyak sebesar 5,8%. Pada tahun sebelumnya (2009) peningkatan lebih besar lagi yaitu sebanyak 22 perusahaan baru di bidang penyelenggara jaringan tetap atau meningkat sebesar 32% dibanding tahun 2008. Peningkatan yang cukup signifikan dalam dua tahun berturut-turut menandai perkembangan telekomunikasi untuk jaringan tetap yang positif di Indonesia. Diantara jenis



penyelenggara jaringan tetap, peningkatan terbesar terjadi untuk penyelenggara jaringan tetap tertutup yang meningkat sebesar 6,9% setelah pada tahun sebelumnya meningkat sebesar 31,8%. Sementara untuk penyelenggara jaringan tetap lokal meningkat sebesar 4,3%.

Untuk penyelenggara jaringan bergerak tidak terdapat peningkatan jumlah penyelenggara pada tahun 2010 setelah pada tahun sebelumnya meningkat cukup signifikan yaitu 13,3%. Tidak adanya penambahan ini karena untuk penyelenggaraan jaringan bergerak membutuhkan investasi yang cukup besar. Disamping itu, saat ini pemain dari jaringan bergerak ini khususnya untuk jaringan bergerak seluler sudah cukup banyak yaitu 8 perusahaan. Dengan kompetisi yang semakin ketat, diduga untuk penyelenggara jaringan bergerak ini tidak banyak lagi penambahan penyelenggara.

Tabel 6.1. Jumlah Penyelenggara Telekomunikasi di Indonesia 2008 – 2010

No	Jenis-Jenis Penyelenggaraan	2008	2009	2010
I	Penyelenggara Jaringan Tetap	64	86	91
	1. Penyelenggara jaringan tetap lokal	16	23	24
	- Circuit Switch + Jasa Teleponi dasar	16	6	6
	- Packet Switch		17	18
	2. Penyelenggara jaringan tetap jarak jauh (SLJJ)	2	2	2
	3. Penyelenggara jaringan tetap Internasional (SLI)	2	3	3
	4. Penyelenggara jaringan tetap tertutup	44	58	62
II	Penyelenggara Jaringan Bergerak	15	17	17
	1. Penyelenggara jaringan bergerak terrestrial radio trunking	6	8	8
	2. Penyelenggara jaringan bergerak selular	8	8	8
	3. Penyelenggara jaringan bergerak satelit	1	1	1
III	Penyelenggara Jasa	271	269	288
	1. Penyelenggara jasa nilai tambah teleponi (Calling Card, Premium Call dan Call Center)	58	29	27
	2. Penyelenggara jasa ISP	150	169	181
	3. Penyelenggara jasa NAP	32	39	43
	4. Penyelenggara jasa ITKP	25	25	28
	5. Penyelenggara jasa Siskomdat	6	7	9
IV	Penyelenggara Telekomunikasi Khusus	14	20	23

Pada kelompok penyelenggara jasa telekomunikasi, terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2010 ini yaitu sebanyak 19 perusahaan menjadi 288 atau terjadi peningkatan sebanyak 7,1%. Peningkatan ini cukup besar dibanding tahun sebelumnya yang justru mengalami penurunan. Peningkatan jumlah penyelenggara jasa telekomunikasi ini berasal dari penyelenggara jasa Internet Service Provider (ISP), penyelenggara jasa Network Access Provider (NAP) dan penyelenggara jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) serta jasa sistem komunikasi data (siskomdat) yang keseluruhannya adalah jasa multimedia khususnya layanan berbasis *internet protocol*. *Booming* pertumbuhan penggunaan internet yang digunakan untuk berbagai keperluan dan penggunaanya yang semakin *mobile* telah mendorong peningkatan jumlah penyelenggara jasa telekomunikasi ini. Sehingga meskipun penyelenggara jasa nilai tambah teleponi menurun akibat aturan yang semakin ketat, namun secara total jumlah penyelenggara jasa telekomunikasi tetap meningkat. Penurunan penyelenggara jasa nilai tambah teleponi pada tahun 2010 juga tidak sebesar penurunan pada tahun sebelumnya.

Proporsi peningkatan terbesar dari peningkatan pada penyelenggara jasa siskomdat yang meningkat 28,6% meskipun secara absolut peningkatan paling besar pada penyelenggara jasa ISP sebanyak 12 perusahaan. Untuk penyelenggara jasa telekomunikasi khusus, meskipun tidak sebesar peningkatan pada tahun sebelumnya, pada tahun 2010 jumlahnya masih meningkat sebesar 15%. Untuk penyelenggara telekomunikasi khusus, pada tahun 2010 ini terjadi peningkatan sebesar 15%. Meskipun peningkatannya lebih kecil dibanding tahun sebelumnya yang meningkat 43%, tapi peningkatan ini juga melanjutkan tren pertumbuhan yang positif dari penyelenggara telekomunikasi khusus ini.

Untuk penyelenggara telepon, sampai akhir tahun 2010 jumlah dan pelaku usahanya tidak mengalami perubahan dengan penyelenggara telepon pada tahun sebelumnya. Penyelenggara telepon tetap kabel terdiri dari 3 perusahaan yaitu PT. Telkom, PT Indosat dan PT. Batam Bintan Telekomunikasi (BBT). Pada jenis telepon tetap nirkabel terdapat empat penyelenggara yaitu PT. Telkom, PT. Indosat, PT. Bakrie Telecom dan PT. Mobile-8. Untuk penyelenggaraan telepon bergerak dengan pasar yang paling dinamis dan tumbuh dengan cepat, di Indonesia terdapat 8 penyelenggara dengan pangsa pasar yang berbeda-beda dan status investasi yang berbeda-beda antara investasi asing dan investasi dalam



negeri. Peningkatan jumlah penyelenggara telepon bergerak terutama terjadi dalam lima tahun terakhir.

Tabel 6.2 Penyelenggara telepon di Indonesia Tahun 2010.

No	Jenis Penyelenggaraan	Nama Operator	Jumlah
1	Telepon Tetap Kabel	PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom)	3
		PT. Indosat	
		PT. Batam Bintang Telekomunikasi (BBT)	
2	Telepon Tetap Nirkabel	PT. Telkom	4
		PT. Indosat	
		PT. Bakrie Telecom	
		PT. Mobile-8	
3	Telepon Bergerak	PT. Telkomsel	8
		PT. Indosat	
		PT. XL-Axiata	
		PT. Mobile-8	
		PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI)	
		PT. Natrindo Telepon Seluler (NTS)	
		PT. Hutchison CP Telecommunication	
		Smart Telecom	

6.3.2. Kapasitas Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Perkembangan sektor telekomunikasi juga ditandai dengan peningkatan yang terjadi pada kapasitas yang dimiliki oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi pada masing-masing kelompok. Langkah yang dilakukan operator penyelenggara jaringan telepon untuk menambah kapasitas jaringan yang dimiliki adalah upaya untuk menjaring pelanggan sebanyak mungkin dan memanfaatkan potensi pasar pelanggan telepon khususnya telepon nirkabel dan telepon bergerak seluler. Namun kemampuan membangun dan meningkatkan kapasitas penyelenggaraan ini berbeda untuk masing-masing investor, tergantung pada kemampuan investasi yang dimiliki. Sementara kapasitas tersambung mencerminkan jumlah pelanggan dari penyelenggaraan jaringan yang dilakukan, yang sekaligus menunjukkan sejauh mana pasar (konsumen) memilih menggunakan jaringan yang ditawarkan.

Pada kelompok jaringan telepon tetap, meskipun kapasitas terpasang jaringan telah ditingkatkan pada tahun sebelumnya, ternyata tidak terjadi peningkatan yang signifikan

untuk kapasitas tersambung. Secara total, peningkatan kapasitas tersambung untuk jaringan tetap kabel hanya meningkat 0,1%. Peningkatan ini juga hanya berasal dari salah satu penyelenggara yaitu PT. Telkom. Sementara dua operator lain tidak menunjukkan peningkatan kapasitas tersambung. Peningkatan kapasitas tersambung telepon tetap kabel menunjukkan bahwa masih terdapat permintaan untuk jenis telepon tetap kabel ini sejalan dengan perkembangan kegiatan masyarakat, setelah kapasitas tersambung pada tahun 2009 mengalami penurunan.

Tabel 6.3. Kapasitas Telepon tetap kabel dan wireless Tahun 2008- Tahun 2010

Jenis Penyelenggaraan	Operator	2008		2009		2010*	
		Kapasitas Terpasang	Tersambung	Kapasitas Terpasang	Tersambung	Kapasitas Terpasang	Tersambung
Tetap Kabel	Telkom	9.839.000	8.629.783	12.241.932	8.376.793	12.241.932	8.382.000
	Indosat**	91.290	42.145	91.290	44.973	91.290	44.973
	BBT	5.404	2.300	5.404	2.207	5.404	2.207
Jumlah		9.935.694	8.674.228	12.247.336	8.423.973	12.247.336	8.429.180
Tetap Wireless	Telkom	19.861.324	13.305.181	26.700.761	15.139.057	26.700.761	18.161.278
	Indosat	3.771.400	761.589	N.A	594.133	N.A	697.405
	Bakrie	13.251.700	7.304.543	19.130.953	10.585.701	19.130.953	12.072.322
	Mobile 8	1.497.600	332.530	1.600.560	66.763	1.600.560	840.983
Jumlah		38.382.024	21.703.843	47.432.274	26.385.654	47.432.274	31.771.988

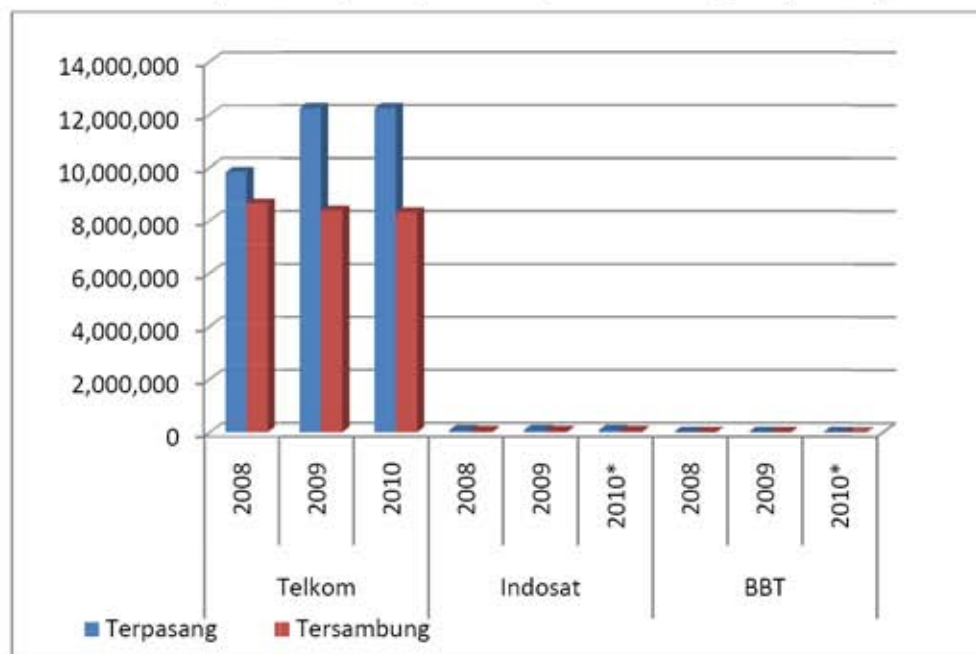
*) Kapasitas terpasang tahun 2010 menggunakan data tahun 2009

**) Untuk Indosat, data kapasitas terpasang 2009 dan 2010* menggunakan data tahun 2008

Pada kelompok telepon tetap nirkabel (fixed wireless access/FWA), pada tahun 2010 ini kapasitas tersambung secara total meningkat sebesar 20,4%. Peningkatan ini sedikit lebih rendah dari peningkatan kapasitas tersambung pada tahun sebelumnya. Peningkatan kapasitas tersambung untuk telepon tetap nirkabel ini dialami oleh semua operator penyelenggara jaringan, dengan peningkatan terbesar pada PT. Mobile-8 yang mencapai 1159%. Namun karena volume kapasitas tersambung tidak besar, maka peningkatannya tidak berpengaruh besar terhadap peningkatan total kapasitas tersambung telepon tetap nirkabel. PT. Telkom dan PT. Bakrie Telecom yang memiliki kapasitas terpasang paling besar di kelompok ini, peningkatan kapasitas tersambung pada tahun 2010 masing-masing mencapai 20% dan 14%.

Perbandingan antara kapasitas terpasang dan kapasitas tersambung telepon tetap kabel menunjukkan bahwa masih banyak kapasitas terpasang yang termanfaatkan. Ketika kapasitas terpasang telepon tetap kabel meningkat signifikan pada tahun 2009, khususnya untuk untuk Telkom sebagai operator utama, kapasitas tersambunganya tidak mengalami peningkatan signifikan, bahkan menurun pada tahun 2009. Hal ini menunjukkan masih sangat terbuka untuk meningkatkan pemanfaatan kapasitas yang dimiliki dengan menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan akses masyarakat/penduduk terhadap telepon tetap kabel melalui berbagai strategi.

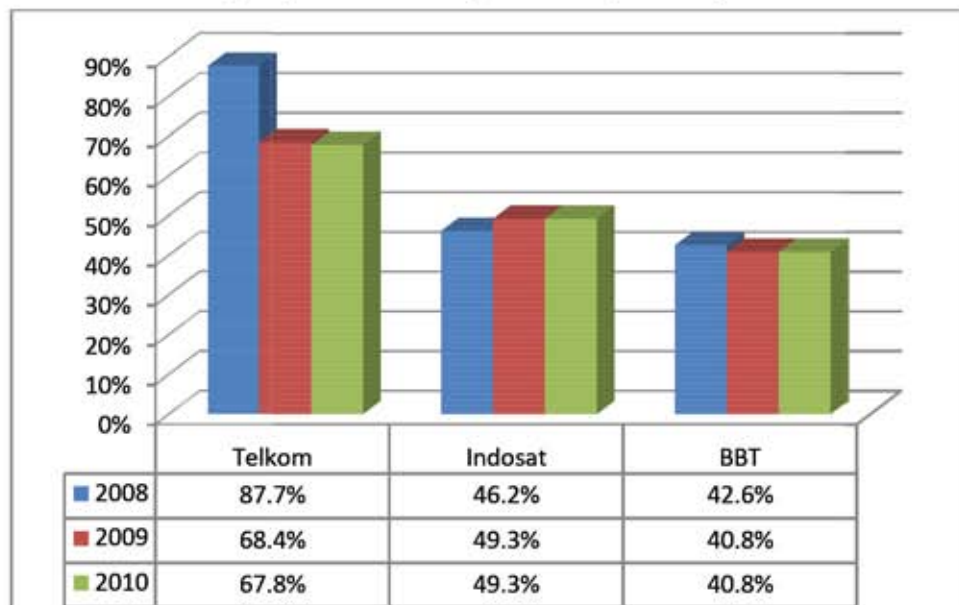
Gambar 6.1. Kapasitas Terpasang dan Telepon tersambung telepon tetap kabel



Gambar 6.2 memperjelas masih rendahnya tingkat pemanfaatan kapasitas terpasang pada telepon tetap kabel. Untuk kapasitas di PT. Telkom, tingkat pemanfaatan kapasitasnya bahkan mengalami penurunan dari 87,7% pada 2008 menjadi tinggal 67,8% pada 2010. Hal ini disebabkan peningkatan kapasitas terpasang yang dilakukan pada tahun 2009 tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas terambung. Sementara untuk Indosat, meskipun mengalami peningkatan pemanfaatan kapasitas terpasang yang dimiliki, namun tingkat pemanfaatannya masih sangat rendah yaitu dibawah 50%. Hal yang sama juga terjadi untuk tingkat pemanfaatan kapasitas di PT. BBT yang bahkan dengan tingkat pemanfaatan yang

masih trendah, juga mengalami penurunan dari 42,6% pada 2008 menjadi 40,8% pada tahun 2010.

Gambar 6.2. Tingkat pemanfaatan kapasitas telepon tetap kabel 2007- 2010

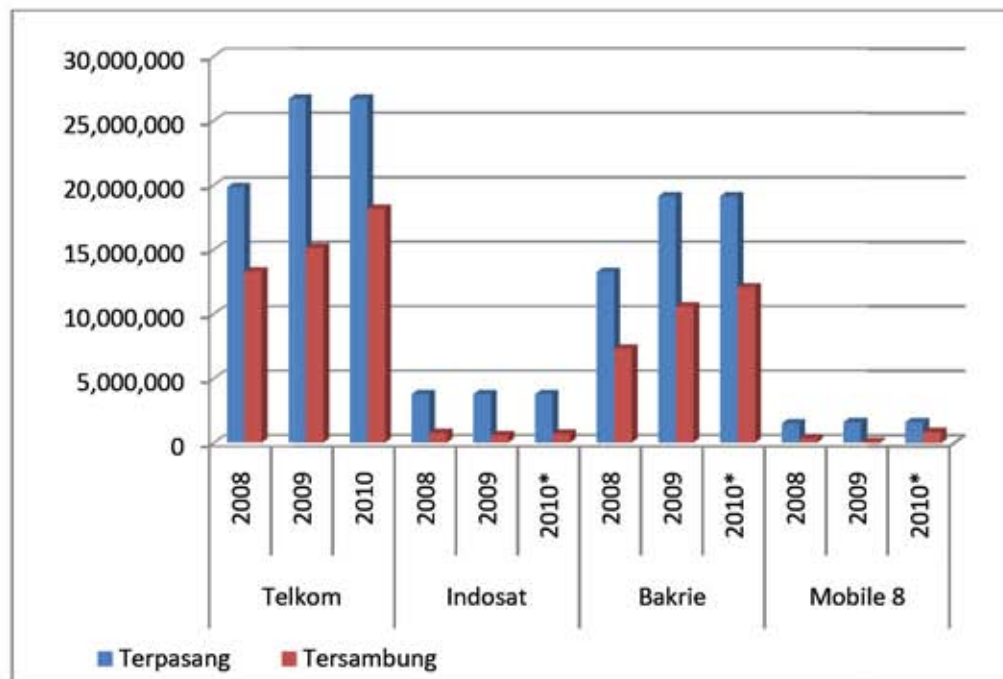


Peningkatan kapasitas terpasang dan tersambung yang rendah untuk jaringan tetap kabel dipengaruhi oleh pertumbuhan dan penetrasi untuk jenis telepon tetap nirkabel dan telepon bergerak seluler yang semakin luas dan harga yang terjangkau. Sehingga penggunaan telepon tetap kabel hanya mengandalkan dari badan usaha, lembaga non pemerintah dan instansi pemerintah

Untuk telepon tetap nirkabel, peningkatan kapasitas terpasang tidak dapat diikuti sepenuhnya oleh peningkatan kapasitas tersambung. Peningkatan kapasitas terpasang oleh operator-operator utama seperti Telkom dan Bakrie Telecom lebih tinggi daripada peningkatan kapasitas tersambung. Akibatnya, kapasitas terpasang operator penyelenggara yang sejak awal lebih tinggi dari kapasitas tersambung, semakin tidak dapat diikuti oleh peningkatan kapasitas tersambung. Pada semua operator jaringan tetap nirkabel (FWA) ini dalam tiga tahun terakhir lebih tinggi daripada kapasitas tersambung. PT.

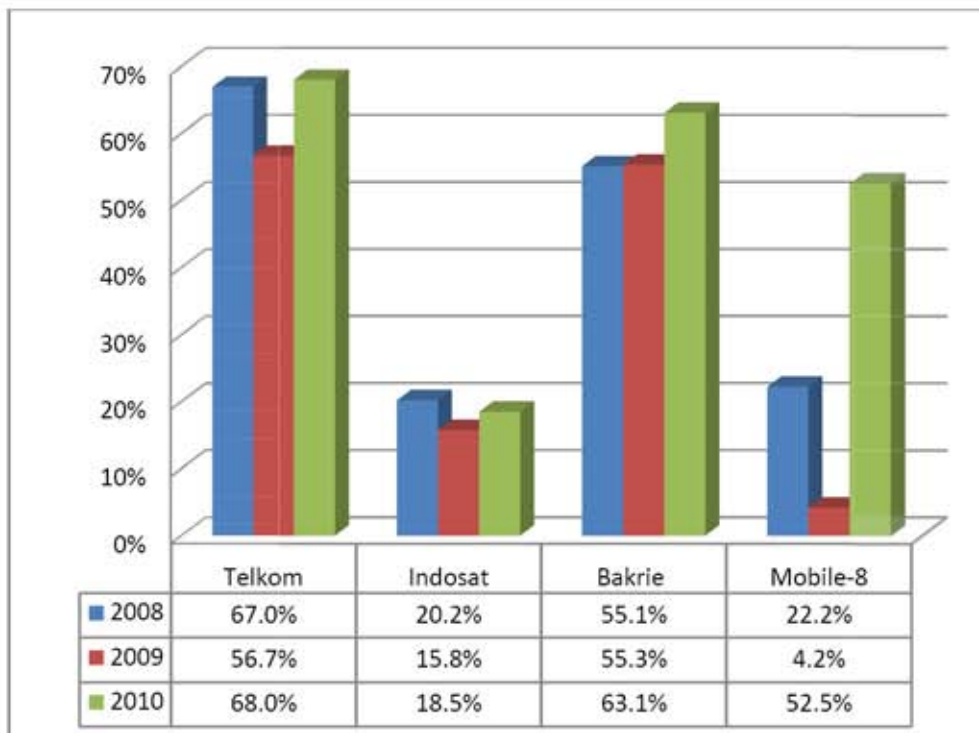
Telkom dan Bakrie Telecom yang memiliki kapasitas yang besar pada kelompok ini bahkan memiliki selisih kapasitas terpasang dengan kapasitas tersambung yang cukup besar.

Gambar 6.3. Kapasitas terpasang dan tersambung telepon tetap wireless 2008- 2010



Tingkat pemanfaatan kapasitas terpasang pada kelompok jaringan tetap nirkabel ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan kapasitas yang relatif tinggi terjadi pada dua operator utama yaitu Telkom dan Bakrie. Tingkat pemanfaatan kapasitas di PT. Telkom melalui produk Telkom-Flexy mencapai 68% pada tahun 2010, yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Sementara untuk Bakrie Telecom melalui produk Esia, tingkat pemanfaatan kapasitasnya mencapai 63% pada tahun 2010, yang juga meningkat dari tahun sebelumnya. Dua operator lain yaitu Indosat dan Mobile-8, tingkat pemanfaatan kapasitasnya masih sangat rendah yaitu kurang dari 30%. Namun untuk Mobile-8 terjadi peningkatan pemanfaatan kapasitas yang signifikan pada tahun 2010 setelah dikeluarkannya produk Duo yang menggabungkan jaringan tetap nirkabel dengan jaringan bergerak seluler. Tingkat pemanfaatan kapasitas juga menunjukkan terjadinya fluktuasi dalam tiga tahun terakhir dimana pemanfaatan kapasitas cenderung menurun pada tahun 2009 dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2010.

Gambar 6.4. Tingkat pemanfaatan kapasitas telepon tetap wireless 2008 – 2010



Perkembangan kapasitas terpasang dan tersambung untuk jaringan bergerak seluler menunjukkan adanya peningkatan kapasitas tersambung yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Peningkatan kapasitas tersambung terjadi pada hampir semua penyelenggara jaringan bergerak seluler kecuali untuk Mobile-8 dan STI. Dengan asumsi tidak ada peningkatan pada kapasitas terpasangnya (karena data yang tersedia masih data tahun 2009), maka peningkatan kapasitas tersambung ini akan meningkatkan pemanfaatan kapasitas pada jaringan bergerak seluler ini.

Peningkatan kapasitas tersambung jaringan bergerak seluler paling tinggi dialami oleh Natrindo (NTS) yang meningkat sebesar 137%. Sementara untuk penyelenggara terbesar pada jaringan bergerak seluler ini yaitu Telkomsel, peningkatan kapasitas tersambung mencapai 15,1%. Dua penyelenggara dengan pengalaman dan pelanggan cukup besar yaitu Indosat dan XL-Axiata, peningkatan kapasitas tersambung masing-masing mencapai 33,4% dan 28,3%. Peningkatan kapasitas tersambung pada ketiga operator ini menjadikan kapasitas tersambung jaringan bergerak seluler ini meningkat cukup signifikan.

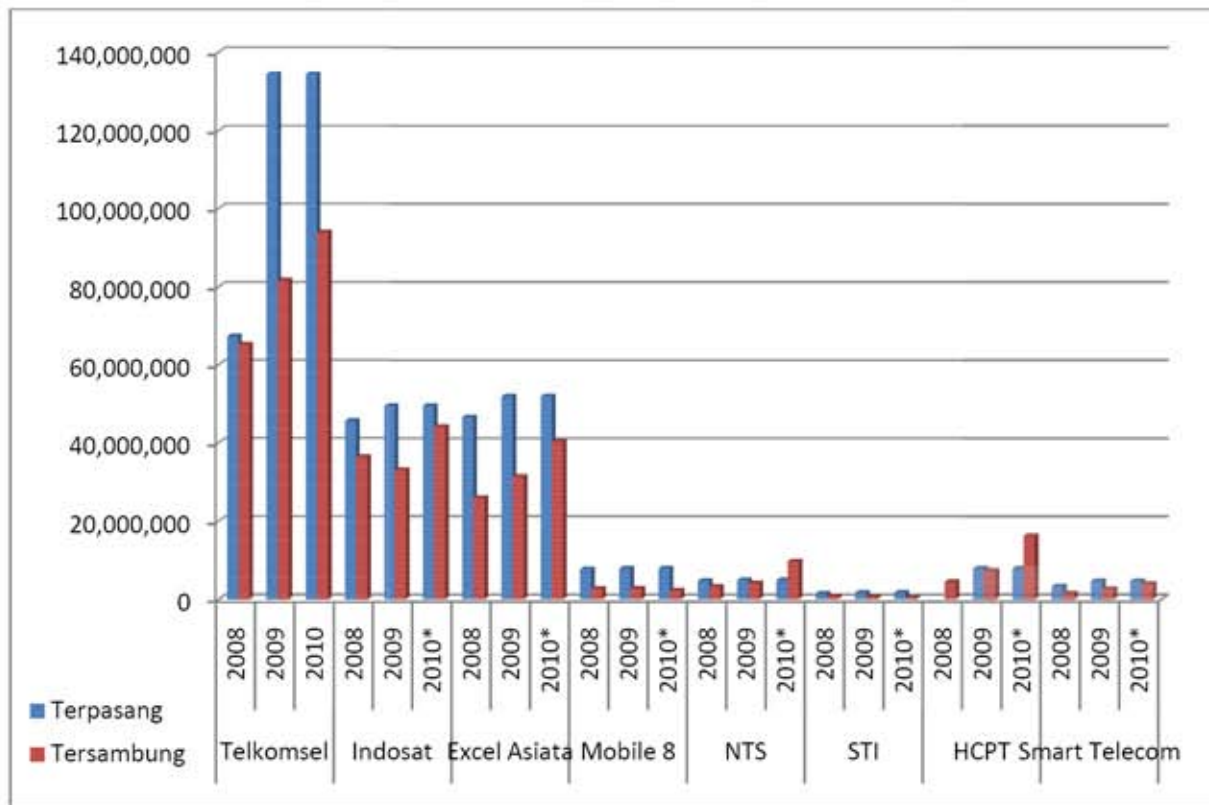
Tabel 6.4. Kapasitas Terpasang dan Tersambung telepon Bergerak Tahun 2008 – 2010

Operator	2008		2009		2010	
	Kapasitas Terpasang	Tersambung	Kapasitas Terpasang	Tersambung	Kapasitas Terpasang	Tersambung
Telkomsel	67.300.000	65.299.991	134.500.000	81.643.532	134.500.000	94.010.449
Indosat	45.651.920	36.510.246	49.525.000	33.136.521	49.525.000	44.217.600
XL-Axiata	46.645.061	26.015.517	52.000.000	31.438.377	52.000.000	40.350.874
Mobile-8	7.748.400	2.701.914	7.880.400	2.805.842	7.880.400	2.240.388
Natrindo Telepon Seluler	4.719.107	3.234.800	4.902.808	4.105.156	4.902.808	9.729.464
STI	1.494.134	784.343	1.722.093	636.868	1.722.093	348.527
Hutchison CP Telecommuni-cation	N.A	4.500.609	7.857.000	7.311.000	7.857.000	16.270.000
Smart Telecom	3.300.000	1.530.823	4.665.000	2.599.665	4.665.000	3.978.127
Jumlah	176.858.622	140.578.243	263.052.301	163.676.961	263.052.301	211,145,429

*) Kapasitas terpasang tahun 2010 menggunakan data tahun 2009

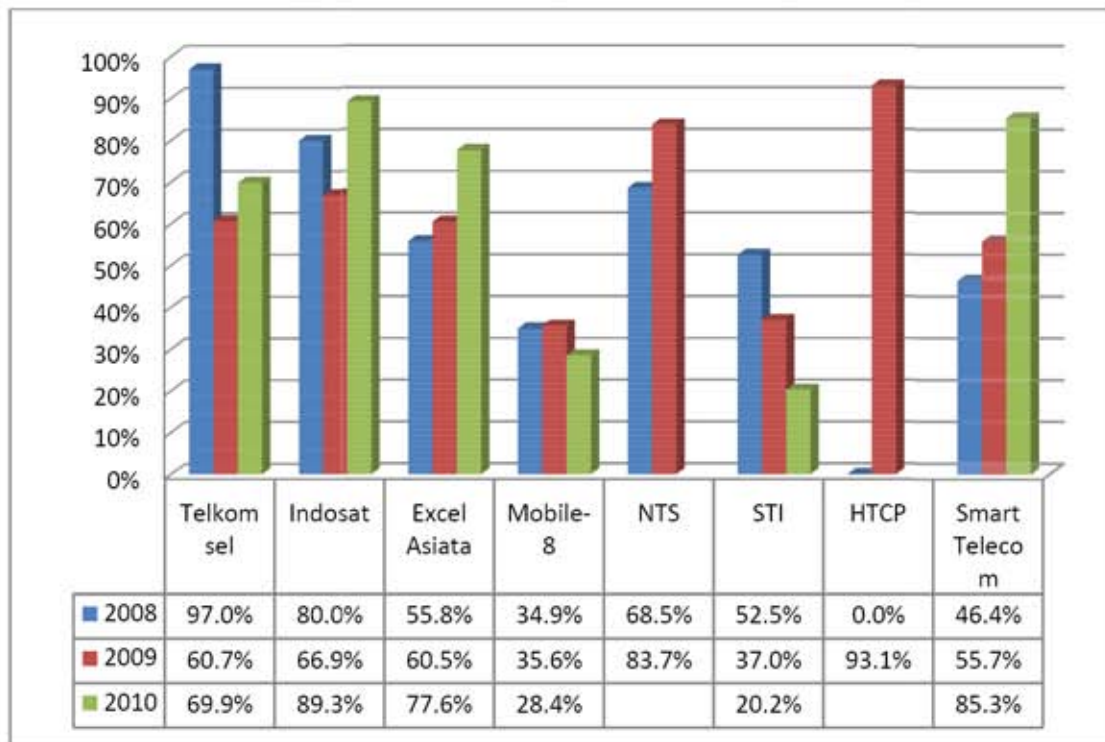
Perbandingan antara kapasitas terpasang dengan kapasitas tersambung pada jaringan bergerak seluler menunjukkan bahwa meskipun secara umum terjadi peningkatan kapasitas tersambung, namun kapasitas tersambung pada masing-masing penyelenggara jaringan bergerak seluler ini masih lebih rendah dari kapasitas terpasangnya. Bahkan untuk penyelenggara jaringan bergerak seluler terbesar yaitu Telkomsel, kapasitas terpasang yang dimiliki masih jauh lebih besar daripada kapasitas tersambung. Sementara untuk operator besar lain yaitu Indosat dan XL-Axiata, kapasitas tersambung yang ada saat ini sudah mendekati kapasitas terpasangnya pada tahun 2009 (belum tersedia data kapasitas terpasang untuk tahun 2010). Untuk beberapa operator penyelenggara kecil seperti NTS dan Hutchinson CPT, kapasitas tersambung pada tahun 2010 sudah lebih besar daripada kapasitas terpasangnya pada tahun 2009. Kondisi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kapasitas tersambung yang cukup besar pada kedua operator penyelenggara tersebut dan diduga juga sudah terjadi peningkatan pada kapasitas terpasangnya pada tahun 2010 (data pasti belum tersedia).

Gambar 6.5. Kapasitas Terpasang dan Tersambung telepon bergerak seluler 2007-2010



Berdasarkan kondisi kapasitas terpasang dan kapasitas tersambung masing-masing operator penyelenggara, terlihat bahwa meskipun tergolong operator besar, tiga operator penyelenggara yaitu Telkomsel, Indosat dan XL-Axiata masih memiliki tingkat pemanfaatan kapasitas yang belum sepenuhnya optimal meskipun sudah cukup tinggi. Hal ini disebabkan ketiga operator penyelenggara tersebut memiliki kapasitas terpasang yang besar dari investasi yang dilakukannya.

Gambar 6.6.Tingkat pemanfaatan kapasitas telepon bergerak 2007 – 2010



6.3.3. Perkembangan Pelanggan Jaringan Telekomunikasi.

Perkembangan dalam bidang telekomunikasi khususnya nirkabel dan seluler baik dari sisi perangkat telepon maupun penyelenggaraan jaringan bergerak seluler dan nirkabel sangat terlihat dari perkembangan jumlah pelanggan jaringan telekomunikasi yang ditunjukkan oleh Tabel 6.5. Jumlah pelanggan bergerak seluler. Pelanggan jaringan tetap kabel memang tidak menunjukkan perkembangan yang tinggi karena peningkatan yang terjadi masih sangat rendah yaitu hanya 0,1% dan hanya berasal dari PT. Telkom. Dua operator telepon tetap kabel lainnya tidak menunjukkan penambahan pelanggan.

Pada jenis telepon tetap nirkabel, peningkatan jumlah pelanggan pada tahun 2010 mencapai 20,4%. Peningkatan ini hanya sedikit lebih rendah dari peningkatan tahun sebelumnya yang mencapai 19,2%. Peningkatan terbesar dialami oleh Mobile -8 yang meningkat 152,8% namun dengan jumlah pelanggan yang tidak terlalu besar dibanding operator lain. Sementara Telkomsel Flexy yang merupakan operator telepon tetap nirkabel terbesar dengan peningkatan sebesar 20%. Bakrie Telecom yang merupakan operator terbesar kedua juga mengalami peningkatan sebesar 14%. Secara rata-rata dalam lima tahun terakhir, pelanggan jaringan tetap nirkabel ini telah meningkat sebesar 50,2% per

tahun. Persaingan diantara penyelenggara jaringan tetap nirkabel terutama Telkom-flexy dengan Bakrie-Esia melalui penawaran teknologi baru, paket *bundling* (perangkat dan SIM Card) dengan harga yang semakin terjangkau, promosi yang gencar dan perkembangan penggunaan internet melalui perangkat telepon seluler telah membantu mendorong peningkatan jumlah pelanggan jaringan tetap nirkabel. Apalagi penggunaan jaringan ini juga semakin *mobile* dan tidak dibatasi oleh satu wilayah saja sehingga bisa dibawa ke berbagai daerah.

Tabel 6.5. Perkembangan Pelanggan Jaringan Tetap Lokal 2005 – 2010

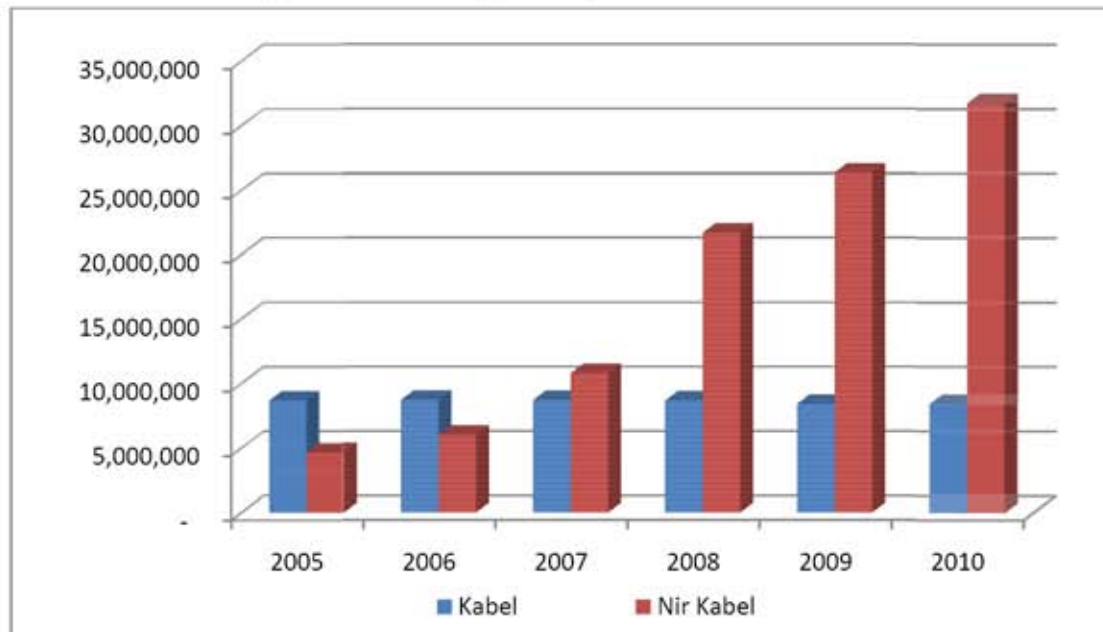
No	Jenis Infrastruktur	2006	2007	2008	2009	2010
A	Kabel	8.738.343	8.717.872	8.674.228	8.423.973	8.429.180
1	PT. Telkom	8.709.211	8.685.000	8.629.783	8.376.793	8.382.000
2	PT Indosat I-Phone	26.632	30.479	42.145	44.973	44.973
3	PT. BBT	2.500	2.393	2.300	2.207	2.207
B	Nir Kabel (wireless)	6.014.031	10.811.635	21.703.843	26.672.621	31.771.988
1	PT Telkom Flexi	4.175.853	6.363.000	13.305.181	15.139.057	18.161.278
	Prabayar	3.381.426	5.535.000	12.568.620	14.490.010	17.614.783
	Pasca bayar	794.427	828.000	736.561	649.047	546.495
2	PT. Indosat StarOne	358.980	627.934	761.589	594.133	697.405
	Prabayar	338.435	594.203	681.362	525.391	631.082
	Pasca bayar	20.545	33.731	80.227	68.742	66.323
3	PT. Bakrie Tel- Esia	1.479.198	3.820.701	7.304.543	10.585.701	12.072.322
	Prabayar	1.414.920	3.695.817	7.196.518		
	Pasca bayar	64.278	124.884	108.025		
4	PT. Mobile-8*	N.A	N.A	332.530	332.530	840.983
	Prabayar	N.A	N.A	N.A	66.526	837.138
	Pasca bayar	N.A	N.A	N.A	237	3.845
	Jumlah	14.752.374	19.529.507	30.378.071	35.096.594	40.201.168

*) Mulai beroperasi tahun 2008. Data tahun 2010 termasuk FrenDuo (Nirkabel+seluler)

Perbandingan antara perkembangan pelanggan telepon tetap kabel dan telepon tetap nirkabel menunjukkan trend perkembangan yang sangat berbeda. Telepon tetap nirkabel memiliki pertumbuhan jumlah pelanggan yang sangat pesat. Pertumbuhan yang besar terutama terjadi pada tahun 2007 dan 2008 dimana jumlah pelanggan meningkat lebih dari 4 juta pada 2007 dan lebih dari 11 juta pada 2008 seperti ditunjukkan gambar 6.7. Pada

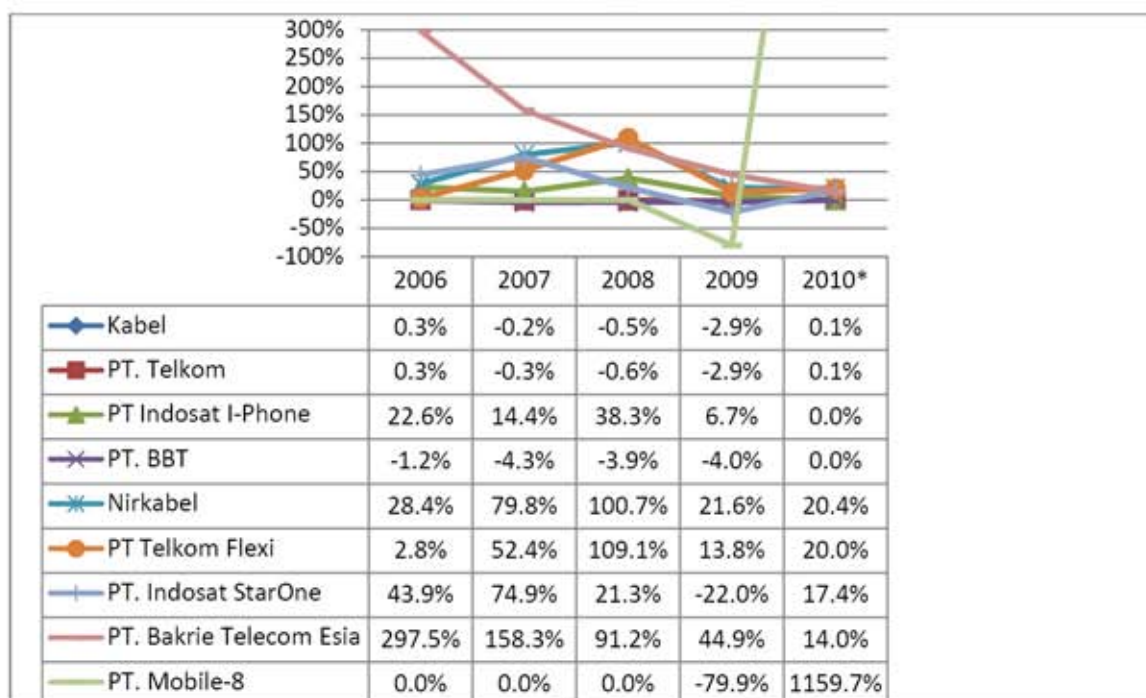
tahun 2010, pelanggan telepon tetap nirkabel telah bertambah lebih dari 5 juta pelanggan dari tahun sebelumnya. Sementara telepon tetap kabel menunjukkan perkembangan pelanggan yang cenderung stagnan. Jumlah pelanggan telepon tetap kabel yang sampai tahun 2006 masih lebih banyak daripada telepon tetap nirkabel, pada tahun 2010 hanya tinggal 24% dari pelanggan telepon tetap nirkabel.

Gambar 6.7 Perbandingan Jumlah Pelanggan Telepon Kabel dan Nirkabel 2005 - 2010



Jika dilihat dari pertumbuhan jumlah pelanggan, gambar 6.8 menunjukkan perbedaan yang sangat kontras antara pertumbuhan pelanggan telepon tetap kabel dan telepon tetap nirkabel. Pertumbuhan pelanggan telepon tetap kabel menunjukkan pertumbuhan yang stagnan, bahkan negatif pada periode 2007-2009. Sementara pertumbuhan pelanggan telepon tetap nirkabel menunjukkan grafik yang tinggi. Meskipun sejak 2008 pertumbuhan pelanggan telepon tetap nirkabel mulai melambat, namun jumlah pelanggan telepon tetap nirkabel masih menunjukkan pertumbuhan yang positif sampai dengan tahun 2010. Melambatnya pertumbuhan ini lebih disebabkan oleh pertumbuhan yang sangat tinggi pada periode sebelumnya sehingga ketika mencapai puncaknya, pertumbuhan pelanggan mulai menurun. Hanya Indosat (StarOne) yang menunjukkan pertumbuhan negatif pada tahun 2009 yang lebih disebabkan karena sulit bersaing dengan operator lain. Namun pada tahun 2010 pertumbuhan pelanggan Indosat (Starone) mulai kembali positif.

Gambar 6.8. Pertumbuhan Jumlah Pelanggan Jaringan Tetap Lokal 2006- 2010



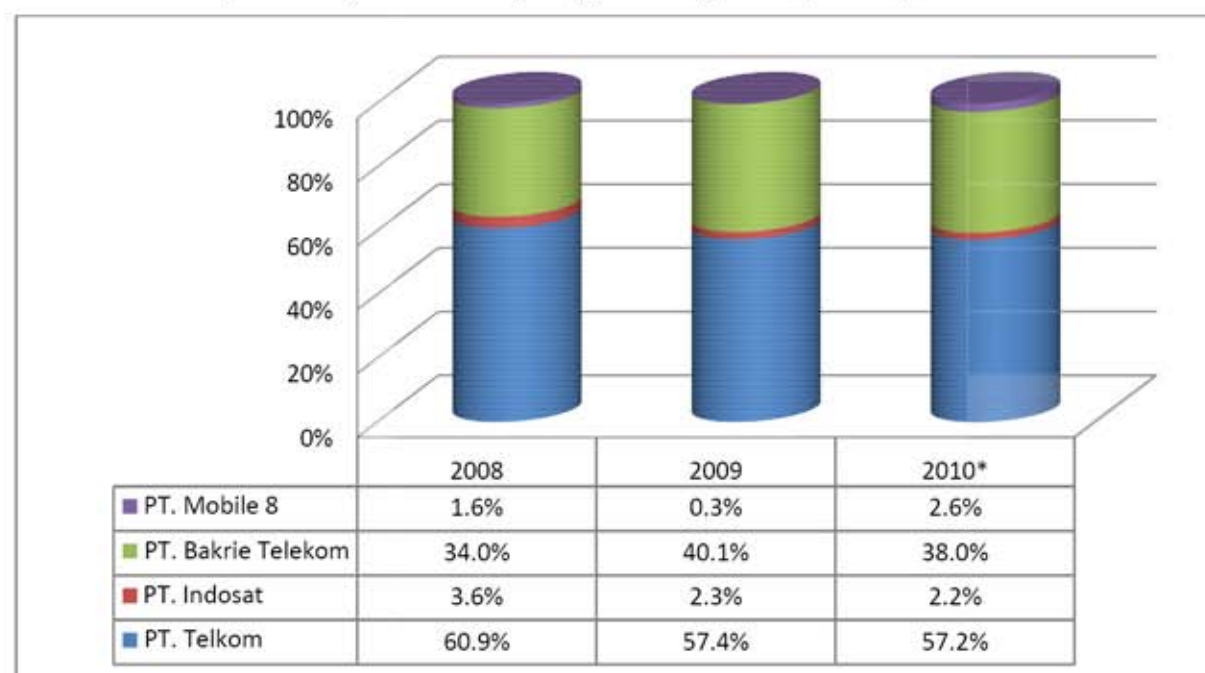
Pangsa pasar diantara penyelenggara telepon tetap nirkabel ini masih didominasi oleh dua operator utama yaitu Telkom (Flexy) dan Bakrie (Esia). Tabel 6.6 dan gambar 6.8 menunjukkan dalam tiga tahun terakhir kedua operator ini menguasai lebih dari 90% pangsa pasar pelanggan telepon tetap nirkabel. Bahkan pada tahun 2009, pangsa pasar kedua operator ini mencapai 97,5% dari total pelanggan telepon tetap nirkabel. Namun pada tahun 2010 pangsa mereka sedikit menurun menjadi sekitar 95% karena peningkatan pelanggan Mobile-8. Dua operator lain yaitu Indosat (StarOne) dan Mobile-8 (Hepi) masing-masing hanya memiliki pangsa 2,62% dan 2,6%. Pangsa pelanggan terbesar dikuasai oleh Telkom Flexy yang akhir tahun 2010 menguasai pangsa 57,2%, sementara Bakrie-Esia menguasai 38%. Pangsa pasar kedua operator ini sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 6.6. Profil Penyelenggara Jaringan Telepon tetap Wireless

Operator	Produk	Tahun Mulai Operasi	2008		2009		2010*	
			Jumlah Pelanggan	Pangsa Pasar	Jumlah Pelanggan	Pangsa Pasar	Jumlah Pelanggan	Pangsa Pasar
PT. Telkom	Telkom Flexi	2002	13.051.181	60,9%	15.139.057	57,4%	18.161.278	57,2%
PT. Indosat	StarOne	2004	761.589	3,6%	594.133	2,3%	697.405	2,2%
PT. Bakrie Telekom	Esia	2003	7.302.543	34,0%	10.585.701	40,1%	12.072.322	38,0%
PT. Mobile 8	Hepi	2008	332.530	1,6%	66.763	0,3%	840.983	2,6%
Total			21.447.843		26.385.654		31.771.988	

Penguasaan pasar yang besar oleh Telkom-Flexy dan Bakrie Esia didorong oleh kelebihan yang dimiliki masing-masing operator. Telkom Flexy unggul dalam penguasaan jaringan yang luas yang dimiliki oleh induk perusahaannya (PT. Telkom) sehingga mampu meyakinkan pelanggan untuk menggunakan operator ini. Sementara pangsa pasar Bakrie-Esia yang besar didukung oleh strategi pemasaran dan promosi yang gencar terutama melalui strategi *co-branding* yang menyatukan penjualan pesawat telpon dan layanan operatornya dengan harga yang murah dan produk yang sangat variatif. Strategi yang gencar dengan berbagai fasilitas dan bonus yang diberikan terhadap produk *co-branding* berharga murah ini mampu menarik minat pelanggan. Belakangan Telkom-Flexy juga menggunakan strategi pemasaran yang hampir sama dengan Esia yaitu *co-branding* pesawat *handset* dengan layanan operator.

Gambar 6.9. Komposisi Pangsa Pasar Penyelenggara Jaringan Telepon Tetap Wireless



Perkembangan dan pertumbuhan jumlah pelanggan telepon tetap nirkabel yang pesat dalam tiga tahun terakhir didukung dengan teknologi yang memungkinkan penggunaan yang lebih mobile dan strategi marketing melalui *co-branding* pesawat telepon dan layanan operator dengan harga yang semakin terjangkau.

Kelebihan teknologi yang lebih *mobile*, layanan operator yang lebih variatif, penggunaan telepon yang lebih multifungsi (termasuk internet dan jejaring sosial) serta strategi *co-branding* juga mendorong perkembangan jumlah pelanggan telepon bergerak seluler juga sangat pesat. Jumlah pelanggan telepon bergerak seluler yang pada 2006 baru mencapai sekitar 63 juta, sampai tahun 2010 telah meningkat hampir 3,5 kali lipat (350%) menjadi sekitar 211,1 juta pelanggan. Pada tahun 2010, jumlah pelanggan telepon bergerak seluler ini sudah meningkat 29% dibanding tahun sebelumnya. Secara rata-rata sejak tahun 2006 pelanggan telepon bergerak seluler telah meningkat 35,6% per tahun. Hal ini menunjukkan Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar dan perilaku konsumennya yang cenderung mengikuti trend, masih memiliki pasar yang sangat potensial bagi penyelenggaraan telepon bergerak seluler.

Jika dilihat dari jenis pelanggannya, untuk masing-masing operator masih didominasi oleh jenis pelanggan prabayar. Proporsi pelanggan pasca bayar pada tiga operator utama dalam tiga tahun terakhir hanya berkisar 1% sampai 4% dari total pelanggan bahkan dengan proporsi yang cenderung semakin menurun. Kemudahan mengontrol penggunaan pulsa dan pengguna yang sebagian besar berpendapatan menengah ke bawah menjadi faktor yang menyebabkan lebih tingginya pelanggan jenis pra bayar, selain karena kemudahan untuk menjadi pelanggan pra bayar maupun mengakhiri proses langganan.

Operator dengan pertumbuhan pelanggan yang paling tinggi pada tahun 2010 adalah Natrindo diikuti oleh Hutchinson CTP oleh dengan peningkatan sebesar 137% dan 122,5%. Operator baru dengan jumlah pelanggan yang masih sedikit cenderung memiliki pertumbuhan pelanggan yang lebih tinggi. Namun hal ini diduga lebih karena jumlah pelanggannya masih sedikit sehingga penambahan jumlah pelanggan yang tidak besar



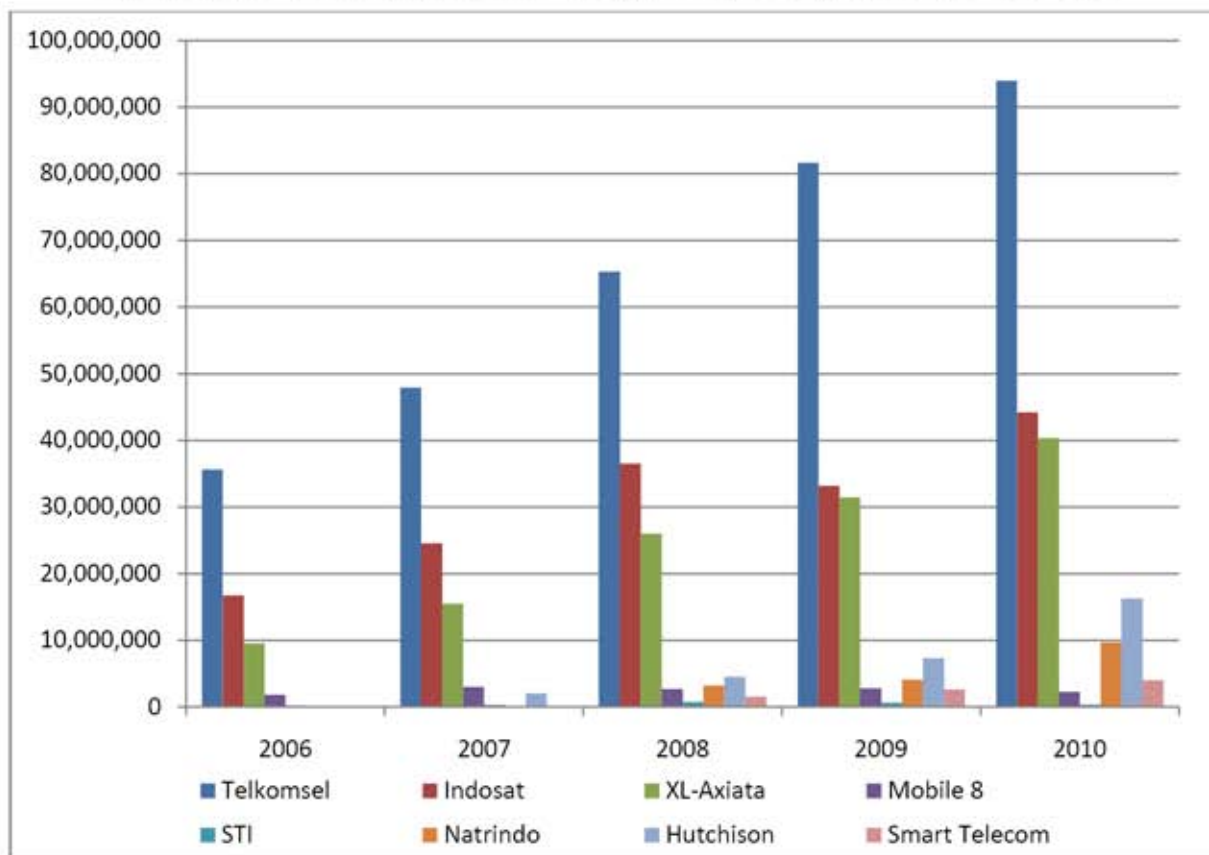
menyebabkan pertumbuhannya terlihat tinggi. Sementara pada kelompok operator dengan jumlah pelanggan besar (lebih dari 30 juta), pertumbuhan pelanggan paling tinggi pada 2010 didapat oleh Indosat yang mencapai 33,4% dan XL-Axiata yang mencapai 32,8%. Dua operator mengalami penurunan pelanggan pada tahun 2010 yaitu Mobile-8 dan STI yang menurun masing masing 20,2% dan 45,3%. Peningkatan jumlah pelanggan yang tinggi pada kedua operator ini didukung oleh strategi pemasaran dan promosi yang sangat besar terutama dengan berbagai bonus layanan.

Tabel 6.7. Perkembangan Jumlah Pelanggan Telepon Bergerak Seluler 2006 - 2010

No	Operator	2006	2007	2008	2009	2010
1	Telkomsel	35.597.000	47.890.000	65.299.991	81.643.532	94.010.449
	Prabayar	33.935.000	45.977.000	63.359.619	79.608.839	91.883.945
	Pasca bayar	1.662.000	1.913.000	1.940.372	2.034.693	2.126.504
2	Indosat	16.704.729	24.545.422	36.510.246	33.136.521	44.217.600
	Prabayar	15.878.870	23.945.431	35.591.033	31.333.173	
	Pasca bayar	825.859	599.991	919.213	1.803.348	
3	XL-Axiata	9.527.970	15.469.000	26.015.517	31.438.377	40.350.874
	Prabayar	9.141.331	14.988.000	25.599.297	31.101.047	40.060.895
	Pasca bayar	386.639	481.000	416.220	337.330	289.979
4	Mobile 8	1.825.888	3.012.801	2.701.914	2.805.842	2.240.388
	Prabayar	1.778.200	2.920.213	2.552.975	2.683.776	2.130.947
	Pasca bayar	47.688	92.588	148.939	122.066	109.441
5	STI	134.713	310.464	784.343	636.868	348.527
	Prabayar	133.746	310.176	784.129	636.566	347.847
	Pasca bayar	967	288	214	302	680
6	Natrindo	12.715	4.788	3.234.800	4.105.156	9.729.464
	Prabayar	10.155	4.788	3.234.800	4.105.156	9.726.792
	Pasca bayar	2.560	N.A	N.A	N.A	2672
7	Hutchison	N.A	2.039.406	4.500.609	7.311.000	16.270.000
	Prabayar	N.A	2.036.202	4.490.202	7.295.000	16.200.000
	Pasca bayar	N.A	3.204	10.407	16.000	70.000
8	Smart Telecom	N.A	115.000	1.530.823	2.599.665	3.978.127
	Prabayar	N.A	N.A	1.456.372	2.528.026	3.978.037
	Pasca bayar	N.A	N.A	74.451	71.639	90.179
	Jumlah	63.803.015	93.386.881	140.578.243	163.676.961	211.145.429

Gambar 6.10 menunjukkan tiga operator utama yang memiliki jumlah pelanggan terbesar adalah Telkomsel, Indosat dan XL-Axiata. Jumlah pelanggan untuk ketiga operator ini juga menunjukkan peningkatan secara proporsional. Sementara jumlah pelanggan untuk operator yang relatif baru, masih jauh dibawa tiga operator utama tersebut. Promosi yang gencar dengan berbagai fasilitas yang diberikan belum mampu menarik pelanggan untuk dengan mudah beralih ke operator kecil. Namun untuk beberapa operator tertentu yaitu Hutchinson CTP dan Natrindo mulai menunjukkan peningkatan jumlah pelanggan yang cukup signifikan sejak tahun 2008 meskipun masih jauh lebih rendah dari tiga operator utama yang lebih dulu muncul.

Gambar 6.10. Perkembangan Jumlah Pelanggan Telepon Bergerak Seluler 2006 - 2010

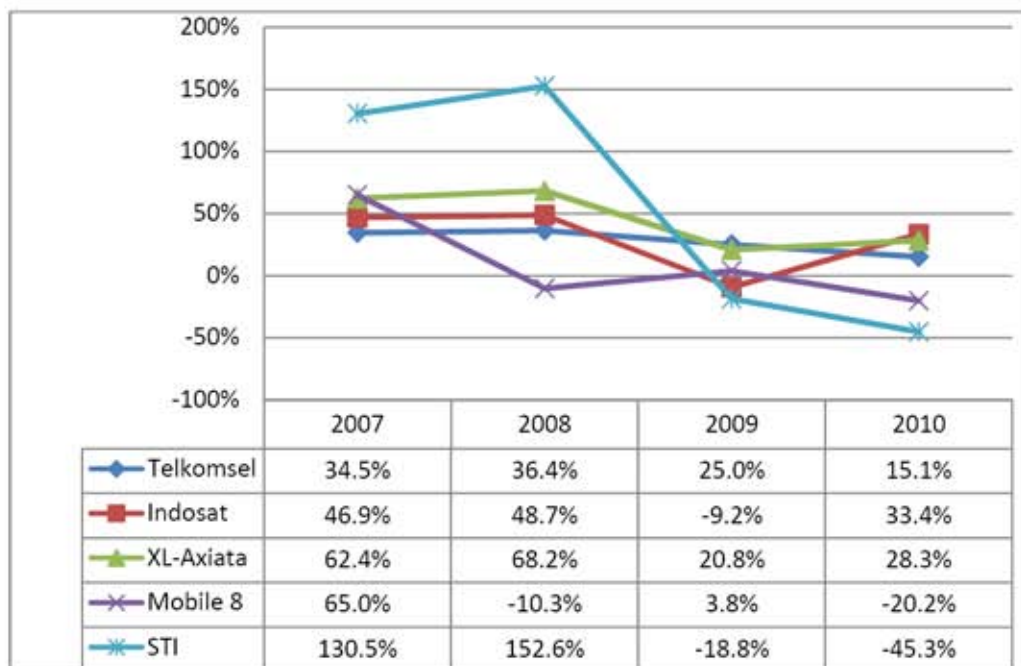


Trend pertumbuhan pelanggan antar operator menunjukkan pelanggan pada operator kecil seperti Natrindo, Hutchison CTP dan Smart Telecom menunjukkan pertumbuhan yang paling tinggi dengan rata-rata pertumbuhan berkisar antara 80% - 450% per tahun. Namun tingginya pertumbuhan ini diduga karena jumlah pelanggan yang relatif masih lebih sedikit, terutama untuk Smart Telecom yang mengalami peningkatan tajam pada 2008. Meskipun

demikian, tiga operator besar juga menunjukkan pertumbuhan pelanggan yang tinggi meskipun jumlah pelanggan juga sudah cukup banyak. Telkomsel yang memiliki jumlah pelanggan terbanyak, jumlah pelanggannya masih tumbuh rata-rata 27,8% per tahun dalam lima tahun terakhir.

Indosat dan XL-Axiata yang memiliki jumlah pelanggan terbanyak berikutnya juga menunjukkan pertumbuhan jumlah pelanggan yang cukup besar. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan pelanggan Indosat dan XL-Axiata mencapai 20% dan 4,9% per tahun. Secara total, pelanggan telepon bergerak seluler tumbuh rata-rata 35,6% per tahun dalam lima tahun namun dengan angka pertumbuhan yang semakin rendah kecuali Indosat dan XL-Axiata yang meningkat kembali pertumbuhannya di 2010.

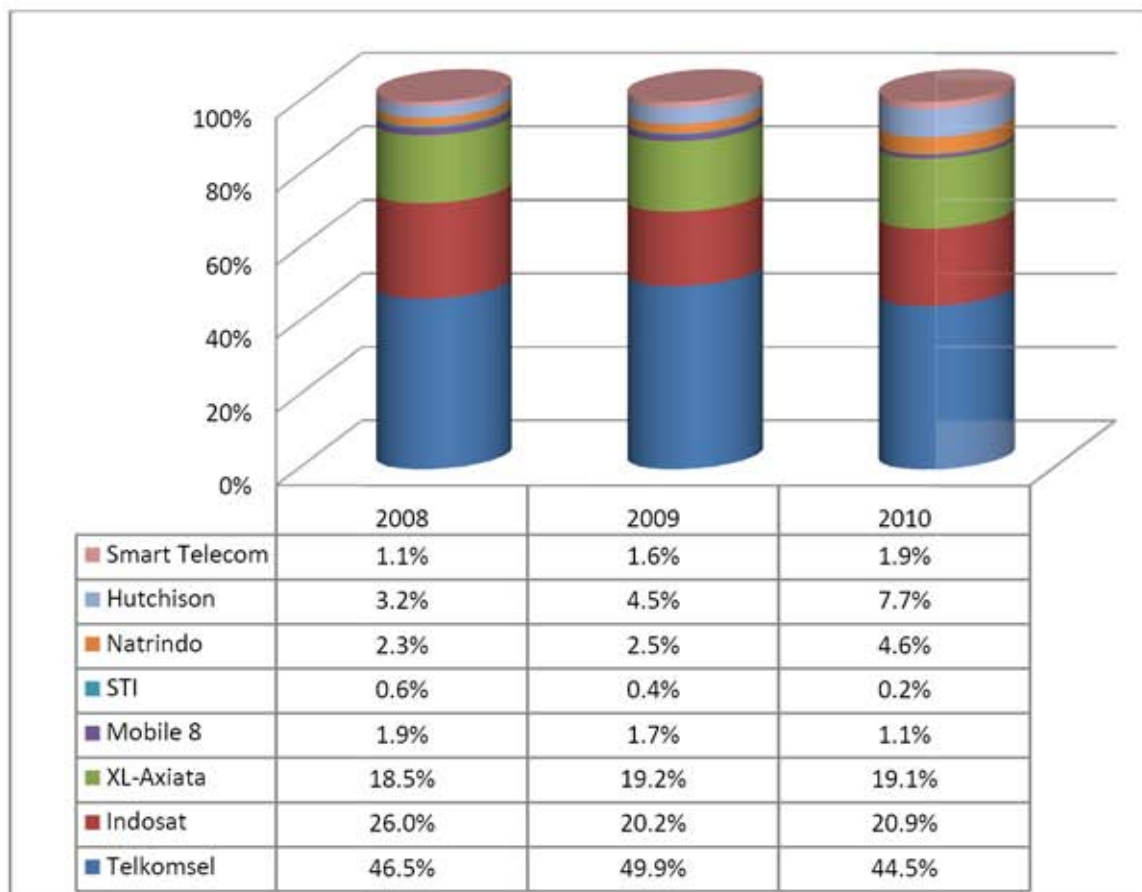
Gambar 6.11. Perkembangan Pertumbuhan Pelanggan Telepon Bergerak Seluler



Trend pertumbuhan positif yang dialami oleh semua operator telepon bergerak seluler menyebabkan tidak banyak terjadi perubahan pangsa pasar dari masing-masing operator dalam tiga tahun terakhir. Telkomsel, Indosat dan XL-Axiata merupakan tiga operator yang memiliki pangsa pelanggan terbesar. Sampai akhir tahun 2010, pangsa pasar ketiga operator tersebut masing-masing adalah Telkomsel (44,5%), Indosat (20,9%) dan XL-Axiata (19,1%). Dengan demikian ketiga operator tersebut menguasai pangsa pasar hampir

85% dari total pelanggan telepon bergerak seluler. Sementara lima operator lainnya hanya memiliki pangsa pasar hampir 15%. Dalam tiga tahun terakhir terjadi sedikit pergeseran pangsa pasar dimana pangsa pasar Indosat sedikit menurun pada tahun 2009 karena penurunan jumlah pelanggan dan sebagian diambil Telkomsel. Pada tahun 2010, pangsa pasar Indosat masih tetap, namun yang meningkat adalah pangsa pasar Hutchinson dan Natrindo, sementara Telkomsel kembali menurun sedikit. Trend pertumbuhan pelanggan yang positif pada semua operator menjadikan penguasaan pangsa pasar diantara operator telepon bergerak seluler cenderung stabil.

Gambar 6. 12. Pergeseran pangsa pasar telepon bergerak seluler 2008- 2010

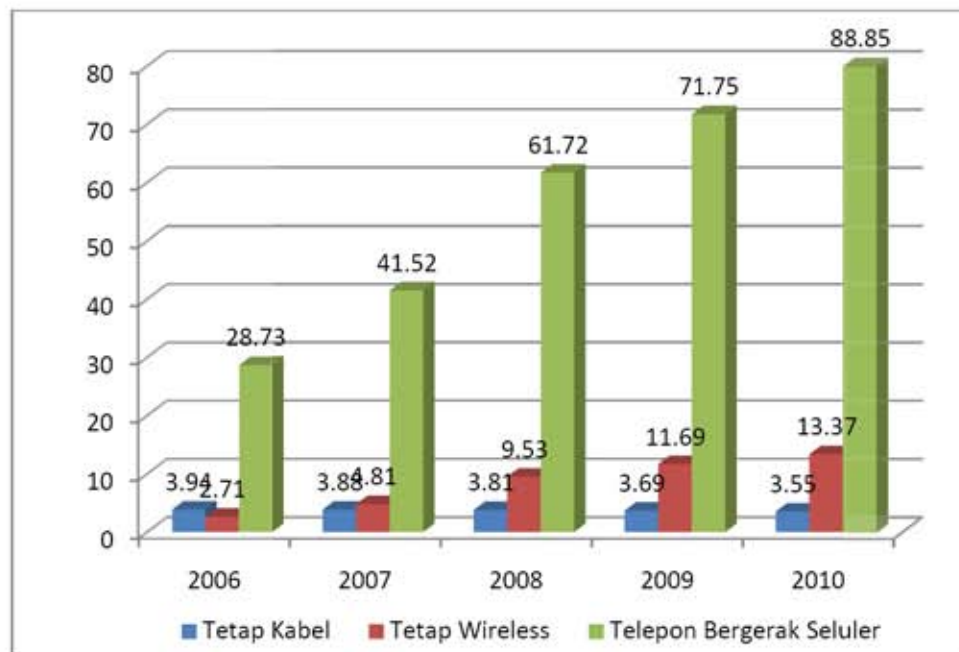


6.3.4. Teledensitas.

Teledensitas adalah indikator yang lazim digunakan dalam bidang telekomunikasi untuk menunjukkan jumlah satuan sambungan telepon terpasang per seratus penduduk. Teledensitas juga menggambarkan tingkat perkembangan dan penetrasi telekomunikasi (telepon) disuatu wilayah/negara yang mencerminkan kemajuan telekomunikasi di

wilayah/negara tersebut. Ukuran yang umum dipakai untuk teledensitas adalah dari penggunaan telepon tetap kabel. Pada tahun 2010, teledensitas Indonesia untuk sambungan telepon tetap baru mencapai 3,55. Ini artinya, setiap 100 orang baru terdapat 3-4 sambungan telepon tetap kabel yang terpasang. Angka ini tergolong rendah terutama jika dibandingkan dengan negara maju atau bahkan negara tetangga ASEAN. Teledensitas telepon tetap kabel ini juga menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya seperti ditunjukkan pada gambar 6.13, karena penambahan pelanggan telepon tetap kabel yang sangat lambat sementara penduduk terus bertambah. Penurunan ini juga terjadi karena penggunaan telepon tetap kabel beralih ke penggunaan telepon tetap nirkabel dan telepon bergerak seluler

Gambar 6.13. Perkembangan Teledensitas untuk tiap jenis Telepon di Indonesia

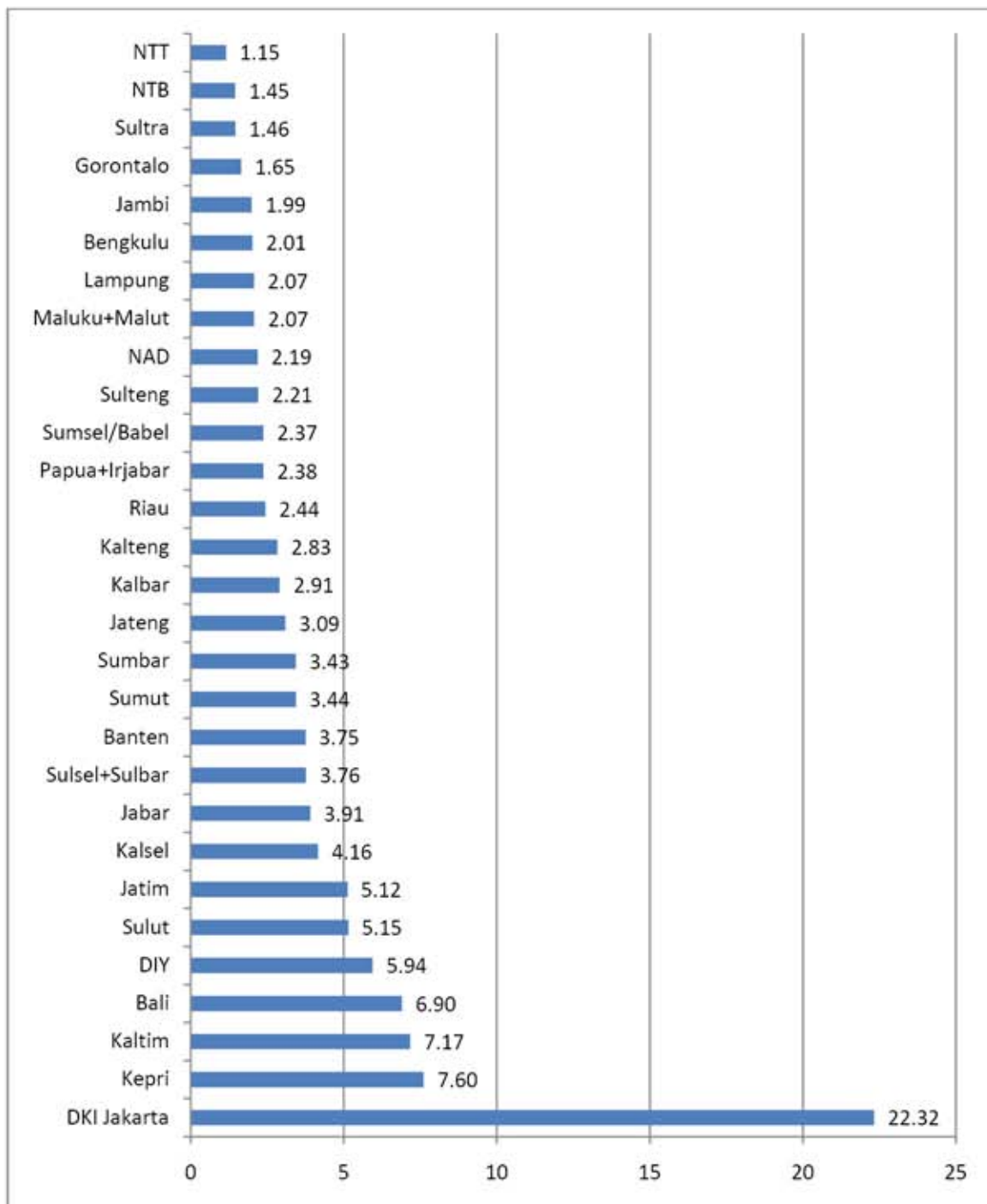


Untuk telepon tetap nirkabel dan telepon bergerak seluler menunjukkan fenomena sebaliknya yaitu terjadinya peningkatan dalam teledensitas untuk telepon tetap nirkabel dan telepon bergerak seluler. Gambar 6.15 menunjukkan teledensitas untuk telepon tetap nirkabel meningkat dari 9,53 pada 2008 menjadi 11,69 pada tahun 2009 dan tahun 2010 menjadi 13,7%. Sementara untuk telepon bergerak seluler, teledensitasnya menunjukkan angka yang jauh lebih besar dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Setelah mencapai angka 61,72 pada 2008, teledensitas telepon bergerak seluler meningkat menjadi 71,75 pada 2009 dan pada 88,85 pada tahun 2010.

Jika dilihat berdasarkan propinsi, teledensitas telepon tetap kabel menunjukkan angka yang sangat bervariasi antar daerah. Meskipun teledensitas tertinggi terdapat di Jakarta dengan angka 22,32, namun teledensitas terbesar berikutnya justru terdapat diluar Jawa seperti ditunjukkan pada gambar 6.14. Teledensitas terbesar kedua sampai ke empat pada tahun 2010 terdapat di propinsi Kepulauan Riau (7,6), Kalimantan Timur (7,17) dan Bali (6,90). Teledensitas yang tinggi pada daerah-daerah tersebut dan melebihi propinsi lain di Jawa selain karena jumlah penduduknya yang relatif sedikit dibanding Jawa, juga karena berkembangnya kegiatan ekonomi dan bisnis yang cukup tinggi pada daerah tersebut. Pada saat yang sama, pertumbuhan pelanggan untuk telepon tetap juga semakin mengandalkan dari pelanggan bisnis seiring dengan semakin meluasnya penggunaan telepon tetap nirkabel dan telepon bergerak seluler oleh individu.

Teledensitas telepon tetap yang masih sangat rendah juga tidak selalu terdapat di propinsi-propinsi di Kawasan Timur. Teledensitas yang paling rendah justru terdapat di NTT (1,15) diikuti NTB (1,45), Sulawesi Utara (1,46) dan Gorontalo (1,65). Artinya, hanya terdapat sekitar 1 sambungan telepon tetap kabel untuk setiap 100 penduduk pada daerah-daerah tersebut. Teledensitas di propinsi Papua justru menunjukkan angka yang relatif cukup besar yaitu 2,38 yang berarti untuk setiap 100 penduduk terdapat sekitar 2 sambungan telepon tetap kabel. Angka teledensitas yang hampir sama juga terdapat di wilayah Maluku-Maluku Utara.

Gambar 6.14. Teledensitas Telepon Rumah menurut Propinsi, Tahun 2010



6.3.5. Pendapatan Operator Jaringan Telekomunikasi.

Untuk menilai kinerja penerimaan dari operator telepon, digunakan tiga indikator yaitu penerimaan operasional, EBITDA (Earning Before Interest Tax Depreciation and Ammortization), dan ARPU (Average Revenue Per User) . Ketiga indikator ini pada dasarnya

mencerminkan penerimaan yang didapat operator dari jasa pelayanan telepon yang diberikan.

6.3.5.1. Penerimaan Total Operasional (*Operating Revenue*)

Salah satu indikator lain untuk melihat perkembangan industri telekomunikasi adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan penyelenggara telekomunikasi, diantaranya penerimaan operasional. Penerimaan operasional operator adalah penerimaan yang diterimanya dari layanan yang disediakan seperti layanan telepon pasca bayar (postpaid), Prabayar (prepaid), international roaming, interkoneksi dan layanan-layanan lainnya seperti penyewaan jaringan.

Penerimaan operasional dari operator telepon seluler di Indonesia menunjukkan peningkatan dalam empat tahun terakhir kecuali Mobile-8 yang mengalami penurunan. Peningkatan penerimaan ini sejalan dengan peningkatan pelanggan yang cukup signifikan untuk telepon bergerak seluler ini. Pada tahun 2010 penerimaan operasional menunjukkan peningkatan yang berbeda-beda pada empat operator utama. Telkom Group mengalami peningkatan penerimaan operasional pada tahun 2010 sebesar 6,2%. Sementara Indosat Group dan XL-Axiata mengalami peningkatan penerimaan sebesar 7,6% dan 27,4%. Dari sini terlihat bahwa XL-Axiata mengalami peningkatan penerimaan paling tinggi pada tahun 2010. Sementara Bakrie Telecom yang mengalami peningkatan penerimaan operasional paling tinggi pada tahun 2009, justru hanya meningkat 0,8% pada tahun 2010.

Tabel 6.8. Penerimaan Operasional Operator Telepon (Rp. Milyar)

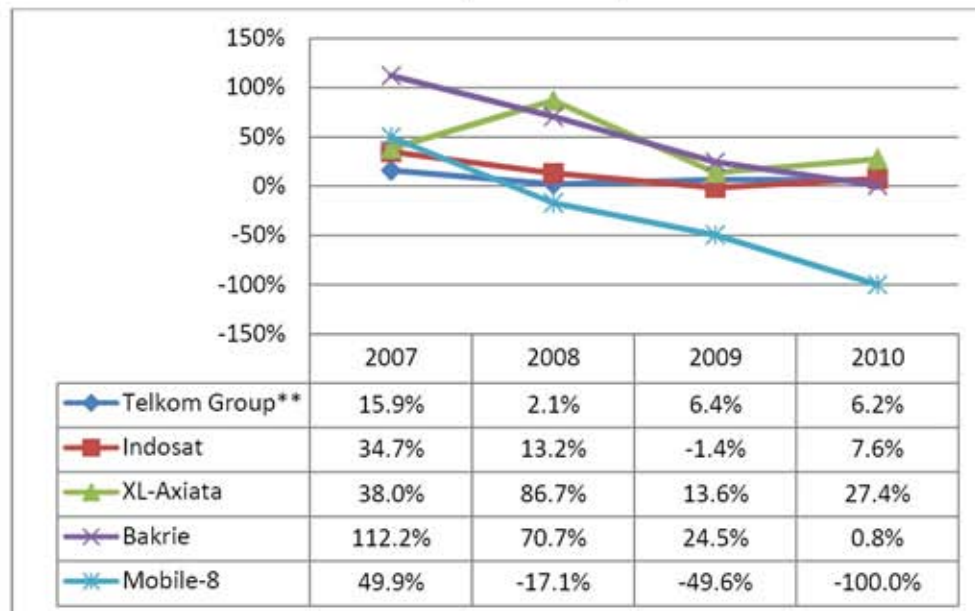
No	Operator	2006	2007	2008	2009	2010
1	Telkom Group*	51.294	59.440	60.689	64.597	68.629
2	Indosat Group **	12.239	16.488	18.659	18.393	19.797
3	XL-Axiata	4.682	7.990	12.061	13.706	17.459
4	Bakrie	608	1.290	2.202	2.743	2.765
5	Mobile-8	589	883	732	369	N.A
6	Smart Telecom		5	200	546	N.A
7	Hutchinson CPT		117	296	615	N.A

*) mencakup seluruh operator telekomunikasi yang berada dalam group PT. Telkom

**) mencakup seluruh operator telekomunikasi yang berada dalam group PT. Indosat

Kecenderungan penurunan pertumbuhan penerimaan operasional terjadi pada hampir semua operator meskipun masih pada angka yang positif seperti ditunjukkan pada gambar 6.15. Sampai tahun 2008, pertumbuhan penerimaan untuk XL-Axiata masih menunjukkan trend peningkatan, namun menurun memasuki tahun 2009. Hal ini disebabkan oleh jumlah pelanggan yang sudah sangat tinggi secara total sehingga pertumbuhan pelanggan juga tidak lagi tinggi dan berdampak pada pertumbuhan penerimaan. Untuk Mobile-8 bahkan sudah menunjukkan pertumbuhan yang negatif sejak 2008. Pada tahun 2010 penerimaan operator menunjukkan hal yang positif dimana pertumbuhan penerimaan mulai mengalami peningkatan walaupun masih rendah. Hanya XL-Axiata yang menunjukkan pertumbuhan penerimaan yang cukup tinggi, diatas 20%.

Gambar 6.15 Pertumbuhan Penerimaan Operasional Operator 2007 - 2010



6.3.5.2. Laba (Rugi) Operasional (*Operating Income/Loss*)

Jika penerimaan operasional masih menunjukkan peningkatan dan pertumbuhan yang positif, tidak demikian dengan laba operasional pada beberapa operator seperti Telkomsel dan Bakrie. Laba operasional kedua operator ini menunjukkan penurunan meskipun nilainya masih positif yang berarti operator masih menikmati keuntungan meskipun semakin menurun. Indosat group dan XL Axiata bahkan menunjukkan peningkatan laba operasional dengan kenaikan yang cukup signifikan. Laba operasional Indosat group pada tahun 2010

meningkat 8,1% dibanding tahun sebelumnya. Sementara laba operasional XL-Axiata bahkan meningkat sampai 109,6% dibanding tahun sebelumnya.

Khusus untuk Mobile-8, menunjukkan terjadinya kerugian yang berlangsung sejak tahun 2008 dan besarnya semakin meningkat pada tahun berikutnya. Laba operasional yang masih negatif (rugi) juga dialami oleh operator baru seperti Smart Telecom dan Hutchinson TCP yang sampai tahun 2009 masih mengalami kerugian operasional yang semakin besar. Hal ini diduga disebabkan oleh masih besarnya investasi yang dilakukan oleh operator tersebut untuk mengembangkan jaringan, sementara jumlah pelanggannya masih sedikit. Disisi lain, pendapatan yang negatif juga terjadi karena persaingan yang semakin ketat diantara operator dalam industri penyelenggara jaringan telekomunikasi ini.

Tabel 6.9. Laba (rugi) Operasional Operator Telepon (Rp. Milyar)

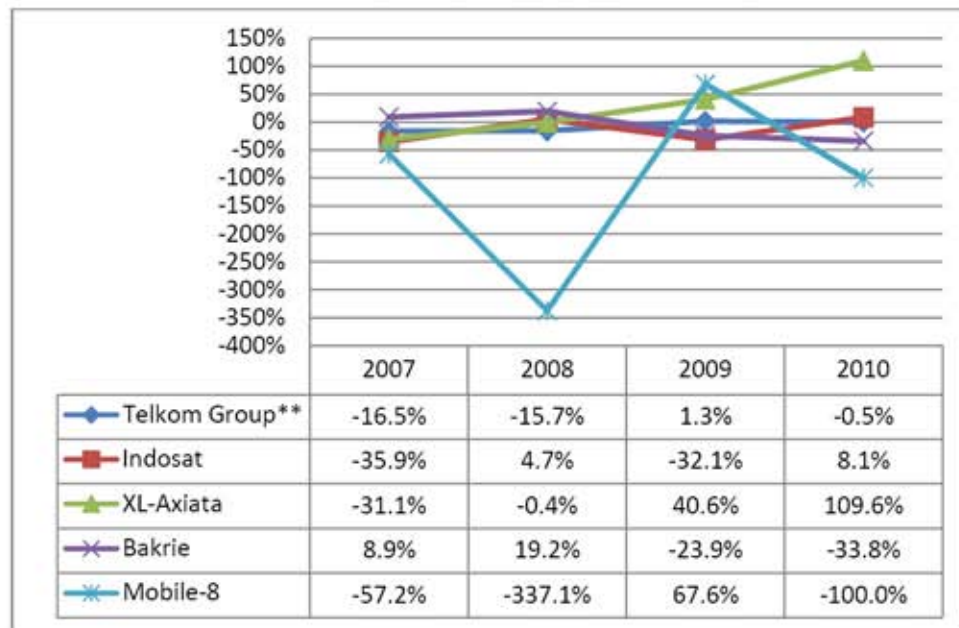
No	Operator	2006	2007	2008	2009	2010
1	Telkom Group*	31.716	26.473	22.307	22.603	22.491
2	Indosat Group **	7.051	4.520	4.733	3.213	3.474
3	XL-Axiata	2.554	1.760	1.753	2.464	5.164
4	Bakrie	292	318	379	288	191
5	Mobile-8	397	170	(403)	(676)	N.A
6	Smart Telecom		(167)	(347)	N.A	N.A
7	HTCP		(741)	(1.686)	(2.821)	(2,6)

*) mencakup seluruh operator telekomunikasi yang berada dalam group PT. Telkom

**) mencakup seluruh operator telekomunikasi yang berada dalam group PT. Indosat

Laba operasional yang semakin kecil meskipun masih positif berdampak pada pertumbuhan laba yang mulai memasuki trend negatif di tahun 2009 pada semua operator kecuali XL-Axiata. Mobile-8 dan Telkom Group meskipun nilainya kecil untuk Telkom Group. Memasuki tahun 2010, kondisi yang terjadi adalah sebaliknya yaitu Telkom Group mengalami penurunan pertumbuhan pendapatan operasional dan bahkan Mobile-8 mengalami penurunan pertumbuhan penerimaan yang sangat tajam. Sebaliknya Indosat mengalami pertumbuhan penerimaan, sementara XL mengalami pertumbuhan penerimaan yang semakin tinggi sampai lebih dari 100%.

Gambar 6.16. Pertumbuhan Pendapatan (Kerugian) Operasional Operator 2007-2010



6.3.5.3. EBITDA (*Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Ammortization*)

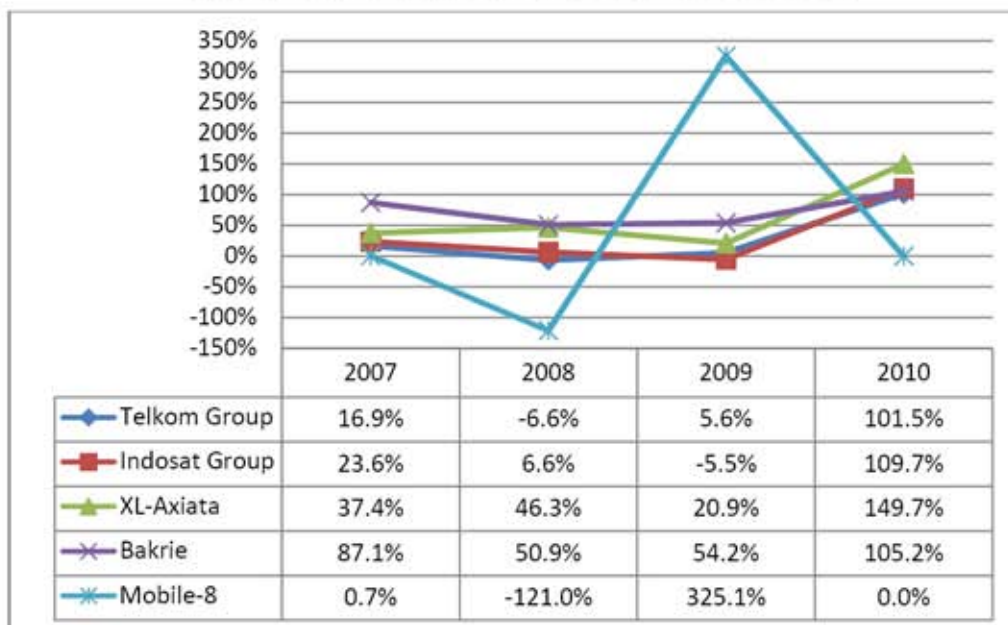
EBITDA adalah pendekatan penerimaan yang dihitung dari penerimaan operator telepon sebelum dikurangi dengan bunga, pajak, penyusutan/depresiasi dan amortisasi. Tabel 6.10 menyajikan EBITDA dari lima operator utama telepon seluler di Indonesia yang secara umum menunjukkan trend peningkatan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa EBITDA dari Telkom Group yang mencakup Telkomsel dan Telkom-Flexi menunjukkan nilai yang jauh lebih besar daripada operator lainnya, namun mengalami penurunan pada tahun 2008. Pada tahun 2009 dan 2010 EBITDA Telkom Group kembali meningkat dan menjadikan trend positif EBITDA. Sementara EBITDA Indosat Group mengalami sedikit penurunan pada tahun 2009 meskipun kembali meningkat di tahun 2010.

Tabel 6.10 EBITDA Operator Utama Telepon di Indonesia 2006-2010 (Rp. Milyar)

No	Operator	2006	2007	2008	2009	2010
1	Telkom Group	31.716	37.067	34.621	36.560	37.103
2	Indosat Group	7.051	8.714	9.321	8.774	9.626
3	XL-Axiata	2.554	3.509	5.132	6.205	9.287
4	Bakrie	292	545	822	1.269	1.335
5	Mobile-8	397	400	(84)	(357)	N.A
6	Smart Telecom		(135)	(289)		N.A
7	HCPT		(1.339)	(561)		(2,0)

Peningkatan EBITDA operator pada tahun 2010 bervariasi dengan paling tinggi dialami oleh XL-Axiata yang meningkat sebesar 49,7% dibanding tahun sebelumnya. Sementara EBITDA Telkom Group dan Indosat Group meningkat masing-masing sebesar 1,5% dan 9,7% dibanding tahun sebelumnya. XL-Axiata menjadi operator yang mengalami peningkatan EBITDA paling stabil dan baik. Dalam lima tahun terakhir, EBITDA dari XL-Axiata meningkat rata-rata sebesar 48,6% per tahun dengan nilai EBITDA yang sudah cukup besar. EBITDA Bakrie Telecom memang mengalami rata-rata peningkatan paling besar yaitu 49,4% per tahun namun dengan nilai EBITDA yang relatif lebih rendah. Sementara EBITDA Telkom Group dan Indosat Group meningkat rata-rata 4,3% dan 8,6% per tahun.

Gambar 6.17 Pertumbuhan EBITDA Operator 2007-2010



6.3.5.4. ARPU (Average Revenue per User)

ARPU menunjukkan penerimaan yang diraih oleh operator per satu pelanggan yang menggunakan produknya. Besaran nilai ARPU menunjukkan besarnya rata-rata penerimaan yang didapat oleh operator dari satu pelanggannya. Artinya, meskipun jumlah pelanggan sedikit, namun bisa jadi ARPU dari operator tersebut besar jika pelanggan cukup intensif menggunakan layanan sambungan telepon dari operator tersebut.

ARPU pada semua operator menunjukkan kecenderungan penurunan cukup tajam dalam lima tahun terakhir. Bakrie Telekom mengalami penurunan ARPU dari Rp. 116,913 pada

2005 menjadi hanya Rp. 33.850 pada tahun 2009 dan Rp. 26.000 pada tahun 2010. Artinya, jika semula Bakrie Telecom memperoleh penerimaan Rp. 116.915 per pelanggannya pada 2005, menurun hanya menjadi Rp. 26.000 per pelanggan pada tahun 2010. Penurunan ini diduga terkait dengan semakin bertambahnya jumlah pelanggan Bakrie Telecom yang mengalami peningkatan pelanggan sangat besar, sementara penggunaan oleh operator semakin sedikit. Secara umum, penurunan ARPU yang terjadi juga merupakan implikasi dari bertambahnya jumlah pelanggan yang cukup besar dalam lima tahun terakhir namun tidak diikuti dengan peningkatan penggunaan oleh pelanggan.

Tabel 6.11. Perkembangan ARPU Operator Telepon Tahun 2005 - 2010

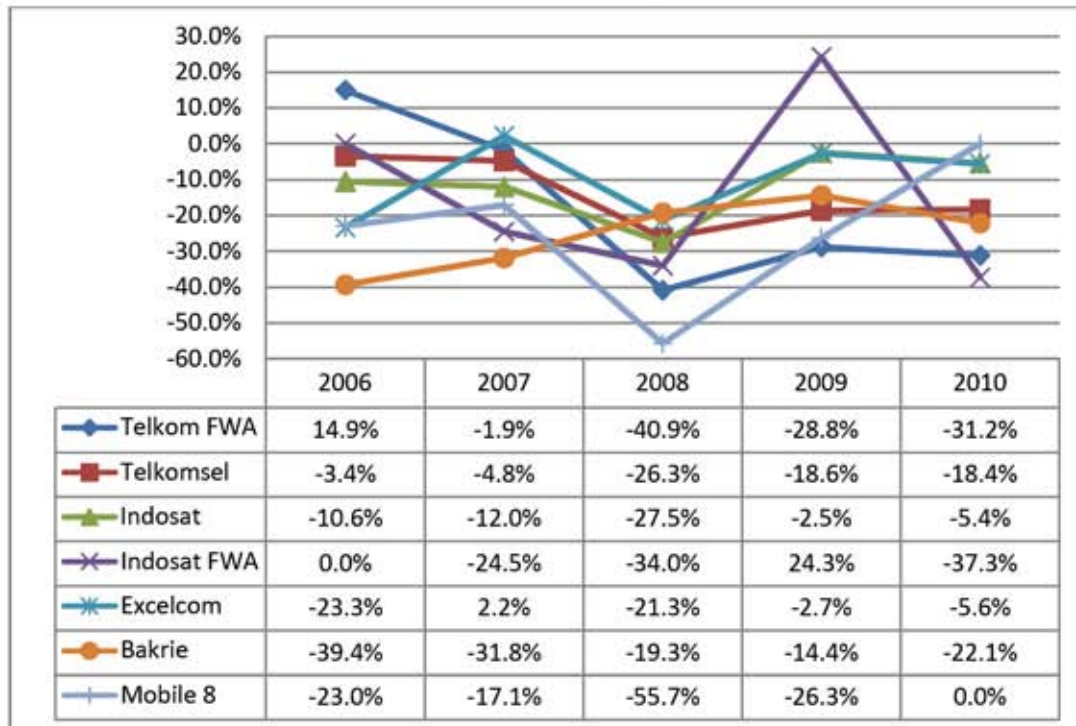
Operator	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Telkom FWA	47.000	54.000	53.000	31.335	22.319	15.359
Telkomsel	87.000	84.000	80.000	59.000	48.000	39.168
Indosat	67.113	60.023	52.828	38.282	37.330	35.300
Indosat FWA	N.A	45.905	34.641	22.858	28.402	17.811
XL-Axiata	60.000	46.000	47.000	37.000	36.000	34.000
Bakrie	116.913	70.891	48.315	39.000	33.380	26.000
Mobile 8	62.332	48.013	39.791	17.621	12.986	12.000
Hutchinson	N.A	N.A	14.971	11.414	11.000	10.000
STI	N.A	N.A	37.147	23.857	22.252	16.894

Penurunan ARPU operator yang terjadi pada tahun 2010 memiliki besaran penurunan yang variatif antar operator. Penurunan terbesar dialami oleh telepon tetap nirkabel Telkom (Flexy) dan telepon tetap nirkabel Indosat (Star One) yang asing-masing menurun sebesar 31,2% dan 37,3% dibanding tahun sebelumnya. Untuk telepon bergerak seluler, penurunan ARPU pada tahun 2010 paling besar dialami oleh Telkomsel yang menurun 17,6%. Sementara ARPU Indosat dan XL-Axiata hanya menurun sebesar 5,4% dan 5,6% dibanding tahun sebelumnya.

Jika dilihat perkembangannya sejak tahun 2006, ARPU operator telepon nirkabel dan seluler ini menunjukkan fluktuasi yang tinggi. Kecenderungan penurunan terjadi mulai tahun 2006 dan mencapai puncaknya pada tahun 2008 dengan pertumbuhan yang semakin negatif. Pada tahun 2009, ARPU operator mengalami peningkatan dan sebagian pertumbuhan yang

sudah positif. Namun memasuki tahun 2010, ARPU kembali mengalami penurunan kecuali Mobile-8 yang pertumbuhan ARPU-nya kembali menuju positif.

Gambar 6.18. Pertumbuhan ARPU Operator 2006 - 2010



ARPU operator telepon bergerak yang semakin menurun dengan pertumbuhan yang negatif mendorong operator untuk lebih meningkatkan penggunaan telepon daripada penambahan pelanggan. Hal ini dilakukan melalui strategi pemasaran termasuk dengan memberikan hadiah atau bonus atas pemakaian.

Analisis secara khusus untuk ARPU telepon bergerak seluler seperti ditunjukkan oleh Tabel 6.12 menunjukkan bahwa penurunan ARPU sangat terlihat untuk jenis pelanggan prabayar pada semua operator. Penurunan ini terlihat jelas pada tiga operator utama yang menguasai pangsa pasar telepon bergerak seluler yaitu Telkomsel, Indosat dan XL-Axiata. Sementara untuk ARPU pasca bayar, sebagian justru mengalami peningkatan seperti pada XL-Axiata dan Hutchinson CPT. Penurunan ARPU prabayar dari Telkomsel dari tahun 2008 ke 2010 mencapai 32,4% dengan rata-rata penurunan 20,3% per tahun. Sementara penurunan ARPU



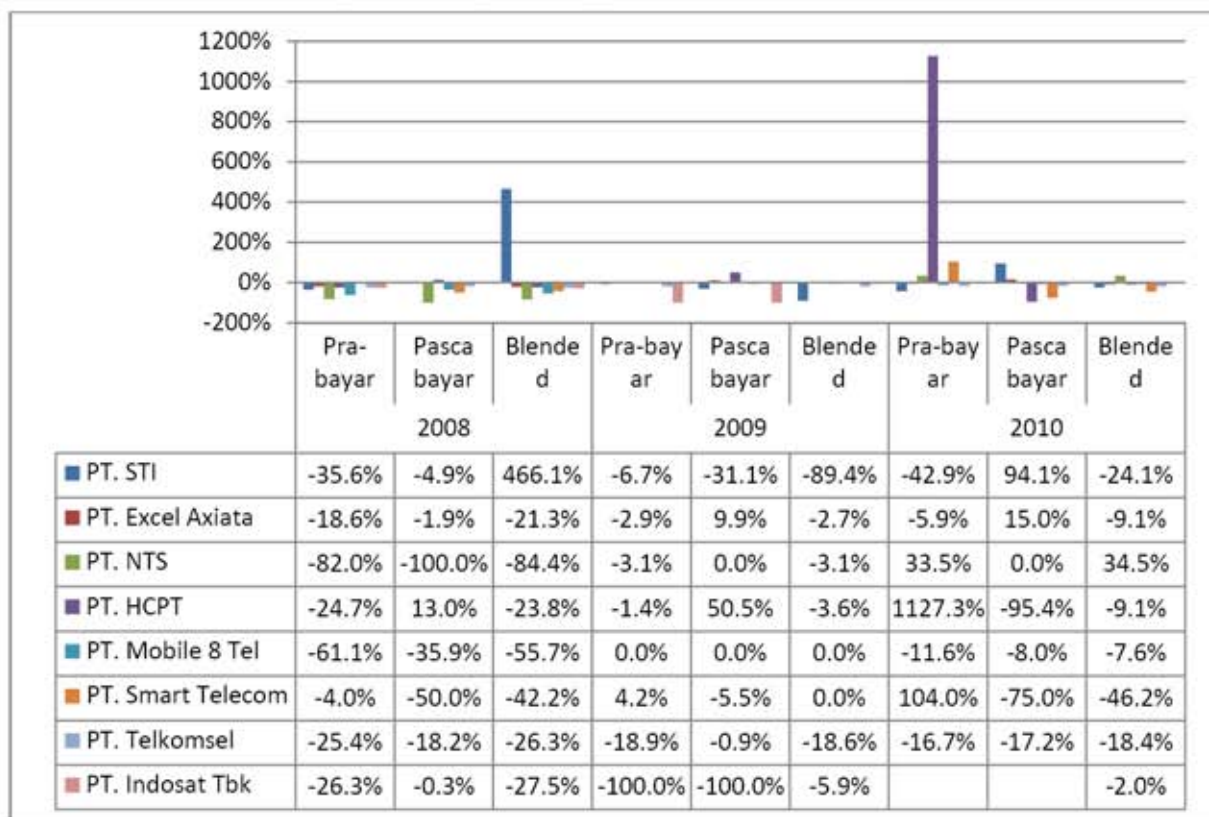
prabayar untuk XL-Axiata dari tahun 2008 ke 2010 mencapai 8,6% dengan penurunan rata-rata 9,1% per tahunnya. Penurunan ini lebih rendah dari pada sebelumnya yang mencerminkan ARPU yang semakin baik dari kedua operator ini.

Sementara untuk pelanggan pasca bayar, ARPU XL-Axiata dari tahun 2008 ke 2010 meningkat 17,8% dengan peningkatan rata-rata 5% per tahun. ARPU pasca bayar dari HTCP meningkat dari 2007 ke 2009 sebesar 70,1% dengan peningkatan rata-rata 31,8%. Jika dilihat bahwa penambahan pelanggan juga paling banyak terjadi untuk jenis pelanggan pra bayar, maka hal ini sejalan dengan dugaan bahwa peningkatan pelanggan berimplikasi pada penurunan ARPU dari operator. Sehingga operator perlu mempertimbangkan strategi pemasarannya dengan lebih menekankan pada membangun loyalitas pengguna dan meningkatkan penggunaan daripada upaya menarik jumlah pelanggan baru.

Tabel 6.12. Perkembangan ARPU Telepon Bergerak Seluler Tahun 2008–2010

No	Nama Operator	2008			2009			2010		
		Pra-bayar	Pasca bayar	Blended	Pra-bayar	Pasca bayar	Blended	Pra-bayar	Pasca bayar	Blended
1	STI	23.813	186.483	210.296	22.221	128.541	22.252	12.683	249.473	16.894
2	XL-Axiata	35.000	152.000	37.000	34.000	167.000	36.000	32.000	192.000	34.000
3	Natrindo Telepon Selular	6.500	0	6.500	6.300	-	6.300	8.413	257.982	8.473
4	Hutchison CPT	11.161	128.928	11.414	11.000	194.000	11.000	135.000	9.000	10.000
5	Mobile 8 Tel	14.495	73.963	17.621	11.310	48.918	12.986	10.000	45.000	12.000
6	Smart Telecom	24.000	55.000	26.000	25.000	52.000	26.000	51.000	13.000	14.000
7	Telkomsel	53.000	216.000	59.000	43.000	214.000	48.000	35.803	177.288	39.168
8	Indosat Tbk	34.654	182.147	38.282	33.138	175.327	37.330	N.A	N.A	35.300

Gambar 6.19. Pertumbuhan (Penurunan) ARPU Operator Seluler 2007-2010



Gambar 6.19 yang menunjukkan pertumbuhan ARPU operator seluler semakin memperjelas bahwa ARPU operator cenderung mengalami penurunan yang ditandai dengan pertumbuhan ARPU yang sebagian besar menunjukkan nilai yang negatif. Grafik tersebut juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ARPU yang positif lebih banyak terjadi pada kelompok pascabayar. Sementara untuk kelompok prabayar kebanyakan menunjukkan pertumbuhan ARPU yang negatif.

Pada operator telepon tetap kabel, nilai nominal ARPU masih cukup tinggi terutama untuk PT. Telkom dan BBT meskipun juga menunjukkan kecenderungan nilai yang semakin menurun. ARPU telepon tetap kabel Telkom pada tahun 2010 masih sebesar Rp. 109.515, sementara ARPU telepon tetap kabel PT. BBT pada tahun 2009 masih sebesar Rp. 516.132. Hal ini disebabkan bahwa untuk jenis telepon tetap kabel, sudah memiliki pelanggan tetap dengan peningkatan pelanggan yang tidak terlalu banyak. Akibatnya penggunaan oleh pelanggan tetap yang jumlahnya tidak sebanyak pelanggan telepon nirkabel atau bergerak menyebabkan ARPU-nya masih cukup tinggi. Namun penurunan nilai ARPU pada telepon tetap kabel ini juga tetap terjadi karena sebagian penggunaan sudah beralih ke telepon



tetap nirkabel dan telepon bergerak seluler, sehingga mempegaruhi penerimaan dari penggunaan telepon tetap kabel.

Tabel 6.13. Perkembangan ARPU Telepon Tetap

No	Operator	Tahun	Kabel	Nirkabel Prabayar	Nirkabel Pascabayar	Nirkabel Blended
1	PT. Telkom	2007	186.000	45.000	114.000	53.000
		2008	166.131	24.509	110.314	31.335
		2009	150.640	16.232	139.125	22.319
		2010	109.515	15.000	83.000	22.000
2	PT. Bakrie Telecom	2007	-	45.326	131.329	48.315
		2008	0	39.000	130.000	39.000
		2009	-	28.341	99.079	29.178
		2010*	N.A	27.000	107.000	28.000
3	PT. Batam Bintan Telekomunikasi	2007	856.000	-	-	-
		2008	776.198	-	-	-
		2009	516.132	-	-	-
		2010	N.A	N.A	N.A	N.A
4	PT. Indosat	2007	316.965	26.590	170.160	34.641
		2008	797	17.955	94.955	22.858
		2009	23.207	23.207	69.160	28.402
		2010*	N.A	N.A	N.A	N.A

ARPU telepon nirkabel menunjukkan kondisi yang berbeda antara kelompok pra bayar dengan pasca bayar. Pada kelompok prabayar menunjukkan nilai ARPU yang kecil dan semakin menurun terutama pada dua operator utama yaitu Telkom dan Bakrie. ARPU nirkabel prabayar untuk Telkom (Flexi) pada tahun 2010 misalnya hanya Rp. 15.000 dan untuk blended hanya Rp. 22.000. Sementara untuk Bakrie (Esia), ARPU prabayar pada tahun 2010 hanya sebesar Rp. 27.000 dan untuk Nirkabel Blended Rp. 28.000. Sementara untuk kelompok pasca bayar, nilai nominal ARPU-nya masih cukup tinggi. Pada tahun 2010, nilai ARPU pasca bayar untuk Telkom (Flexi) meskipun menurun tajam dibanding tahun sebelumnya, masih mencapai Rp. 83.000. Sedangkan untuk Bakrie (Esia) nilai ARPU pasca bayarnya masih sebesar Rp. 107.000. Sama seperti telepon tetap kabel, pelanggan telepon nirkabel pascabayar juga merupakan pelanggan tetap dengan jumlah pelanggan yang tidak banyak. Sementara untuk pelanggan nirkabel prabayar, menunjukkan nilai nominal ARPU yang tidak besar meskipun trend penurunannya sebenarnya juga tidak terlalu besar. Hal ini

disebabkan jumlah pelanggan telepon nirkabel prabayar yang cukup banyak sehingga ARPU cenderung kecil.

Jika dilihat dari trend penurunannya, tabel 6.14 menunjukkan bahwa penurunan ARPU pada telepon tetap nirkabel cenderung lebih besar daripada telepon tetap kabel dan pada telepon tetap nirkabel, penurunan pada kelompok prabayar cenderung lebih besar daripada kelompok pasca bayar. Pada operator utama telpon tetap kabel yaitu PT. Telkom, penurunan ARPU pada periode 2006-2010 secara total hanya mencapai 38,9% dan rata-rata hanya 5,4% per tahun. Sementara untuk nirkabel pasca bayarnya, penurunan ARPU mencapai rata-rata 8,3% per tahun. Bahkan untuk nirkabel pra bayar, penurunan ARPU secara total mencapai 53% dengan penurunan rata-rata mencapai 14,3%. Sementara untuk Bakrie Telecom yang menjadi salah satu operator utama telepon tetap nirkabel, penurunan ARPU pra bayar secara total pada 2006 - 2010 mencapai 53% dengan penurunan rata-rata 17,1%. Sementara untuk pasca bayarnya, penurunan total mencapai 44% dengan rata-rata penurunan 12,5% per tahun.

Tabel 6.14. Trend penurunan ARPU Operator Telepon Tetap 2006 - 2010

No.	Operator	Perubahan	Kabel*	Nirkabel Prabayar	Nirkabel Pascabayar	Nirkabel Blended
1.	PT. Telkom	Rata-Rata per tahun	-5,4%	-14,3%	-8,3%	-24,0%
		Total 2006- 2010	-38,9%	-56,8%	-38,6%	-68,8%
2.	PT. Bakrie Telecom	Rata-Rata per tahun		-53,0%	-44,0%	-55,7%
		Total 2006- 2010		-17,1%	-12,5%	-18,3%
3.	PT.Indosat	Rata-Rata per tahun	-99,7%	-42,0%	-75,8%	-54,2%
		Total 2006- 2010	-27,5%	-11,4%	-27,4%	-14,5%

6.3.6. Biaya Operasional Penyelenggara Telekomunikasi

Dari sisi biaya, penyelenggaraan telekomunikasi oleh operator salah satunya ditunjukkan dengan biaya operasional operator telepon tetap maupun bergerak. Tabel 6.15 yang menunjukkan perkembangan biaya operasional oleh masing-masing operator yang cenderung semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh peningkatan investasi yang dilakukan oleh operator yang dicerminkan oleh peningkatan kapasitas terpasang yang dimiliki operator. Biaya operasional Telkom Group merupakan yang terbesar diantara



operator lain yaitu mencapai Rp. 46 triliun karena mencakup penyelenggaraan layanan telepon tetap dan tetap bergerak selain bergerak seluler, disamping juga karena besarnya kapasitas terpasang yang dimiliki dan jumlah pelanggan. Sementara biaya operasional Indosat Group mencapai Rp. 16 triliun, yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Biaya Operasional XL-Axiata sebagai salah satu dari tiga operator utama tahun 2010 mencapai Rp. 12,3 triliun serta operator lainnya masih dibawah Rp. 5 triliun

Tabel 6.15. Perkembangan Biaya Operasional Operator Telepon 2005 –2010 (Rp. Milyar)

Operator	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Telkom Group	24.636	29.701	32.967	38.933	41.993	46.138
Indosat Group	7.938	8.841	11.969	13.925	15.180	16.323
Excelcom	2.055	3.224	4.480	4.600	11.242	12.294
Bakrie	344	469	972	1.270	2.454	2.574
Mobile 8	530	560	715	1.119	1.044	N.A
Hutchinson	N.A	N.A	N.A	2.054	3436	N.A
STI	N.A	N.A	N.A	344	400	N.A

Biaya Operasional telkom Group pada tahun 2010 meningkat sebesar 9,9% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan biaya operasional ini juga lebih tinggi dibanding peningkatan tahun sebelumnya. Dalam lima tahun terakhir, biaya operasional Telkom Group telah meningkat rata-rata sebesar 11,7%. Untuk Indosat Group, pada tahun 2010 biaya operasionalnya meningkat 7,5% dibanding tahun sebelumnya dengan peningkatan rata-rata dalam lima tahun terakhir mencapai 17,1%. Sementara XL-Axiata dan Bakrie mencatat peningkatan biaya operasional sebesar 9,4% dan 4,9% pada tahun 2010 dengan peningkatan rata-rata biaya operasional masing-masing sebesar 48,8% dan 59% per tahun. Dari grafik pertumbuhan biaya operasional terlihat adanya pola fluktuasi yang berbeda antara Telkom Group dan Indosat Group dengan XL-Axiata dan Bakrie yang hanya terdiri dari penyelenggaraan jaringan bergerak. Telkom Group dan Indosat menunjukkan pertumbuhan biaya operasional yang semakin menurun sejak 2008. Sementara XL-Axiata dan Bakrie Telecom justru mengalami peningkatan biaya operasional yang tajam pada 2009 sebelum akhirnya menurun kembali pada tahun 2010.

Bab 7

Bidang Frekuensi

Spektrum frekuensi radio (frekuensi) merupakan sumber daya yang sangat vital dan terbatas dalam dunia telekomunikasi. Perkembangan teknologi dalam bidang telekomunikasi khususnya telekomunikasi seluler dan layanan internet yang berbasis nirkabel menyebabkan pemanfaatan frekuensi juga menjadi sangat tinggi. Hal ini berimplikasi pada perlunya pengelolaan, pengaturan dan pengawasan penggunaan frekuensi di wilayah Indonesia. Apalagi pemanfaatan frekuensi juga sudah menggunakan berbagai perangkat telekomunikasi dan teknologi yang digunakan. Peningkatan penggunaan frekuensi juga diikuti dengan semakin beragamnya penggunaan frekuensi untuk berbagai kebutuhan karena penggunaan sarana telekomunikasi yang semakin variatif dengan penggunaan teknologi telekomunikasi yang semakin tinggi pula

Penyajian data statistik bidang frekuensi akan memberikan gambaran pemanfaatan dan penggunaan frekuensi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan peta penggunaannya pada saat ini. Penyajian data penggunaan frekuensi ini dilakukan untuk memotret pola penggunaan spektrum frekuensi radio untuk berbagai keperluan serta penggunaannya berdasarkan *service*. Penggunaan pita frekuensi berdasarkan *service* akan dipetakan berdasarkan penggunaannya untuk setiap propinsi. Pemetaan penggunaan menurut propinsi juga akan dilakukan terhadap penggunaan menurut pita frekuensi.

7.1 Ruang Lingkup

Data statistik bidang frekuensi yang disajikan dalam buku ini meliputi jumlah penggunaan spektrum frekuensi berdasarkan pita frekuensi, jumlah penggunaan spektrum frekuensi berdasarkan jenis penetapan frekuensi, dan jumlah penggunaan frekuensi berdasarkan peruntukannya. Keseluruhan data tersebut juga dipetakan penggunaannya menurut propinsi. Selanjutnya juga dilakukan analisis untuk menghitung jumlah penggunaan frekuensi menurut *subservice* TV, Radio (AM/FM) dan GSM di tiap - tiap propinsi. Secara

khusus, penggunaan frekuensi untuk *subservice* tertentu seperti TV, radio (AM, FM) dan GSM/DCS akan dilihat penggunaannya antar wilayah dengan membandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk di wilayah (propinsi) tersebut.

Statistik frekuensi yang ditampilkan dalam laporan ini meliputi :

- 1) Statistik penggunaan spektrum frekuensi berdasarkan pita frekuensi (misalnya VLF, LF, MF, HF, dst.) dan propinsi tahun 2007 – 2010;
- 2) Penggunaan frekuensi berdasarkan *service* dan *subservice* tahun 2007 – 2010;
- 3) Penggunaan frekuensi menurut kepulauan, propinsi, *service* dan *subservice* tahun 2010;
- 4) Perbandingan jumlah penggunaan frekuensi TV, Radio AM, Radio FM dan GSM dengan jumlah penduduk dan luas wilayah untuk tiap propinsi Tahun 2010;
- 5) Penerbitan Izin Amatir Radio yang meliputi IAR, IKRAP dan SKAR.

Data statistik frekuensi yang disajikan dan dianalisa dalam bab ini diperoleh langsung dari Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio Ditjen Postel pada posisi data terakhir yaitu 31 Januari 2011. Sementara data penduduk dan luas wilayah propinsi diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

7.2. Konsep dan Definisi

Definisi dari terminologi yang digunakan dalam penyajian data frekuensi dibawah ini disusun agar dapat memberi interpretasi yang sama terhadap terminologi yang digunakan. Beberapa konsep dan definisi yang digunakan dalam pembahasan selanjutnya pada bab frekuensi ini adalah :

1. Telekomunikasi adalah setiap transmisi, emisi atau penerimaan isyarat, sinyal, tulisan, gambar-gambar dan suara atau pernyataan pikiran apapun melalui kawat, radio, optik atau sistem elektromagnetik lainnya;
2. Spektrum Frekuensi Radio adalah susunan pita frekuensi radio yang mempunyai frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz sebagai satuan getaran gelombang elektromagnetik yang merambat dan terdapat dalam dirgantara (ruang udara dan antariksa);



3. Alokasi Spektrum Frekuensi Radio adalah pencantuman pita frekuensi radio tertentu dengan maksud untuk penggunaan oleh satu atau lebih dinas komunikasi radio terrestrial atau dinas komunikasi radio ruang angkasa atau dinas astronomi berdasarkan persyaratan tertentu;
4. Radio adalah istilah umum yang dipakai dalam penggunaan gelombang radio;
5. Gelombang Radio atau Gelombang Hertz adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang lebih rendah dari 3.000 GHz, yang merambat dalam ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan;
6. Komunikasi radio adalah telekomunikasi dengan perantara gelombang radio;
7. Komunikasi radio terrestrial adalah Setiap komunikasi radio selain komunikasi radio ruang angkasa atau radio astronomi;
8. Komunikasi radio ruang angkasa adalah setiap komunikasi radio yang mencakup penggunaan satu atau lebih stasiun ruang angkasa, atau penggunaan satu atau lebih satelit pemantul ataupun objek lain yang ada di ruang angkasa;
9. Navigasi radio adalah Radio penentu yang digunakan untuk keperluan navigasi, termasuk pemberitahuan sebagai adanya peringatan tentang benda yang menghalangi;
10. Radio Astronomi adalah Astronomi yang berdasarkan penerimaan gelombang radio yang berasal dari kosmos.

7.3. Penggunaan Frekuensi (ISR)

7.3.1. Penggunaan Berdasarkan Pita Frekuensi

Penggunaan pita frekuensi masih menunjukkan peningkatan pada tahun 2010 meskipun peningkatannya tidak sebesar tahun sebelumnya. Penggunaan pita frekuensi pada tahun 2010 hanya meningkat 15,6% dibanding tahun sebelumnya. Padahal pada tahun 2009, peningkatan penggunaan frekuensi mencapai lebih dari 100%. Peningkatan penggunaan frekuensi menurut pita frekuensi yang tidak terlalu tinggi ini diantaranya disebabkan penurunan penggunaan pada beberapa jenis pita frekuensi. Pita frekuensi yang penggunaannya mengalami penurunan adalah frekuensi HF yang berada pada pita 3 MHz-30

MHz dan frekuensi MF yang berada pada pita 300 kHz-3 MHz meskipun volume penggunaannya sedikit untuk kedua jenis pita tersebut. Sementara untuk jenis pita frekuensi tinggi yang penggunaannya tinggi, masih terjadi peningkatan penggunaan meskipun tidak sebesar peningkatan pada tahun sebelumnya.

Tabel 7.1. Jumlah Penggunaan Frekuensi (ISR) berdasarkan pita frekuensi

No.	Nama Spektrum	Pita Frekuensi	2008	2009	2010*
1	VLF	(3 kHz – 30 kHz)	N.A	0	0
2	LF	(30 kHz – 300 kHz)	N.A	0	0
3	MF	(300 kHz – 3 MHz)	N.A	391	360
4	HF	(3 MHz – 30 MHz)	329	6.327	6.134
5	VHF	(30 MHz – 300 MHz)	8.838	22.236	28.235
6	UHF	(300 MHz – 3 GHz)	89.968	92.627	103.665
7	SHF	(3 GHz - 30 GHz)	36.653	163.284	190.887
8	EHF	(30 GHz – 300 GHz)	N.A	2	0
	Jumlah		135.788	284.867	329.269

Data VLF (Very Low Frequency) dan LF (Low Frequency) tidak dapat dimunculkan karena penggunaan frekuensi rendah (kurang dari 300 kHz) menyangkut penggunaan untuk keperluan khusus seperti untuk keperluan militer dan tidak banyak bandwidth yang pada band ini dalam spektrum radio.

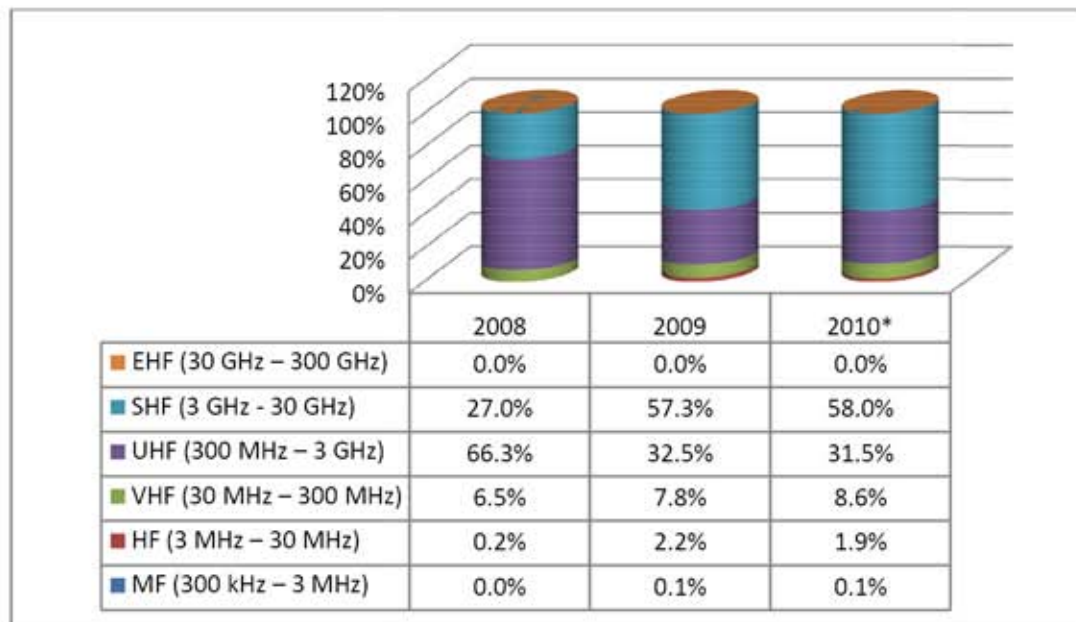
*) Sampai 31 Januari 2011

Komposisi penggunaan frekuensi menurut pita frekuensi pada tahun 2010 juga masih didominasi oleh penggunaan frekuensi untuk pita frekuensi tinggi terutama SHF (pita 3 GHz-30 GHz) dan UHF (pita frekuensi 300 MHz-3 GHz). Proporsi penggunaan kedua jenis pita frekuensi ini pada tahun 2010 secara bersama-sama mencapai 89,5% dari total penggunaan frekuensi. Proporsi penggunaan pita frekuensi SHF pada tahun 2010 bahkan meningkat meskipun kecil menjadi 58% dibanding tahun sebelumnya yang proporsinya mencapai 57,3%. Sementara untuk pita frekuensi UHF, proporsinya menurun sebesar 1% dari 32,5% pada tahun 2009 menjadi 31,5% pada tahun 2010.

Peningkatan proporsi penggunaan pita frekuensi SHF yang terjadi meskipun kenaikan penggunaannya sebenarnya kecil disebabkan adanya penurunan pada penggunaan pita frekuensi lainnya. Peningkatan penggunaan pita frekuensi SHF meskipun kecil, namun karena proporsi penggunaannya besar menyebabkan tetap terjadinya peningkatan dalam

penggunaan pita frekuensi secara total. Sebaliknya meskipun terjadi penurunan penggunaan pita frekuensi MF dan HF meskipun cukup besar, namun tidak berdampak signifikan terhadap total penggunaan frekuensi. Proporsi penggunaan kedua jenis pita frekuensi ini juga bahkan cenderung semakin rendah dan semakin tidak signifikan.

Gambar 7.1. Komposisi Penggunaan Frekuensi berdasarkan Pita Frekuensi



Jika dilihat dari kumulatif penggunaannya, meskipun penggunaan pita frekuensi terbesar pada tahun 2009 dan 2010 adalah untuk jenis pita frekuensi SHF, namun secara kumulatif penggunaan terbesar sampai tahun 2010 adalah masih untuk jenis pita frekuensi UHF. Hal ini disebabkan penggunaan jenis pita frekuensi UHF yang sudah cukup besar pada tahun 2008 meskipun kemudian tidak mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2009 dan 2010. Bahkan ketika peningkatan penggunaan pita frekuensi SHF pada tahun 2010 cukup rendah, penggunaan jenis pita frekuensi UHF juga lebih rendah lagi.

Peningkatan penggunaan frekuensi yang rendah pada tahun 2010 menyebabkan secara kumulatif penggunaan frekuensi menurut pita frekuensi secara total hanya tumbuh 40%. Pertumbuhan ini lebih rendah dibanding pertumbuhan yang terjadi pada tahun sebelumnya yang mencapai 53%. Pertumbuhan kumulatif penggunaan frekuensi paling besar terjadi juga untuk jenis pita frekuensi SHF yang pertumbuhannya mencapai 66,7%, diikuti oleh jenis pita

frekuensi VHF yang tumbuh 43,8%. Sementara untuk jenis pita frekuensi UHF yang kumulatif penggunaannya paling besar, pertumbuhan kumulatif penggunaannya hanya mencapai 23,2%.

Tabel 7.2. Kumulatif Penggunaan Frekuensi (ISR) berdasarkan pita frekuensi

No.	Nama Spektrum	Pita Frekuensi	2008	2009	2010
1	VLF	(3 kHz – 30 kHz)	N.A	0	0
2	LF	(30 kHz – 300 kHz)	N.A	0	0
3	MF	(300 kHz – 3 MHz)	454	845	1.193
4	HF	(3 MHz – 30 MHz)	17.795	24.122	30.256
5	VHF	(30 MHz – 300 MHz)	42.166	64.402	92.637
6	UHF	(300 MHz – 3 GHz)	354.726	447.353	551.018
7	SHF	(3 GHz - 30 GHz)	122.693	285.977	476.864
8	EHF	(30 GHz – 300 GHz)	14	16	16
	Jumlah		537.848	822.715	1.127.926

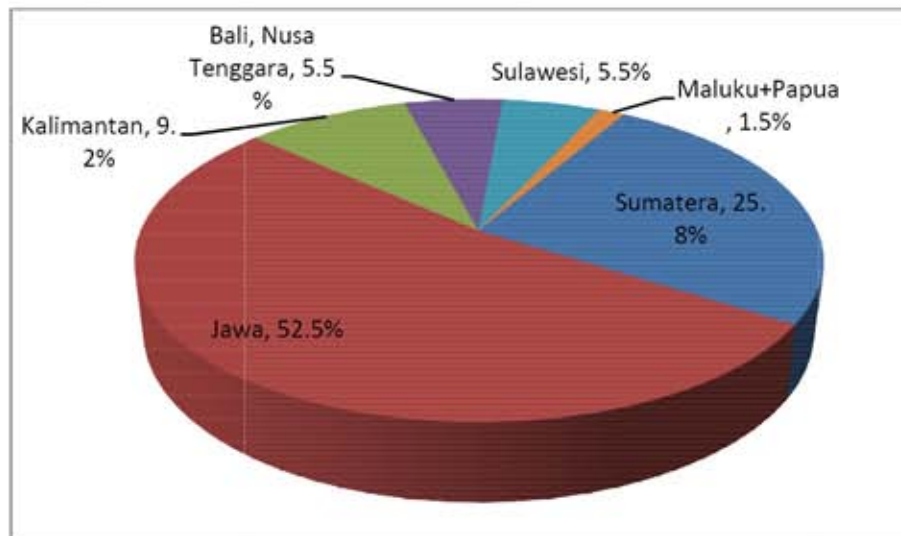
*) Sampai Januari 2011

Distribusi penggunaan pita frekuensi menurut pulau besar pada gambar 7.2 menunjukkan bahwa Pulau Jawa masih menjadi lokasi penggunaan pita frekuensi yang terbesar dan jauh diatas pulau besar lainnya. Proporsi penggunaan pita frekuensi di pulau Jawa mencapai 52,5% sementara di Pulau Sumatera yang menjadi lokasi terbesar kedua, proporsinya hanya mencapai 25,8%. Penggunaan pita frekuensi yang besar di Jawa disebabkan karena Jawa merupakan pusat berbagai macam kegiatan baik pemerintahan, ekonomi dan bisnis maupun kegiatan sosial dimana penggunaan frekuensi juga menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan tersebut. Sehingga meskipun secara geografis wilayahnya tidak terlalu luas, namun faktor dinamika kegiatan lebih menentukan dalam intensitas dan kumulatif penggunaan pita frekuensi daripada luas wilayah.

Fenomena yang sama sebenarnya juga terlihat jika membandingkan penggunaan frekuensi antara di wilayah Bali-Nusa Tenggara dengan wilayah Sulawesi. Meskipun wilayah geografis Sulawesi lebih luas daripada Bali, namun karena dinamika kegiatan khususnya ekonomi dan bisnis di Bali-Nusa Tenggara lebih tinggi, maka proporsi penggunaan pita frekuensinya menunjukkan proporsi yang sama dengan Sulawesi. Proporsi penggunaan pita frekuensi yang

paling rendah terdapat di Kawasan Timur Indonesia yaitu di wilayah Maluku dan Papua. Hal ini juga terkait dengan dinamika kegiatan sosial-ekonomi dan pemerintahan yang relatif rendah di wilayah tersebut sehingga penggunaan pita frekuensi juga tidak tinggi.

Gambar 7.2. Penggunaan Pita Frekuensi menurut pulau besar



Penggunaan frekuensi menurut jenis pita frekuensi di tiap propinsi menunjukkan bahwa hampir pada semua daerah, penggunaan frekuensi yang terbesar adalah untuk jenis pita frekuensi SHF, diikuti oleh pita frekuensi UHF. Penggunaan pita frekuensi SHF terbesar terdapat di propinsi Jawa Barat, diikuti oleh Jawa Timur dan DKI Jakarta. Penggunaan jenis pita frekuensi SHF yang besar juga cenderung diikuti dengan penggunaan frekuensi total yang juga menjadi yang terbesar pada ketiga daerah tersebut. Hal ini dikarenakan proporsi penggunaan pita frekuensi SHF yang besar sehingga mempengaruhi jumlah total penggunaan frekuensi. Pada ketiga daerah tersebut, penggunaan jenis pita frekuensi lainnya juga cenderung proporsional dengan pola proporsi penggunaan pita SHF.

Pola penggunaan jenis frekuensi yang sedikit berbeda terjadi untuk Kawasan Timur Indonesia. Penggunaan frekuensi di wilayah Maluku paling tinggi justru adalah untuk jenis pita frekuensi VHF, baru kemudian SHF. Sementara untuk di Maluku Utara, penggunaan tertinggi justru untuk jenis pita frekuensi HF. Penggunaan pita frekuensi yang paling tinggi untuk jenis pita HF juga terjadi di propinsi Papua. Bahkan penggunaan pita frekuensi HF di Papua jauh lebih tinggi dibanding penggunaannya di propinsi-propinsi lain. Hal ini diduga terkait dengan adanya kebutuhan khusus untuk penggunaan jenis frekuensi HF yang tinggi

di Papua mengingat wilayahnya yang luas dan banyak pemukiman serta infrastruktur transportasi darat yang belum bagus.

Tabel 7.3. Penggunaan Pita Frekuensi per Propinsi tahun 2010

No	Propinsi	Pita Frekuensi					
		MF	HF	VHF	UHF	SHF	EHF
1	Babel		63	210	707	1.320	
2	Bengkulu	3	46	221	581	1.101	
3	Jambi	4	99	567	1.313	2.431	
4	Kepri	1	54	517	1.721	3.092	
5	Lampung	15	93	309	3.123	4.744	
6	NAD	11	83	497	2.360	4.230	
7	Riau	4	307	1.185	4.882	8.674	
8	Sumbar	11	76	406	2.326	4.145	
9	Sumsel	10	165	1.223	2.913	5.947	
10	Sumut	31	348	2.095	6.495	12.222	
11	Banten	5	33	433	4.813	8.998	
12	DIY	1	16	289	2.207	3.756	
13	DKI Jakarta	10	347	865	10.346	21.772	
14	Jawa Barat	64	163	2.085	15.706	29.897	
15	Jawa Tengah	55	126	1.788	10.224	16.332	
16	Jawa Timur	35	251	1.997	13.953	22.459	
17	Bali	10	75	536	3.003	5.342	
18	NTB	5	69	666	1.792	2.746	
19	NTT	2	283	858	774	1.610	
20	Kalimantan Barat	14	256	464	1.826	3.669	
21	Kalimantan Selatan	10	99	1.038	1.540	3.541	
22	Kalimantan Tengah	11	265	593	1.254	2.543	
23	Kalimantan Timur	3	466	2.297	2.960	6.621	
24	Sulawesi Utara	2	88	299	1.146	2.053	
25	Sulawesi Tengah	7	131	374	672	1.281	
26	Sulawesi Selatan*	16	116	630	2.839	5.535	
27	Sulawesi Tenggara		42	309	603	969	
28	Gorontalo		39	34	162	445	
29	Maluku	2	296	451	294	416	
30	Maluku Utara		119	107	89	116	
31	Irjabar				48	31	
32	Papua	5	1.196	226	564	710	

*) Termasuk Sulawesi Barat yang merupakan Propinsi Pemekaran dari Sulawesi Selatan

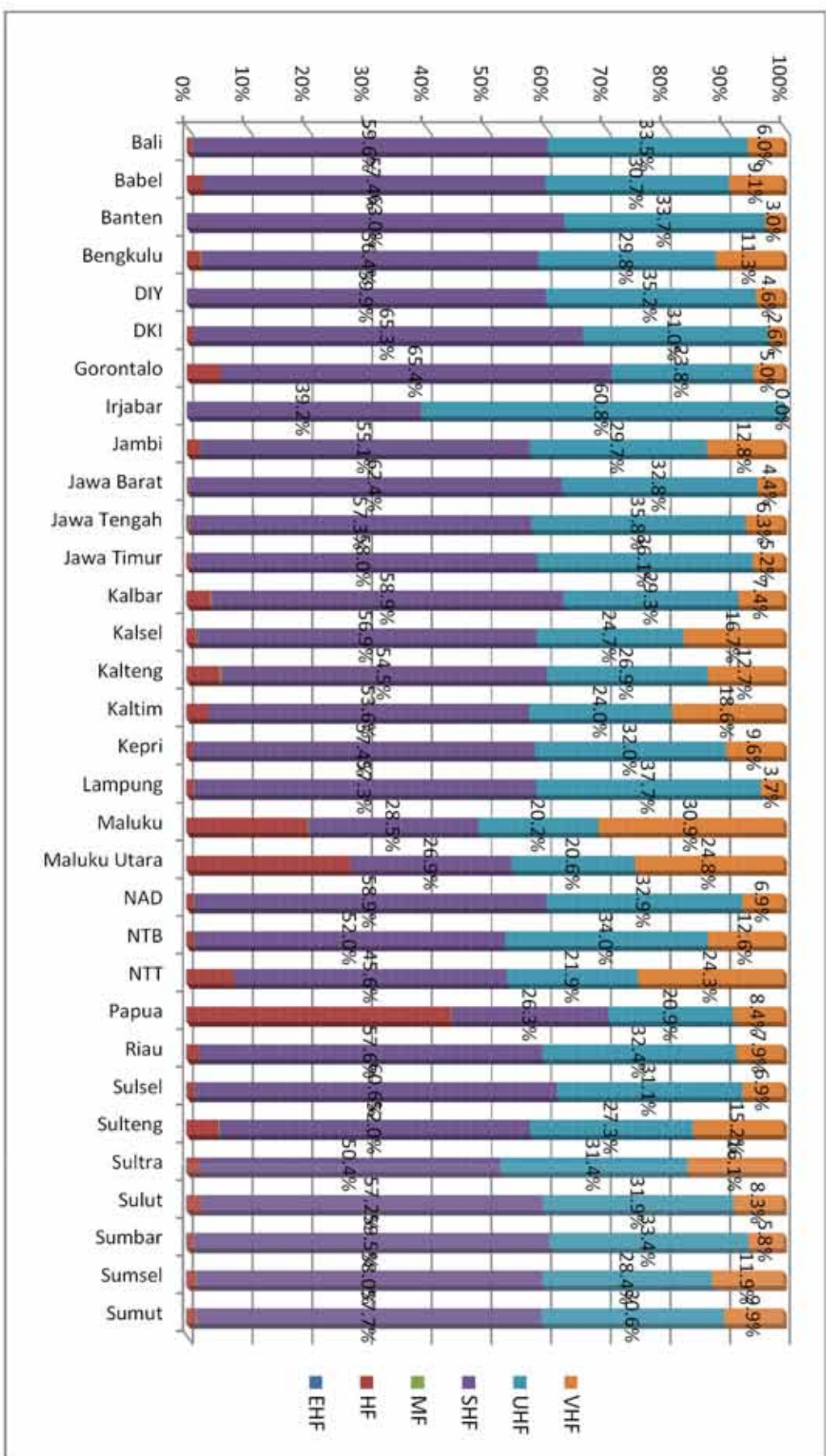
Dari tabel 7.3 juga terlihat bahwa tidak ada penggunaan jenis pita frekuensi EHF pada semua propinsi. Pada beberapa propinsi juga tidak terdapat penggunaan pita frekuensi MF seperti di



Bangka-Belitung, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara dan Irian Jaya Barat. Khusus untuk Irian Jaya Barat juga tidak terdapat penggunaan untuk jenis pita frekuensi VHF dan HF meskipun penggunaan jenis pita frekuensi HF ini sangat tinggi di provinsi tetangganya. Tidak terdapat korelasi yang jelas antara tidak adanya penggunaan jenis frekuensi MF dengan kondisi geografis provinsi tersebut. Bangka Belitung dan Maluku Utara merupakan provinsi dengan kondisi geografis kepulauan. Namun Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Irian Jaya Barat memiliki kondisi geografis daratan.

Komposisi penggunaan pita frekuensi menurut provinsi seperti diperlihatkan pada gambar 7.3 menunjukkan hampir pada semua provinsi, proporsi penggunaan terbesar adalah untuk jenis pita frekuensi SHF dengan rata-rata proporsinya mencapai 54% dari total penggunaan. Sementara untuk penggunaan frekuensi UHF yang proporsinya tertinggi kedua, proporsi penggunaannya rata-rata hanya mencapai 30,8%. Proporsi tertinggi dari penggunaan jenis frekuensi SHF terdapat di provinsi Gorontalo dan DKI Jakarta yang mencapai sekitar 65%, diikuti oleh Jawa Barat yang mencapai 62,4%. Namun untuk beberapa daerah di Kawasan Timur Indonesia, penggunaan pita frekuensi SHF ini relatif kecil. Rata-rata proporsi penggunaan pita frekuensi SHF di empat provinsi di kawasan timur ini hanya 30,2%. Rata-rata proporsi penggunaannya hampir sama dengan penggunaan frekuensi UHF yang mencapai 30,6%. Khusus untuk Papua, proporsi penggunaan frekuensi terbesar justru untuk pita frekuensi HF yang mencapai 44,% diikuti oleh Maluku Utara yang mencapai 27,6%. Sementara rata-rata proporsi penggunaan frekuensi HF secara total hanya 4,8%.

Tidak terdapat korelasi yang jelas antara tidak adanya penggunaan jenis frekuensi MF dengan kondisi geografis provinsi. Beberapa provinsi yang tidak ada penggunaan frekuensi MF menunjukkan geografis berbentuk kepulauan, sementara beberapa provinsi lain menunjukkan bentuk daratan





7.3.2. Penggunaan Berdasarkan Service

Perkembangan penggunaan frekuensi menurut service juga menunjukkan peningkatan penggunaan frekuensi. Namun seperti penggunaan menurut pita frekuensi, peningkatan penggunaan frekuensi menurut service pada tahun 2010 tidak sebesar peningkatan pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 secara total penggunaan frekuensi menurut service hanya meningkat sebesar 15,5%, lebih rendah dari peningkatan tahun sebelumnya yang mencapai 34,5%. Peningkatan yang rendah ini berlangsung pada semua jenis service terutama *Land Mobile (private)* yang hanya meningkat 1,5%, *Broadcast* (10,2%) dan *Land Mobile (public)* yang hanya meningkat 10,9%. Proporsi penggunaan jenis service *Land Mobile* yang cukup besar (meskipun bukan yang terbesar) dan hanya meningkat rendah penggunaannya pada tahun 2010, menyebabkan secara total penggunaan frekuensi menurut service ini juga rendah. Peningkatan penggunaan frekuensi yang tinggi hanya terjadi pada jenis service *Satelite* yang presentasi peningkatannya sangat tinggi. Namun karena proporsi penggunaannya rendah, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan total penggunaan frekuensi menurut service.

Tabel 7.4. Jumlah penggunaan kanal frekuensi menurut service 2009-2010

No.	Service	2008**	2009	2010*
1	Aeronautical/Penerbangan	0	1.018	1.193
2	Broadcast (TV & Radio)	1.737	1.805	1.990
3	Fixed Service (private)		1.003	910
4	Fixed Service (public)	122.949	171.483	201.196
5	Land Mobile (Private)	40.092	33.321	33.824
6	Land Mobile (Public)	52.705	77.809	86.295
7	Maritim		6.268	8.104
8	Satellite	627	682	5.278
	Total	218.110	293.389	338.790

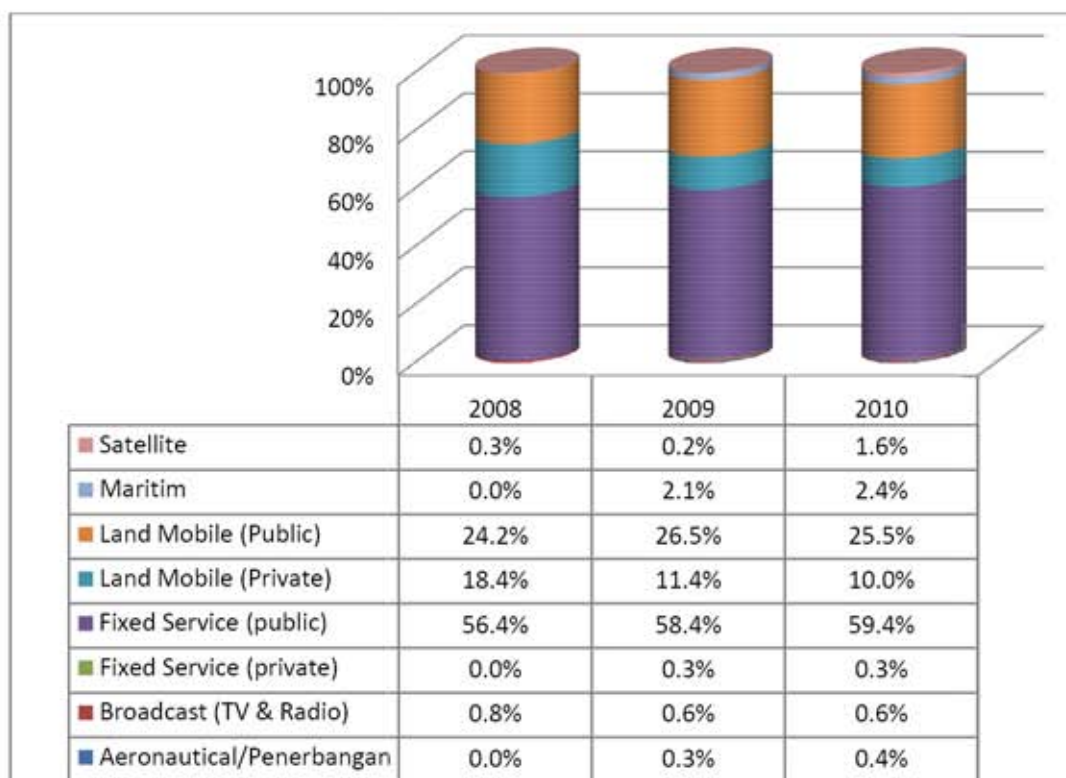
*)Sampai 31 Januari 2011

**) Merupakan data perhitungan ISR, bukan data jumlah frekuensi yang ditetapkan

Peningkatan penggunaan frekuensi menurut service yang rendah pada tahun 2010, tidak banyak menyebabkan perubahan komposisi penggunaan frekuensi menurut service. Proporsi penggunaan frekuensi terbesar masih untuk jenis service *Fixed service (public)* yang pada tahun 2010 proporsinya mencapai 59,4%. Jenis service lain yang penggunaannya

cukup besar adalah *Land Mobile public* yang mencapai 25,5% dan sedikit menurun dibanding proporsi penggunaan tahun sebelumnya yang mencapai 26,5%. Perubahan yang relatif kecil juga pada proporsi penggunaan jenis service Sattelite yang meningkat dari 0,3% pada tahun 2009 menjadi 0,4% pada tahun 2010 akibat kenaikan penggunaanya pada tahun 2010. Proporsi penggunaan jenis servive Land Mobile private mengalami penurunan dari 18,4% pada 2008 menjadi tinggal 11,4% pada tahun 2009 dan menurun kembali menjadi 10 pada tahun 2010.

Gambar 7.4 Komposisi penggunaan frekuensi menurut *service* tahun 2008 – 2010

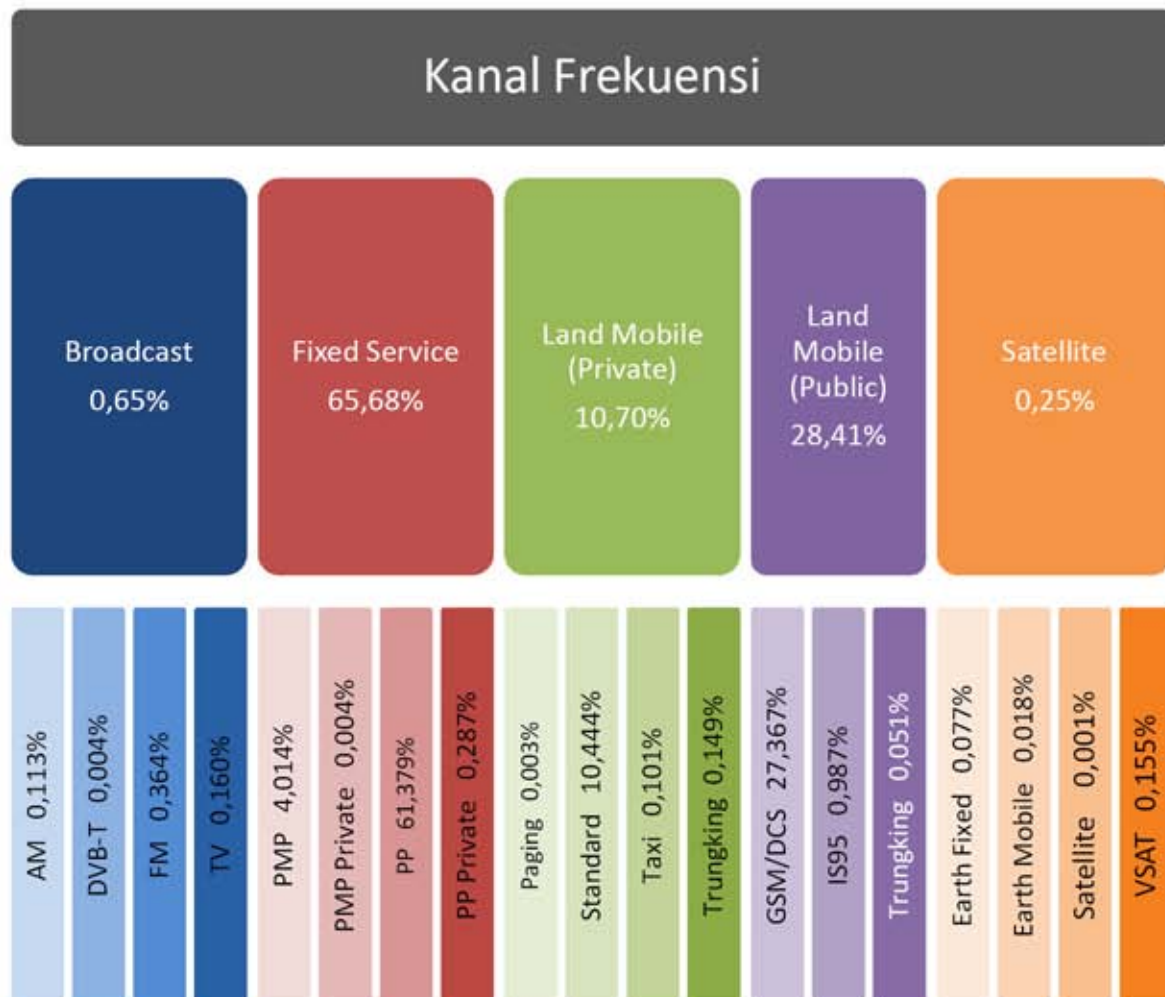


Jika dilihat komposisi penggunaannya sampai dengan *subservice*-nya, diantara komponen frekuensi untuk jenis service *Fixed Service*, masih ada pada penggunaan jenis *subservice Point to Point* (PP). Proporsi penggunaan subservice PP pada tahun 2010 mencapai 61,3% dari total penggunaan frekuensi seperti ditunjukkan pada gambar 7.5. Proporsi penggunaan *subservice* frekuensi lain yang cukup besar adalah untuk jenis *subservice* frekuensi GSM/DCS yang mencapai 27,1% yang berada di kelompok jenis service *Land Mobile* (public). Penggunaan *subservice* GSM/DCS hanya mencapai 96,3% dari total penggunaan frekuensi untuk Land Mobile (Public) service . Pada kelompok service Land Moblie (Private) proporsi

penggunaan yang tertinggi adalah untuk jenis subservice Standard. Namun proporsi penggunaannya hanya sekitar 10% dari total penggunaan frekuensi menurut subservice.

Sementara penggunaan frekuensi untuk jenis service Broadcast pada semua jenis subservice-nya masih tergolong rendah. Secara total proporsi penggunaannya untuk semua subservice-nya (AM, FM, TV dan DVB-T) hanya mencapai 0,65% dari total frekuensi dengan yang terbesar adalah untuk subservice AM yang hanya 0,113% dari total penggunaan frekuensi. Proporsi penggunaan yang rendah ini karena penggunaannya yang masih terbatas dan dikontrol secara ketat oleh pemerintah.

Gambar 7.5. Komposisi Penggunaan Frekuensi menurut Service dan Subservice Tahun 2010



7.3.3. Penggunaan Menurut Propinsi

Sebaran penggunaan frekuensi menurut subservice pada tiap propinsi ditunjukkan pada tabel 7.5. Dari tabel tersebut terlihat bahwa penggunaan jenis subservice yang proporsi penggunaannya tinggi seperti PP pada kelompok Fixed Service, Standard pada kelompok Land Mobile (private) dan GSM pada kelompok service Land Mobile (public) memang relatif tinggi pada hampir semua daerah. Pada jenis subservice Pppenggunaan frekuensi yang rendah hanya terdapat di Papua Barat, Maluku Utara dan Gorontalo. Sementara penggunaan yang tinggi terdapat di Jawa Barat, Jawa Timur dan DKI Jakarta. Untuk subservice Standard, penggunaan yang tinggi juga terdapat di ketiga propinsi tersebut, sementara di Papua Barat justru tidak ada penggunaan jenis subservice frekuensi tersebut.

Secara total penggunaan frekuensi menurut subservice, Jawa Timur, Jawa Barat dan DKI Jakarta adalah tiga propinsi dengan jumlah penggunaan frekuensi terbesar. Proporsi penggunaan service frekuensi oleh ketiga daerah tersebut mencapai 36,4% dari total penggunaan frekuensi dengan distribusi Jawa Timur mencapai 11,75%, Jawa Barat 14,5% dan DKI Jakarta mencapai 10,1%. Proporsi penggunaan subservice frekuensi di Pulau Jawa sendiri mencapai 51,3% dari total penggunaan. Sementara di Pulau Sumatera proporsinya hanya mencapai 25,2% dan di Kalimantan hanya 8,95%. Proporsi penggunaan frekuensi yang tinggi di Jawa terutama pada ketiga propinsi memiliki korelasi dengan jumlah penduduk yang besar dan padat serta kegiatan sosial-ekonomi dan pemerintahan yang tinggi pada ketiga daerah tersebut sehingga membutuhkan penggunaan service frekuensi yang tinggi pula. Dari pola persebaran tersebut juga terlihat bahwa faktor kepadatan penduduk dan dinamika kegiatan yang ada disuatu daerah lebih memiliki korelasi terhadap penggunaan frekuensi dibandingkan luas wilayah atau kondisi geografis. Wilayah dengan dinamika kegiatan sosial-ekonomi dan kepadatan penduduk yang rendah menunjukkan penggunaan service frekuensi yang rendah seperti di Bengkulu dan Bangka-Belitung untuk Pulau Sumatera, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan Sulawesi tenggara di Sulawesi dan Maluku Utara, Papua dan Papua Barat di Papua. Sementara propinsi-propinsi di Jawa yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat yang tinggi cenderung memiliki tingkat penggunaan frekuensi yang tinggi.

Dari sisi distribusi penggunaannya menurut jenis subservice, selain subservice PP, jenis subservice GSM/DCS memiliki distribusi penggunaan yang relatif cukup baik. Semua propinsi menggunakan jenis subservice GSM/DCS ini dengan jumlah yang bervariasi antar daerah, namun tidak ada daerah yang penggunaannya sangat rendah, kecuali Papua Barat. Hal ini tidak terlepas dari sebaran penggunaan seluler yang menggunakan frekuensi GSM yang sudah sangat meluas dan menjangkau daerah-daerah pelosok. Intensitas penggunaannya pada tahun-tahun berikutnya diduga akan semakin tinggi lagi sejalan dengan teknologi seluler yang semakin tinggi.



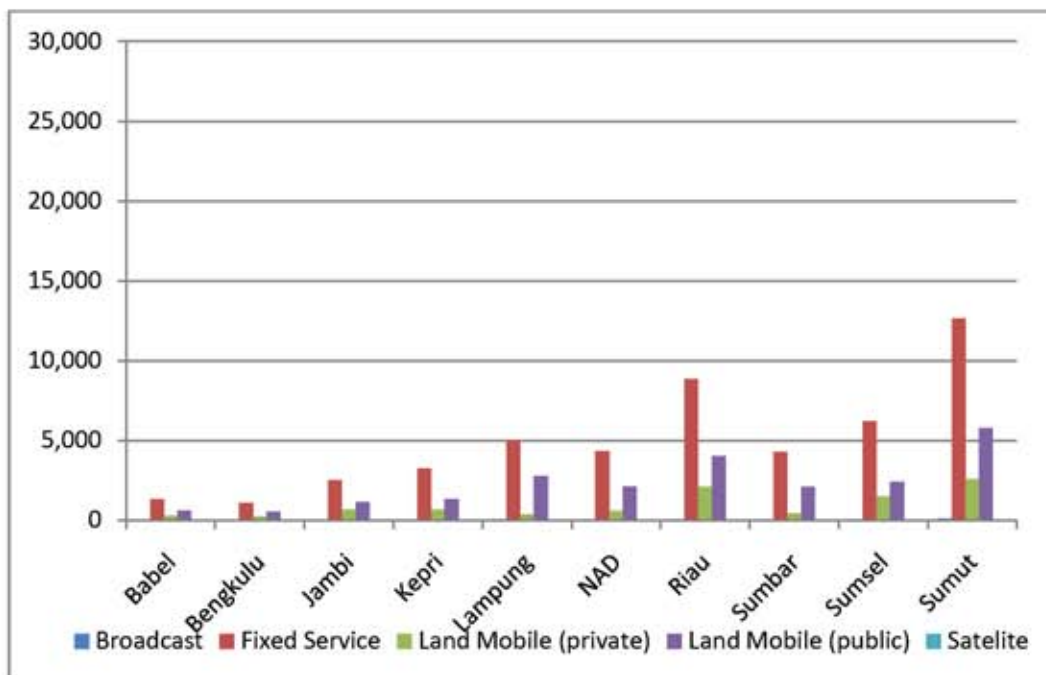
Tabel 7.5. Penggunaan Frekuensi menurut Propinsi, Service dan Subservice sampai Desember 2010 (satuan : pemancar stasiun radio)

Wilayah	Broadcast				Fixed Service				Land Mobile (private)				Land Mobile (public)		
	AM	FM	TV	DVB-T	PMP	PMP Private	PP Private	PP	Paging	Taxi	Trunking	Standard	IS95	GSM/DCS	Trunking
Babel	0	13	8	0	21	0	2	1.313	0	0	4	284	0	646	0
Bengkulu	3	15	5	0	13	0	0	1.096	0	0	2	252	0	554	0
Jambi	4	17	17	0	95	0	14	2.403	0	4	2	685	37	1.124	0
Kepri	1	10	12	1	238	0	14	3.013	0	9	1	687	17	1.347	4
Lampung	15	38	14	0	272	0	0	4.740	0	0	2	403	192	2.602	0
NAD	11	37	9	0	114	0	11	4.216	0	1	30	567	1	2.142	7
Riau	4	28	21	0	210	7	28	8.607	0	4	74	2.016	75	3.942	11
Sumbang	11	32	17	0	184	0	2	4.127	5	12	2	442	2	2.094	0
Sumsel	10	41	27	0	306	0	4	5.927	0	4	4	1.500	167	2.263	1
Sumut	31	77	12	0	483	0	9	12.164	0	10	1	2.564	140	5.650	1
Sumatera	90	308	142	1	1.936	7	84	47.606	5	44	122	9.400	631	22.364	24
Banten	5	25	7	0	875	0	80	8.878	0	4	13	629	133	3.575	52
DIY	1	39	14	0	309	0	23	3.722	0	18	5	284	79	1.772	0
DKI Jakarta	8	42	13	8	1.647	1	177	21.421	3	88	149	2.154	372	7.215	6
Jawa Barat	63	128	31	1	2.550	4	173	29.596	0	21	24	2.620	417	12.272	7
Jawa Tengah	55	152	25	0	941	0	98	16.193	0	19	8	1.957	468	8.611	4
Jawa Timur	35	114	44	1	2.269	0	88	22.338	0	62	52	2.534	639	10.603	7
Jawa	167	500	134	10	8.591	5	639	102.148	3	212	251	10.178	2.008	44.048	76
Kabbar	13	24	30	0	146	0	8	3.644	1	0	2	736	0	1.617	0
Kalsel	10	33	26	0	170	0	9	3.538	0	0	6	1.107	40	1.290	1
Kateng	11	19	15	0	81	0	6	2.507	0	0	2	843	4	1.151	0
Kaltim	2	40	14	0	274	0	69	6.515	0	8	37	3.116	0	2.198	42
Kalimantan	36	116	85	-	671	-	92	16.204	1	8	47	5.802	44	6.256	43
Bali	10	35	14	0	329	0	17	5.291	0	4	5	662	114	2.461	15
NTB	5	15	6	0	60	0	15	2.722	0	4	2	821	10	1.602	0
NTT	2	32	7	0	32	0	6	1.562	0	5	2	1.110	0	713	0
Bali, Nusa Tenggara	17	82	27	-	421	-	38	9.575	-	13	9	2.593	124	4.776	15
Gorontalo	0	4	2	0	13	0	4	438	0	1	2	70	0	145	0
Sulsel	16	21	28	0	379	0	20	5.486	0	21	5	784	57	2.304	0
Sulteng	7	9	29	0	26	0	4	1.266	0	6	2	474	0	633	0
Sultra	0	14	16	0	34	0	0	957	0	0	2	330	0	560	0
Sulut	2	19	25	0	138	0	10	2.021	0	10	5	378	24	937	0
Sulawesi	25	67	100	-	590	-	38	10.168	-	38	16	2.036	81	4.579	-
Iriabar	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	48	0
Maluku	15	38	14	0	272	0	0	4.740	0	0	2	403	192	2.602	0
Maluku Utara	2	9	6	0	24	0	6	388	0	0	4	737	0	250	0
Papua	2	14	26	0	20	0	0	671	0	0	14	1.441	0	476	1
Maluku+Papua	19	61	46	-	316	-	6	5.830	-	-	20	2.581	192	3.376	1
Sub Total	354	1.134	534	11	12.525	12	897	191.531	9	315	465	32.590	3.080	85.399	159
Total				2.033				204.965				33.379			88.638

7.3.4. Pola Penggunaan menurut Wilayah Kepulauan

Penggunaan frekuensi menurut service di wilayah Sumatera menunjukkan intensitas penggunaan frekuensi yang paling tinggi berda di Sumatera Utara, diikuti oleh Riau. Kedua propinsi ini menunjukkan tingkat penggunaan frekuensi yang relatif lebih tinggi dibanding propinsi lain di Sumatera terutama untuk tiga jenis service yang paling banyak digunakan yaitu Fixed Service, Land Mobile (public) dan Land Mobile (private). Penggunaan frekuensi menurut antar daerah di Sumatera ini juga menunjukkan kecenderungan proporsionalitas antar services. Tidak ada daerah yang memiliki tingkat penggunaan yang tinggi untuk jenis service tertentu namun rendah dibanding daerah lain untuk jenis service yang lain.

Gambar 7.6. Penggunaan Frekuensi menurut Service di wilayah Sumatera

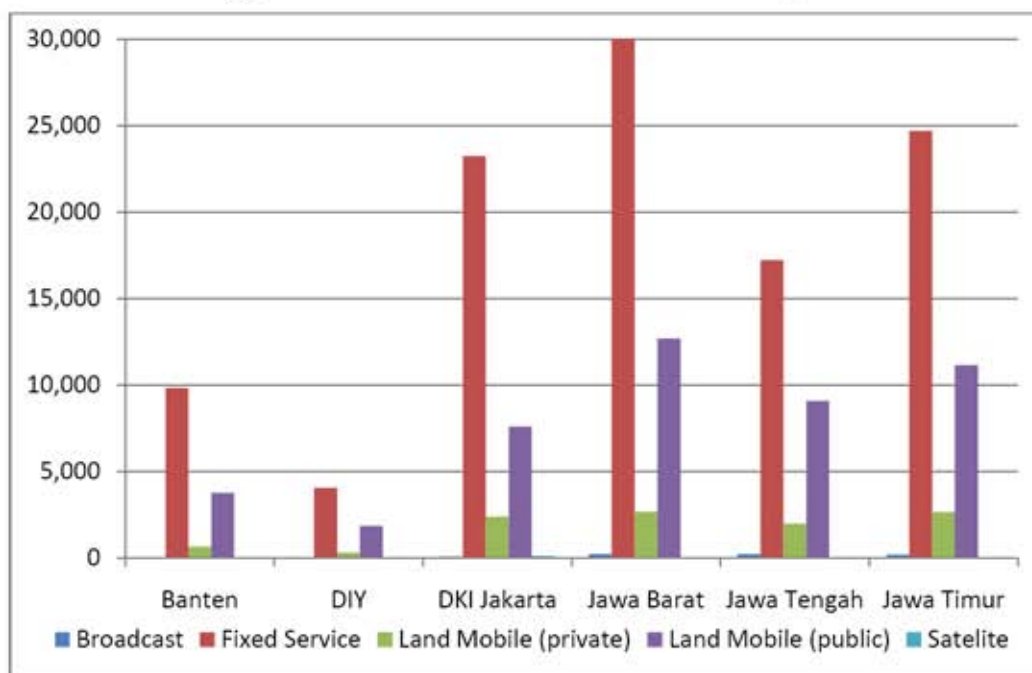


Daerah berikutnya yang menunjukkan tingkat penggunaan frekuensi yang tinggi adalah Sumatera Selatan, Lampung dan Sumatera Barat. Hal yang menarik adalah bahwa tingkat penggunaan frekuensi di NAD pada tahun 2010 ini juga cukup tinggi dan hampir menyamai Sumatera Barat. Bahkan untuk jenis service Land Mobile (private), penggunaannya lebih besar daripada Lampung. Sementara Bangka-Belitung dan Bengkulu menjadi propinsi di Sumatera yang memiliki tingkat penggunaan frekuensi menurut service yang rendah. Dari pola persebaran penggunaan frekuensi di Sumatera ini, terlihat adanya kombinasi faktor

luas geografis dan dinamika kegiatan sosial-ekonomi penduduk yang mempengaruhi tingkat penggunaan frekuensi.

Penggunaan frekuensi menurut service pada daerah-daerah di Jawa menunjukkan tingkat penggunaan yang tinggi dan jauh lebih tinggi dibanding daerah-daerah lain di luar Jawa. Penggunaan service frekuensi yang sangat tinggi tertama terdapat pada daerah-daerah yang secara geografis luas dan atau memiliki intensitas kegiatan sosial-ekonomi dan pemerintahan yang tinggi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Penggunan frekuensi paling tinggi terdapat di Jawa Barat untuk semua jenis service khususnya yang paling banyak dipakai (Fixed Service dan Land Mobile), diikuti oleh Jawa Timur dan DKI jakarta. Meskipun memiliki luasan wilayah dan jumlah penduduk yang lebih sedikit, namun intensitas penggunaan frekuensi di DKI Jakarta lebih tinggi daripada di Jawa Tengah, khususnya untuk fixed service. Hal ini diduga terkait dengan posisi Jakarta sebagai pusat kegiatan bisnis dan ekonomi serta pusat pemerintahan yang membutuhkan penggunaan jenis fixed service yang tinggi. Namun meskipun secara total penggunaan frekuensinya lebih rendah dibanding DKI Jakarta, penggunaan jenis service Land Mobile (public) di Jawa Tengah menunjukkan tingkat penggunaan yang lebih tinggi.

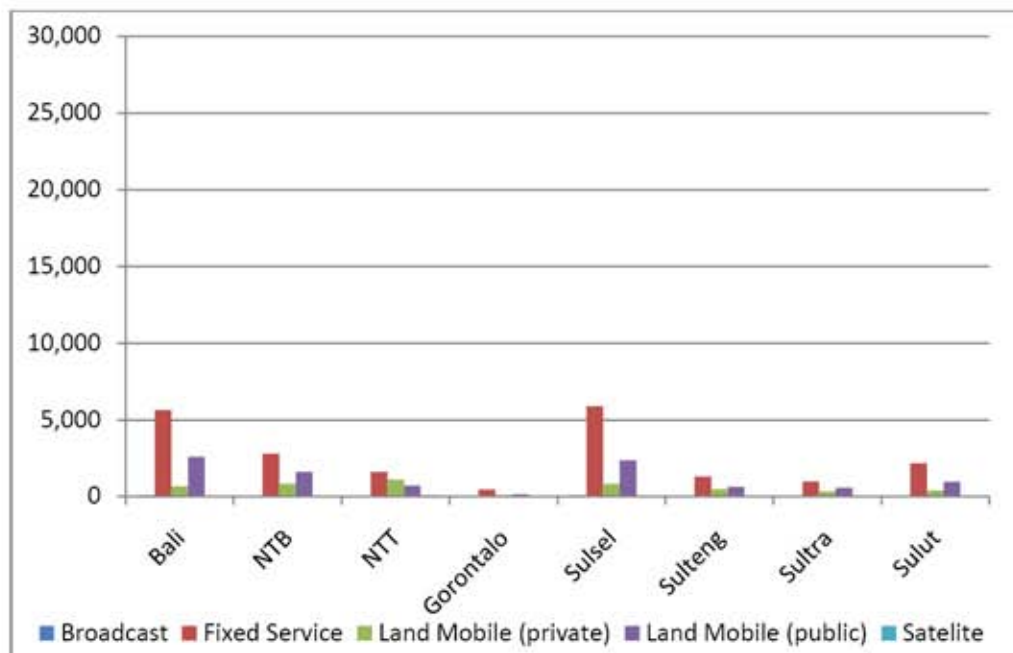
Gambar 7.7. Penggunaan Frekuensi menurut Service di wilayah Jawa



Intensitas penggunaan service frekuensi yang relatif lebih rendah di pulau Jawa terdapat di DI Yogyakarta dan Banten. Meskipun demikian, intensitas penggunaannya masih lebih tinggi dibanding propinsi-propinsi lain di luar Jawa yang penggunaannya masih rendah. Penggunaan yang relatif rendah di DI Yogyakarta dan Banten karena secara geografis kedua wilayah ini lebih kecil daripada Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan tidak memiliki dinamika kegiatan sosial-ekonomi dan pemerintahan yang tinggi sebagaimana Jakarta.

Penggunaan frekuensi di wilayah Sulawesi dan Bali-Nusa Tenggara menunjukkan tingkat penggunaan yang masih rendah, dibandingkan wilayah Jawa dan Sumatera. Tingkat penggunaan service frekuensi yang tinggi pada wilayah ini terdapat di Sulawesi Selatan dan Bali, diikuti Nusa Tenggara Barat. Secara rata-rata, intensitas penggunaan frekuensi di wilayah Bali-Nusa Tenggara menunjukkan penggunaan yang lebih tinggi daripada wilayah Sulawesi. Bahkan penggunaan frekuensi di Nusa Tenggara Timur yang paling rendah di wilayah ini masih lebih tinggi dibanding kebanyakan propinsi di Sulawesi. Intensitas penggunaan frekuensi yang sedikit lebih tinggi di Sulawesi selain Sulawesi Selatan adalah di Sulawesi Utara. Sementara di Gorontalo menunjukkan intensitas penggunaan frekuensi yang sangat rendah dan paling rendah di wilayah Sulawesi dan Bali-Nusa Tenggara

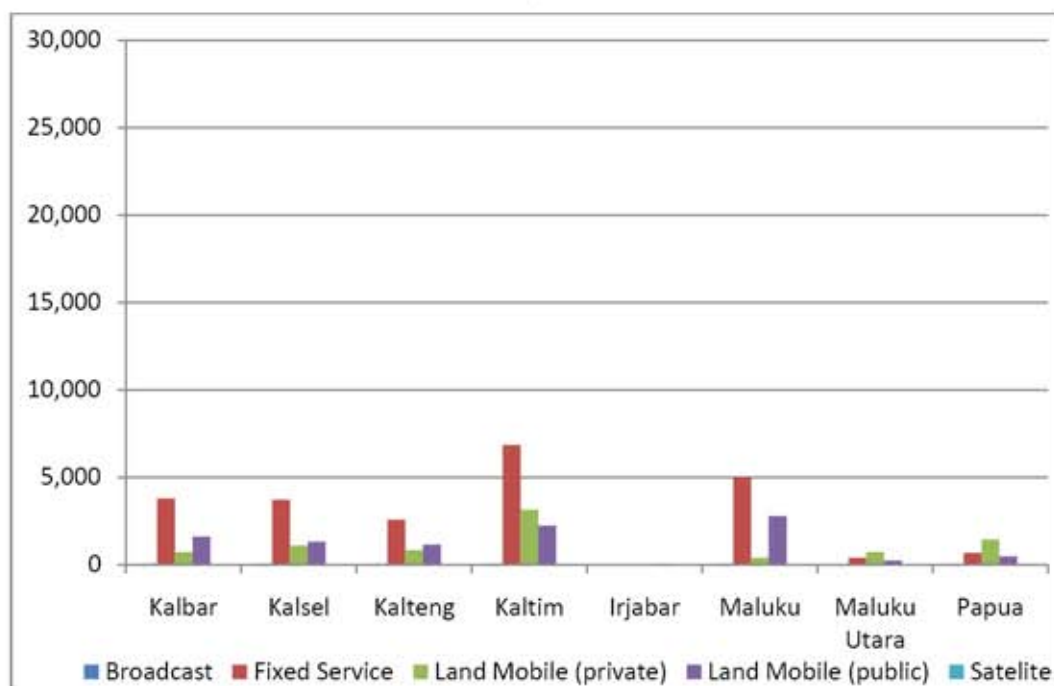
Gambar 7.8. Penggunaan Frekuensi menurut Service di wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Sulawesi



Lebih tingginya penggunaan frekuensi di Bali-Nusa Tenggara yang wilayah geografisnya lebih kecil dibanding propinsi-propinsi di Sulawesi menunjukkan faktor dinamika kegiatan sosial-ekonomi yang berpengaruh besar dalam penggunaan service frekuensi dibandingkan dengan luas wilayah. Apalagi Bali juga menunjukkan tingkat penggunaan frekuensi yang lebih tinggi. Sementara di Sulawesi Selatan yang perkembangan pembangunan dan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat lebih maju di Sulawesi juga menunjukkan tingkat penggunaan frekuensi yang lebih tinggi dibanding propinsi lain di Sulawesi.

Penggunaan service frekuensi di wilayah Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) seperti terlihat pada gambar 7.9 menunjukkan intensitas penggunaan frekuensi yang relatif sedikit lebih tinggi dibanding wilayah Sulawesi. Beberapa propinsi seperti Kalimantan Timur dan Maluku bahkan menunjukkan intensitas penggunaan frekuensi yang relatif cukup tinggi. Secara rata-rata intensitas penggunaan service frekuensi pada propinsi-propinsi di Kalimantan lebih tinggi daripada propinsi-propinsi di KTI. Penggunaan frekuensi paling rendah di Kalimantan terdapat di Kalimantan Tengah yang secara pembangunan ekonomi juga kalah maju dibanding propinsi lain di Kalimantan.

Gambar 7.9. Penggunaan Frekuensi menurut Service di wilayah Kalimantan, Maluku dan Papua





Sementara di KTI terapat pola penggunaan frekuensi yang sedikit berbeda. Meskipun penggunaan frekuensi di Maluku paling tinggi di KTI, namun penggunaan jenis service Land Mobile (private) di Maluku menunjukkan intensitas yang lebih rendah dibanding penggunaan service Land Mobile (private) di Maluku Utara dan Papua. Bahkan pada kedua propinsi ini, jenis service Land Mobile (private) merupakan yang tertinggi dibanding jenis service lainnya. Sedangkan di Papua Barat menunjukkan intensitas penggunaan service frekuensi yang paling rendah untuk semua jenis service. Bahkan penggunaan service frekuensinya juga merupakan yang paling rendah diantara propinsi lain di Indonesia.

7.4. Perbandingan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah

Perbandingan penggunaan spektrum frekuensi radio antar propinsi dengan membandingkannya dengan jumlah penduduk dan luas wilayah perlu dilakukan agar dapat diketahui penyebaran penggunaan dan peruntukan frekuensi di suatu daerah secara tepat. Beberapa jenis spektrum frekuensi penggunaannya mungkin dipengaruhi oleh kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Artinya untuk daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi, penggunaan spektrum frekuensinya akan semakin besar untuk melayani penduduk tersebut meskipun wilayahnya tidak luas. Sementara untuk jenis spektrum frekuensi lain, penggunaannya mungkin tergantung dengan luasan wilayah. Artinya untuk wilayah yang luas, penggunaan spektrum services frekuensinya akan semakin besar. Pada bagian ini, perbandingan pengukuran penggunaan frekuensi dilakukan terhadap beberapa subservice utama yaitu frekuensi Radio AM, Radio FM, TV dan GDM/DCS.

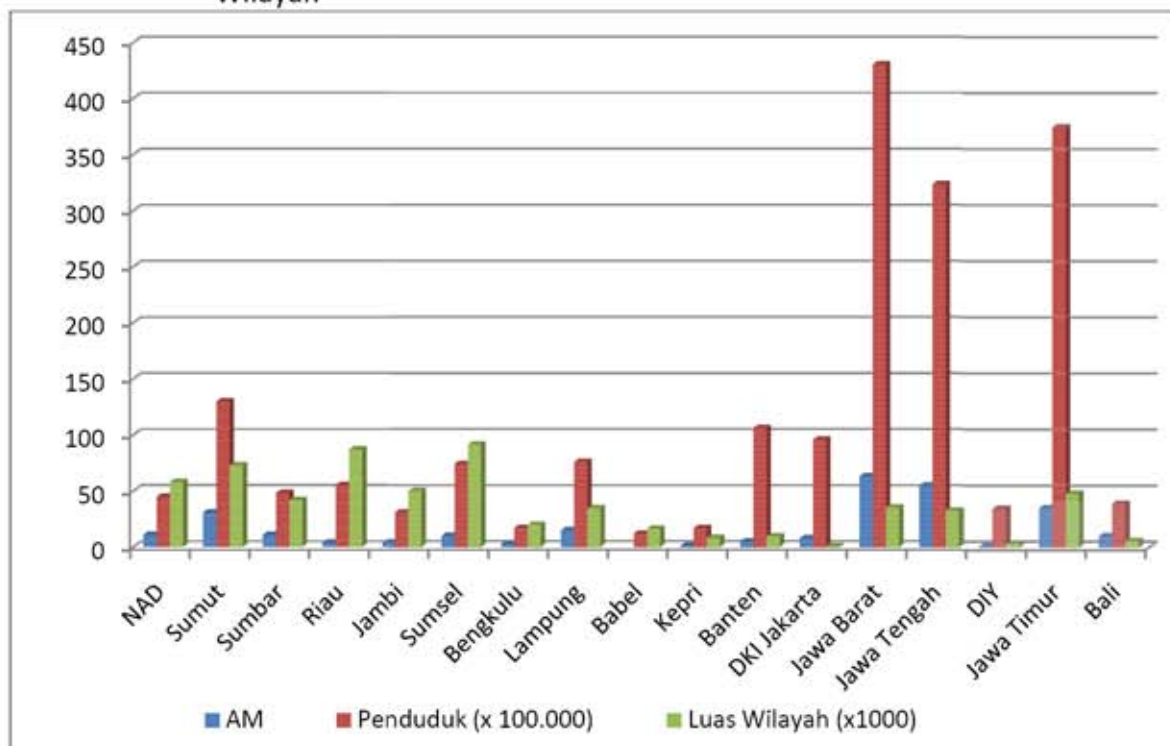
7.4.1. Frekuensi Radio AM

Penggunaan frekuensi Radio AM di wilayah Sumatera dan Jawa-Bali menunjukkan pola yang sedikit berbeda dengan frekuensi TV dimana penggunaan frekuensinya tidak banyak dipengaruhi oleh tingkat kemajuan daerah. Dari gambar 7.10A terlihat bahwa tingkat penggunaan frekuensi AM justru rendah di daerah propinsi perkotan seperti DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Penggunaan frekuensi radio AM ini tinggi pada daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dan daerahnya relatif berkembang baik perkotan maupun pedesaan seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Penggunaan frekuensi AM yang

rendah di Jakarta, DI Yogyakarta dan Bali disebabkan pada daerah-daerah tersebut sebagian penyiaran radio sudah menggunakan frekuensi AM. Sementara pada daerah-daerah lain dengan tingkat kemajuan yang belum tinggi dan tingkat penggunaan frekuensi AM yang rendah, lebih disebabkan oleh boleh banyaknya penggunaan frekuensi siaran radio pada wilayah tersebut karena potensi pasarnya yang masih rendah.

Penggunaan frekuensi AM yang tinggi pada daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur diduga karena potensi pasar untuk siaran radio yang cukup tinggi dan wilayah yang cukup luas. Dengan kondisi demikian, penggunaan frekuensi AM dinilai lebih efektif untuk menjangkau wilayah yang lebih luas dan biaya yang tidak terlalu tinggi. Hal yang sama juga terjadi pada penggunaan frekuensi AM di wilayah Sumatera Utara.

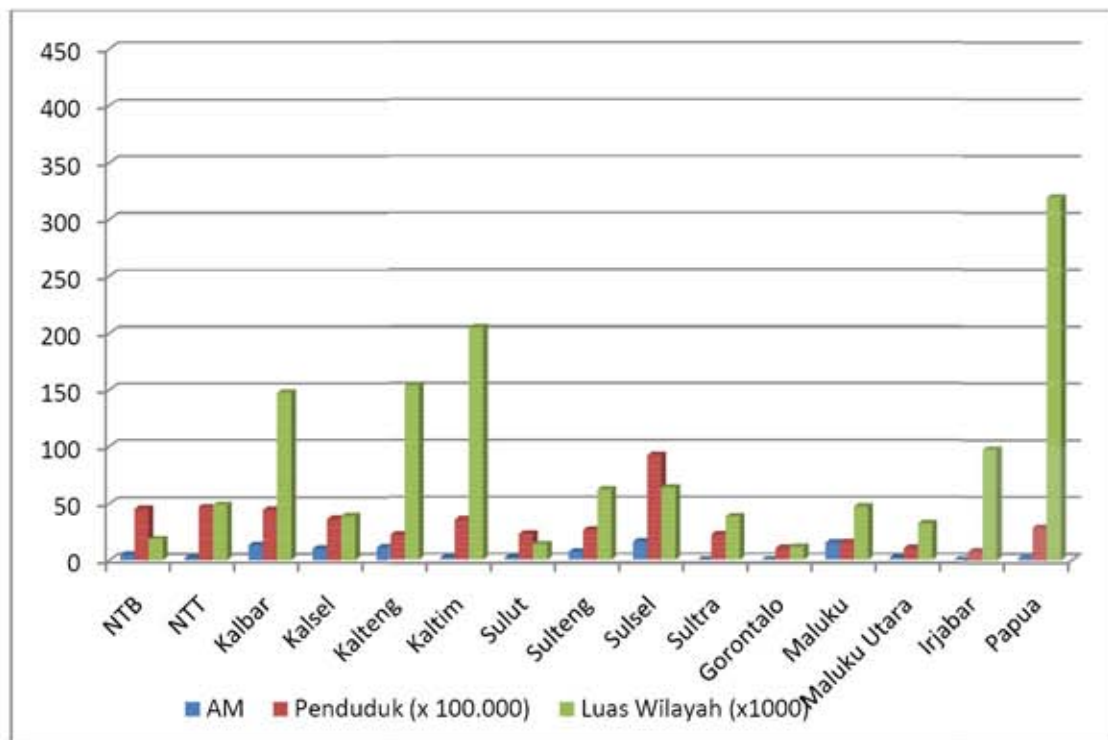
Gambar 7.10A. Perbandingan Penggunaan Frekuensi AM dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah



Penggunaan frekuensi radio AM di wilayah Kalimantan, Sulawesi dan KTI menunjukkan tingkat penggunaan yang rendah pada daerah yang memiliki geografis yang luas maupun yang kecil. Namun pada daerah yang memiliki jumlah penduduk yang lebih besar, tingkat penggunaan frekuensi radio AM juga menunjukkan jumlah yang lebih besar seperti di Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan. Namun distribusi penggunaan frekuensi radio AM

ini relatif tersebar merata pada semua propinsi meskipun ada beberapa propinsi yang penggunaannya rendah seperti di Maluku Utara dan Irian Jaya Barat. Penggunaan frekuensi yang relatif tinggi pada daerah-daerah dengan kemajuan ekonomi lebih tinggi menunjukkan adanya pengaruh pasar siaran radio. Penggunaan frekuensi AM ini terutama untuk daerah yang masih pedesaan sehingga penggunaannya juga tidak terlalu tinggi.

Gambar 7.10B. Perbandingan Penggunaan Frekuensi AM dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah

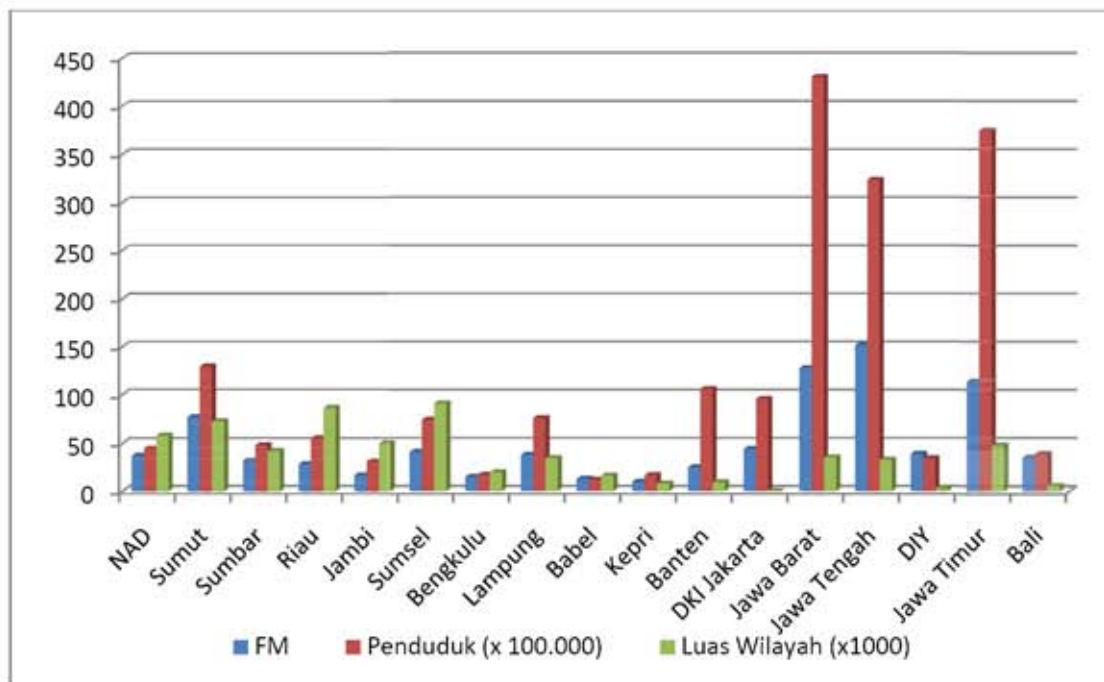


7.4.2. Frekuensi Radio FM

Penggunaanfrekuensi radio FM justru menunjukkan intensitas penggunaan yang lebih tinggi dibanding frekuensi radio AM terutama pada daerah-daerah di Jawa. Bahkan secara rata-rata penggunaan frekuensi radio FM di wilayah Sumatera dan Jawa-Bali ini lebih tinggi daripada penggunaan frekuensi radio AM. Intensitas penggunaan frekuensi radio FM ini menunjukkan pola yang lebih jelas dimana penggunaan frekuensinya memiliki korelasi yang cukup erat dengan jumlah penduduk daripada dengan luas wilayah. Daerah-daerah dengan jumlah penduduk yang lebih besar seperti di Jawa menunjukkan penggunaan frekuensi radio FM yang lebih tinggi dibanding daerah lainnya. Sementara untuk wilayah Sumatera, penggunaan frekuensi radio FM yang tinggi terdapat di provinsi Sumatera Utara dan Sumatera

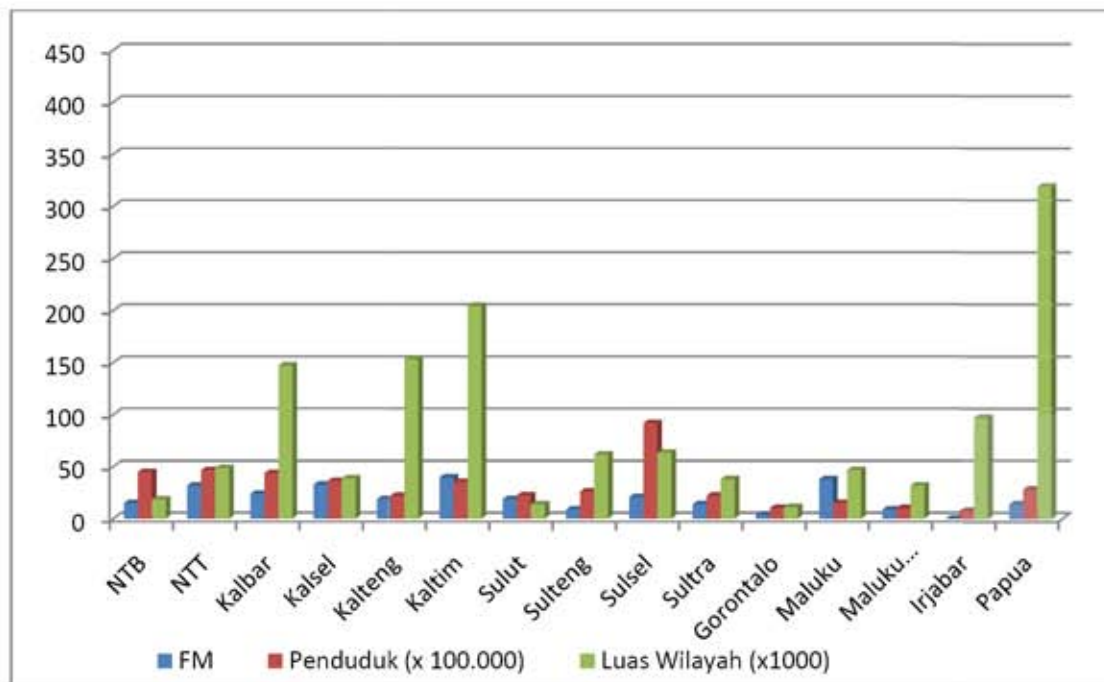
Selatan yang juga memiliki jumlah penduduk yang relatif lebih tinggi dan tingkat kemajuan daerah yang lebih baik. Kualitas yang lebih baik serta danya permintaan yang tinggi dari jumlah penduduk yang besar terhadap siaran radio FM berpengaruh terhadap intensitas penggunaan frekuensi radio FM yang lebih tinggi.

Gambar 7.11A. Perbandingan Penggunaan Frekuensi FM dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah



Korelasi yang kuat antara jumlah penduduk dengan penggunaan frekuensi radio FM semakin terlihat jika membandingkan gambar 7.11A dan gambar 7.11B yang membandingkan penggunaan frekuensi radio FM dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. Pada wilayah Kalimantan, Sulawesi dan KTI yang penduduknya lebih sedikit, penggunaan frekuensi radio FM juga lebih rendah dibandingkan daerah-daerah di Jawa. Penggunaan frekuensi radio FM yang cukup tinggi pada wilayah ini hanya terdapat di Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Maluku yang memiliki jumlah penduduk relatif lebih besar. Namun untuk Sulawesi Selatan yang memiliki jumlah penduduk paling besar di kawasan ini ternyata menunjukkan penggunaan frekuensi radio FM yang cukup besar. Khusus untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, disamping memiliki jumlah penduduk yang relatif besar dikawasannya juga memiliki tingkat kemajuan dan daerah perkotaan yang lebih banyak yang juga turut berpengaruh pada tingginya penggunaan frekuensi FM.

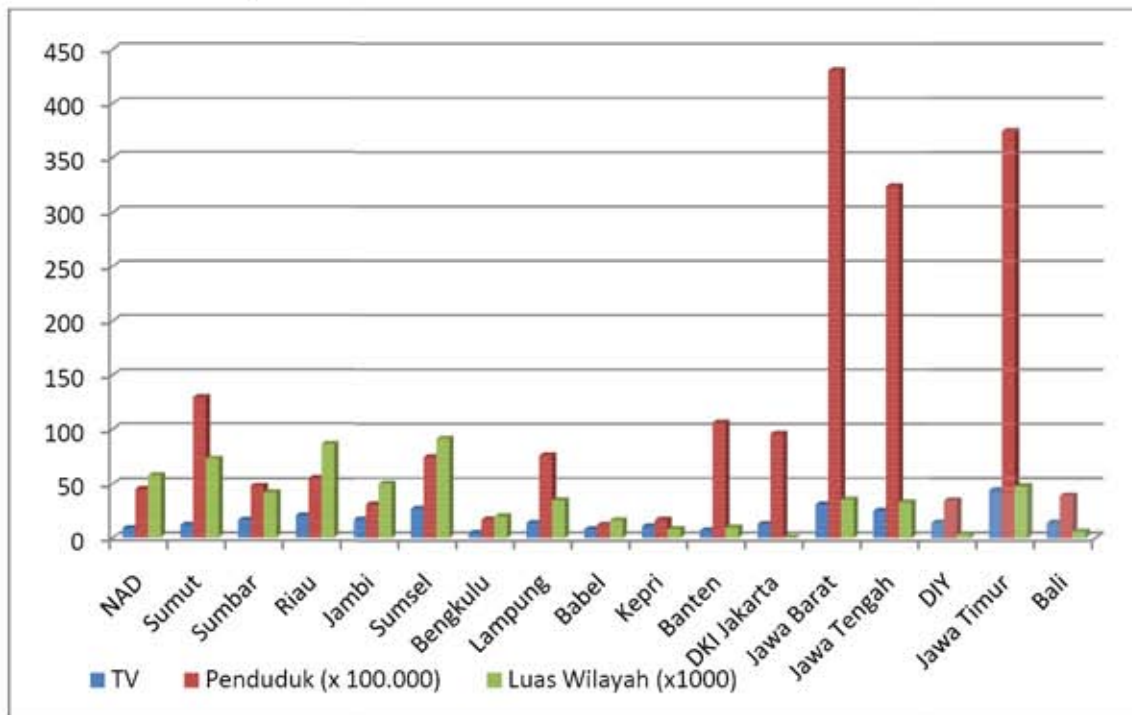
Gambar 7.11B. Perbandingan Penggunaan Frekuensi FM dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah



7.4.3. Frekuensi TV

Perbandingan penggunaan spektrum frekuensi dengan luas wilayah dan jumlah penduduk untuk wilayah Sumatera dan Jawa-Bali untuk frekuensi TV menunjukkan terdapat korelasi yang cukup kuat antara penggunaan spektrum frekuensi TV dengan kepadatan penduduk dibandingkan kepada luas wilayah. Penggunaan frekuensi TV pada daerah-daerah dengan jumlah yang tinggi menunjukkan jumlah penggunaan yang tinggi seperti di Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa tengah serta Sumatera Selatan. Namun faktor luas wilayah dan tingkat kemajuan pembanguna wilayah juga menunjukkan pengaruh yang juga cukup kuat terhadap penggunan frekuensi. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan frekuensi TV yang juga cukup tinggi di Sumatera Selatan dan DKI Jakarta yang penggunaan frekuensinya cukup tinggi. Berkembangnya televisi daerah juga menyebabkan distribusi penggunaan frekuensi TV memasuki tahun 2010 ini relatif lebih merata. Penggunaan frekuensi TV di beberapa wilayah di Sumatera seperti Jambi, Riau dan Sumatera Barat misalnya juga cukup signifikan meskipun dari sisi jumlah penduduk tidak terlalu besar. Bahkan penggunan frekuensi TV di ketiga daerah ini lebih besar daripada Sumatera Utara yang memiliki umlah penduduk dan luas wilayah lebih besar.

Gambar 7.12A. Perbandingan Jumlah Frekuensi TV dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah.

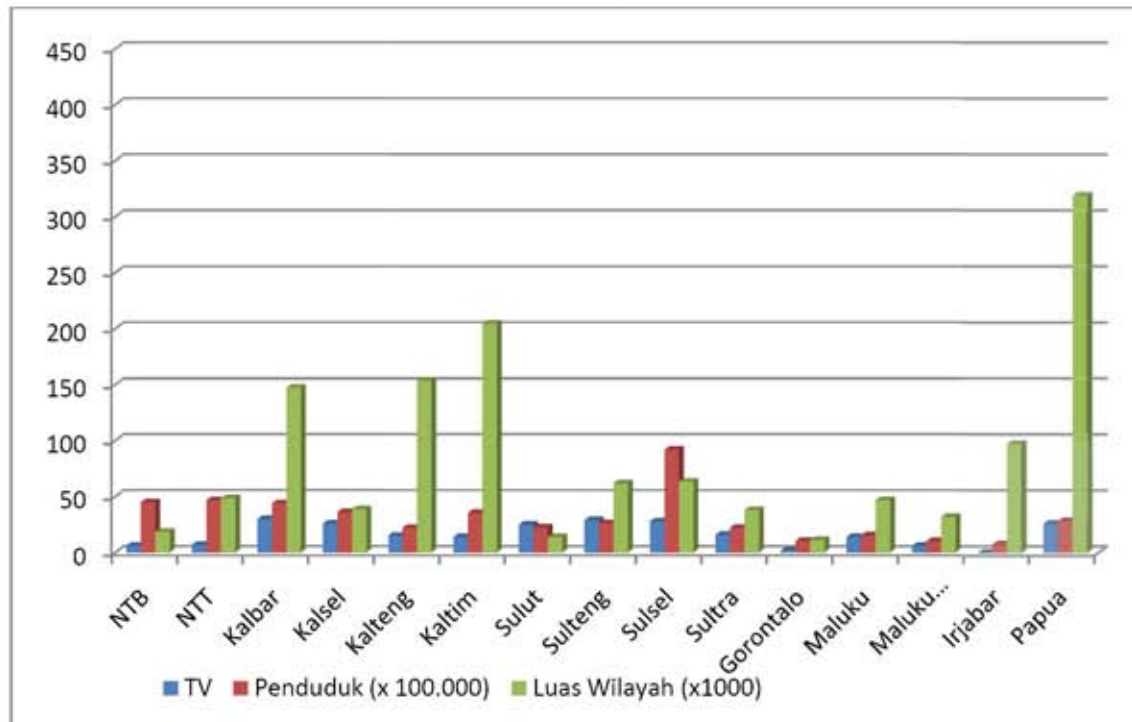


Lebih terdistribusinya penggunaan frekuensi TV antar daerah juga terlihat dari perbandingan antara penggunaan frekuensi TV dengan luas wilayah dan jumlah penduduk untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi dan KTI. Penggunaan frekuensi TV di wilayah Kalimantan justru menunjukkan angka yang relatif tinggi, terutama di propinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan meskipun kedua daerah memiliki karakteristik berbeda. Kalimantan Barat memiliki wilayah yang luas sementara Kalimantan Selatan memiliki wilayah yang lebih kecil. Sementara di Sulawesi, penggunaan frekuensi yang tinggi justru terjadi di propinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Tingginya penggunaan frekuensi TV di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan diduga terkait dengan tingkat kemajuan daerah yang relatif lebih tinggi dibanding daerah lainnya.

Hal yang menarik juga ditunjukkan dalam penggunaan frekuensi di Sulawesi Utara dimana penggunaan frekuensi TV juga cukup tinggi meskipun jumlah penduduk relatif lebih sedikit dan luas wilayah juga tidak terlalu besar. Sementara di Papua yang tingkat kemajuan pembangunannya juga relatif masih kurang, justru memiliki tingkat penggunaan frekuensi TV yang lebih tinggi dibanding NTB, NTT dan Maluku yang memiliki tingkat kemajuan

pembangunan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada pola yang khusus dalam penggunaan frekuensi TV dikaitkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. Berkembangnya siaran TV daerah atau potensi pasar dari siaran TV di suatu daerah lebih menjadi faktor penentu intensitas penggunaan frekuensi TV.

Gambar 7.12B. Perbandingan Jumlah Frekuensi TV dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah



7.4.4. Distribusi Penggunaan ISR Kanal TV dan FM untuk Keperluan Penyiaran

Tabel 7.6 menunjukkan distribusi alokasi dan penggunaan ISR untuk Kanal frekuensi TV menurut propinsi yang membandingkan ketersediaan kanal dan jumlah kanal yang terpakai untuk masing-masing propinsi. Distribusi penggunaan kanal frekuensi TV menunjukkan bahwa intensitas penggunaan yang sangat berbeda antara propinsi dengan wilayah yang kecil namun memiliki corak perkotaan dengan propinsi dengan wilayah yang luas dengan lebih banyak wilayah pedesaan. Tingkat utilisasi frekuensi TV pada daerah yang wilayahnya tidak luas namun cenderung banyak daerah perkotaan seperti DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Bali menunjukkan intensitas yang tinggi, minimal 70%. Meskipun alokasi ketersediaan kanal-nya juga tidak besar, namun kanal yang tersedia telah banyak digunakan. Bahkan di DI

Yogyakarta utilitasnya mencapai 100%. Daerah lain yang juga memiliki utilisasi kanal frekuensi TV yang cukup besar adalah Jawa Timur dan Sulawesi Utara. Di Jawa Timur, meskipun alokasi ketersediaannya cukup besar (83) namun utilitasnya juga relatif tinggi. Sekitar 53% kanal frekuensi yang dialokasi di Jawa Timur sudah digunakan.

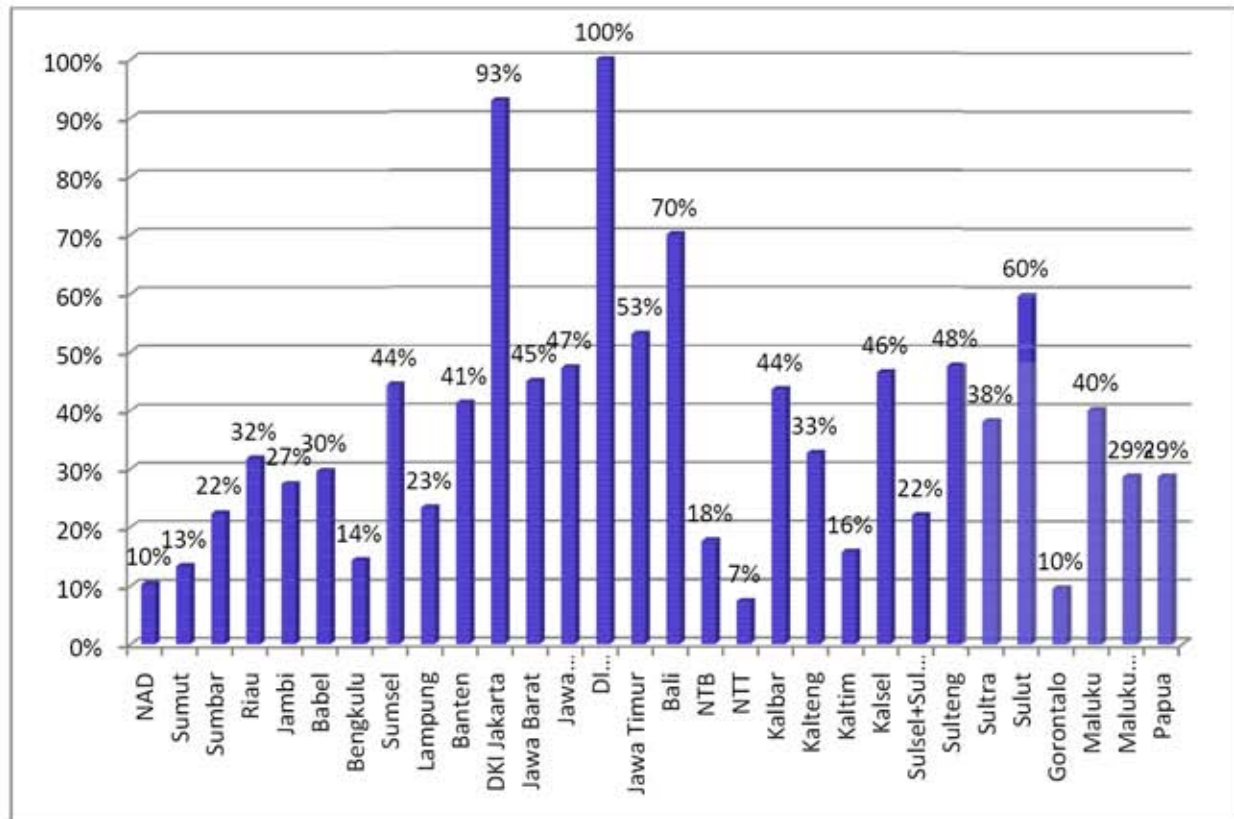
Tabel 7.6. Utilisasi Kanal TV Menurut Propinsi

No	Propinsi	Jumlah Tersedia	Jumlah Terpakai	Utilisasi	No	Propinsi	Jumlah Tersedia	Jumlah Terpakai	Utilisasi
1	NAD	87	9	10,3%	16	Bali	20	14	70,0%
2	Sumut	90	12	13,3%	17	NTB	34	6	17,6%
3	Sumbar	76	17	22,4%	18	NTT	96	7	7,3%
4	Riau	104	33	31,7%	19	Kalbar	69	30	43,5%
5	Jambi	62	17	27,4%	20	Kalteng	46	15	32,6%
6	Babel	27	8	29,6%	21	Kaltim	89	14	15,7%
7	Bengkulu	35	5	14,3%	22	Kalsel	56	26	46,4%
8	Sumsel	61	27	44,3%	23	Sulsel+Sulbar	127	28	22,0%
9	Lampung	60	14	23,3%	24	Sulteng	61	29	47,5%
10	Banten	17	7	41,2%	25	Sultra	42	16	38,1%
11	DKI Jakarta	14	13	92,9%	26	Sulut	42	25	59,5%
12	Jawa Barat	69	31	44,9%	27	Gorontalo	21	2	9,5%
13	Jawa Tengah	53	25	47,2%	28	Maluku	35	14	40,0%
14	DI Yogyakarta	14	14	100,0%	29	Maluku Utara	21	6	28,6%
15	Jawa Timur	83	44	53,0%	30	Papua	91	26	28,6%

Sementara di banyak daerah lain, khususnya propinsi dengan wilayah yang luas, utilisasi kanal frekuensi yang dialokasikan masih relatif rendah. Pada daerah-daerah tersebut khususnya di luar Jawa, dengan alokasi kanal frekuensi TV yang relatif besar maupun kecil, utilitasnya belum cukup tinggi. Pada daerah-daerah di Sumatera yang memiliki alokasi kanal cukup tinggi seperti NAD, Sumatera Utara dan Riau, tingkat utilitasnya masih rendah, dibawah 35%. Bahkan di NAD baru sekitar 10,3% dan di Sumatera Utara baru mencapai 13,3%. Bahkan utilisasi di kedua daerah ini lebih rendah daripada di Papua yang juga memiliki alokasi kanal yang besar, namun utilitasnya mencapai 28,6%. Namun untuk beberapa daerah dengan alokasi kanal frekuensi TV yang kecil seperti Gorontalo, Maluku Utara, NTB, Bangka-Belitung dan Bengkulu, ternyata tingkat utilitasnya juga rendah akibat penggunaan kanal frekuensi TV yang masih sedikit. Hal ini secara implisit menunjukkan

tingkat kemajuan ekonomi dan pembangunan daerah lebih berpengaruh dalam penggunaan kanal frekuensi TV.

Gambar 7.13. Tingkat utilisasi kanal frekuensi TV menurut propinsi



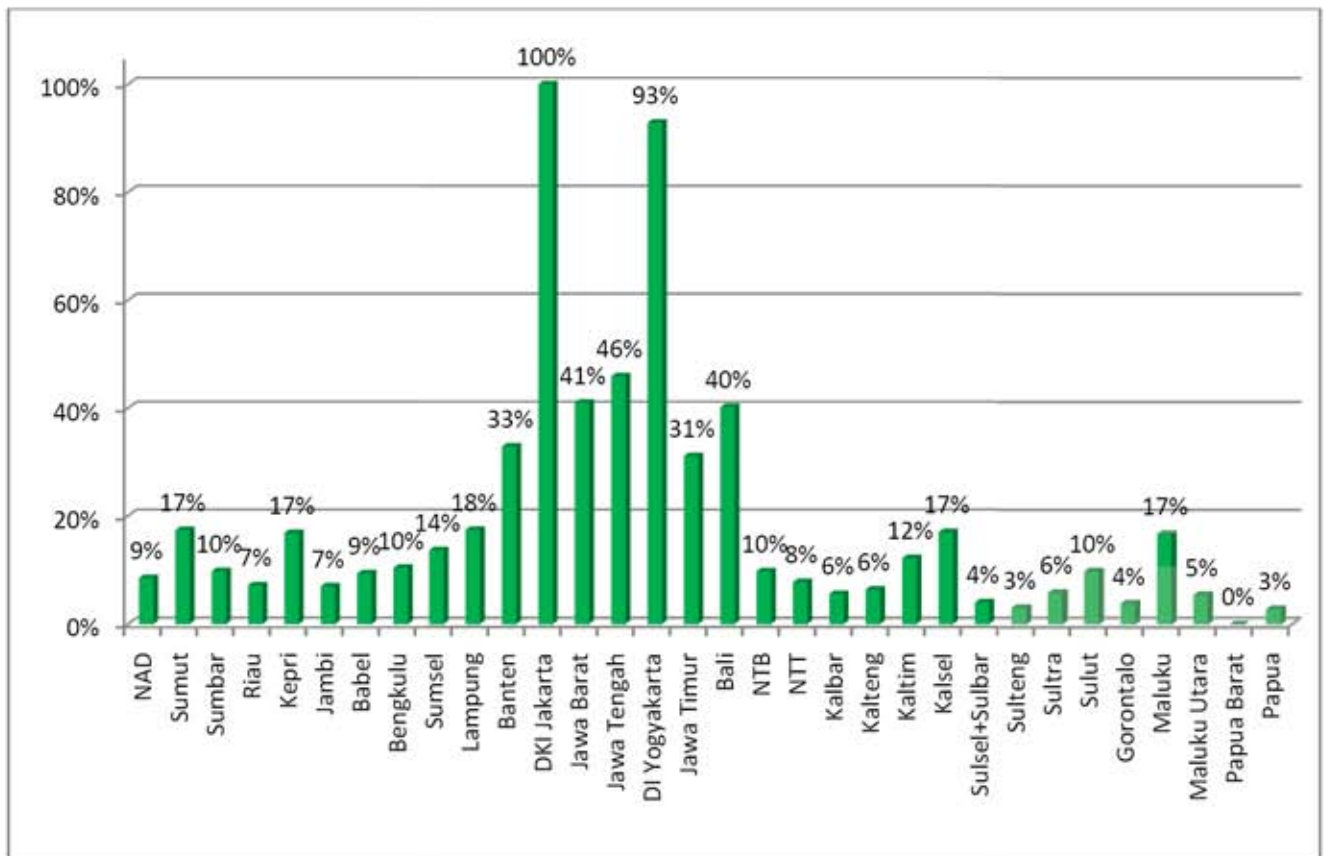
Untuk penggunaan kanal frekuensi radio FM, Tabel 7.7 juga menunjukkan tingkat penggunaan yang tinggi di DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Pada kedua propinsi tersebut yang memiliki alokasi kanal FM tersedia yang juga tidak besar, pemanfaatannya sudah cukup tinggi yaitu mencapai lebih dari 90%. Tingkat utilisasi yang relatif tinggi untuk kanal frekuensi radio FM juga terdapat di daerah-daerah di Jawa dan Bali dengan tingkat utilisasi diatas 40%, meskipun alokasi kanal tersedia di daerah-daerah tersebut cukup besar. Di Jawa Tengah dengan alokasi kanal sebesar 331, tingkat utilitasnya mencapai 45%.

Tabel 7.7. Utilisasi Kanal Radio FM Menurut Propinsi

No	Propinsi	Jumlah Tersedia	Jumlah Terpakai	Utilisasi	No	Propinsi	Jumlah Tersedia	Jumlah Terpakai	Utilisasi
1	NAD	434	37	8,5%	17	Bali	87	35	40,2%
2	Sumut	443	77	17,4%	18	NTB	153	15	9,8%
3	Sumbar	325	32	9,8%	19	NTT	410	32	7,8%
4	Riau	391	28	7,2%	20	Kalbar	427	24	5,6%
5	Kepri	59	10	16,9%	21	Kalteng	295	19	6,4%
6	Jambi	242	17	7,0%	22	Kaltim	328	40	12,2%
7	Babel	139	13	9,4%	23	Kalsel	194	33	17,0%
8	Bengkulu	144	15	10,4%	24	Sulsel+Sulbar	522	21	4,0%
9	Sumsel	300	41	13,7%	25	Sulteng	305	9	3,0%
10	Lampung	217	38	17,5%	26	Sultra	243	14	5,8%
11	Banten	76	25	32,9%	27	Sulut	194	19	9,8%
12	DKI Jakarta	42	42	100%	28	Gorontalo	104	4	3,8%
13	Jawa Barat	312	128	41,0%	29	Maluku	227	38	16,7%
14	Jawa Tengah	331	152	45,9%	30	Maluku Utara	168	9	5,4%
15	DI Yogyakarta	42	39	92,9%	31	Papua Barat	195	0	0,0%
16	Jawa Timur	366	114	31,1%	32	Papua	500	14	2,8%

Namun pada daerah-daerah di luar Jawa, tingkat utilisasi kanal frekuensi FM ini masih sangat rendah, pada daerah dengan alokasi kanal frekuensi besar maupun daerah dengan alokasi kanal frekuensi yang jumlahnya kecil. Pada daerah-daerah di luar Jawa-Bali ini tingkat utilisasi kanal frekuensi FM-nya tidak ada yang lebih dari 20%. Pada daerah-daerah dengan alokasi kanal frekuensi FM yang besar seperti NAD, Sumatera Utara, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan dan Papua, tingkat utilisasi kanal frekuensi yang tersedia masih sangat rendah, yaitu antara 2,8% (Papua) sampai 17,4% (Sumatera Utara). Namun hal yang sama juga terjadi pada daerah dengan alokasi kanal frekuensi FM yang rendah seperti Bangka-Belitung, Bengkulu, NTB dan Gorontalo. Meskipun alokasi kanal FM pada daerah-daerah tersebut kecil, namun tingkat utilitasnya masih tetap rendah yaitu dibawah 10% karena penggunaannya juga rendah. Hal ini menunjukkan bahwa daerah dengan kepadatan penduduk tinggi dan relatif lebih maju juga menunjukkan tingkat utilitas dan kepadatan penggunaan kanal frekuensi FM yang tinggi.

Gambar 7.14. Tingkat utilisasi kanal frekuensi FM menurut propinsi



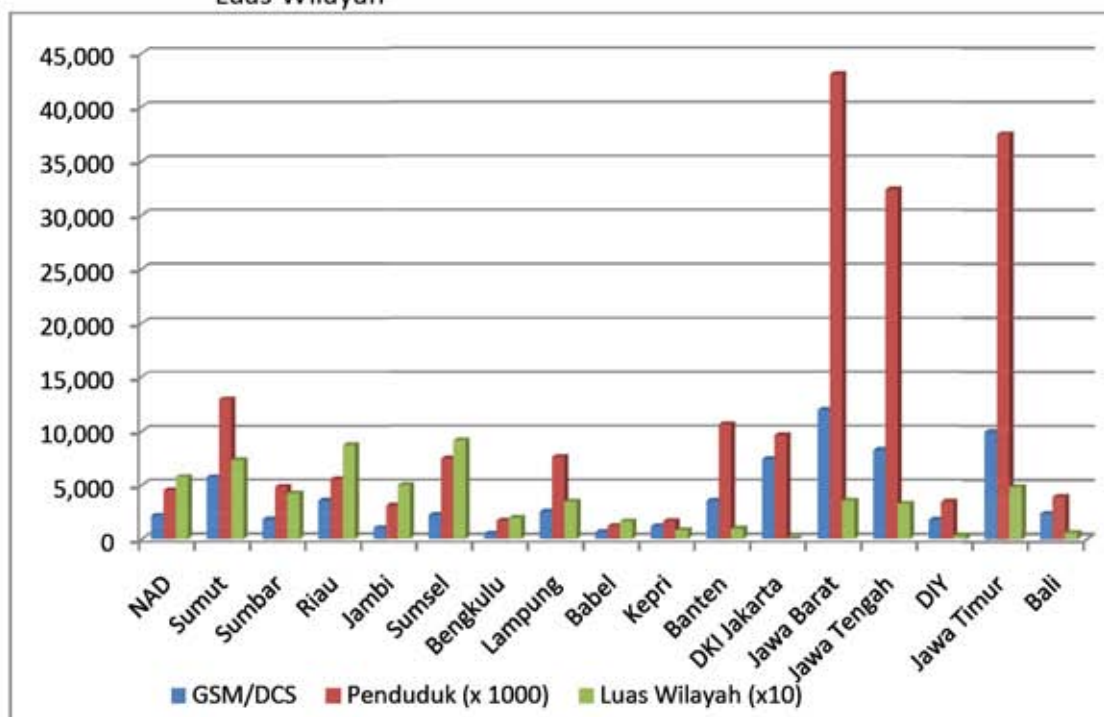
7.4.5. Frekuensi GSM

Penggunaan frekuensi GSM menunjukkan variasi yang cukup tinggi di wilayah Sumatera dan Jawa-Bali dengan penggunaan yang tersebar pada semua propinsi. Penggunaan frekuensi GSM di wilayah Sumatera dan Jawa-Bali terdapat di propinsi Jawa Barat, diikuti Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada wilayah Sumatera, penggunaan frekuensi GSM paling tinggi terdapat di Propinsi Sumatera Utara. Jika memperhatikan pola distribusi penggunaan frekuensi GSM ini, terdapat korelasi yang cukup tinggi antara penggunaan frekuensi GSM ini dengan tingkat kepadatan penduduk (jumlah penduduk per luas wilayah) dengan tetap memperhatikan faktor luas wilayah geografis. Daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi cenderung memiliki penggunaan frekuensi yang tinggi.

Beberapa daerah yang memiliki luas wilayah yang tidak terlalu besar seperti DKI Jakarta, DI Jogjakarta dan Bali yang namun wilayahnya memiliki tingkat kemajuan yang lebih tinggi dan penduduknya padat, penggunaan frekuensi GSM bahkan cenderung tinggi meskipun

wilayahnya kecil. Untuk ketiga propinsi ini, dibandingkan luas wilayahnya, penggunaan frekuensi GSM yang mencerminkan keberadaan BTS untuk GSM sudah dalam tingkatan sangat padat dimana penggunaan satu frekuensi GSM (satu menara BTS) hanya mencakup wilayah yang tidak terlalu luas. Penggunaan satu frekuensi GSM di Jogjakarta hanya mencakup luas wilayah sebesar 3,7 km² di Jogjakarta, 2,5 km² di Bali dan bahkan di Jakarta hanya mencakup luas wilayah seluas 0,1 km². Sementara pada wilayah dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah serta dinamika kegiatan ekonomi yang juga rendah di Sumatera seperti di Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu, penggunaan satu frekuensi GSM mencakup wilayah yang cukup luas yaitu sekitar 40 km² atau lebih.

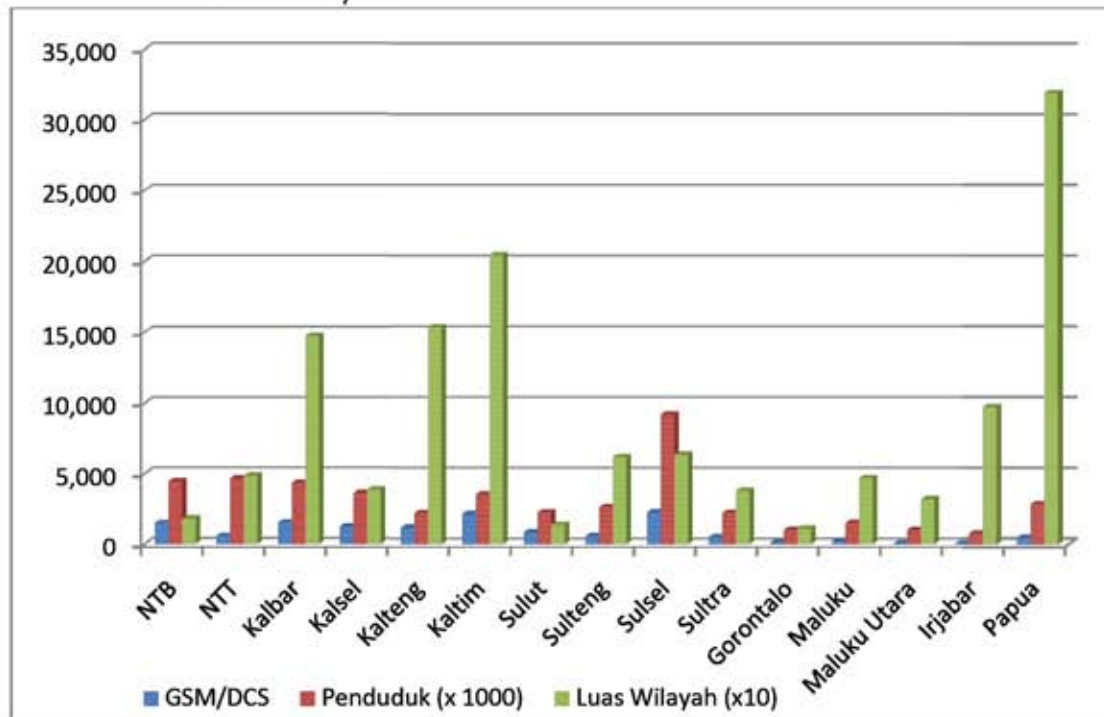
Gambar 7.15A. Perbandingan Penggunaan Frekuensi GSM dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah



Sementara penggunaan frekuensi GSM pada wilayah Kalimantan-Sulawesi dan KTI menunjukkan tingkat penggunaan yang rendah sejalan dengan kepadatan penduduk yang juga rendah di wilayah ini. Penggunaan frekuensi GSM yang relatif tinggi hanya terdapat di wilayah Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur yang memiliki kepadatan penduduk relatif lebih tinggi dibanding wilayah lainnya. Namun jika dibandingkan antara penggunaan frekuensi GSM dengan luas wilayah, Sulawesi Utara juga memiliki tingkat perbandingan penggunaan frekuensi terhadap luas wilayah yang juga kecil yaitu 16 km²

untuk setiap penggunaan satu frekuensi GSM. Rasio penggunaan frekuensi GSM terhadap luas wilayah yang besar terdapat di wilayah KTI yaitu di propinsi Papua Barat, Papua dan Maluku Utara. Pada wilayah ini, perbandingan penggunaan luas wilayah untuk penggunaan satu frekuensi GSM mencapai 450 km² sampai dengan 1900 km².

Gambar 7.15B. Perbandingan Penggunaan Frekuensi GSM dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah



Penggunaan frekuensi GSM menunjukkan korelasi yang lebih kuat dengan tingkat kepadatan penduduk. Daerah-daerah dengan kepadatan penduduk tinggi menunjukkan penggunaan frekuensi GSM yang tinggi. Pada wilayah dengan dinamika ekonomi yang tinggi, menunjukkan perbandingan luas wilayah untuk setiap frekuensi GSM yang kecil karena penggunaan frekuensi GSM yang tinggi

7.5. Penerbitan Izin Amatir Radio dan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP)

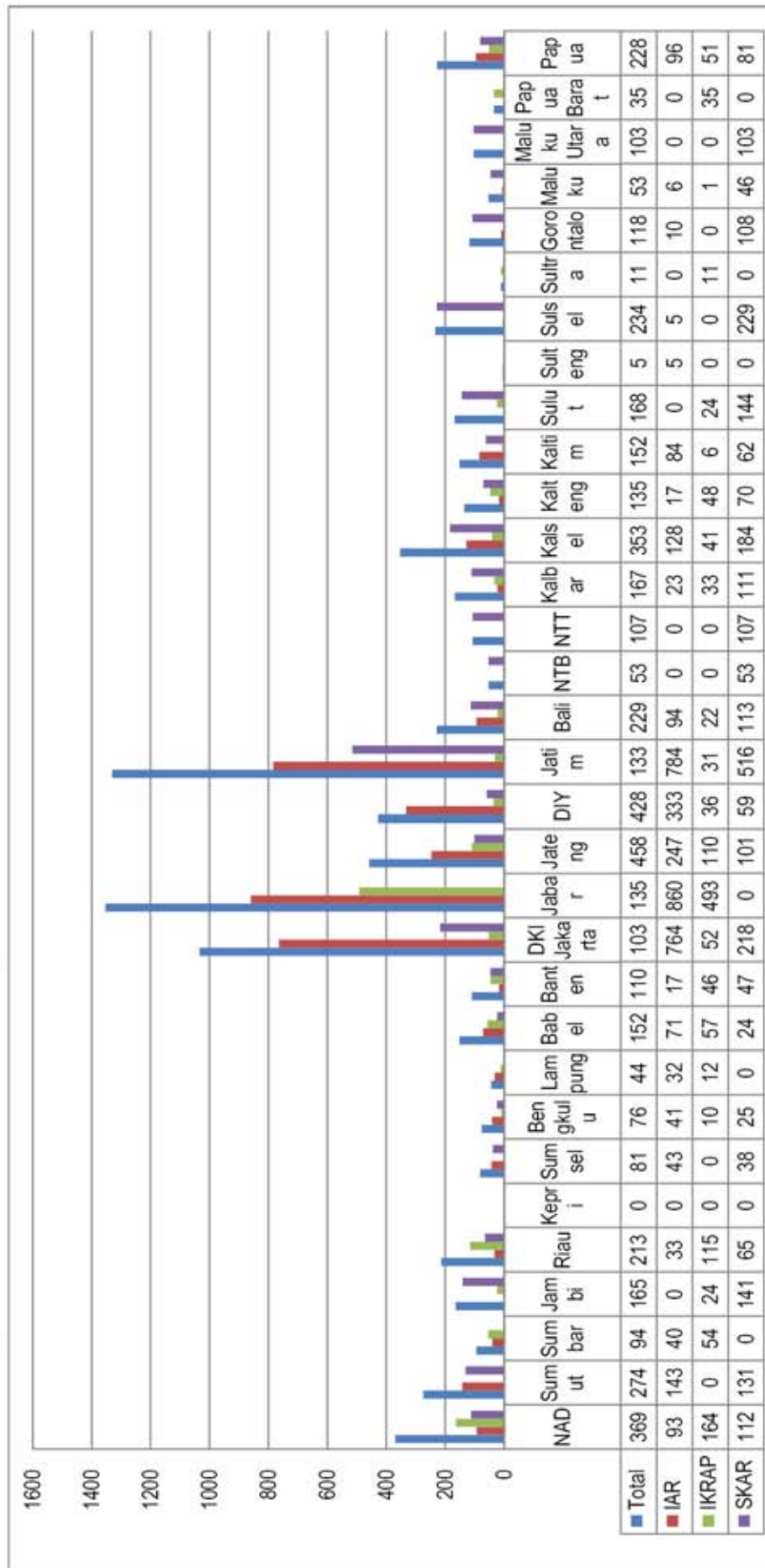
Salah satu pengaturan dalam penggunaan frekuensi oleh *stakeholder* adalah melalui penerbitan izin bagi penggunaan frekuensi radio. Terdapat tiga jenis izin/sertifikat yang dikeluarkan yaitu Izin Amatir Radio (IAR), Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) dan

Surat Kecakapan Amatir Radio (SKAR). Secara implisit, jumlah ijin terkait dengan pengelolaan radio ini mencerminkan penggunaan frekuensi yang terjadi.

Secara umum, jumlah ijin pengelolaan radio ini paling banyak masih terjadi di Pulau Jawa dengan terbanyak di Jawa Barat dan Jawa Timur sesuai dengan penggunaan frekuensi radio yang juga tinggi pada wilayah ini. Namun penerbitan izin pengelola radio ini juga tinggi di DKI Jakarta meskipun memiliki luas wilayah yang lebih kecil seperti ditunjukkan pada diagram pada gambar 7.16. Penerbitan izin yang terkait dengan operasional radio menunjukkan pola yang bervariasi dan berbeda antar daerah diantara tiga jenis izin/surat yang diterbitkan. Izin Amatir Radio menjadi ijin yang paling banyak diterbitkan untuk daerah-daerah di Pulau Jawa dan jauh lebih banyak dibandingkan IKRAP pada daerah tersebut. Pada beberapa daerah lain diluar Jawa, IAR juga menjadi yang paling banyak dikeluarkan dibanding ijin lainnya seperti di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Papua. Pada beberapa daerah di Sumatera seperti Bengkulu dan Sumatera Selatan, IAR juga lebih banyak dibanding ijin lainnya, namun volume penerbitannya masih kecil.

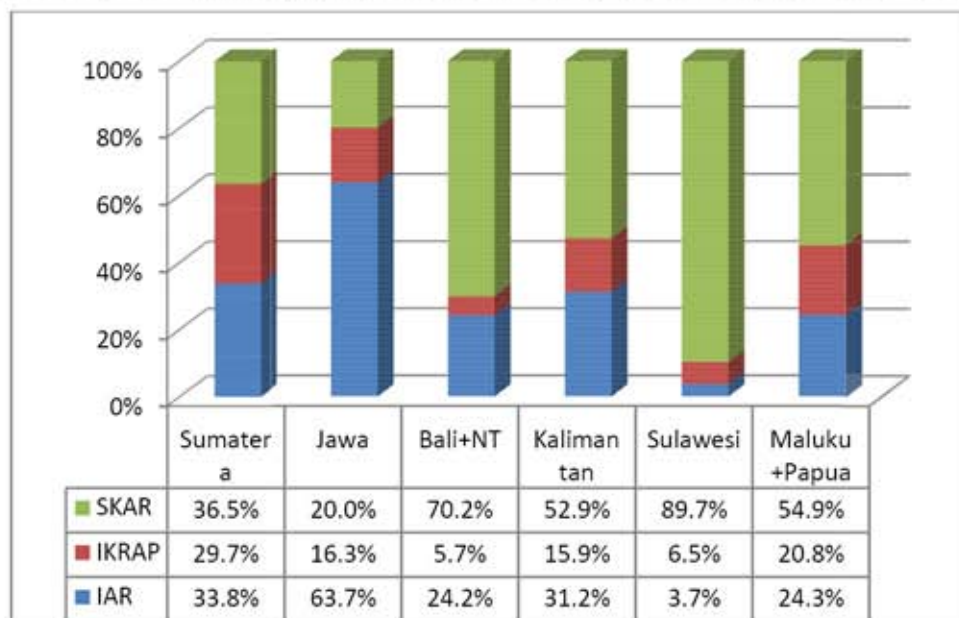
Untuk jenis ijin IKRAP, volume penerbitannya yang cukup tinggi terdapat di Jawa Barat meskipun lebih rendah daripada IAR. Namun di Sumatera Utara, Riau, Banten dan Papua Barat, IKRAP menjadi ijin yang paling banyak diterbitkan dibanding dengan dua jenis ijin lainnya. Sementara untuk SKAR, paling banyak diterbitkan di Jawa Timur dan DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan. Pada beberapa daerah, SKAR justru menjadi dokumen yang paling banyak dikeluarkan meskipun volumenya tidak terlalu besar seperti Jambi, Kalimantan Barat, NTT, Sulawesi Utara dan Gorontalo dan Maluku Utara. Khusus di Jambi, Sulawesi Utara dan Gorontalo, jumlah SKAR yang diterbitkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan ijin lainnya.

Gambar 7.16 .Sebaran penerbitan izin amatir radio menurut jenis izin dan propinsi



Jika dilihat dari komposisinya menurut pulau besar, terdapat komposisi yang cukup berbeda antara Sumatera, Jawa dan wilayah Kawasan Tengah dan Kawasan Timur Indonesia. Di Pulau Sumatera, komposisi penerbitan ijin sertifikat radio pada tahun 2010 cukup berimbang antara IAR, IKRAP dan SKAR dengan proporsi SKAR yang sedikit lebih banyak dibandingkan ijin lainnya. Sementara di Pulau Jawa yang menjadi tempat paling banyak dikeluarkan ijin, proporsi IAR jauh lebih banyak dibanding dua ijin lainnya yaitu mencapai 63,7%. Sementara pada kawasan tengah dan timur Indonesia, proporsi penerbitan ijin paling banyak adalah untuk SKAR dengan proporsi antara 52% sampai 89%. Bahkan di Pulau Sulawesi, proporsi SKAR mencapai 89,9%.

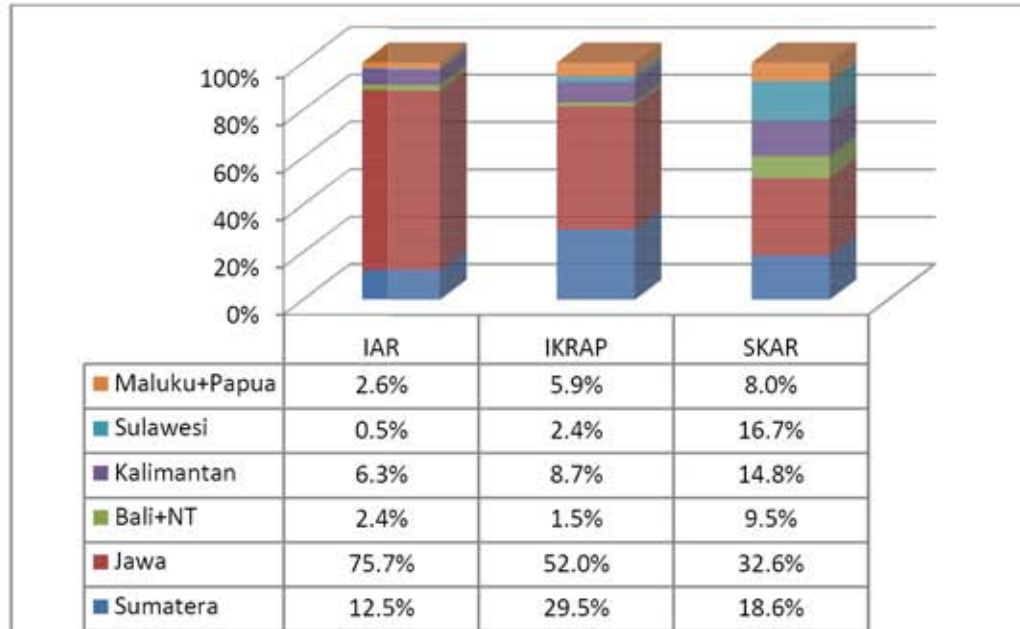
Gambar 7.17. Proporsi Sertifikat yang dikeluarkan menurut jenis sertifikat menurut Pulau Besar



Sementara untuk distribusi penyebaran ijin antar pulau besar menurut jenis ijin, SKAR menunjukkan distribusi yang relatif lebih terdistribusi dibanding jenis ijin lainnya. Untuk IAR dan IKRAP, penerbitannya lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Bahkan untuk IAR, proporsi penerbitannya di Pulau Jawa mencapai 75,7%, sementara di Sulawesi hanya 0,5%. Hal ini karena penggunaan amatir radio yang masih banyak terpusat di pulau Jawa. Untuk IKRAP, proporsi penerbitan di wilayah Sumatera cukup besar yaitu mencapai 29,5%. Sementara untuk SKAR, meskipun proporsi terbesar masih ada di Pulau Jawa karena Jawa masih menjadi pusat kegiatan di berbagai bidang di Indonesia, termasuk penyiaran, namun proporsi pada pulau-pulau besar lain tidak terlalu kecil. Di Pulau Sulawesi, proporsinya

bahkan bisa mencapai 16,7% dan lebih tinggi daripada di Kalimantan, Bali-Nusa Tenggara dan Maluku-Papua.

Gambar 7.18. Distribusi sertifikat amatir radio di pulau besar di Indonesia



Bab 8

Bidang Standardisasi

Statistik bidang standardisasi ini akan menyajikan informasi dari kegiatan bidang standardisasi perangkat yang menjadi bidang tugas dari Direktorat Standardisasi di Ditjen Pos dan Telekomunikasi. Tugas dari direktorat ini adalah melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang standar teknik dan standar pelayanan pos dan telekomunikasi serta komunikasi radio. Informasi yang disajikan dari kinerja bidang standardisasi ini adalah data dan analisis dari hasil penerbitan sertifikat dari pengujian peralatan telekomunikasi. Jika pengujian dilakukan oleh UPT Balai Besar Pengujian Perangkat telekomunikasi, maka perumusan sertifikat standardisasinya dikeluarkan oleh Direktorat Standardisasi.

Penerbitan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Standardisasi dari sisi jenisnya terdiri dari empat jenis yaitu sertifikat baru, sertifikat perpanjangan, sertifikat revisi dan sertifikat perpanjangan dan revisi. Dari sisi jenis perangkat yang disertifikasi yang datanya disajikan, terdapat 5 (lima)—jenis perangkat yaitu perangkat pelanggan (CPE) Kabel, perangkat pelanggan (CPE) Nirkabel, perangkat transmisi, perangkat penyiaran dan perangkat sentral. Penyajian data sertifikasi juga akan menggambarkan distribusi jumlah perangkat yang disertifikasi menurut negara asal perangkat dan fluktuasi bulanan penerbitan sertifikat perangkat untuk masing-masing jenis sertifikat.

8.1. Ruang Lingkup

Data standardisasi yang disajikan dalam laporan ini akan diuraikan secara terperinci dengan kurun waktu masing-masing data sebagai berikut:

1. Data penerbitan sertifikat baru pada tahun 2005 - 2010
2. Data penerbitan sertifikat perpanjangan pada tahun 2006 - 2010.
3. Data penerbitan sertifikat revisi pada tahun 2006 - 2010.
4. Data penerbitan sertifikat perpanjangan sekaligus revisi pada tahun 2006 - 2010.



5. Penerbitan sertifikasi menurut jenis sertifikat dan jenis perangkat tahun 2010.
6. Penerbitan sertifikat bulanan menurut jenis sertifikat tahun 2009 - 2010
7. Penerbitan sertifikat menurut jenis sertifikat dan negara asal perangkat 2010
8. Penerbitan sertifikat bulanan menurut negara asal perangkat 2010

Data sertifikasi standardisasi perangkat yang dipaparkan dalam laporan ini diperoleh langsung dari Direktorat Standardisasi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Dalam penyajian data ini, tidak dipisahkan antara data sertifikasi untuk masing-masing jenis perangkat (terminal, transmisi dan sentral) mengingat semakin bervariasinya jenis perangkat yang diuji. Sehingga dalam penyajiannya digabung menjadi satu untuk masing-masing jenis sertifikat.

8.2 Konsep dan Definisi

Sub bab ini berisi definisi dari terminologi yang digunakan dalam penyajian data standardisasi agar dapat memberi interpretasi yang sama terhadap terminologi yang digunakan.

- 1) Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
- 2) Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
- 3) Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat.
- 4) Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis dan atau standar yang ditetapkan.
- 5) Tipe alat dan perangkat telekomunikasi adalah merek, model atau jenis alat dan perangkat telekomunikasi yang mempunyai karakteristik tertentu.
- 6) Label adalah keterangan mengenai alat dan perangkat telekomunikasi yang berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang mengidentifikasi informasi tentang alat dan perangkat yang telah bersertifikat.
- 7) Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi adalah penilaian kesesuaian antara karakteristik alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku.

- 8) Persyaratan teknis adalah parameter listrik/elektronis yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
- 9) Sertifikat baru adalah sertifikat yang diterima untuk pengujian alat/perangkat yang baru pertama kali diuji.
- 10) Sertifikat revisi adalah sertifikat yang dikeluarkan sebagai revisi atas sertifikat awal/baru jika terjadi kesalahan dalam penerbitan (data, detail teknis) atau ada perubahan pada sebagian komponen perangkat.
- 11) Sertifikat perpanjangan adalah sertifikat yang diterbitkan atas perpanjangan pengujian dari alat yang sudah diuji sebelumnya dan masa basa berlaku sertifikat sudah habis sehingga perlu diperpanjang.
- 12) Sertifikat perpanjangan dan revisi adalah sertifikat yang diterbitkan jika dalam proses perpanjangan sertifikat juga terjadi perubahan pada alat/perangkat telekomunikasi yang diperpanjang sertifikatnya sehingga diperlukan revisi data dalam perpanjangan sertifikatnya

8.3. Penerbitan Sertifikat

8.3.1. Perkembangan Penertiban Sertifikat Peralatan

Salah satu kinerja dari Direktorat Standardisasi adalah jumlah sertifikat perangkat yang diterbitkan atas perangkat telekomunikasi yang masuk ke Indonesia dan telah mengalami proses pengujian untuk bisa digunakan di wilayah hukum Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2010, untuk jumlah sertifikat baru yang diterbitkan, menunjukkan terjadinya penurunan dibanding tahun sebelumnya. Jumlah sertifikat baru yang diterbitkan pada tahun 2010 hanya 99% dari jumlah sertifikat baru yang diterbitkan tahun sebelumnya. Penurunan ini merupakan yang pertama kali dalam lima tahun terakhir setelah tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan mencapai 53% per tahun.

Namun untuk seluruh jenis sertifikat, jumlah sertifikat yang diterbitkan tetap mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Secara total jumlah sertifikat yang diterbitkan pada tahun 2010 untuk semua jenis sertifikat mencapai 5.011 atau meningkat 5,4% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan pada

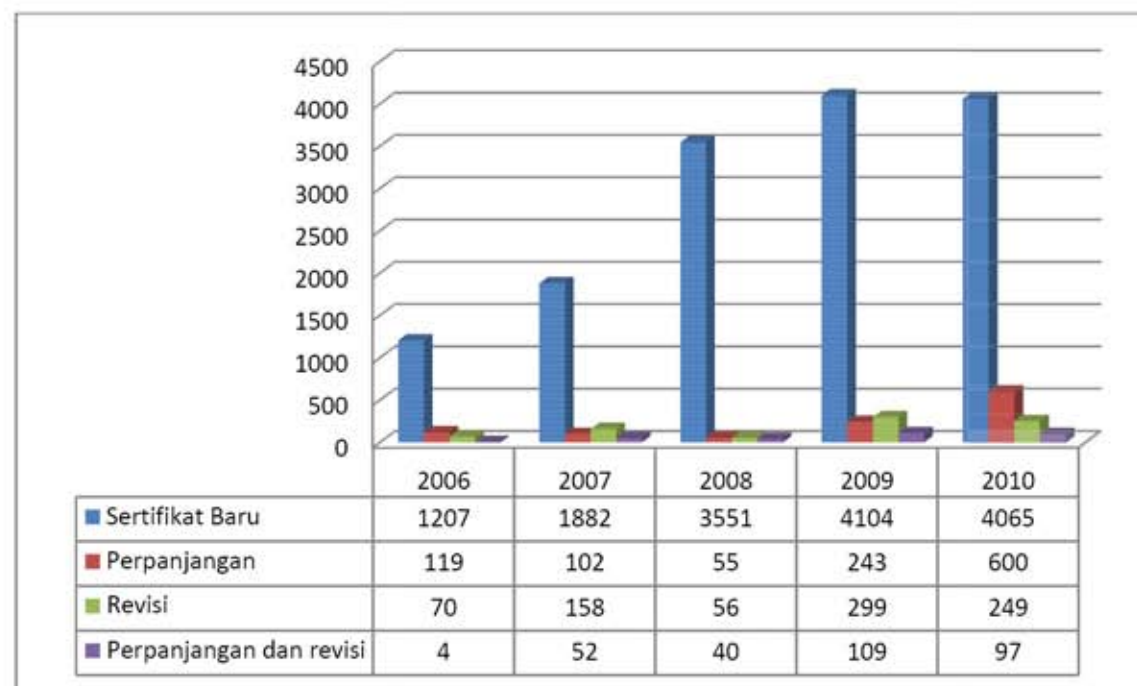
penerbitan sertifikat perpanjangan yang mencapai 147%, sementara untuk jenis sertifikat lain justru mengalami penurunan. Selain sertifikat baru yang menurun 1%, penerbitan sertifikat revisi juga menurun 16,7% dan untuk jenis sertifikat revisi dan perpanjangan, penurunannya mencapai 11%.

Tabel 8.1. Jumlah Penerbitan Sertifikat untuk masing-masing Jenis 2005 –2010

Jenis Sertifikat	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Sertifikat Baru	596	1.207	1.882	3.551	4.104	4065
Perpanjangan	N.A	119	102	55	243	600
Revisi	N.A	70	158	56	299	249
Perpanjangan dan revisi	N.A	4	52	40	109	97
Jumlah	596	1.400	2.194	3.702	4.755	5.011

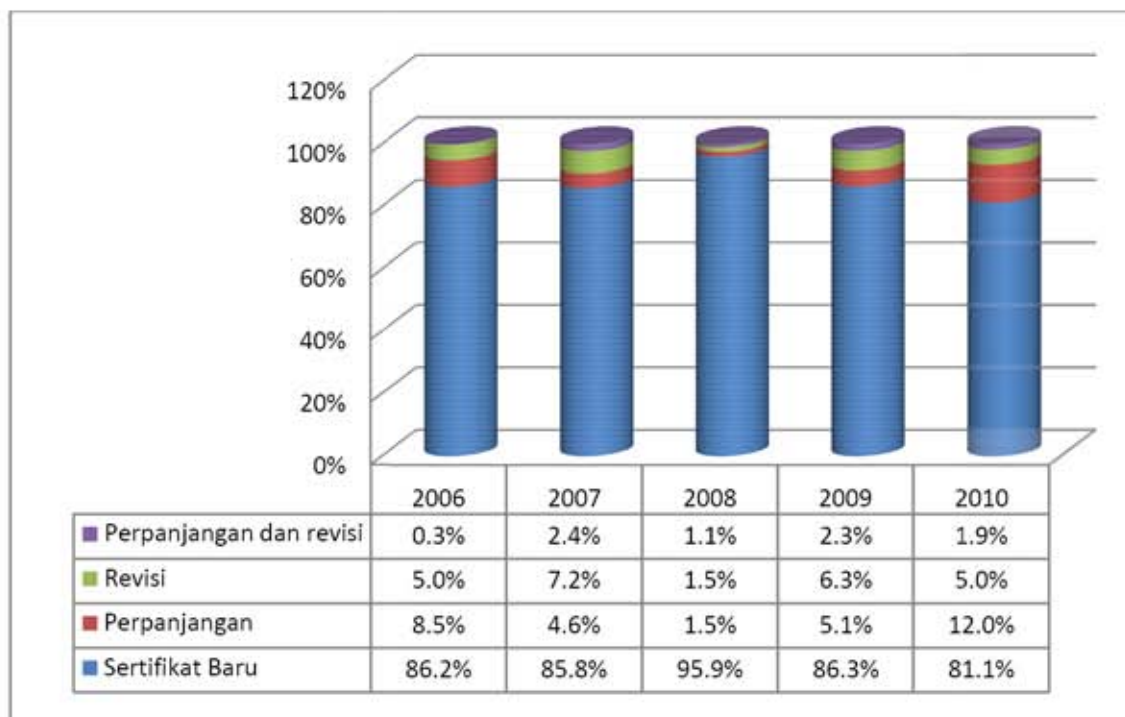
Gambar 8.1. menunjukkan kecenderungan penurunan jumlah sertifikat yang diterbitkan pada tahun 2010 setelah mengalami peningkatan cukup tinggi dalam empat tahun sebelumnya. Peningkatan yang tinggi pada tahun 2008 untuk jenis sertifikat baru, kemudian melambat pada tahun 2009, akhirnya mengalami penurunan pada tahun 2010. Kecenderungan menurun ini juga terjadi untuk jenis sertifikat revisi dan sertifikat revisi dan perpanjangan.

Gambar 8.1. Perkembangan Jumlah Penerbitan Sertifikat untuk masing-masing Jenis 2006 – 2010



Dari komposisi jenis sertifikat yang diterbitkan, penerbitan sertifikat perangkat masih didominasi untuk jenis sertifikat baru. Pada tahun 2010, sekitar 81,1% sertifikat yang dikeluarkan adalah untuk jenis sertifikat baru. Namun sejalan dengan penurunan jumlah sertifikat baru yang diterbitkan, proporsi jumlah sertifikat baru juga menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara untuk jenis sertifikat perpanjangan, proporsinya menunjukkan kecenderungan peningkatan dari 5,1% pada tahun 2009 menjadi 12% pada tahun 2010.

Gambar 8.2. Komposisi Sertifikat yang diterbitkan menurut Jenis sertifikat 2006 – 2010



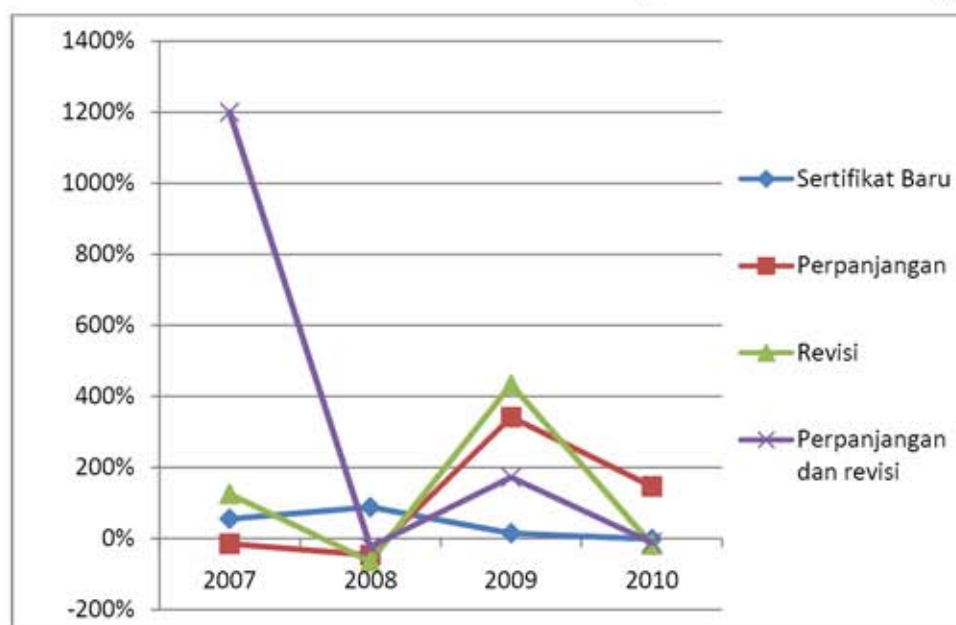
Dari sisi pertumbuhannya, sejalan dengan penurunan jumlah sertifikat yang diterbitkan untuk jenis sertifikat baru, sertifikat revisi dan sertifikat revisi dan perpanjangan, maka pertumbuhan penerbitan jumlah sertifikat untuk ketiga jenis sertifikat tersebut juga mengalami nilai pertumbuhan yang negatif meskipun rendah. Pertumbuhan yang negatif ini membuat pertumbuhan penerbitan sertifikat cenderung fluktuatif seperti ditunjukkan oleh gambar 8.3. Namun untuk jenis sertifikat baru, pertumbuhan yang negatif ini baru terjadi pada tahun 2010 meskipun trend penurunan pertumbuhan sudah terjadi pada tahun 2009. Sementara untuk jenis sertifikat revisi dan sertifikat revisi dan perpanjangan, pertumbuhan

yang negatif ini mengulang yang terjadi pada tahun 2008. Meskipun demikian, secara total, penerbitan sertifikat perangkat masih menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Tabel 8.2. Pertumbuhan Penerbitan sertifikat menurut jenis sertifikat

Jenis Sertifikat	2006	2007	2008	2009	2010
Sertifikat Baru	102,5%	55,9%	88,7%	15,6%	-1,0%
Perpanjangan	N.A.	-14,3%	-46,1%	341,8%	146,9%
Revisi	N.A.	125,7%	-64,6%	433,9%	-16,7%
Perpanjangan dan revisi	N.A.	1200,0%	-23,1%	172,5%	-11,0%
Jumlah	134,9%	56,7%	68,7%	28,4%	5,4%

Gambar 8.3. Pertumbuhan Penerbitan Sertifikat Perangkat menurut Jenis Perangkat



Jika dilihat dari jenis perangkat dari sertifikat yang diterbitkan, penerbitan sertifikat pada tahun 2010 paling banyak adalah untuk jenis perangkat pelanggan (CPE) Nirkabel, diikuti oleh sertifikat untuk jenis perangkat transmisi. Untuk jenis sertifikat baru dan sertifikat revisi, jenis perangkat pelanggan (CPE) Nirkabel adalah yang paling banyak diterbitkan. Sementara untuk jenis sertifikat perpanjangan, paling banyak adalah untuk jenis perangkat transmisi, diikuti untuk perangkat jenis Sentral. Untuk jenis perangkat pelanggan (CPE) kabel, hanya diterbitkan satu sertifikat perpanjangan dan empat buah sertifikat revisi.

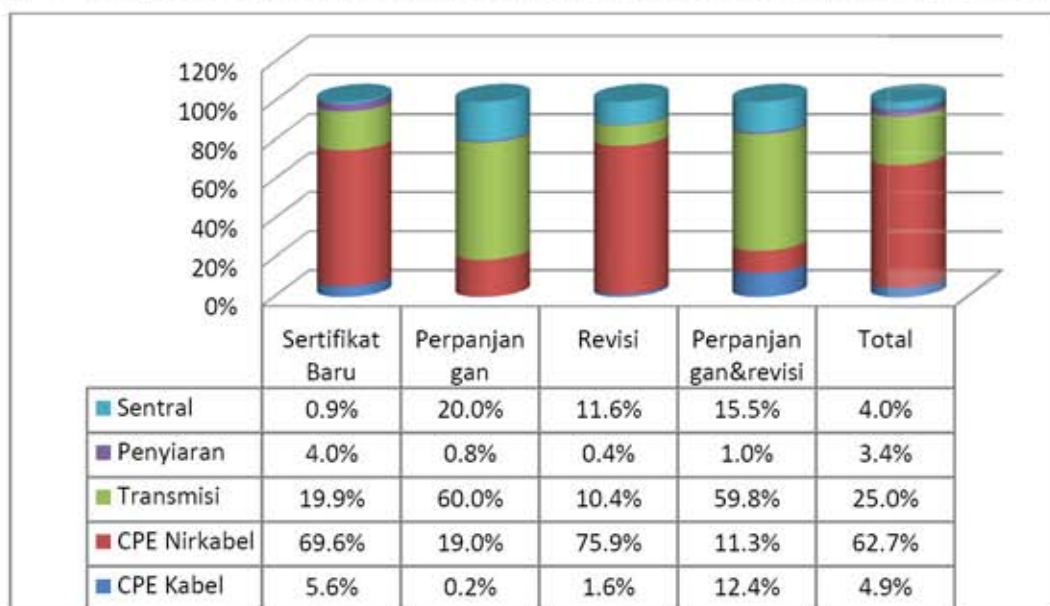
Komposisi jenis sertifikat yang diterbitkan untuk masing-masing jenis perangkat juga menunjukkan variasi meskipun untuk sebagian besar jenis sertifikat, proporsi paling besar adalah untuk jenis perangkat pelanggan (CPE) Nirkabel. Untuk seluruh jenis sertifikat,

proporsi sertifikat untuk jenis perangkat pelanggan (CPE) nirkabel yang didominasi oleh “Pesawat Telepon Selular/Handphone” mencapai 62,7%, sementara untuk jenis perangkat transmisi proporsinya hanya 25% seperti ditunjukkan gambar 8.4. Untuk jenis sertifikat baru, proporsi penerbitan sertifikat untuk perangkat pelanggan (CPE) nirkabel ini mencapai hampir 70% , sementara jenis perangkat transmisi hanya 19,9% dan perangkat pelanggan (CPE) kabel hanya 5,6%. Namun untuk jenis sertifikat perpanjangan, proporsi penerbitan sertifikat untuk jenis perangkat transmisi mencapai 60%, diikuti oleh jenis perangkat Sentral yang proporsinya mencapai 20%. Sementara untuk jenis perangkat pelanggan (CPE) nirkabel, proporsinya hanya 19%. Secara implisit ini menunjukkan bahwa jenis perangkat Transmisi maupun Sentral memiliki masa laku perangkat yang lebih lama dibanding jenis perangkat lainnya (CPE) sehingga lebih banyak/sering mengalami perpanjangan sertifikat.

Tabel 8.3. Penerbitan sertifikat menurut jenis sertifikat dan jenis perangkat Tahun 2010

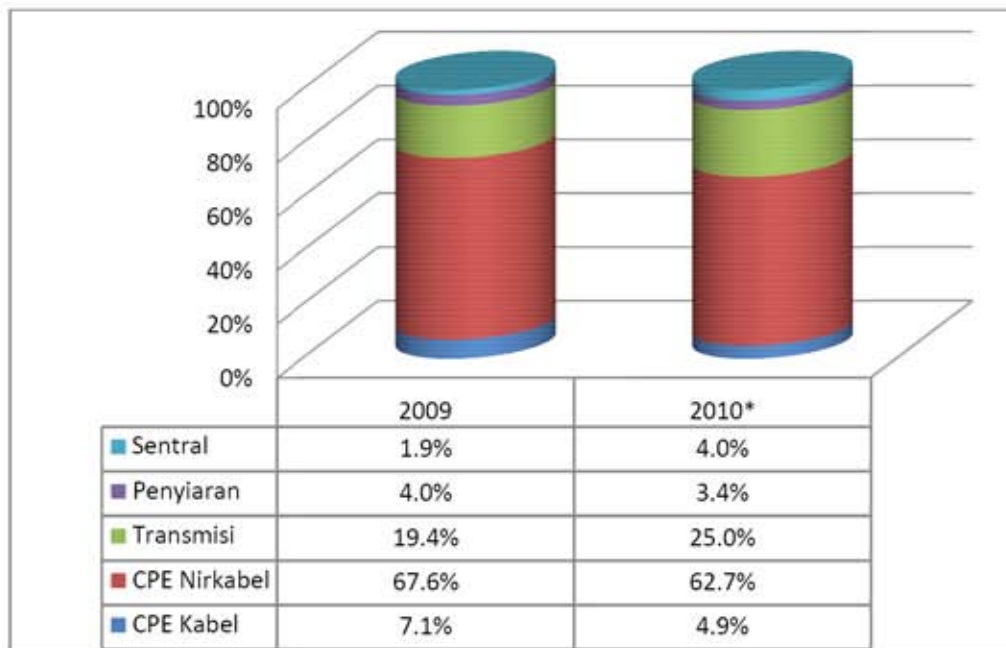
Jenis	Perangkat Pelanggan (CPE) Kabel	Perangkat Pelanggan (CPE) Nirkabel	Transmisi	Penyiaran	Sentral	Total
Sertifikat Baru	229	2828	807	163	38	4065
Perpanjangan	1	114	360	5	120	600
Revisi	4	189	26	1	29	249
Perpanjangan & revisi	12	11	58	1	15	97
Total	246	3142	1251	170	202	5011

Gambar 8.4. Komposisi Penerbitan Sertifikat Perangkat menurut Jenis Perangkat dan Jenis Sertifikat



Jika dibandingkan komposisi penerbitan sertifikat menurut jenis perangkat dalam dua tahun terakhir, penurunan jumlah sertifikat baru yang diterbitkan pada tahun 2010 berdampak pula pada pergeseran komposisi jenis perangkat yang diterbitkan sertifikatnya. Jenis sertifikat baru yang banyak diterbitkan untuk jenis perangkat pelanggan (CPE) Nirkabel, menyebabkan proporsi penerbitan sertifikat untuk jenis perangkat pelanggan (CPE) nirkabel mengalami penurunan dari 67,7% pada 2009 menjadi 62,7% pada 2010. Penurunan ini diikuti dengan peningkatan proporsi penerbitan sertifikat untuk jenis perangkat transmisi dan perangkat pelanggan (CPE) kabel. Peningkatan penerbitan sertifikat yang hanya terjadi untuk jenis perpanjangan menjadikan proporsi penerbitan sertifikat untuk jenis perangkat transmisi meningkat dari 19,4% pada tahun 2009 menjadi 25% pada tahun 2010. Hal ini terjadi karena untuk sertifikat perpanjangan, paling banyak dikeluarkan untuk jenis perangkat transmisi.

Gambar 8.5. Perbandingan Komposisi Penerbitan Sertifikat menurut Jenis Perangkat 2009-2010



8.3.2. Fluktuasi Penerbitan Sertifikat Bulanan

Perbandingan penerbitan sertifikat perangkat per bulan antara tahun 2009 dan 2010 menunjukkan bahwa jumlah penerbitan sertifikat baru yang tinggi pada tahun 2010 baru terjadi pada bulan-bulan di semester 2 kecuali pada bulan September. Sementara pada semester 1, jumlah penerbitan sertifikat baru pada tahun 2010 lebih rendah daripada tahun 2009 pada setiap bulannya. Hal ini menunjukkan bahwa penerbitan sertifikat untuk

pengujian perangkat baru pada tahun 2010 baru banyak terjadi pada semester 2. Penerbitan sertifikat baru pada tahun 2010 bahkan cenderung tinggi pada pertengahan tahun dan kuartal ke-4 tahun 2010. Sementara pada tahun 2009, fluktuasi penerbitan sertifikasi antar bulan tidak menunjukkan fluktuasi yang tinggi.

Pola yang sama juga terjadi untuk penerbitan sertifikat revisi dimana sertifikat revisi baru banyak dikeluarkan pada semester 2. Sementara pada semester 1 cenderung tidak banyak sertifikat yang dikeluarkan setiap bulannya. Secara umum, untuk semua jenis sertifikat, penerbitan sertifikat pada tahun 2010 memang lebih banyak dikeluarkan pada semester 2 dibanding semester 1. Sebaliknya pada tahun 2009, sertifikat yang dikeluarkan pada semester 1 juga relatif cukup banyak dan tidak terakumulasi di semester 2.

Tabel 8.4. Penerbitan sertifikat bulanan menurut jenis sertifikat tahun 2009 dan 2010

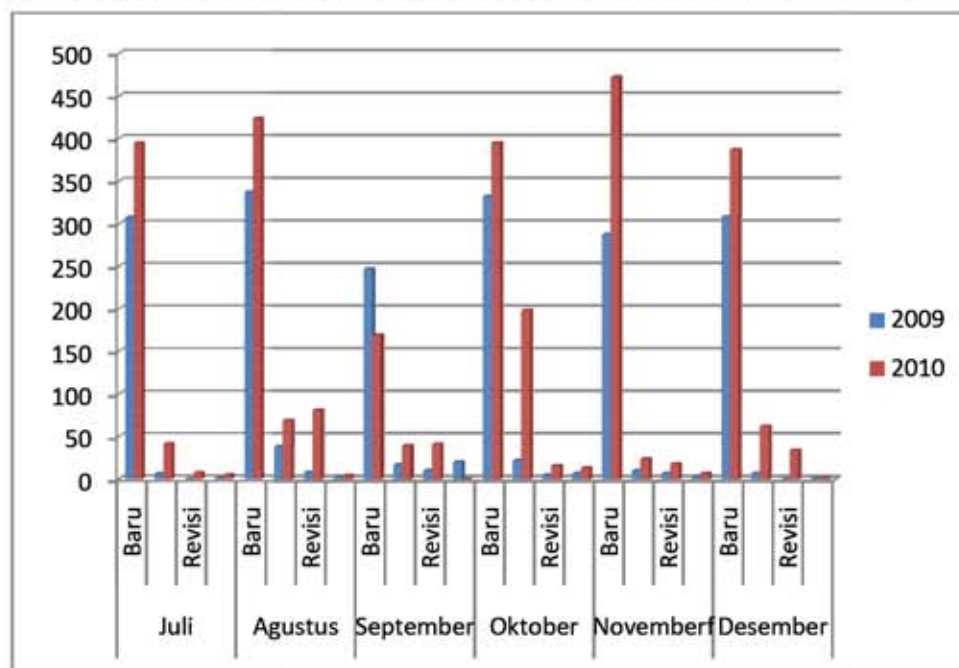
Bulan	Baru		Perpanjangan		Revisi		Revisi&Perpanjangan	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
Januari	371	297	22	6	62	3	0	4
Februari	356	242	8	10	10	1	4	3
Maret	335	344	30	60	126	7	4	2
April	453	316	9	16	20	3	3	13
Mei	348	269	13	15	35	10	2	8
Juni	305	355	15	59	9	27	13	37
Juli	308	395	7	42	0	8	1	5
Agustus	337	424	38	69	8	81	3	4
September	247	169	17	39	10	41	20	-
Oktober	332	395	22	198	5	16	7	13
Nopember	287	472	10	24	7	18	3	7
Desember	308	387	7	62	0	34	1	1

Perbandingan jumlah penerbitan sertifikat antara semester 2 tahun 2009 dengan semester 2 tahun 2010 yang ditunjukkan oleh gambar 8.6 juga menjelaskan perbedaan pola intensitas penerbitan sertifikat antara tahun 2009 dan tahun 2010. Meskipun penerbitan sertifikat baru pada bukan-bulan di semester 2 tahun 2010 lebih tinggi daripada penerbitan sertifikat baru pada bulan-bulan di semester 2 (kecuali pada bulan September) bahkan dengan perbedaan yang cukup besar, namun secara total penerbitan sertifikat baru pada 2010 lebih rendah daripada tahun 2009. Tidak terdapat informasi yang cukup jelas mengapa

penerbitan sertifikat baru perangkat telekomunikasi pada tahun 2010 lebih terakumulasi di semester 2. Namun hal ini diduga terkait dengan impor perangkat telekomunikasi yang masuk Indonesia yang baru banyak masuk pada semester 2 tahun 2010. Hal ini didukung dengan data impor kuartalan perangkat telekomunikasi seperti disajikan pada pembahasan berikutnya.

Penerbitan sertifikat baru perangkat telekomunikasi pada tahun 2010 yang lebih banyak terakumulasi di semester 2 diduga terkait dengan impor perangkat telekomunikasi yang baru banyak masuk Indonesia pada tahun 2010

Gambar 8.6. Perbandingan Penerbitan Sertifikat Bulanan menurut Jenis Sertifikat 2009 dan 2010



Jika dilihat dari negara asal perangkat telekomunikasi yang dikeluarkan sertifikatnya pada tahun 2010, perangkat telekomunikasi asal negara China masih mendominasi penerbitan sertifikat tersebut. Sebanyak 2350 sertifikat baru dan total 2675 sertifikat telah diterbitkan pada tahun 2010 untuk perangkat telekomunikasi asal China. Negara berikutnya yang paling banyak dikeluarkan sertifikat perangkatnya adalah Amerika Serikat dan Jepang. Seperti ditunjukkan pada tabel 8.5, sebanyak 340 sertifikat baru dan total 460 sertifikat

Standardisasi perangkat telah dikeluarkan untuk perangkat asal Amerika Serikat. Untuk perangkat asal Jepang, jumlah sertifikat yang dikeluarkan mencapai 271 buah yang 162 diantaranya adalah untuk sertifikat baru.

Tabel 8.5. Komposisi sertifikat menurut jenis sertifikat dan negara asal perangkat Tahun 2010

Negara Asal	Baru	Perpan- jangan	Revisi	Revisi & Perpanjangan	Total
China	2350	135	165	25	2675
Amerika Serikat	340	108	6	6	460
Jepang	162	103	1	5	271
Italia	127	27	5	3	162
Taiwan	139	3	11	1	154
Korea Selatan	139	4	7	3	153
Swedia	33	66	17	30	146
Finlandia	59	44	0	4	107
Meksiko	92	0	5	0	97
Kanada	76	13	5	1	95
Malaysia	69	14	5	5	93
Jerman	56	21	2	8	87
Indonesia	56	10	0	2	68
Hungaria	61	0	5	0	66
India	51	0	9	0	60
Lainnya	255	52	6	4	317
Total	4065	600	249	97	5011

Dominannya sertifikat asal China yang dikeluarkan atas perangkat yang masuk juga ditunjukkan oleh komposisi sertifikat perangkat yang dikeluarkan menurut negara asal. Proporsi sertifikat baru untuk perangkat asal China yang dikeluarkan pada tahun 2010 mencapai 57,8% dari total. Proporsi ini jauh lebih besar dibandingkan dengan sertifikat baru perangkat telekomunikasi dari negara lain. Proporsi sertifikat baru perangkat asal Amerika Serikat misalnya hanya 8,4% dan sertifikat baru perangkat asal Jepang hanya 4% dari total sertifikat baru yang diterbitkan tahun 2010. Besarnya proporsi penerbitan sertifikat baru perangkat asal China yang diterbitkan secara implisit juga menunjukkan dominannya produk perangkat telekomunikasi asal China yang masuk Indonesia dan disertifikasi sesuai dengan standar yang ditetapkan di Indonesia.

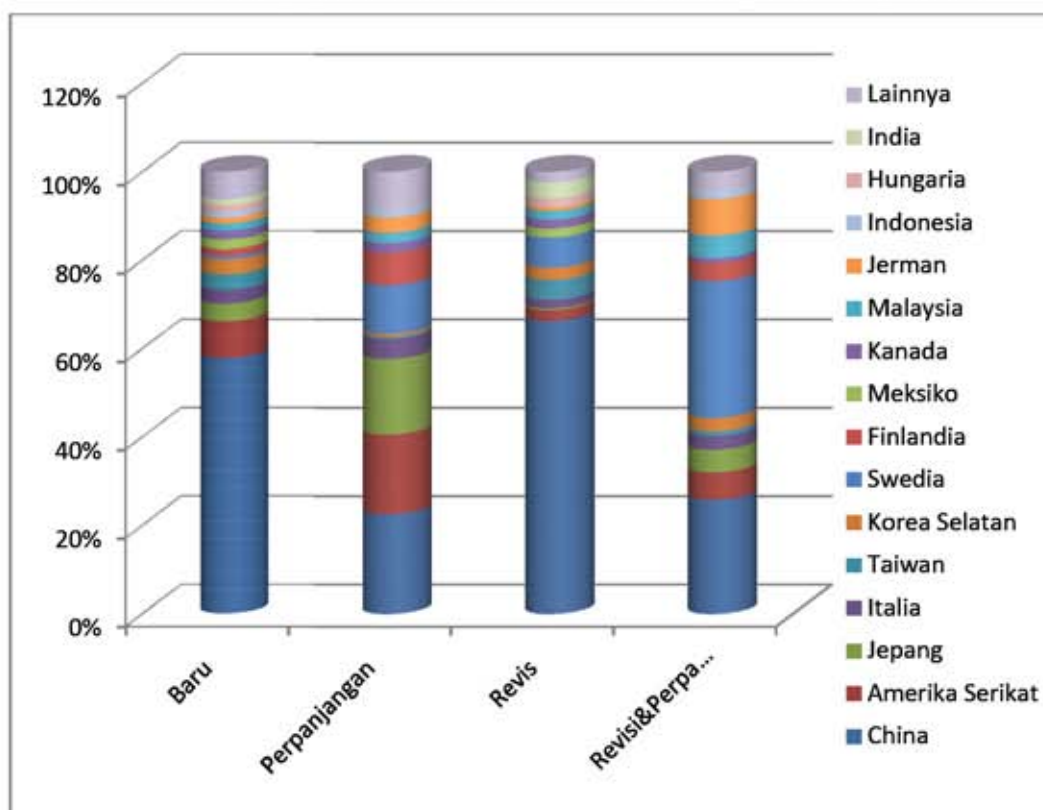
Tabel 8.6. Proporsi sertifikat menurut jenis sertifikat dan negara asal perangkat Tahun 2010

Negara Asal	Baru	Perpan- jangan	Revisi	Revisi & Perpanjangan
China	57,8%	22,5%	66,3%	25,8%
Amerika Serikat	8,4%	18,0%	2,4%	6,2%
Jepang	4,0%	17,2%	0,4%	5,2%
Italia	3,1%	4,5%	2,0%	3,1%
Taiwan	3,4%	0,5%	4,4%	1,0%
Korea Selatan	3,4%	0,7%	2,8%	3,1%
Swedia	0,8%	11,0%	6,8%	30,9%
Finlandia	1,5%	7,3%	0,0%	4,1%
Meksiko	2,3%	0,0%	2,0%	0,0%
Kanada	1,9%	2,2%	2,0%	1,0%
Malaysia	1,7%	2,3%	2,0%	5,2%
Jerman	1,4%	3,5%	0,8%	8,2%
Indonesia	1,4%	1,7%	0,0%	2,1%
Hungaria	1,5%	0,0%	2,0%	0,0%
India	1,3%	0,0%	3,6%	0,0%
Lainnya	6,3%	8,7%	2,4%	4,1%

Proporsi yang besar untuk sertifikat perangkat asal China juga terjadi untuk jenis sertifikat revisi. Proporsi penerbitan sertifikat revisi untuk perangkat asal China mencapai 66,3% dari total sertifikat revisi yang dikeluarkan. Proporsi ini juga jauh lebih besar daripada sertifikat revisi untuk perangkat telekomunikasi asal negara lainnya. Proporsi sertifikat revisi perangkat asal Swedia hanya 6,8% dan untuk perangkat asal Taiwan hanya 4,4%.

Gambar 8.7 semakin menunjukkan dominannya penerbitan sertifikat perangkat asal China yang sekaligus mencerminkan dominannya perangkat telekomunikasi asal China yang masuk dan perlu di sertifikasi di Indonesia. Untuk jenis sertifikat baru dan sertifikat revisi, proporsi penerbitan sertifikatnya sangat dominan dan jauh lebih besar dibanding perangkat telekomunikasi dari negara lain. Namun untuk sertifikat perpanjangan, proporsinya hampir seimbang antara perangkat telekomunikasi dari China, Amerika Serikat dan Jepang. Sementara untuk sertifikat revisi dan perpanjangan, proporsi terbesar adalah untuk perangkat asal Swedia (30,9%) diikuti oleh China (25,8%). Namun untuk jenis sertifikat revisi, perpanjangan dan sertifikat revisi dan perpanjangan, jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding sertifikat baru.

Gambar 8.7. Proporsi Penerbitan Sertifikat menurut negara asal Tahun 2010



8.3.3. Penerbitan Sertifikat Menurut Negara Asal

Dominasi penerbitan sertifikat untuk perangkat asal China juga terjadi dari bulan ke bulan dalam satu tahun di 2010. Pola fluktuasi penerbitan sertifikat perangkat asal China in juga sangat mempengaruhi pola fluktuasi penerbitan sertifikat perangkat secara total. Intensitas penerbitan sertifikat perangkat asal China yang tinggi di awal semester 2 dan pada kuartal 4 juga diikuti dengan intensitas penerbitan sertifikat secara total yang juga tinggi pada bulan-bulan tersebut. Demikian pula dengan penerbitan sertifikat perangkat asal China yang lebih tinggi pada semester 2 juga berdampak pada distribusi penerbitan sertifikat secara total yang juga lebih tinggi pada semester 2 dibanding semester 1. Secara rata-rata setiap bulan diterbitkan 223 sertifikat perangkat asal China, sedangkan khusus untuk semester 2, rata-rata per bulannya mencapai 269 sertifikat. Sementara untuk total sertifikat yang dikeluarkan, rata-rata tiap bulannya dikeluarkan 418 sertifikat dan pada semester 2 rata-rata per bulannya mencapai 484 sertifikat.



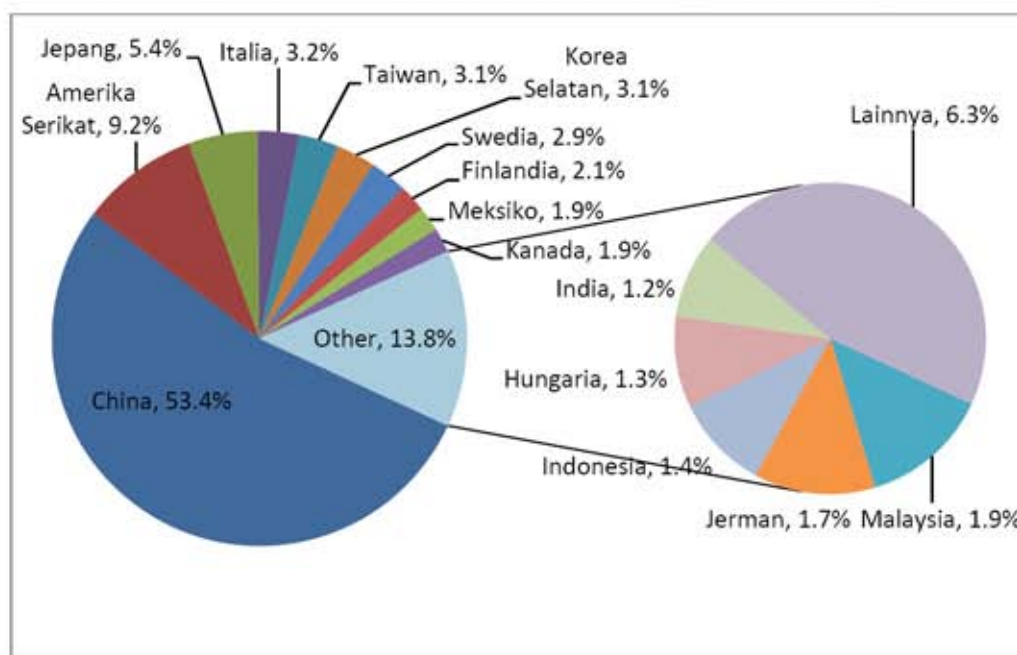
Tabel 8.7. Sebaran penerbitan sertifikat bulanan menurut negara asal perangkat Tahun 2010

Negara	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
China	183	129	210	158	172	210	266	360	142	277	267	303
USA	20	13	61	49	41	57	33	44	15	58	32	37
Jepang	9	15	22	24	13	20	37	26	11	44	28	22
Italia	10	10	18	10	15	19	4	12	3	28	25	8
Taiwan	12	10	10	13	9	9	15	22	8	12	20	14
Korea Selatan	4	11	11	14	4	9	14	14	7	18	30	17
Swedia	1	0	7	11	4	47	3	5	20	42	3	3
Finlandia	6	2	4	9	3	3	6	5	0	42	27	0
Meksiko	8	4	4	6	1	7	11	15	5	11	17	8
Kanada	8	9	6	8	4	7	12	14	0	11	5	11
Malaysia	9	5	8	3	8	11	7	13	4	12	12	1
Jerman	2	4	7	11	2	16	4	6	6	14	12	3
Indonesia	7	1	8	10	3	9	6	3	0	6	4	11
Hungaria	9	8	6	0	3	6	4	8	2	6	10	4
India	5	11	4	6	5	2	2	1	12	3	5	4
Lainnya	19	24	27	16	15	46	26	31	13	38	24	38
Total	312	256	413	348	302	478	450	579	248	622	521	484

Proporsi penerbitan sertifikat secara total pada tahun 2010 juga ditunjukkan oleh gambar 8.8. Dari gambar tersebut terlihat bahwa penerbitan sertifikat perangkat asal China sangat dominan dengan proporsi mencapai 53,4%. Sementara untuk proporsi sertifikat perangkat asal Amerika Serikat yang merupakan terbanyak kedua hanya 9,2% dan Jepang hanya 5,4%. Meskipun dalam proporsi yang kecil, namun terdapat penerbitan sertifikat perangkat untuk perangkat asal Indonesia. Dari total sertifikat perangkat yang diterbitkan, 1,4% adalah sertifikat untuk perangkat asal Indonesia.

Proporsi penerbitan sertifikat perangkat asal China yang jauh lebih besar dibanding dengan sertifikat perangkat asal negara lainnya menunjukkan dominannya perangkat asal China yang masuk ke Indonesia dan perlu untuk disertifikasi dibandingkan dengan perangkat dari negara lainnya

Gambar 8.8. Komposisi Penerbitan Sertifikat Standardisasi Perangkat menurut Negara Asal



8.4. Neraca Perdagangan Perangkat Telekomunikasi

Standardisasi perangkat melalui pemberian sertifikat atas perangkat yang akan masuk dan digunakan di Indonesia terkait erat dengan arus keluar masuk perangkat telekomunikasi dari dan ke Indonesia. Standardisasi diperlukan untuk memastikan perangkat telekomunikasi yang masuk ke Indonesia telah memenuhi standar perangkat yang telah ditetapkan untuk digunakan di wilayah Indonesia. Penerbitan sertifikat Standardisasi yang besar untuk suatu jenis perangkat secara implisit menunjukkan tingginya arus masuk (impor) untuk jenis perangkat telekomunikasi tersebut. Neraca perdagangan perangkat telekomunikasi yang menunjukkan arus keluar (ekspor) dan masuk (impor) perangkat telekomunikasi dari dan ke Indonesia memberikan gambaran tentang besarnya arus keluar dan terutama masuknya perangkat telekomunikasi ke Indonesia yang membutuhkan perhatian dari bidang Standardisasi perangkat.

Neraca perdagangan perangkat telekomunikasi Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan keseimbangan perdagangan (*balance of trade*) yang awalnya positif dengan kecenderungan selisih (*gap*) yang semakin kecil sampai akhirnya menjadi negatif sejak tahun 2008. Sampai dengan tahun 2007, perdagangan perangkat telekomunikasi Indonesia



sebenarnya masih surplus dimana ekspor perangkat telekomunikasi baik nilai maupun beratnya masih lebih besar daripada impornya seperti ditunjukkan tabel 8.8. Hal ini menunjukkan bahwa sampai tahun 2007, kinerja industri dan perdagangan perangkat telekomunikasi Indonesia di pasar internasional masih cukup baik.

Memasuki tahun 2008, sebetulnya nilai ekspor perangkat telekomunikasi Indonesia masih meningkat sebesar 32%. Namun pada saat yang sama impor perangkat telekomunikasi ke Indonesia juga meningkat sebesar 70,3% sehingga kinerja perdagangan perangkat telekomunikasi menunjukkan terjadinya defisit dimana total eksportnya masih lebih rendah dari total impornya. Tahun 2009, ketika kinerja ekspor lebih baik lagi dengan peningkatan nilai ekspor mencapai 80,7%, namun impor produk telekomunikasi juga meningkat lebih tajam lagi yaitu sebesar 121,4% sehingga defisit neraca perdagangan produk telekomunikasi Indonesia mencapai sekitar 617 juta dollar.

Tabel 8.8. Ekspor dan Impor Perangkat Telekomunikasi 2005-2010

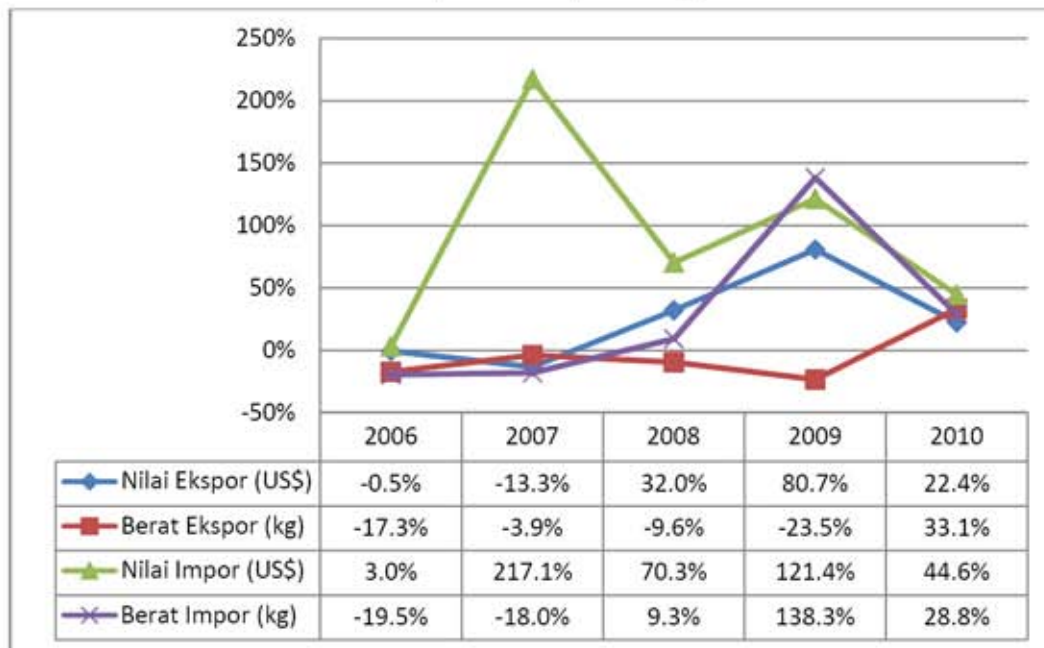
	Ekspor		Impor	
	Nilai (US\$)	Berat (kg)	Nilai (US\$)	Berat (kg)
2005	916.903.299	76.963.926	203.358.918	28.281.079
2006	912.615.463	63.646.802	209.462.317	22.769.222
2007	791.072.473	61.144.702	664.248.080	18.671.184
2008	1.044.207.325	55.282.207	1.130.915.894	20.398.992
2009	1.886.732.217	42.314.730	2.503.657.803	48.611.492
2010	2.310.105.995	56.333.735	3.619.695.162	62.600.497

Pada tahun 2010, sebenarnya ekspor produk telekomunikasi Indonesia masih meningkat dengan peningkatan yang mencapai 22,4%. Namun pada periode yang sama, peningkatan impor produk telekomunikasi Indonesia justru meningkat dua kali peningkatan ekspor yaitu sebesar 44,6%. Akibatnya secara total defisit neraca perdagangan perangkat telekomunikasi Indonesia menjadi semakin besar. Jumlah penduduk Indonesia yang besar dan pendapatan per kapita penduduk yang mulai meningkat merupakan pasar yang sangat potensial bagi produk-produk telekomunikasi khususnya dalam bentuk konsumen produk seperti telepon

seluler, modem, bluetooth dan lainnya. Kondisi ini memberi kontribusi besar terhadap peningkatan impor perangkat telekomunikasi dalam tiga tahun terakhir.

Gambar 8.9 menunjukkan trend pertumbuhan ekspor dan impor produk telekomunikasi di Indonesia. Dari gambar tersebut terlihat bahwa meskipun masih tumbuh positif dan trend-nya cenderung meningkat, namun pertumbuhannya relatif kecil. Sementara untuk impor menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Meskipun pertumbuhan nilai impornya cenderung fluktuatif, namun nilai pertumbuhannya jauh lebih tinggi dari pertumbuhan nilai ekspor. Sehingga secara komulatif, kinerja ekspor produk perangkat telekomunikasi Indonesia semakin tertinggal oleh impornya.

Gambar 8.9. Trend Pertumbuhan Ekspor dan Impor Perangkat Telekomunikasi 2006-2010



Bab 9

Bidang Kelembagaan Internasional

Kegiatan bidang kelembagaan internasional mulai mendapat tempat khusus sejak tanggal 28 November 2002 setelah struktur organisasi Ditjen Postel telah bertambah satu, yaitu Direktorat Kelembagaan Internasional. Tugas pokok dan fungsi dari Direktorat ini adalah untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Ditjen Pos dan Telekomunikasi di bidang kelembagaan internasional pos dan telekomunikasi, khususnya untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia di bidang pos dan telekomunikasi dan untuk menyelenggarakan hubungan kelembagaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seiring dengan restrukturisasi organisasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17/PER/M-KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemkominfo bahwa sebagian tugas pokok kelembagaan internasional berpindah ke Pusat Kelembagaan Internasional yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Kemkominfo.

Perlunya keterlibatan dalam kegiatan kelembagaan internasional dalam bidang pos dan terutama telekomunikasi ini sejalan dengan semakin meningkatnya intensitas, kompleksitas, beban dan tantangan kerja di bidang pos dan telekomunikasi (khususnya telekomunikasi sesuai dengan kecenderungan semakin tingginya tingkat akselerasi kemajuan ICT secara nasional maupun terutama sekali dalam lingkup global). Semakin pesatnya perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi menyebabkan tidak ada lagi batasan geografis maupun administratif dalam bidang ini sehingga diperlukan pengaturan dan penataan antar negara terkait dengan pemanfaatan telekomunikasi. Pada saat yang sama, penduduk Indonesia yang besar dan wilayah geografis yang luas merupakan pasar yang menjanjikan bagi investasi pada bidang pos dan telekomunikasi. Minat investasi pada sektor ini bukan hanya dari investor di dalam negeri namun juga dari luar negeri, termasuk pelaku-pelaku utama industri telekomunikasi dunia.

9.1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyajian data statistik bidang Kelembagaan Internasional ini meliputi kegiatan-kegiatan yang diikuti atau melibatkan Ditjen Pos dan Telekomunikasi dalam bentuk forum, seminar atau dalam kerangka kerjasama antar negara. Penyajian data ini meliputi :

- 1) Kegiatan kelembagaan Multilateral tahun 2008 – 2010
- 2) Kegiatan kelembagaan Regional tahun 2008 – 2010
- 3) Kegiatan kelembagaan Bilateral tahun 2008 – 2010
- 4) Kegiatan Investasi dan Pasar Internasional tahun 2008 – 2010
- 5) Kegiatan Pengelolaan Orbit dan Satelit tahun 2008 – 2010
- 6) Izin Hak Labuh Satelit yang dikeluarkan Ditjen Pos dan Telekomunikasi 2010

9.2. Kegiatan Kelembagaan Internasional

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Infomasi telah berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi Pos dan Telekomunikasi. Kegiatan tersebut dilakukan baik yang terkait dengan multilateral seperti berbagai seminar internasional dan konferensi, maupun kegiatan yang dibuat dalam kerangka kerjasama multilateral dan regional dalam rangka merespon perkembangan telekomunikasi dan informatika yang sangat cepat tanpa mengenal batas wilayah negara. Indonesia juga aktif melakukan kerjasama bilateral dengan negara lain untuk bidang pos maupun telekomunikasi. Kerjasama ini termasuk juga dalam membangun pemahaman bersama dalam hal-hal yang menyinggung dua negara dalam bidang teknologi informasi. Disamping itu juga keterlibatan atau melakukan kegiatan untuk yang terkait dengan investasi dan pasar internasional serta kegiatan pengelolaan dan orbit satelit.

Penyajian data dalam bidang kelembagaan internasional dibagi berdasarkan kegiatan-kegiatan yang diikuti atau diselenggarakan pada bidang-bidang kegiatan tersebut. Penyajian data dilakukan dengan membandingkan kegiatan dalam tiga tahun terakhir. Secara berurutan pembahasan dilakukan meliputi kegiatan multilateral, regional, bilateral, kerjasama investasi dan pemasaran dan pengelolaan orbit dan satelit.

9.2.1. Kegiatan Multilateral

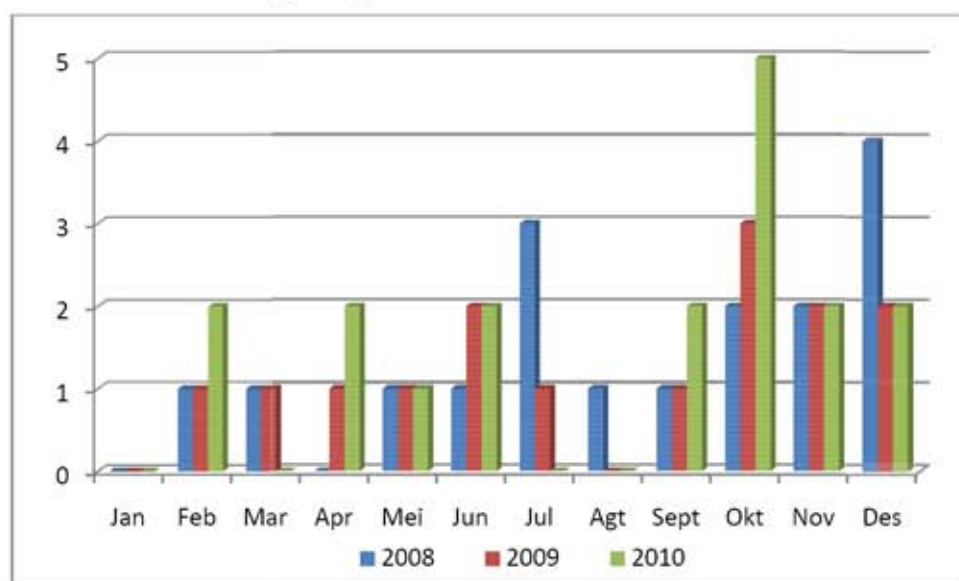
Selama tahun 2010, telah diikuti sebanyak 19 kegiatan yang bersifat multilateral dalam bidang pos dan telekomunikasi. Jumlah ini 26,7% lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Dari sisi sebaran kegiatannya, kegiatan Multilateral ini paling banyak terjadi pada kuartal terakhir terutama di bulan Juni sebanyak 6 kegiatan. Sebanyak 52% kegiatan multilateral ini berlangsung pada kuartal IV tahun 2010. Kegiatan-kegiatan multilateral yang banyak dilakukan adalah kegiatan-kegiatan pertemuan ITU (International Telecommunication Union) seperti *conference* maupun *council meeting*.

Tabel 9.1. Jumlah Kegiatan bersifat Multilateral Kelembagaan Internasional 2008 –2010

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jmlh
2008	0	1	1	0	1	1	3	1	1	2	2	4	17
2009	0	1	1	1	1	2	1	0	1	3	2	2	15
2010	0	2	0	2	1	2	0	0	2	6	2	2	19

Jika dibandingkan diantara tiga tahun pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, terdapat pola distribusi kegiatan yang berbeda. Kegiatan pada tahun 2009 lebih tersebar disepanjang bulan dan relatif merata dibanding kegiatan tahun 2010. Namun kegiatan pertemuan multilateral ini memang cenderung banyak dilakukan pada kuartal 4, baik pada 2008, 2009 maupun 2010. Sementara pada tahun 2008, kegiatan cukup menonjol pada tiap akhir semester. Secara rata-rata, kegiatan pada tahun 2010 memang lebih banyak setiap bulannya dibanding tahun 2008 dan 2009.

Gambar 9.1. Perkembangan Kegiatan Multilateral Tahun 2008- 2010



9.2.2. Kegiatan Regional

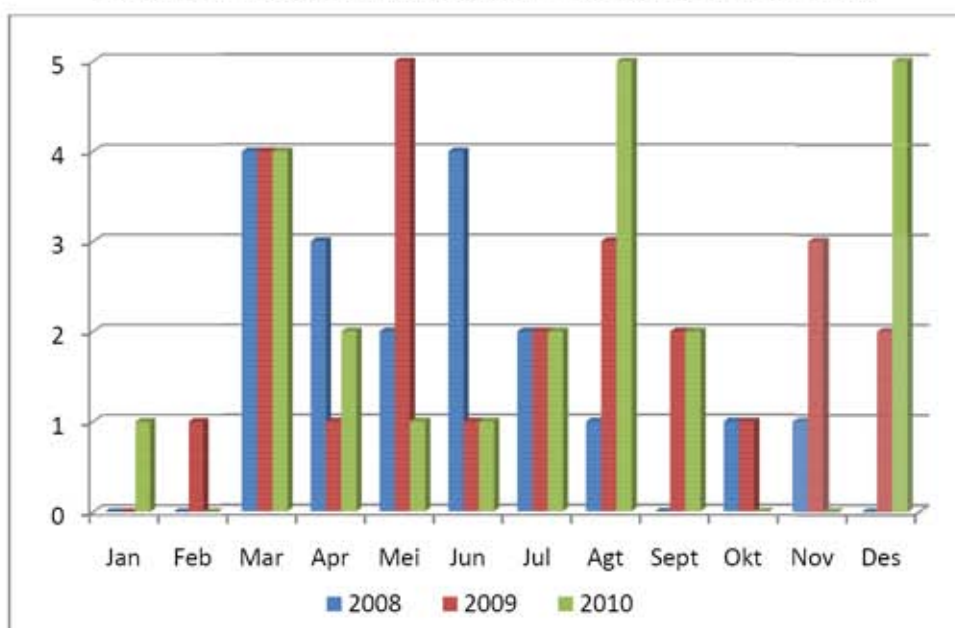
Kegiatan kelembagaan internasional pada tahun 2010 juga lebih banyak dibanding tahun sebelumnya yaitu sebanyak 26 kegiatan atau lebih banyak atau 4% lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Sementara jika dibanding kegiatan tahun 2008, kegiatan yang mencakup kerjasama dan forum regional ini pada tahun 2010 lebih banyak 44%. Pada tahun 2010, kegiatan yang bersifat regional ini adalah kegiatan *High Level Force HLTF ASEAN Conectivity*, *APT Preparatory Meeting For ITU PP10-4* dan *APT Conference Preparatory for WRC 2012 (APG20-12)*.

Tabel 9.2. Jumlah Kegiatan bersifat Regional Kelembagaan Internasional 2008- 2010

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jmlh
2008	0	0	4	3	2	4	2	1	0	1	1	0	18
2009	0	1	4	1	5	1	2	3	2	1	3	2	25
2010	1	0	4	2	1	1	2	5	2	0	0	8	26

Distribusi kegiatan pada tahun 2010 justru banyak terjadi pada bulan Agustus dan Desember. Secara total, jumlah kegiatan regional pada kuartal terakhir tidak lebih banyak pada kuartal-kuartal lainnya. Intensitas kegiatan skala regional ini pada tahun 2010 justru lebih banyak pada kuartal ke-3. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya, kegiatan yang bersifat regional ini paling banyak biasanya pada kuartal 2 atau kuartal 4.

Gambar 9.2. Perkembangan Kegiatan Regional Tahun 2008- 2010



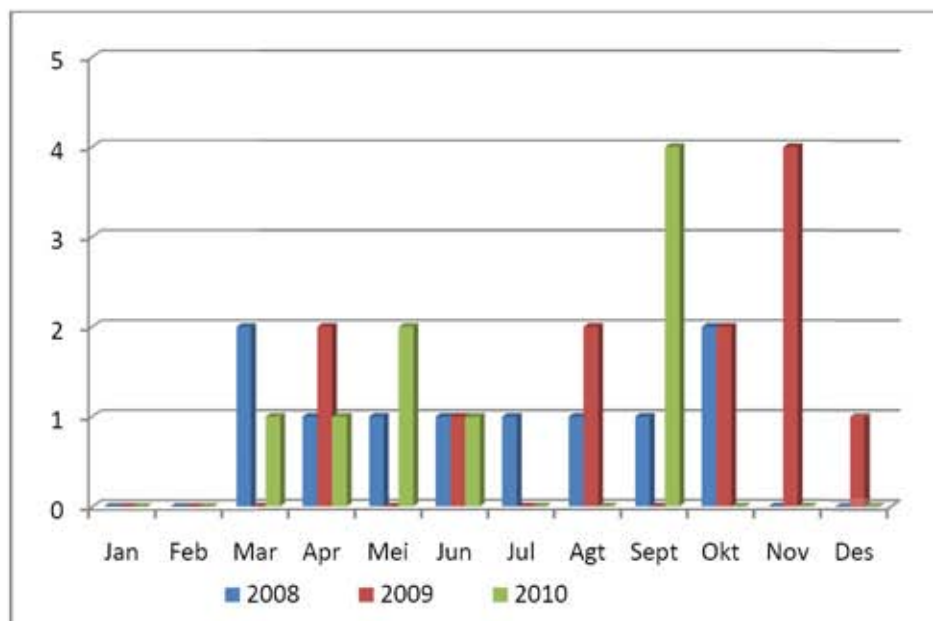
9.2.3. Kegiatan Bilateral

Kegiatan kelembagaan internasional pos dan telekomunikasi yang bersifat bilateral lebih sedikit diikuti pada tahun 2010 ini. Selama tahun 2010, hanya diikuti sembilan kegiatan kelembagaan internasional atau 25% lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya. Kegiatan bilateral yang diikuti pada tahun 2010 juga hanya berlangsung pada bulan September dalam bentuk kegiatan kerjasama bilateral dengan negara lain JCC meeting atau kegiatan dalam kerangka kerjasama BIMP-EAGA *Senior Official Meeting* (SOM). Dibanding kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, kegiatan yang bersifat bilateral pada tahun 2010 tidak terlalu tersebar sepanjang tahun. Pada tahun 2008, kegiatan yang bersifat bilateral ini lebih tersebar di antara bulan-bulan pada tahun 2008.

Tabel 9.3. Jumlah Kegiatan bersifat Bilateral Kelembagaan Internasional 2008- 2010

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jmlh
2008	0	0	2	1	1	1	1	1	1	2	0	0	10
2009	0	0	0	2	0	1	0	2	0	2	4	1	12
2010	0	0	1	1	2	1	0	0	4	0	0	0	9

Gambar 9.3. Perkembangan Kegiatan Bilateral Tahun 2008- 2010



9.2.4. Kegiatan Kerjasama Investasi dan Pemasaran

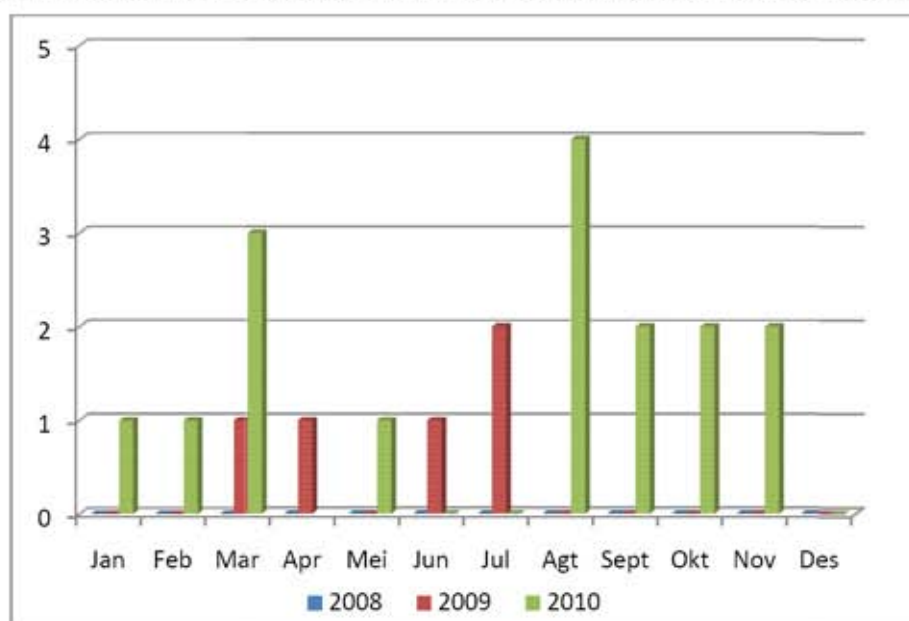
Kegiatan kelembagaan internasional dalam bidang Investasi dan pasar internasional pada tahun 2010 justru jauh lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya dan tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2010 ini telah diikuti sebanyak 16 kegiatan kerjasama investasi dan pemasaran atau lebih dari 300% meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya diikuti lima kegiatan. Dari total kegiatan tersebut, 64,5% berlangsung pada semester II tahun 2010, khususnya pada bulan Agustus sebanyak 4 kegiatan. Sementara pada semester I, hanya berlangsung sebanyak 6 kegiatan kerjasama pemasaran dan investasi..

Tabel 9.4. Jumlah Kegiatan terkait Investasi dan Pasar Internasional 2008- 2010

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jmlh
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	5
2010	1	1	3	0	1	0	0	4	2	2	2	0	16

Kegiatan-kegiatan kerjasama pemasaran dan investasi ini ini biasanya menyatu dengan kegiatan pertemuan multilateral dalam forum-forum pertemuan telekomunikasi internasional. Beberapa kegiatan yang terkait dengan kerjasama pemasaran dan investasi ini diantaranya adalah kegiatan APECTEL 42, ASEAN Economic Community (AEC) Council Meeting, atau dalam rangkaian kegiatan WTO.

Gambar 9.4. Perkembangan Kegiatan terkait Investasi dan Pasar Internasional Tahun 2008- 2010



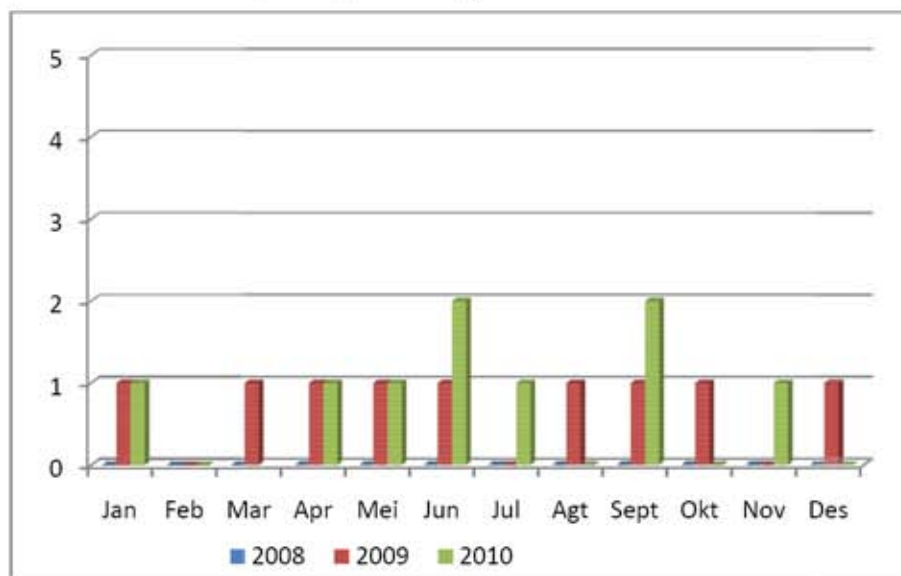
9.2.5. Kegiatan Pengelolaan Orbit dan Satelit

Kegiatan kelembagaan internasional yang bersifat kegiatan pengelolaan orbit dan satelit pada tahun 2010 telah diikuti sebanyak sembilan kegiatan. Jumlah ini sama dengan jumlah kegiatan terkait pengelolaan orbit dan satelit pada tahun sebelumnya. Kegiatan pengelolaan orbit dan satelit pada tahun 2010 sedikit lebih banyak berlangsung pada semester 1. Pada semester 2 hanya diikuti empat kegiatan pengelolaan orbit dan satelit yang pada bulan Juli, September dan November. Kegiatan forum pertemuan pengelolaan orbit dan satelit ini diantaranya terkait dengan pemanfaatan (utilisasi) spektrum frekuensi, monitoring spektrum frekuensi dan pengaturan orbit dan satelit.

Tabel 9.5. Jumlah Kegiatan Pengelolaan Orbit dan Satelit 2008- 2010

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jmlh
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	9
2010	1	0	0	1	1	2	1	0	2	0	1	0	9

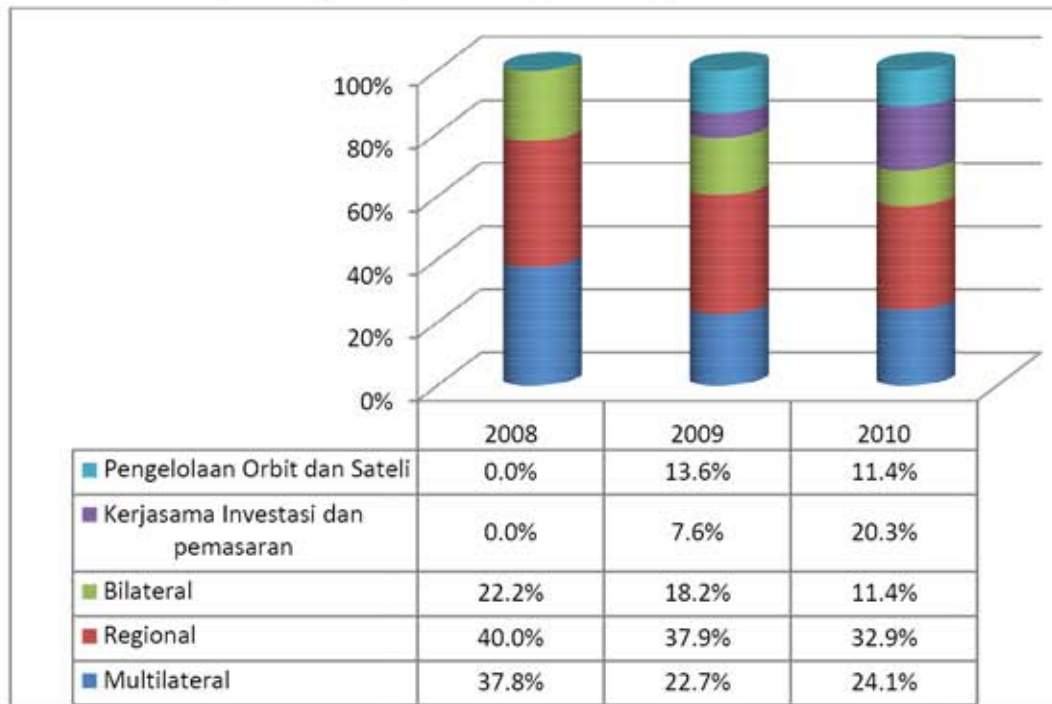
Gambar 9.5. Perkembangan Kegiatan Pengelolaan Orbit dan Satelit Tahun 2008- 2010



Komposisi diantara lima jenis kegiatan kelembagaan internasional menunjukkan bahwa pada tahun 2010, kegiatan kelembagaan internasional ini lebih terdistribusi merata diantara jenis kegiatan dibanding tahun sebelumnya. Proporsi terbesar adalah untuk kegiatan yang bersifat regional namun dengan proporsi hanya 32,9%. Sementara proporsi kegiatan lain

yang juga cukup besar adalah untuk kegiatan multilateral sebanyak 24,1% dan kegiatan kerjasama investasi dan pemasaran sebanyak 20,3%. Sementara pada tahun 2008 dan 2009, kegiatan lebih didominasi oleh kegiatan Regional yang proporsinya mencapai 37,9% pada tahun 2009 dan 40% pada tahun 2008. Kegiatan multilateral juga menunjukkan proporsi yang signifikan pada tahun 2008 yaitu sebesar 37% seperti ditunjukkan pada gambar 9.6..

Gambar 9.6. Komposisi kegiatan pada bidang Kelembagaan Internasional 2008- 2010



9.3. Penerbitan Izin Hak Labuh (*Landing Right*) Satelit

Kegiatan lain yang dilakukan dan menjadi tugas pokok dan fungsi Direktorat Kelembagaan Internasional adalah penerbitan izin hak labuh (*landing right*) satelit. Penerbitan izin ini diberikan kepada berbagai pihak yang menempatkan satelit dalam rangka kegiatan telekomunikasi serta negara yang menjadi administratornya. Penerbitan ini dilakukan dalam rangka pengaturan dan penataan penempatan satelit serta penggunaan frekuensi dari penempatan satelit pada wilayah orbit Indonesia.

Selama tahun 2010, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi telah mengeluarkan sepuluh ijin hak labuh kepada delapan perusahaan pengelola satelit telekomunikasi di Indonesia. Jumlah ini lebih banyak daripada ijin hak labuh yang diberikan selama satu tahun pada tahun 2009. *Landing right* / Hak Labuh adalah ijin yang diberikan oleh Ditjen Pos dan



Telekomunikasi kepada perusahaan yang menerima pancaran/koneksi dari satelit asing. Dengan kata lain operator tersebut menggunakan satelit milik asing. Sepuluh ijin ini diterbitkan untuk 13 satelit seperti ditunjukkan pada tabel 9.6. Administrator dari satelit tersebut berasal dari beberapa negara yaitu Tonga, China, Jepang, Inggris, Malaysia dan Amerika Serikat. China menjadi negara yang paling banyak menjadi administrator untuk satelit yang izin hak labuhnya dikeluarkan pada tahun 2010 ini.

Tabel 9.6. Izin Hak Labuh yang Dikeluarkan oleh Ditjen Pos dan Telekomunikasi 2010

No	Nama Perusahaan	Satelit		Slot Orbit	Administrasi
		Nama Filing	Nama Komersial		
1	PT. CIPTA SKYNINDO	TONGASAT AP-3 TANGSAT-C/KU-3	APSTAR-V TELSTAR-18	138 E 62 E	TONGA
2	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA	CHINASAT-6,DFH-3AOB NSTAR-A2	SINOSAT-1 JCSAT-5A	110,5 E 132 E	CHINA JEPANG
3	PT. DINI NUSA KUSUMA	INMARSAT-4-A43.5E	INMARSAT-4-f1	143.5 BT	INGGRIS
4	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA	APSTAR-142E APSTAR-142E-R	APSTAR-1-3S JCSAT-5A	142 BT	CHINA
5	PT. TELENET	NSTAR-A2	JCSAT-5A	132E	JEPANG
6	PT. PATRA TELEKOMUNIKASI	MEASAT-1	MEASAT-3A	91SE	MALAYSIA
7	PT. KARYA MEGAH ADIJAYA	ASIASAT-E, ASIASAT-EK-1	ASIASAT-35	91.SE	CHINA
		ASIASAT-EKS, ASIASAT-EKX	INTELSAT-8	166E	USA
		MEASAT-1	TELSTAR-10/APSTAR-2R	76.SE	CHINA
8	PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK	USASAT-14K- USASAT-60A	GE-23	172E	USA

Selain menerbitkan ijin hak labuh dari satelit asing yang digunakan perusahaan telekomunikasi Indonesia yang menerima koneksi/pancarasa satelit asing tersebut, Ditjen Pos dan Telekomunikasi juga telah menerbitkan filling satelit bagi perusahaan untuk satelit yang dimilikinya untuk kebutuhan usaha di sektor telekomunikasi. Selama tahun 2010, Ditjen Pos dan Telekomunikasi telah menerbitkan filling satelit bagi empat perusahaan untuk satelit yang dimiliki dan dikelolanya. Keempat perusahaan tersebut adalah PT. PSN yang mengelola 5 filling satelit, PT. Telkom yang mengelola 16 filling satelit, PT. Indosat yang mengelola 6 filling satelit dan PT. MCI yang mengelola 7 filling satelit. Filling satelit yang sama dapat memiliki nama satelit yang berbeda di Orbit. Untuk nama filling Palapa B3 dan

Palapa C3 yang dikelola PT. Telkom misalnya memiliki nama satelit Telkom-1 (dengan 36 xpdr) dan Telkom-2 (dengan 24 xpdr).

Jumlah filling satelit yang cukup banyak ini menunjukkan kemampuan perusahaan telekomunikasi Indonesia yang semakin banyak dan mampu mengelola satelit yang cukup banyak untuk kebutuhan bisnis dibidang telekomunikasi yang dijalannya. Secara implisit, filing satelit yang banyak ini juga menunjukkan semakin berkembangnya industri telekomunikasi Indonesia dengan sangat cepat.

Tabel 9.7. Rekapitulasi Filling Satelit dari Satelit yang dimiliki dan dikelola Perusahaan Telekomunikasi Indonesia.

OPERATOR	SLOT ORBIT (BT)	NAMA SATELIT DI ORBIT	NAMA FILING	BAND	JMLH TRANSP.
PT.PSN	123	GARUDA 1	GARUDA-2	L-band (service link) Ext C-band (feeder link)	Specific
	146	PALAPA PACIFIC/AGILA-2 (54 xpdr)	PALAPA PAC-C 146E	C-band	30 xpdr (24 xpdr Std C-band, 6 xpdr Ext C-band)
			PALAPA PAC-KU 146E	Ku-band	24
	80.5	[GARUDA BACKUP]	GARUDA-4A	L-band (service link) Ext C-band (feeder link)	Specific
	144	PALAPA PAC-3R (PLAN)	PALAPA PAC-3R	C-band	38
PT.TELKOM	108	TELKOM-1 (36 xpdr)	PALAPA-B1	C-band	24
			PALAPA-C2		
			PALAPA-B1	C Band (TT&C)	-
			PALAPA-B1-EC	Extended C-band	12
	118	TELKOM-2 (24 xpdr)	PALAPA-B3	C-band	24
			PALAPA-C3		
			PALAPA-B3-EC	Extended C-band	12
			PALAPA-B3 TT&C	C-band (TT&C)	-
			PALAPA-B3 MOD-1	C-band (TT&C)	-
	118	TELKOM-3 (PLAN) (42 xpdr)	PALAPA-B3	C-band	24
			PALAPA-C3		
			PALAPA-B3-EC	Extended C-band	8

OPERATOR	SLOT ORBIT (BT)	NAMA SATELIT DI ORBIT	NAMA FILING	BAND	JMLH TRANSP.
			PALAPA-B3 TT&C	C-band (TT&C)	-
			PALAPA-B3 MOD-1	C-band (TT&C)	-
			PALAPA-C3-K	KU-BAND	10
			TELKOM-3EK	Extended C-band KU-BAND	-
PT.INDOSAT	113	PALAPA-D	PALAPA-C1	Standard C	24
				Extended C	11
				Standard Ku	2
				Extended Ku	2
			PALAPA-C1-K	Extended Ku	8
				Standard Ku	12
			PALAPA-B2	Standard C	12
	150.5	PALAPA-C2	PALAPA-C4	Standard C	24
				Extended C	11
				Standard Ku	2
				Extended Ku	2
			PALAPA-C4-A	Standard C	24
				Extended C	12
PT. MCI	107.7E	INDOSTAR-1	INDOSTAR-1A	S-Band Band band	X-5 C-Txp Band S-
			INDOSTAR-1	S-Band Band band	X-5 C-Txp Band S-
	107.7E	INDOSTAR-2	INDOSTAR-107.7E	S - Band Band Band	X5 C - Txp Band S-
			INDOSTAR-107E-K	Ku - Band	10 Txp Band Txp S- 22 Ku-Band
	110E		INDOSTAR-110E	S - Band - Band	X C - 5 Txp S-Band



OPERATOR	SLOT ORBIT (BT)	NAMA SATELIT DI ORBIT	NAMA FILING	BAND	JMLH TRANSP.
				Band	
			INDOSTAR-110E-K	Ku - Band	10 Txp S- Band 22 Txp Ku-Band
	118E		INDOSTAR-118E	S - Band - Band Band	X C - 5 Txp Band S-

Bab 10

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Penyajian data statistik pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pos dan Telekomunikasi mencakup penyajian data pada tiga Unit pelaksana teknis yang ada Ditjen Pos dan Telekomunikasi dengan fungsi teknis yang berbeda-beda. Ketiga UPT tersebut adalah Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Balai Teknologi Informasi Pedesaan (BTIP) dan UPT Monitor Spektrum frekuensi radio yang mencakup Balai/Loka/Pos Monitoring di daerah-daerah yang melakukan monitoring penggunaan frekuensi di daerah (sebanyak 35 UPT).

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Peranan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dalam proses Pengujian alat/perangkat telekomunikasi adalah melakukan pengujian alat/perangkat telekomunikasi berbasis radio dan non radio, *Electromagnetic Compatibility* alat/perangkat telekomunikasi dan pelayanan kalibrasi perangkat telekomunikasi serta Jasa Penyewaan Alat. Produk atau hasil akhir dari pengujian ini adalah bukti hasil pengujian alat yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengujian perangkat Telekomunikasi (RHU). BBPPT dalam melaksanakan pengujian alat/perangkat telekomunikasi mengacu pada Persyaratan Teknis Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (*Technical Specification Regulation*), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Acuan Internasional seperti ISO, ETSI, RR, ITU, IEC.

Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan (BTIP) adalah balai yang dibentuk dalam rangka pengelolaan pembiayaan penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika pedesaan yang dilaksanakan melalui pihak ketiga. BTIP bertujuan untuk mempercepat pemerataan penyediaan akses dan layanan telekomunikasi dan informatika pedesaan sebagai bentuk tanggungjawab pelayanan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pembentukan BTIP didasari atas azas adil dan merata dalam pelayanan

telekomunikasi. Azas adil dan merata, bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasil dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata. Namun demikian seiring dengan meningkatnya kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi BTIP dalam rangka penyediaan akses layanan dan pengelolaan pembiayaan telekomunikasi dan informatika, maka pada tanggal 19 Nopember 2010 berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.KOMINFO/11/2010 organisasi dan tata kerja BTIP berubah menjadi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI).

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtangga-an. Salah satu tugas penting dari UPT Monitoring Spektrum frekuensi adalah Koordinasi monitoring spektrum frekuensi radio, penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan pelayanan/pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio.

10.1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyajian data pada bidang Unit Pelaksana Teknis ini dibagi untuk masing-masing UPT yang akan dipaparkan pada bagian ini.

10.1.1. Ruang Lingkup Penyajian Data BBPPT

Data yang dimunculkan dalam statistik bidang pengujian perangkat telekomunikasi berupa rekapitulasi hasil uji (RHU) dan Surat Perintah Pembayaran (SP2) atas pengujian yang telah dilakukan. Kedua jenis instrumen ini diterbitkan oleh BBPPT sebagai pelaksana pengujian perangkat di Ditjen Postel. Setiap alat/perangkat telekomunikasi yang masuk ke Indonesia wajib dilakukan pengujian, sebelum digunakan dan diperdagangkan di wilayah Indonesia dengan informasi pengujian yang terdiri dari nama pemohon, nama alat, merek/type, asal



negara pembuat dan informasi nomor dan tanggal RHU. Pengujian dilakukan terhadap setiap perangkat yang diajukan oleh pemohon pengujian yang berbeda.

Pada bagian pertama, data yang disajikan dan dianalisis adalah data rekapitulasi hasil uji atas pengujian yang dilakukan terhadap perangkat-perangkat telekomunikasi oleh BBPPT. Penyajian meliputi jumlah pengujian bulanan dan tahunan dan jumlah perangkat yang diuji menurut kelompok jenis perangkat dan negara asal perangkat. Pada bagian kedua penyajian data adalah besarnya penagihan dari jasa pengujian yang tercantum dalam Surat Perintah Pembayaran (SP2). Data yang digunakan berasal dari data penanganan SP2 yang menyediakan informasi nama permohonan, nama alat, merek/type, negara pabrik pembuat, tanggal diterima, jenis perangkat, besarnya pembayaran dan waktu pembayaran. Penyajian data SP2 juga akan dilakukan menurut bulan, kelompok jenis perangkat dan negara asal perangkat. Secara keseluruhan, lingkup penyajian data statistik pengujian perangkat ini.

- 1) RHU bulanan Januari-Desember tahun 2010 menurut negara asal perangkat
- 2) RHU bulanan Januari-Desember tahun 2010 menurut kelompok jenis perangkat
- 3) SP2 bulanan Januari-Desember tahun 2010 menurut negara asal perangkat
- 4) SP2 bulanan Januari-Desember tahun 2010 menurut kelompok jenis perangkat

10.1.2. Ruang Lingkup Penyajian Data BTIP

Data-data yang disajikan dalam statistik Balai Teknologi Informasi Pedesaan meliputi data-data yang menunjukkan kinerja BTIP dalam penyebaran dan pemerataan telekomunikasi dan teknologi informasi ke daerah-daerah di Indonesia. Indikator kinerja tersebut berasal dari program-program yang dijalankan oleh BTIP dalam mencapai tujuan pemerataan tersebut yaitu program Desa Berdering (Dering), Desa Pakai Internet (Desa Pinter) dan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK). Penyajian data meliputi :

- 1). Perkembangan jumlah Desa Berdering menurut propinsi tahun 2010
- 2). Perkembangan jumlah Desa Pinter menurut propinsi tahun 2010
- 3). Perkembangan jumlah kecamatan dalam program PLIK menurut propinsi tahun 2010

10.1.3. Ruang Lingkup Penyajian Data UPT Monitoring Spektrum Frekuensi

Penyajian data monitoring dan pelanggaran yang dilakukan UPT monitoring spektrum frekuensi merupakan wujud dari hasil pengaturan frekuensi oleh Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio sebagai regulator. Pengaturan dan penataan frekuensi dilakukan untuk menghindari terjadinya interferensi baik interferensi antar sistem maupun interferensi antar pengguna dalam suatu sistem. Pengaturan dan penataan frekuensi juga dilakukan untuk tujuan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi sehingga tidak terjadi pemborosan dalam pemakaiannya. Data yang dimunculkan dalam statistik UPT Monitoring spektrum frekuensi ini meliputi :

- 1) Monitoring penertiban penggunaan frekuensi oleh UPT Tahun 2009 dan 2010;
- 2) Tindakan terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi oleh UPT Tahun 2009 dan 2010.

10.2. Konsep dan Definsi

Beberapa konsep dan definisi yang terdapat dalam pemaparan data tentang UPT Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, UPT Balai Teknologi Informasi Perdesaan dan UPT yang meliputi UPT monitoring spektrum frekuensi, adalah sebagai berikut :

- Spektrum Frekuensi Radio adalah susunan pita frekuensi radio yang mempunyai frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz sebagai satuan getaran gelombang elektromagnetik yang merambat dan terdapat dalam dirgantara (ruang udara dan antariksa);
- Proses pengujian adalah proses pengujian terhadap perangkat telekomunikasi di Indonesia oleh BBPPT. Proses ini diawali dengan pengajuan oleh pemohon (pemilik alat) lengkap dengan persyaratan yang dibutuhkan ke BBPPT. Permohonan selanjutnya diperiksa kelengkapan persyaratan pengujian. Setelah dinyatakan lengkap, pengujian terhadap alat/perangkat dilakukan sesuai dengan jenis alatnya dan laboratorium atau saran pengujian yang tersedia di BBPPT.
- Rekapitulasi Hasil Uji (RHU) adalah rekapitulasi dari hasil pengujian terhadap perangkat yang diuji oleh UPT BBPPT dan didokumentasikan sebagai data untuk disampaikan ke Direktorat Standarisasi.
- Surat Perintah Pembayaran (SP2) adalah surat yang memerintahkan kepada pemilik perangkat yang diuji di UPT BBPPT untuk membayar biaya pelaksanaan pengujian



sesuai dengan tarif yang diberlakukan sesuai dengan jenis pengujian dan fungsi alat yang diuji. Pendapatan dari pelaksanaan pengujian merupakan penerimaan negara bukan pajak di Ditjen Postel.

- Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation/USO) bidang Telekomunikasi adalah kewajiban pelayanan dari pemerintah di bidang telekomunikasi dalam rangka mendukung peningkatan akses dan keterjangkauan masyarakat terhadap jaringan telekomunikasi khususnya telepon.
- Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) adalah wilayah-wilayah yang menjadi sasaran dari program USO dibidang telekomunikasi di seluruh Indonesia. Propinsi-propinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta menjadi wilayah sasaran kebijakan dan program USO oleh pemerintah yang dibagi dalam 11 WPUT dengan pembagian :

WPUT I	: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat
WPUT II	: Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung
WPUT III	: Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung
WPUT IV	: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah
WPUT V	: Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan
WPUT VI	: Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah
WPUT VII	: Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara
WPUT VIII	: Papua, Papua Barat
WPUT IX	: Maluku, Maluku Utara
WPUT X	: Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
WPUT XI	: Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur.

10.3. UPT Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi

Balai Besar Pengujian Perangkat telekomunikasi (BBPPT) memiliki tugas untuk melakukan pengujian terhadap perangkat telekomunikasi yang masuk dan akan dipergunakan di wilayah Indonesia. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan perangkat tersebut aman dan layak untuk digunakan di wilayah hukum Indonesia. Hasil pengujian perangkat tersebut terangkum dalam rekapitulasi hasil uji yang diklasifikasi menurut merek perangkat, jenis perangkat, negara asal perangkat dan waktu pengujian.

10.3.1. Rekapitulasi Hasil Pengujian

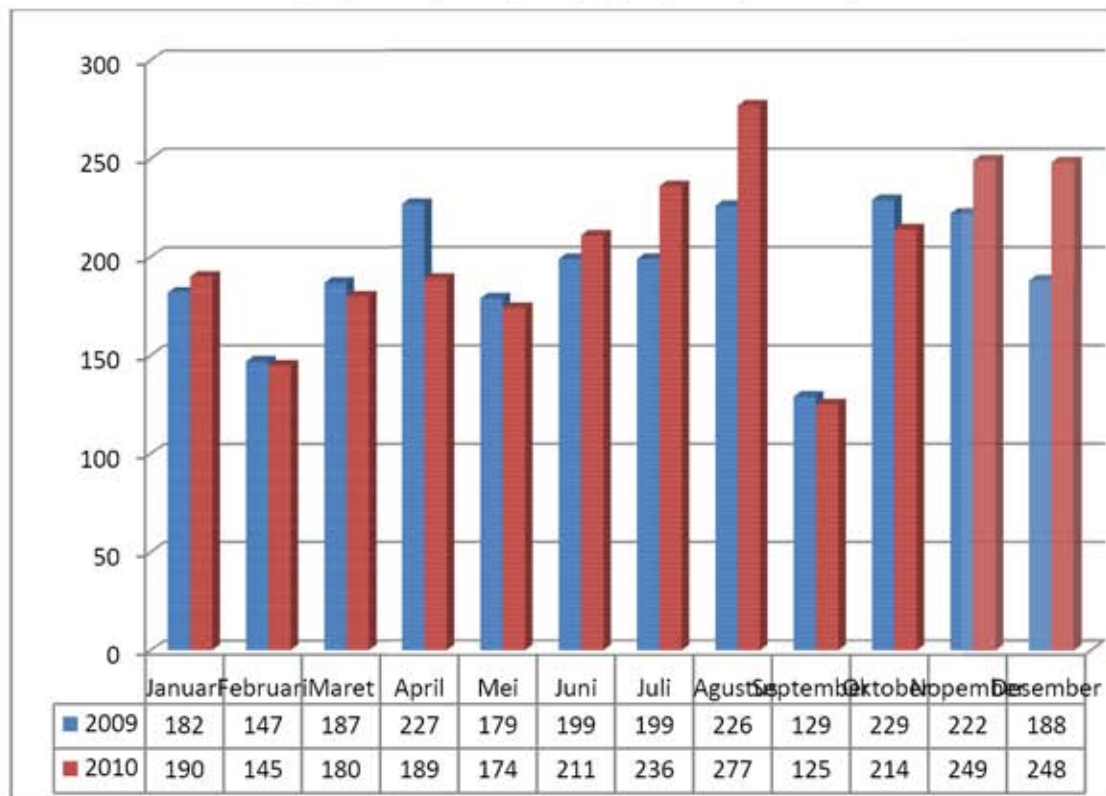
Pada tahun 2010, berdasarkan data rekapitulasi hasil pengujian telah dilakukan pengujian terhadap 2280 perangkat yang pengujian perangkat tersebut tersebar pada 12 bulan. Dilihat dari distribusinya, pengujian perangkat pada tahun 2010 paling banyak berlangsung pada semester IV dimana 30,4% pengujian berlangsung pada kuartal IV tahun 2010 ini. Pengujian paling banyak terjadi pada bulan Juli dan Oktober yaitu sebanyak 252 dan 248 pengujian atau 11,1% dan 10,9% dari total pengujian yang dilakukan pada tahun 2010. Jumlah pengujian perangkat pada tahun 2010 ini meningkat 7,4% dari tahun sebelumnya.

Tabel 10.1. Rekapitulasi Hasil Pengujian Perangkat menurut Negara Asal Tahun 2010

Negara	Bulan												Total
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
China	75	82	122	81	87	128	160	177	77	144	171	150	1454
Jepang	1	12	13	11	5	8	13	7	3	15	13	8	109
Amerika Serikat	15	4	14	9	8	7	10	4	5	10	5	7	98
Taiwan	9	8	7	9	2	6	12	9	1	14	11	7	95
Korea Selatan	5	4	8	5	3	6	1	4	7	20	6	1	70
Malaysia	3	1	7	3	6	10	8	3	5	9	2	0	57
Indonesia	2	3	7	7	0	9	4	2	0	3	4	3	44
Italia	2	2	7	3	5	2	3	6	3	3	6	1	43
Jerman	3	4	5	2	7	0	0	5	0	4	1	6	37
Thailand	0	12	4	1	0	1	1	3	1	4	1	0	28
Kanada	4	0	0	3	2	3	1	3	0	6	2	1	25
Mexico	2	1	2	1	2	1	8	3	0	2	2	0	24
Perancis	0	1	1	0	0	1	4	5	0	0	0	11	23
Inggris	0	3	5	2	1	1	2	3	0	2	0	3	22
Lainnya	15	12	12	8	15	13	25	13	3	12	7	16	151
Jumlah	136	149	214	145	143	196	252	247	105	248	231	214	2280

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, secara rata-rata pengujian perangkat pada tahun 2010 setiap bulannya memang lebih banyak daripada pengujian perangkat pada tahun 2009. Namun dari gambar 10.1 terlihat bahwa jika dibandingkan antar semester, jumlah pengujian perangkat pada semester I tahun 2009 lebih banyak daripada jumlah pengujian perangkat pada semester 1 tahun 2010. Peningkatan jumlah pengujian perangkat pada tahun 2010 baru terjadi pada semester 2, khususnya pada kuartal terakhir. Pada dua bulan pertama semester 2, jumlah pengujian perangkat pada tahun 2010 ini bahkan jauh lebih banyak dibanding periode yang sama tahun 2010.

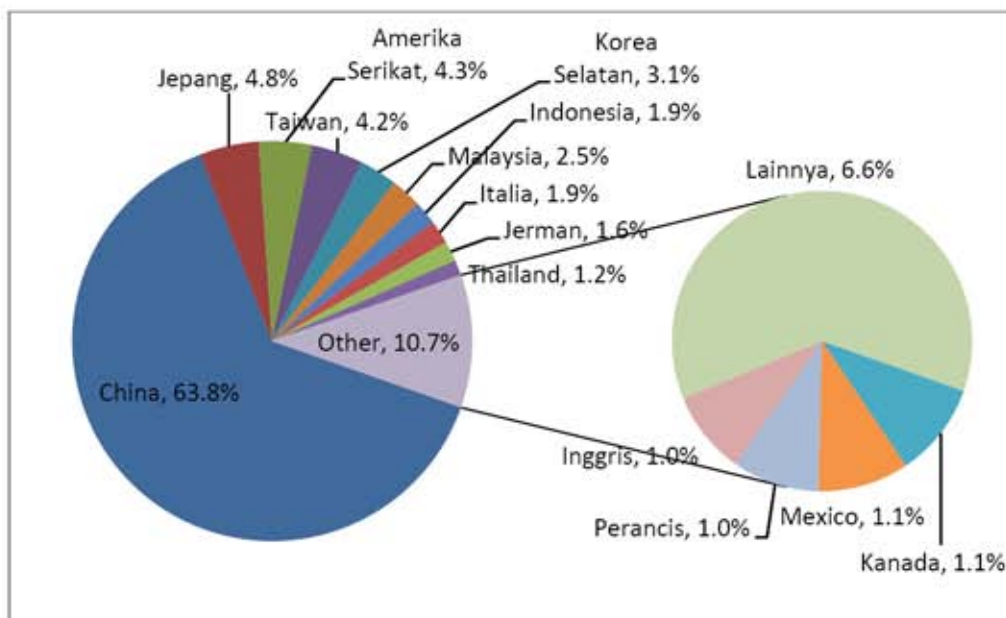
Gambar 10.1. Perbandingan jumlah perangkat yang diuji setiap bulannya Tahun 2009 dan 2010



Distribusi perangkat yang diuji yang ditunjukkan pada gambar 10.2 memperlihatkan dominasi China yang masih kuat dalam perangkat telekomunikasi yang masuk ke Indonesia dan dilakukan pengujian. Dari total pengujian perangkat yang dilakukan tahun 2010, sebanyak 63,8% adalah perangkat telekomunikasi yang berasal dari China. Proporsi ini jauh lebih besar dibanding perangkat dari negara lainnya. Negara terbesar berikutnya yang perangkatnya masuk dan diuji di Indonesia pada tahun 2010 adalah Jepang dan Amerika Serikat, namun dengan proporsi hanya 4,8% dan 4,3%. Tidak ada negara lain yang proporsi jumlah perangkat telekomunikasi yang masuk dan diuji di Indonesia yang lebih dari 5%. Hal ini menunjukkan sangat dominannya perangkat telekomunikasi asal China yang masuk ke Indonesia. Bahkan untuk perangkat teknologi tinggi, proporsi perangkat telekomunikasi asal China yang masuk Indonesia bisa menjadi merupakan salah satu yang tertinggi dibanding perangkat teknologi tinggi lainnya. Hal ini diduga terkait dengan jenis perangkat telekomunikasi yang diuji yang sebagian besar adalah perangkat telekomunikasi yang bersifat *consumers product* seperti telepon seluler, modem dan perangkat pendukungnya. Untuk jenis *consumer product* ini, perangkat asal China memang banyak mendominasi pasar.

Diantara perangkat-perangkat telekomunikasi yang masuk ke Indonesia dan dilakukan pengujian, terdapat pula perangkat-perangkat telekomunikasi dari dalam negeri dan dari negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Namun proporsi jumlah perangkat dari dalam negeri dan negara-negara tetangga masih sangat kecil dibanding total perangkat yang diuji. Proporsi perangkat telekomunikasi asal Malaysia yang diuji hanya 2,5% dan perangkat asal Thailand hanya 1,2%. Sementara perangkat telekomunikasi dari dalam negeri yang diuji di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi hanya 1,9% dari total perangkat telekomunikasi yang diuji pada tahun 2010.

Gambar 10.2. Komposisi perangkat yang Diuji menurut Negara Asal Tahun 2010



Dilihat dari jenis perangkat yang diuji, jenis perangkat yang bersifat *consumer product* seperti telepon seluler, WLAN dan modem menjadi perangkat-perangkat telekomunikasi yang paling banyak dilakukan pengujian di Indonesia pada tahun 2010. Selama tahun 2010, terdapat 981 jenis telepon seluler yang dilakukan pengujian di UPT Balai Pengujian perangkat ini. Sementara untuk jenis WLAN (termasuk WLAN dengan *bluetooth* dan WLAN+router) jumlahnya mencapai 180, sedangkan untuk modem dengan berbagai jenis dan tambahan perangkat pendukungnya, jumlahnya mencapai 142 buah. Besarnya jumlah perangkat berbentuk telepon seluler yang masuk dan diuji menunjukkan Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial untuk telepon seluler karena jumlah penduduk yang

besar dan perilaku konsumennya yang cenderung mengikuti trend yang berkembang termasuk dalam penggunaan perangkat telepon seluler. Dengan kondisi demikian, banyak penawaran jenis telepon seluler yang masuk dengan berbagai variasi jenis dan untuk berbagai segmen konsumen.

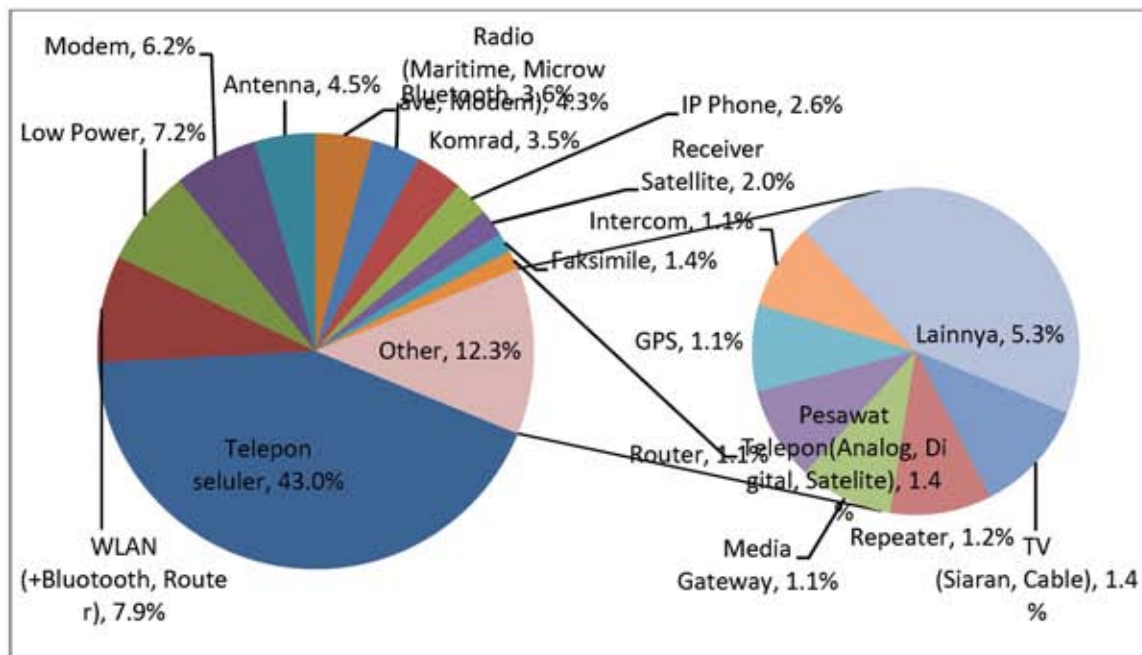
Tabel 10.2. Rekapitulasi Hasil Pengujian Perangkat menurut Jenis Perangkat Tahun 2010

Jenis Perangkat	Bulan												Total
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
Telepon seluler	64	50	71	42	66	95	128	122	26	95	124	98	981
WLAN (+Bluetooth, Router)	7	8	20	15	3	15	20	23	8	28	14	19	180
Low Power	6	11	15	4	6	15	17	8	17	31	25	9	164
Modem	7	10	21	9	17	11	6	15	6	4	15	21	142
Antenna	2	6	15	25	3	5	7	12	2	3	5	17	102
Radio (Maritime, Microwave, Modem)	11	13	16	14	9	4	6	6	0	5	6	7	97
Bluetooth	8	6	3	7	4	7	8	9	2	16	6	7	83
Komrad	1	10	6	5	6	15	6	7	6	10	3	4	79
IP Phone	6	9	7	3	1	3	8	5	2	3	7	6	60
Receiver Satellite	1	0	1	5	1	4	6	6	3	12	3	4	46
Faksimile	2	8	8	0	2	2	0	4	3	2	2	0	33
Pesawat Telepon(Analog, Digital, Satelite)	2	1	4	0	1	2	3	2	10	1	3	3	32
TV (Siaran, Cable)	1	5	3	2	2	1	1	7	4	2	2	2	32
Repeater	3	2	6	0	3	2	1	4	1	2	1	3	28
Media Gateway	2	0	3	6	7	1	2	3	0	2	0	0	26
Router	5	0	4	1	1	2	9	1	1	2	0	0	26
GPS	1	4	4	0	2	3	1	5	1	0	3	0	24
Intercom	0	0	0	0	0	0	0	0	7	13	3	1	24
Lainnya	7	6	7	7	9	9	23	8	6	17	9	13	121
Total	136	149	214	145	143	196	252	247	105	248	231	214	2280

Komposisi perangkat telekomunikasi yang diuji menurut jenis perangkat pada tahun 2010 seperti diperlihatkan oleh gambar 10.3, menunjukkan besarnya proporsi untuk telepon seluler. Proporsi jenis perangkat telekomunikasi yang diuji pada tahun 2010 untuk telepon seluler mencapai 43%, jauh lebih besar dibandingkan dengan jenis perangkat telekomunikasi lainnya. Untuk jenis WLAN dengan berbagai variasi dan tambahan

perlengkapannya, komposisinya hanya 7.9% , sedangkan untuk *Low Power* proporsinya hanya 7,2%.

Gambar 10.3. Komposisi perangkat yang Diuji menurut Jenis Perangkat Tahun 2010

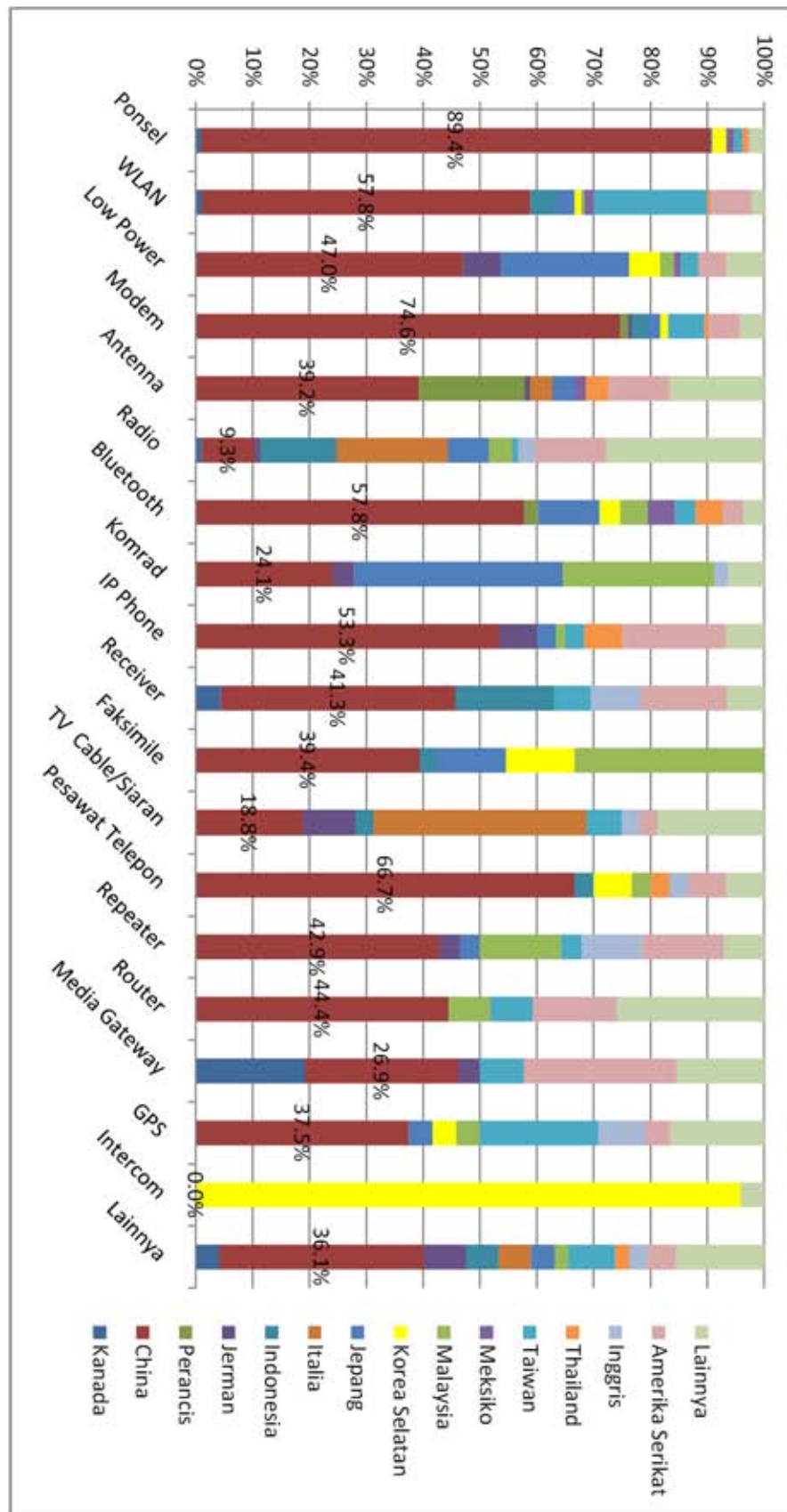


Jika dilihat dari distribusinya menurut perangkat dan negara asal, untuk jenis telepon seluler yang paling banyak diuji adalah perangkat telekomunikasi asal China. Perangkat telekomunikasi asal China bahkan mendominasi hampir untuk semua jenis perangkat telekomunikasi yang diuji terutama untuk jenis *consumers product* seperti telepon seluler, WLAN dan pesawat telepon. Hanya untuk beberapa jenis perangkat telekomunikasi saja yang tidak didominasi perangkat asal China seperti untuk Radio maritime/microwave, TV Cable/siaran, Radio komunikasi (Komrad) dan Intercom. Untuk intercom, proporsi terbesar perangkat yang masuk berasal dari Korea Selatan. Untuk perangkat radio maritime/microwave dan TV Cable/siaran, perangkat yang paling banyak dilakukan pengujian adalah perangkat asal negara Italia dan , sedangkan untuk Komrad adalah perangkat asal Jepang.

Hampir 90% telepon seluler yang diuji di BBPPT adalah telepon seluler yang berasal dari China. Proporsi ini menegaskan dominanya produk yang bersifat *consumers product* termasuk dalam bidang telekomunikasi yang membanjiri pasar Indonesia. Jumlah penduduk yang besar dan konsumen yang cenderung mengikuti trend menjadikan Indonesia pasar yang potensial untuk produk tersebut

Tabel 10.3. Jumlah perangkat yang diuji menurut jenis perangkat dan negara asal tahun 2010

Jenis Perangkat	Negara Asal															Total
	Kanada	China	Perancis	Jerman	Indonesia	Italia	Jepang	Korea Selatan	Malaysia	Meksiko	Taiwan	Thailand	Inggris	Amerika Serikat	Lainnya	
Telepon seluler	10	877	0	2	1	1	1	24	0	13	14	10	2	0	26	981
WLAN	2	104	0	0	8	0	6	2	1	3	36	1	0	13	4	180
Low Power	0	77	0	11	0	0	37	9	4	2	5	0	0	8	11	164
Modem	0	106	2	1	4	0	3	2	0	0	9	1	0	8	6	142
Antenna	0	40	19	1	0	4	4	0	0	2	0	4	0	11	17	102
Radio maritime/microwave	1	9	0	1	13	19	7	0	4	0	1	0	3	12	27	97
Bluetooth	0	48	2	0	0	0	9	3	4	4	3	4	0	3	3	83
Komrad	0	19	0	3	0	0	29	0	21	0	0	0	2	0	5	79
IP Phone	0	32	0	4	0	0	2	0	1	0	2	4	0	11	4	60
Receiver	2	19	0	0	8	0	0	0	0	0	3	0	4	7	3	46
Faksimile	0	13	0	0	1	0	4	4	11	0	0	0	0	0	0	33
TV Cable/Siaran	0	6	0	3	1	12	0	0	0	0	2	0	1	1	6	32
Pesawat Telepon	0	20	0	0	1	0	0	2	1	0	0	1	1	2	2	30
Repeater	0	12	0	1	0	0	1	0	4	0	1	0	3	4	2	28
Router	0	12	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	4	7	27
Media Gateway	5	7	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	7	4	26
GPS	0	9	0	0	0	0	1	1	1	0	5	0	2	1	4	24
Intercom	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	1	24
Lainnya	5	44	0	9	7	7	5	0	3	0	10	3	4	6	18	122
Total	25	1454	23	37	44	43	109	70	57	24	95	28	22	98	151	2280





10.3.2. Surat Perintah Pembayaran (SP2) Pengujian

Sebagai proses lanjutan dari pengujian yang dilakukan, pihak Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi mengeluarkan surat perintah pembayaran (SP2) kepada pemohon pengujian atas biaya pengujian yang sudah dilakukan. Penerimaan atas pembayaran pengujian ini menjadi penerimaan negara bukan pajak untuk Ditjen Pos dan Telekomunikasi yang masuk ke kas negara. Selama tahun 2010, telah diterbitkan 2437 SP2 dengan nilai total pembayaran mencapai Rp. 15,95 Milyar. Dari distribusi pembayaran yang diterima, pembayaran paling banyak diterima pada bulan Desember yang mencapai Rp. 1,677 Milyar.

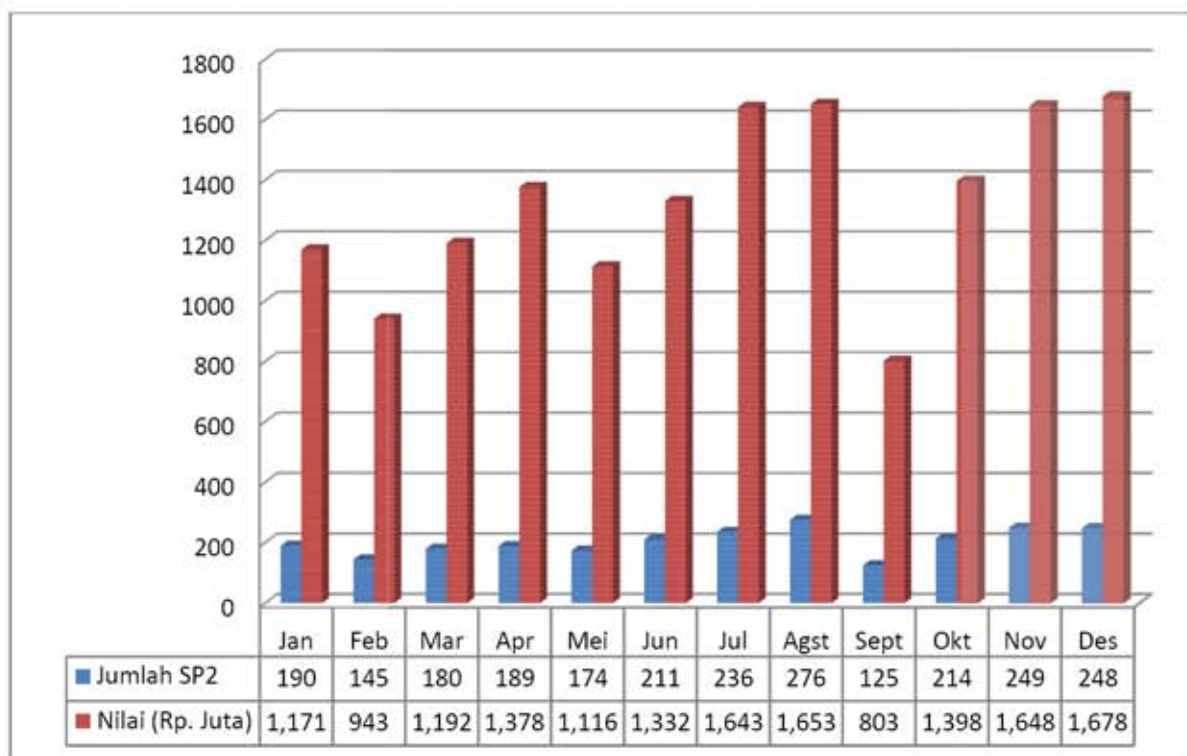
Jumlah SP2 yang diterbitkan tidak selalu sebanding dengan jumlah pembayaran yang diterima, tergantung pada jenis perangkat yang diuji pada bulan tersebut. Meskipun SP2 yang diterbitkan paling banyak dikeluarkan pada bulan Agustus, nilai pembayaran SP2 paling besar justru pada bulan Desember. Pada bulan Juli, meskipun jumlah SP2 tidak terlalu besar, namun nilai pembayaran SP2 yang diterima termasuk cukup besar. Nilai rata-rata pembayaran SP2 yang paling besar terdapat pada bulan April dimana rata-rata nilai pembayaran setiap SP2 yang diterbitkan sebesar Rp. 7,29 juta. Sementara nilai rata-rata terendah adalah pembayaran SP2 pada bulan Agustus yaitu sebesar Rp. 5,9 juta per SP2.

Tabel 10.4. Jumlah dan Nilai Penanganan Surat Perintah Pembayaran (SP2) Tahun 2010

No	Bulan	Jumlah SP2	Nilai Pembayaran (Rp)	Rata-Rata nilai per SP2 (Rp)
1	Januari	190	1.171.000.000	6.163.158
2	Februari	145	942.500.000	6.500.000
3	Maret	180	1.192.000.000	6.622.222
4	April	189	1.377.500.000	7.288.360
5	Mei	174	1.115.500.000	6.410.920
6	Juni	211	1.331.500.000	6.310.427
7	Juli	236	1.642.500.000	6.959.746
8	Agustus	276	1.652.500.000	5.987.319
9	September	125	802.500.000	6.420.000
10	Oktober	214	1.397.500.000	6.530.374
11	Nopember	249	1.647.500.000	6.616.466
12	Desember	248	1.677.500.000	6.764.113
Total		2437	15.950.000.000	6.544.932

Fluktuasi penerimaan dari SP2 antar bulan dalam setahun menunjukkan pola yang hampir sama dengan jumlah SP2 yang dikeluarkan. Pada semester 2, Jumlah dan nilai SP2 yang diterima cenderung tinggi pada awal dan akhir semester dan rendah pada tengah semester. Sementara pada semester 1, jumlahnya relatif tidak banyak berbeda antar bulan meskipun berada dibawah rata-rata nilai SP2 pada semester 2. Secara total, penerimaan SP2 pada semester 2 lebih tinggi daripada di semester 1. Pada awal dan akhir semester 2, penerimaan dari SP2 mencapai rata lebih dari Rp. 1,6 milyar per bulan seperti ditunjukkan pada gambar 10.8.

Gambar 10.5. Fluktuasi Jumlah dan Nilai Penanganan SP2 Tahun 2010



Jika dibandingkan menurut negara asal perangkat diterbitkannya SP2, penerimaan terbesar SP2 berasal dari perangkat yang berasal dari China. Secara total, nilai pembayaran SP2 dari perangkat asal China pada tahun 2010 mencapai Rp. 10,95 Milyar atau sekitar 68,7% dari total nilai pembayaran SP2 pada tahun 2010. Jika dirata-rata, setiap nilai pembayaran SP2 untuk perangkat asal China mencapai Rp. 7,5 juta. Selain karena jumlah perangkat yang diterbitkan SP2-nya cukup banyak, nilai pembayaran SP2 untuk perangkat asal China ini juga karena nilai pembayaran SP2 per perangkat untuk perangkat telekomunikasi asal China ini juga tinggi. Sementara untuk perangkat asal negara lainnya, nilai pembayaran SP2 secara



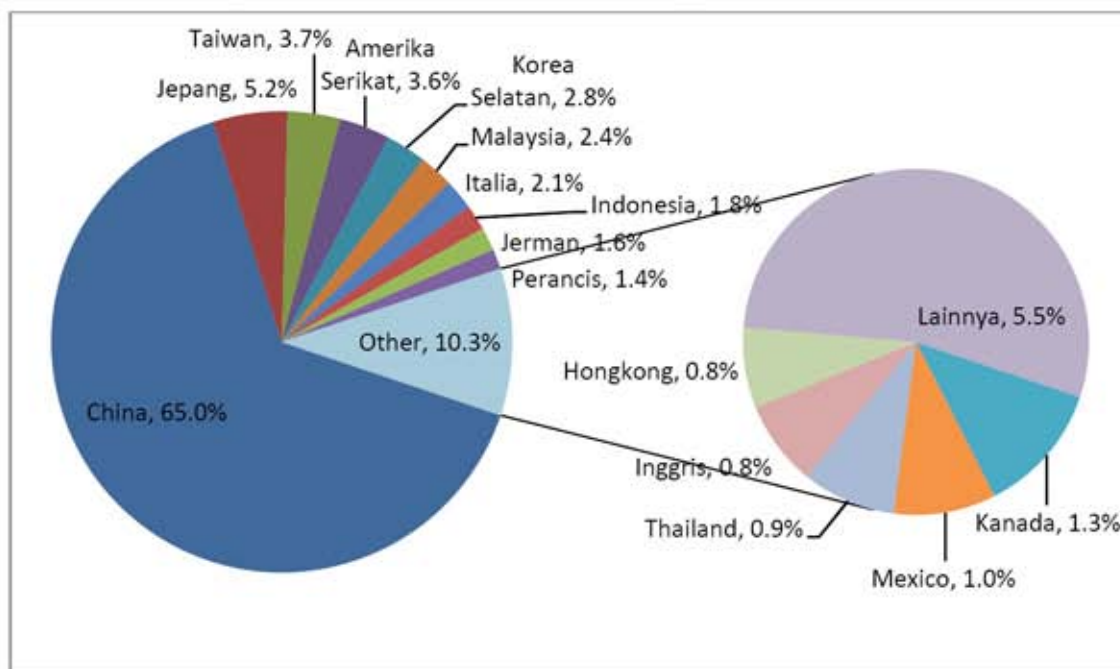
total tidak ada yang mencapai lebih dari Rp. 1 milyar. Total nilai pembayaran SP2 untuk perangkat asal Taiwan yang merupakan tertinggi kedua hanya Rp. 602 juta dan total nilai pembayaran SP2 untuk perangkat asal Jepang hanya Rp. 468,5 juta. Nilai pembayaran SP2 rata-rata tertinggi adalah untuk perangkat asal Kanada yang mencapai Rp. 9,8 juta. Perangkat telekomunikasi asal Meksiko dan Perancis juga cukup tinggi mencapai lebih dari Rp. 8 juta per perangkat.

Tabel 10.5. Jumlah dan Nilai Penanganan SP2 menurut negara asal 2010

No	Negara	Jumlah SP2	Nilai Pembayaran (Rp)	Rata-Rata nilai per SP2 (Rp)
1	China	1454	10.955.000.000	7.534.388
2	Jepang	109	468.500.000	4.298.165
3	Amerika Serikat	98	455.500.000	4.647.959
4	Taiwan	95	602.500.000	6.342.105
5	Korea Selatan	70	443.500.000	6.335.714
6	Malaysia	57	267.000.000	4.684.211
7	Indonesia	44	259.500.000	5.897.727
8	Italia	43	389.000.000	9.046.512
9	Jerman	37	209.500.000	5.662.162
10	Thailand	28	137.500.000	4.910.714
11	Kanada	25	245.000.000	9.800.000
12	Mexico	24	204.500.000	8.520.833
13	Perancis	23	192.500.000	8.369.565
14	Inggris	22	149.000.000	6.772.727
15	Lainnya	151	972.000.000	6.437.086
Total		2280	15.950.500.000	6.995.833

Jika dilihat dari komposisi SP2 yang dikeluarkan seperti ditunjukkan oleh gambar 10.9, terlihat perangkat asal China memang mendominasi penerbitan SP2 perangkat. Dari total jumlah SP2 yang dikeluarkan, sekitar 65% adalah SP2 untuk perangkat telekomunikasi asal China. Sementara untuk perangkat asal Jepang, proporsi jumlah SP2 yang dikeluarkan hanya mencapai 5,2% dan untuk perangkat asal Amerika Serikat hanya 3,6%. Kondisi ini menunjukkan sangat besarnya jumlah perangkat asal China yang diuji dan dikeluarkan SP2 dari proses pengujian tersebut. Proporsi SP2 yang diterbitkan untuk perangkat telekomunikasi asal Indonesia juga hanya kecil yaitu hanya 1,8% dari total SP2 yang diterbitkan. Demikian pula dengan perangkat asal Malaysia yang hanya 2,4% dan Thailand yang hanya 0,9%.

Gambar 10.6 Komposisi Penerbitan dari SP2 menurut Negara Asal Tahun 2010



Sesuai dengan pengujian yang dilakukan dimana perangkat telepon dalam bentuk telepon seluler yang paling banyak diuji pada tahun 2010, maka penerbitan SP2 atas pengujian selama tahun 2010 dan nilai pembayarannya paling banyak juga untuk perangkat telepon seluler. Jumlah SP2 yang diterbitkan untuk telepon seluler mencapai 1057 buah dengan total nilai pembayaran untuk SP2 tersebut sebesar Rp. 8,7 Milyar. Jenis perangkat yang SP2-nya terbanyak kedua yang dikeluarkan adalah untuk jenis WLAN beserta variasi kelegkapan perangkatnya dengan total mencapai 203 dan nilai pembayaran total SP2 mencapai Rp. 1,15 milyar.

Jika dilihat perbandingan antara jumlah SP2 yang dikeluarkan untuk suatu perangkat dan nilai pembayaran SP2-nya, terlihat bahwa ada beberapa jenis perangkat yang nilai SP2 per unit perangkatnya cukup tinggi dan sebaliknya ada yang relatif rendah. Untuk perangkat jenis telepon seluler, rata-rata nilai pembayaran per SP2-nya cukup tinggi yaitu mencapai Rp. 8,2 juta. Nilai SP2 yang juga tinggi terdapat pada perangkat telekomunikasi jenis Repeater dan TV Siaran dengan nilai pembayaran diatas Rp. 8 juta per SP2. Sementara untuk perangkat jenis Low Power, nilai pembayaran per SP2 yang dikeluarkan justru rendah yaitu hanya Rp. 2,06 juta. Nilai SP2 yang rendah juga untuk jenis perangkat Bluetooth yang hanya Rp. 2,04 juta dan untuk jenis perangkat pesawat telepon yang nilai pembayaran SP2-nya hanya Rp. 3,6 juta.

Jika dilihat dari proporsi total nilai pembayarannya, total nilai pembayaran dari SP2 dari jenis perangkat telepon seluler ini mencapai 54,6% dari total nilai pembayaran SP2 tahun 2010. Proporsi



ini jauh lebih besar dibandingkan proporsi total nilai pembayaran SP2 untuk jenis perangkat lainnya. Proporsi total nilai pembayaran SP2 dari jenis perangkat WLAN misalnya hanya 7,2% dan untuk Modem hanya 6,7% dari total nilai pembayaran SP2 tahun 2010. Ini sekaligus menunjukkan derasnya jenis telepon seluler yang masuk ke Indonesia dan dilakukan pengujian cukup memberikan penerimaan kepada kas negara melalui SP2 yang diterbitkan.

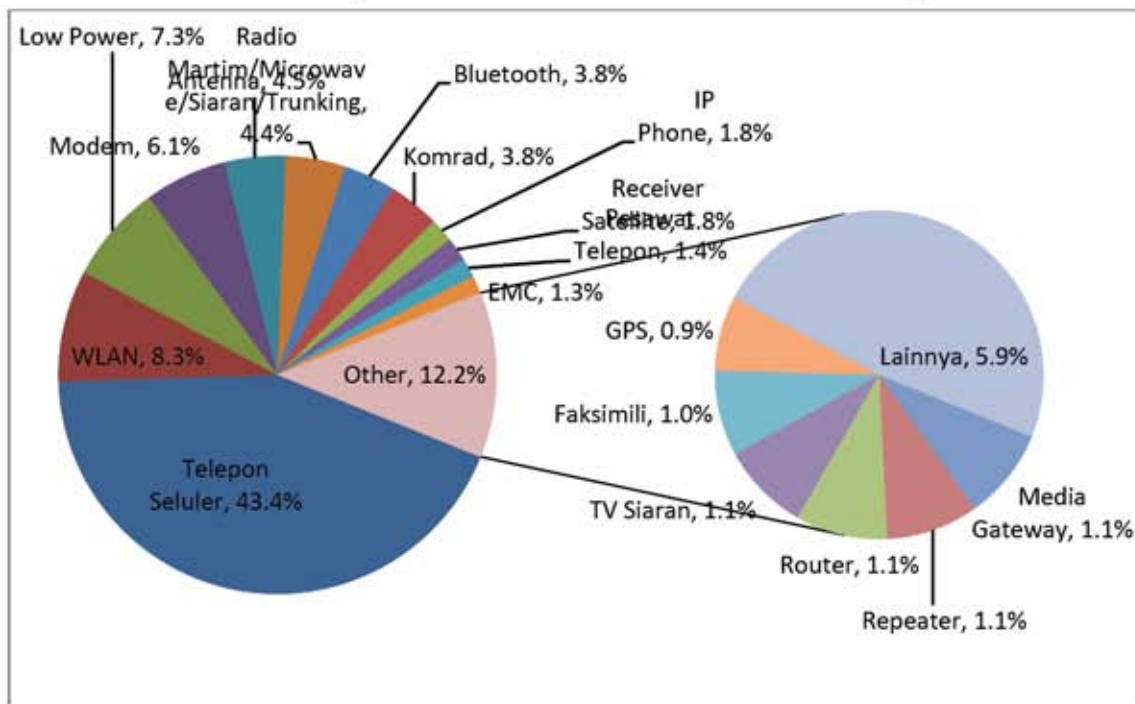
Tabel 10.6. Jumlah dan Nilai Penanganan SP2 menurut jenis perangkat 2010

No	Bulan	Jumlah SP2	Nilai Pembayaran (Rp)	Rata-Rata nilai per SP2 (Rp)
1	Telepon Seluler	1057	8.709.000.000	8.239.357
2	WLAN*	203	1.153.000.000	5.679.803
3	Low Power *	177	366.000.000	2.067.797
4	Modem*	149	1.072.500.000	7.197.987
5	Antenna	109	708.000.000	6.495.413
6	Radio Maritim/Modem dsb*	108	639.000.000	5.916.667
7	Bluetooth	93	190.000.000	2.043.011
8	Komrad	93	460.000.000	4.946.237
9	IP Phone*	43	200.500.000	4.662.791
10	Receiver Satellite	43	268.000.000	6.232.558
11	Pesawat Telepon*	34	125.500.000	3.691.176
12	EMC	29	118.500.000	4.086.207
13	Media Gateway*	27	170.000.000	6.296.296
14	Repeater*	27	218.500.000	8.092.593
15	Router*	27	128.500.000	4.759.259
16	TV Siaran	26	208.000.000	8.000.000
17	Faksimili *	25	119.000.000	4.760.000
18	GPS (Bluetooth)*	22	133.000.000	6.045.455
19	Lainnya	145	950.000.000	6.551.724
Total		2437	15.937.000.000	6.539.598

*) Dengan berbagai variasi produknya

Sesuai dengan total nilai penerimaan SP2-nya, komposisi jumlah SP2 yang diterbitkan juga menunjukkan bahwa proporsi SP2 untuk jenis perangkat telepon seluler adalah yang paling besar dibandingkan dengan perangkat telekomunikasi lainnya. Dari total SP2 yang diterbitkan, proporsi SP2 untuk telepon seluler mencapai 43,3%. Sementara untuk perangkat telekomunikasi lainnya, proporsinya tidak ada yang mencapai 10%. Proporsi penerbitan SP2 untuk perangkat jenis WLAN dan variasi produknya hanya 7,3% dan Low Power juga hanya 7,3% dari total. Sementara untuk jenis perangkat telekomunikasi yang bersifat *consumers product* lain seperti Modem proporsi jumlah SP2 yang diterbitkan juga tidak besar yaitu hanya 6,1%.

Gambar 10.7. Komposisi Penerbitan dari SP2 menurut Jenis Perangkat 2010



Sejalan dengan dominannya perangkat dari China dalam SP2 perangkat yang diterbitkan oleh Balai Pengujian Perangkat Telekomunikasi, dominasi ini juga terjadi pada hampir semua jenis perangkat khususnya perangkat yang bersifat *consumers product* seperti telepon seluler dan Modem. Dari total SP2 yang diterbitkan untuk telepon seluler, sekitar 90% adalah untuk SP2 perangkat telepon seluler asal China. Hal ini menunjukkan bahwa dari penerbitan SP2 hasil pengujian, telepon seluler asal China juga sangat dominan diantara telepon seluler asal negara lain. Bahkan untuk telepon seluler asal negara lain, proporsi SP2 yang dikeluarkan tidak ada yang lebih dari 5%.

Derasnya produk telepon seluler yang masuk Indonesia dan melalui pengujian, memberikan kontribusi penerimaan yang cukup signifikan terhadap PNBPN Pos dan Telekomunikasi. Total nilai pembayaran SP2 dari telepon seluler mencapai 54,6% dari total nilai SP2 tahun 2010

Proporsi SP2 untuk Modem asal China juga mencapai 79,2% dari total SP2 yang dikeluarkan untuk Modem dan untuk pesawat telepon proporsinya mencapai 67% dari total SP2 yang dikeluarkan untuk pesawat telepon. Hanya untuk jenis perangkat EMC dan TV Siaran dimana



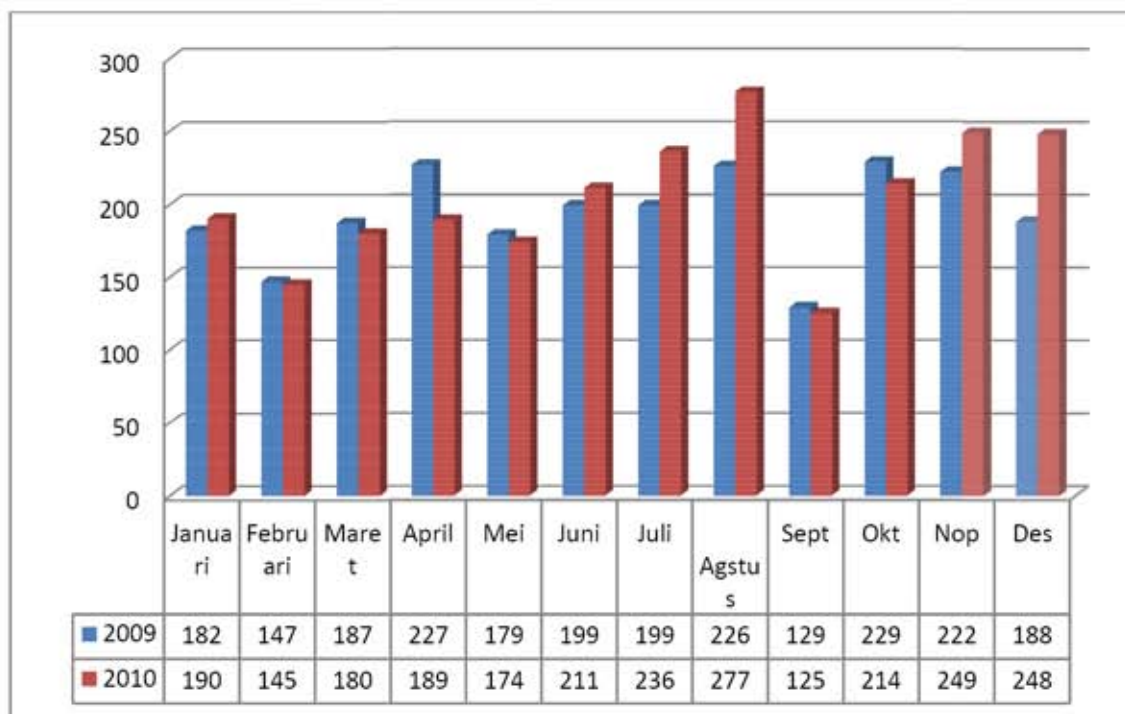
produk dari Cina tidak terlalu mendominasi. Proporsi terbesar untuk SP perangkat TV siaran adalah untuk perangkat asal Italia yang mencapai 53,8%, sedangkan untuk jenis perangkat EMC, proporsi terbesar SP2 adalah untuk perangkat asal Korea Selatan dengan proporsi mencapai 69%.

Tabel 10.7. Jumlah Penerbitan SP2 menurut jenis perangkat dan negara asal 2010

Jenis/Negara	Kanada	China	Perancis	Jerman	Hong-kong	Indonesia	Italia	Jepang	Korea	Malaysia	Mexico	Taiwan	Thailand	Inggris	USA	Lainnya	Total
Telepon Seluler	9	961	0	2	3	1	1	0	22	0	11	14	10	2	0	21	1057
WLAN	3	116	1	0	0	8	0	14	2	1	2	38	0	0	13	5	203
Low Power	0	88	0	10	1	0	0	43	8	1	1	6	0	0	9	10	177
Modem	3	118	1	2	1	4	0	2	2	0	0	4	1	0	6	5	149
Antenna	0	42	24	1	1	0	6	0	1	0	2	0	5	1	11	15	109
Radio *	3	14	0	5	1	13	24	11	1	4	0	1	0	1	7	25	108
Bluetooth	2	47	2	0	0	0	0	15	1	8	5	3	4	0	3	3	93
Komrad	0	23	0	0	0	1	2	30	0	22	0	0	0	4	0	11	93
IP Phone	0	21	2	5	0	0	0	2	0	1	0	4	0	0	4	4	43
Receiver Satellite	2	18	0	0	1	8	0	0	1	0	0	1	0	3	6	3	43
Pesawat Telepon	0	23	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	2	4	34
EMC	0	6	0	1	0	0	0	1	20	0	0	1	0	0	0	0	29
Media Gateway	5	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	27
Repeater	0	12	0	1	0	0	0	1	2	5	0	1	0	2	2	1	27
Router	0	11	0	0	7	0	0	0	0	2	1	0	0	0	6	0	27
TV Siaran	0	2	0	3	0	1	14	0	0	0	0	2	0	0	1	3	26
Faksimili	0	6	0	0	0	0	0	3	4	9	0	0	1	0	0	2	25
GPS	0	5	0	0	1	0	0	1	1	1	2	4	0	2	2	3	22
Lainnya	4	64	4	8	3	7	5	4	3	4	0	11	1	3	7	17	145
Total	31	1585	34	40	19	43	52	127	69	59	24	90	22	20	87	135	2437

Secara rata-rata, jumlah SP2 yang dikeluarkan setiap bulannya pada tahun 2010 lebih tinggi dari rata-rata SP2 yang dikeluarkan pada tahun 2009. Namun jika dibandingkan per semester, untuk semester 1, total SP2 yang diterbitkan pada tahun 2009 lebih banyak daripada jumlah SP2 yang diterbitkan pada semester 1 tahun 2010. Tingginya jumlah SP2 yang dikeluarkan pada tahun 2010 terutama terjadi pada semester 2 yang secara rata-rata juga lebih tinggi daripada semester 2 tahun 2009. Pada semester 2 tahun 2010, rata-rata setiap bulannya diterbitkan 237 SP2, sementara pada periode yang sama, rata-rata penerbitan SP2 pada tahun 2009 hanya 213 buah.

Gambar 10.8 Perbandingan Penerbitan SP2 per bulan Tahun 2009 dan 2010



10.4. UPT Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP)

UPT Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP) didirikan salah satunya bertujuan untuk mengatasi kesenjangan penggunaan dan pemanfaatan telekomunikasi antar daerah dan meningkatkan penetrasi teknologi informasi ke wilayah perdesaan khususnya pada daerah-daerah yang masih minim penggunaan telekomunikasi dan teknologi informasi. Salah satu langkah yang dilakukan BTIP adalah dengan meningkatkan keterjangkauan sarana telekomunikasi ke daerah-daerah yang masih tertinggal melalui program yang diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat di perdesaan dalam memanfaatkan teknologi informasi. Terdapat tiga program utama yang dilakukan oleh BTIP pada saat ini untuk mendorong peningkatan akses masyarakat pedesaan terhadap sarana teknologi informasi yaitu program Desa Berdering (DeRing), Desa Pakai Internet (Desa Pinter) dan Program Layanan Internet Kecamatan (PLIK).

10.4.1. Pegawai BTIP

Sampai tahun 2010, di BTIP ditempatkan 31 pegawai dari berbagai jenjang pendidikan. Jumlah ini hanya meningkat satu pegawai dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 30

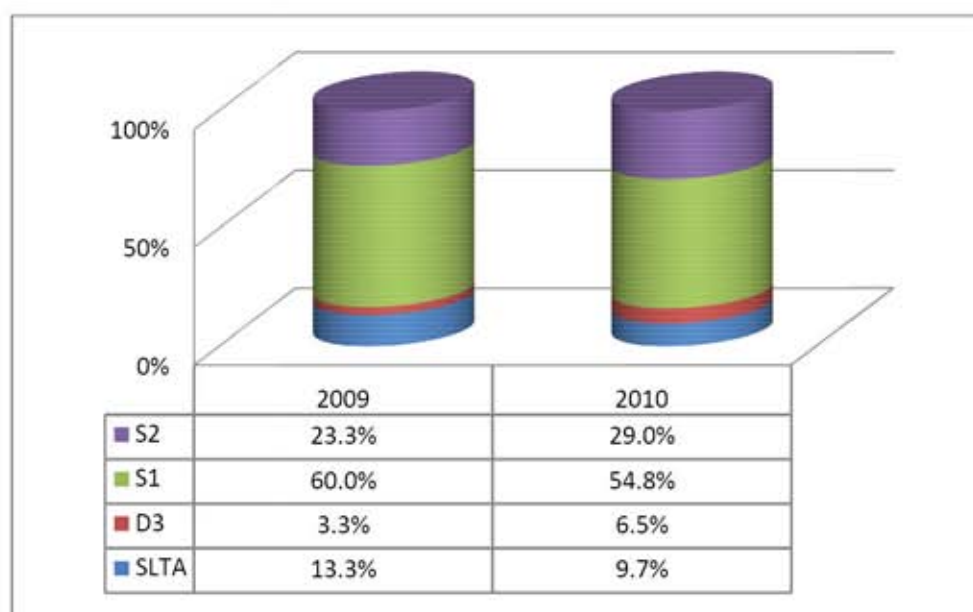
pegawai. Penambahan pegawai baru dari rekrutmen tahun 2010 yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun Ditjen Pos dan Telekomunikasi tidak banyak yang dialokasikan untuk penambahan pegawai di BTIP. Meskipun di Ditjen Pos dan Telekomunikasi terdapat penambahan 124 pegawai atau 10,1% dibanding tahun sebelumnya, namun di BTIP hanya ada penambahan satu pegawai.

Tabel 10.8. Perkembangan Jumlah Pegawai di BTIP menurut tingkat Pendidikan

No	Tahun	SLTA	D3	S1	S2	S3
1	2009	4	1	18	7	0
2	2010	3	2	17	9	0

Meskipun hanya terjadi penambahan satu pegawai, namun dari komposisi pegawai menurut jenjang pendidikan, terjadi pergeseran yang cukup signifikan yang mengarah ke penguatan SDM pegawai di BTIP. Proporsi pegawai dengan jenjang pendidikan Magister (S2) meningkat dari 23,3% menjadi 29% pada tahun 2010. Pada saat yang sama proporsi pegawai dengan jenjang pendidikan S1 menurun dari 60% menjadi 54,8% pada 2010. Sebaliknya pegawai dengan jenjang pendidikan SLTA menurun dari 13,3% menjadi hanya tinggal 9,7% dan pegawai dengan jenjang pendidikan D3 meningkat dari 3,3% menjadi 6,5%. Hal ini menunjukkan adanya upaya BTIP untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawainya melalui peningkatan jenjang pendidikan.

Gambar 10.9. Komposisi pegawai BTIP menurut tingkat pendidikan



10.4.2. Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT)

Program utama dari BTIP untuk meningkatkan penetrasi penggunaan sarana telekomunikasi dan teknologi informasi ke perdesaan dilakukan dengan menetapkan wilayah dan desa-desa dalam Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT). Pada setiap propinsi ditetapkan sejumlah desa yang masuk dalam WPUT yang jumlahnya bervariasi antar propinsi. Sampai dengan tahun 2010, sudah ditetapkan 4052 desa yang masuk ke dalam WPUT. Jumlah ini merupakan hasil penambahan yang dilakukan pada tahun 2009 sebanyak 1581 desa. Total jumlah tersebut mencapai 55,4% dari total desa yang ada di seluruh propinsi di Indonesia.

Penambahan desa yang masuk dalam program WPUT secara nominal paling banyak terjadi di wilayah Sumatera Barat, diikuti Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Barat. Penambahan desa di Sumatera Barat sebanyak 221 desa, sementara di Nusa Tenggara Timur 159 desa dan di Kalimantan Barat sebanyak 128 desa. Namun jika dilihat presentasi penambahannya, presentasi paling tinggi justru terjadi di Nusa Tenggara Barat, diikuti Sulawesi Barat dan Sumatera Barat. Presentasi peningkatan jumlah desa WPUT di Nusa Tenggara Barat mencapai 36%. Sementara peningkatan jumlah desa WPUT di Sulawesi Barat mencapai 29,5% dan di Sumatera Barat mencapai 13%. Peningkatan jumlah desa progra WPUT di daerah Jawa justru cenderung rendah meskipun jumlah desa di wilayah desa ini tergolong banyak. Hal ini disebabkan pada program WPUT tahap awal sudah cukup banyak desa di Jawa yang masuk dan desa-desa di Jawa yang relatif sudah cukup banyak yang terakses telekomunikasi.

Dari sebaran desa program WPUT tersebut, proporsi terbesar terdapat di Nangroe Aceh Darussalam (NAD), disusul Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Jumlah desa di NAD yang masuk dalam program WPUT mencapai 13,3% dari total desa WPUT, sementara di Sumatera Utara proporsinya mencapai 9,2% dan Jawa Tengah mencapai 7,4%. Banyaknya jumlah desa di NAD yang masuk dalam program WPUT Ditjen Pos dan Telekomunikasi menunjukkan keinginan pemerintah untuk meningkatkan dan memperluas akses telekomunikasi di wilayah NAD yang selama ini relatif tertinggal akibat konflik berkepanjangan. Peningkatan akses telekomunikasi ini diharapkan akan mempercepat pembangunan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah NAD ini.

10.9. Perkembangan Jumlah Desa dalam Program WPUT dibanding Jumlah Total Desa di tiap Propinsi

NO	PROPINSI	Desa (2007)	Desa Tambahan (2009)	Total Desa WPUT	Jumlah Desa Total
1	NAD	5.264	60	5.324	6378
2	Sumatera Utara	3.561	114	3.675	5616
3	Sumatera Barat	1.695	221	1.916	1916
4	Jambi	838	0	838	1231
5	Riau	872	5	877	1482
6	Kepulauan Riau	90	0	90	245
7	Bangka Belitung	167	12	179	321
8	Bengkulu	1.015	74	1.089	1233
9	Sumatera Selatan	1.891	62	1.953	2783
10	Lampung	805	0	805	2193
11	Kalimantan Barat	1.026	128	1.154	1531
12	Kalimantan Tengah	1.131	4	1.135	1395
13	Kalimantan Timur	879	6	885	1352
14	Kalimantan Selatan	1.330	36	1.366	1957
15	Sulawesi Utara	563	2	565	1280
16	Gorontalo	196	8	204	476
17	Sulawesi Tengah	745	75	820	1530
18	Sulawesi Barat	237	70	307	491
19	Sulawesi Selatan	1.134	52	1.186	2866
20	Sulawesi Tenggara	1.053	0	1.053	1705
21	Papua	2.247	113	2.360	2442
22	Papua Barat	768	0	768	1166
23	Maluku	720	26	746	886
24	Maluku Utara	589	57	646	793
25	Bali	201	0	201	701
26	Nusa Tenggara Barat	247	89	336	820
27	Nusa Tenggara Timur	2.091	159	2.250	2742
28	Banten	666	73	739	1483
29	Jawa Barat	1.196	83	1.279	5808
30	Jawa Tengah	2.921	51	2.972	8566
31	DI Yogyakarta	30	0	30	438
32	Jawa Timur	2.303	1	2.304	8484
	Total	38.471	1.581	40.052	72.310

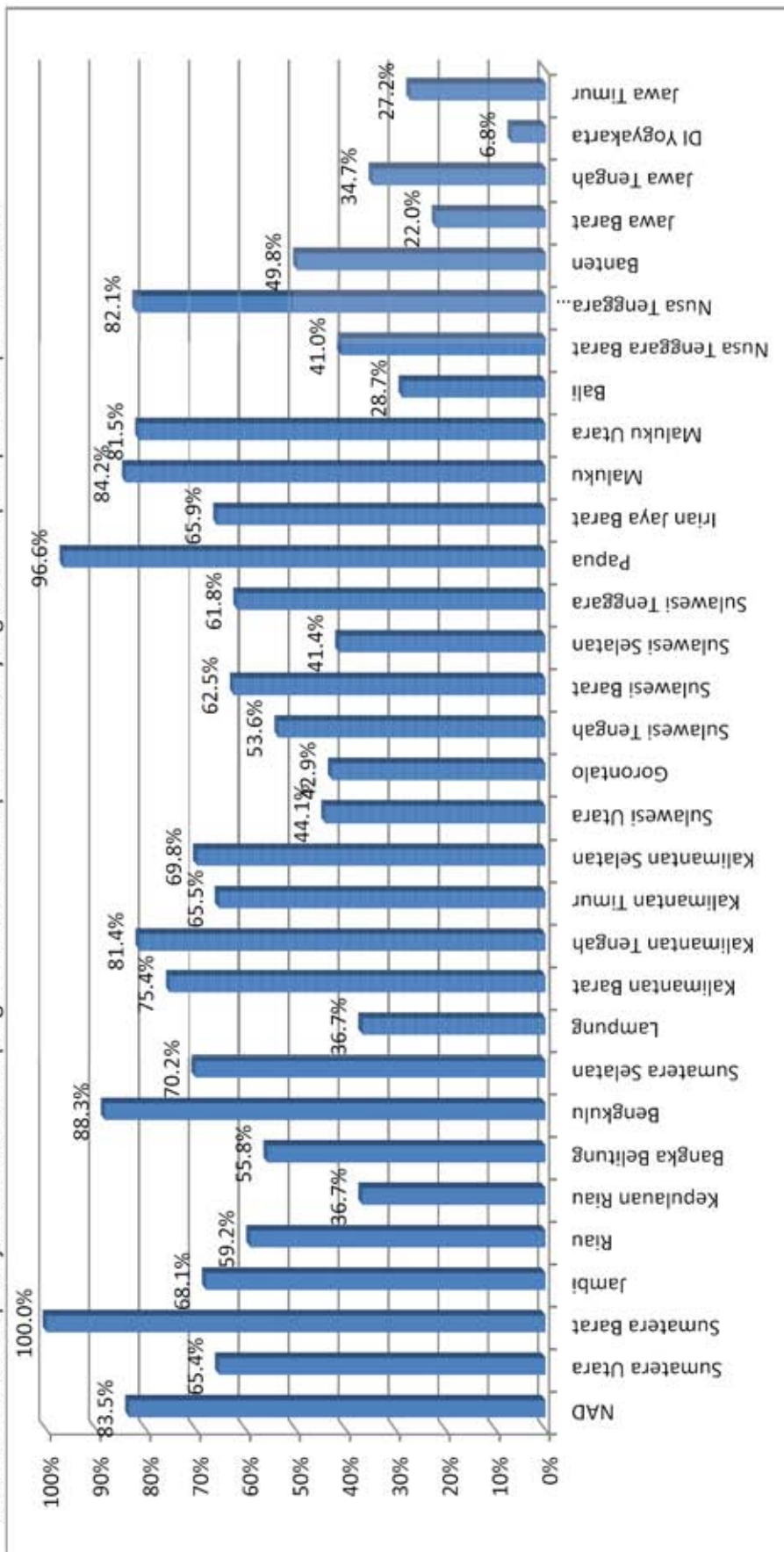
Jika dibandingkan jumlah desa yang masuk program WPUT dengan jumlah desa yang ada, secara total hanya 55,4% desa yang masuk dalam program WPUT. Presentasi tertinggi desa yang masuk program WPUT adalah di Sumatera Barat dan Papua. Seluruh desa yang ada Sumatera Barat masuk dalam program WPUT. Sementara di Papua, presentasi jumlah desa

yang masuk program WPUT mencapai 96,6% dari total desa yang ada di WPUT. Propinsi-propinsi di Jawa malah menunjukkan presentasi yang rendah dari desa yang masuk program WPUT. Di Jawa Barat, hanya 22% desa yang masuk program WPUT dari jumlah desa yang ada. Sementara di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang juga masih banyak daerah perdesaan, masing-masing hanya 34,7% dan 27,2%. Desa-desa di wilayah Jawa yang relatif sudah banyak terakses telekomunikasi menyebabkan hanya sedikit desa yang masuk program WPUT.

Sementara provinsi-provinsi di kawasan Timur Indonesia menunjukkan proporsi yang besar jumlah desa yang masuk dalam program WPUT. Selain Papua yang persentasinya mencapai 96,6%, Maluku dan Maluku Utara persentasinya mencapai 84,2% dan 81,5%. Sementara propinsi-propinsi di Kalimantan yang memiliki wilayah geografis yang luas, proporsi desa yang masuk program WPUT juga cukup tinggi. Di Kalimantan Tengah persentasinya mencapai 81,4% , di Kalimantan Barat mencapai 75,4% dan di Kalimantan Selatan mencapai hampir 70% dari total desa di propinsi tersebut. Sebaliknya di wilayah Sulawesi persentasinya justru rendah. Secara total, jumlah desa di Sulawesi yang masuk program WPUT hanya 49,5% dari total desa di Sulawesi. Presentasi yang relatif tinggi hanya di Sulawesi Barat, namun hanya 62,5% dari total desa di wilayah tersebut.

Sebaliknya di wilayah Sumatera yang dari sisi tingkat kemajuan daerah lebih tinggi dari Sulawesi, proporsi desa yang masuk program WPUT relatif lebih besar. Secara total jumlah desa di Sumatera yang masuk dalam program WPUT mencapai 71,6% dari total desa yang ada di Sumatera. Pada beberapa propinsi menunjukkan presentasi jumlah desa yang masuk program WPUT yang cukup tinggi. Di Sumatera Barat persentasinya mencapai 100% (seluruh desa di Sumatera Barat masuk dalam program WPUT), Sementara di Bengkulu dan NAD persentasinya mencapai 88,3% dan NAD mencapai 83,5%.

Gambar 10.10 . Proporsi jumlah desa dalam program WPUT terhadap Total Desa yang ada di Tiap Propinsi sampai Tahun 2010



10.4.3. Program Desa Berdering*

Salah satu program peningkatan penetrasi telekomunikasi di perdesaan adalah melalui program Desa Berdering. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses telepon ke desa-desa yang selama ini belum terjangkau telepon khususnya yang bersifat *fixed line* (telepon tetap kabel). Untuk mendukung program ini, sampai tahun 2010 telah ditetapkan 33.184 desa yang tersebar di 32 Propinsi (DKI Jakarta tidak masuk program karena semua wilayah di DKI Jakarta sudah terakses telepon). Jika dibandingkan dengan total jumlah desa di Indonesia, jumlah desa yang menjadi target Desa Berdering ini mencapai 45,9% dari total desa di Indonesia. Sampai dengan 31 Desember 2010, jumlah desa yang telah *on air* mencapai 26.753 desa atau sekitar 80,6% dari total desa. Jika dibandingkan dengan jumlah desa di Indonesia, proporsi desa yang sudah *on air* dari program Desa Berdering ini baru mencapai 37%.

Tabel 10.10. Posisi pencapaian Program DeRing di banding Jumlah Desa per propinsi 2010

No	Propinsi	Jumlah Desa Target	Jumlah Desa On Air	Jumlah Total Desa	No	Propinsi	Jumlah Desa Target	Jumlah Desa On Air	Jumlah Total Desa
1	NAD	3.847	3847	6378	17	NTB	388	388	820
2	Sumatera Utara	2.976	2976	5616	18	NTT	2.027	2027	2742
3	Sumatera Barat	1.804	1801	1902	19	Kalimantan Barat	986	983	1531
4	Riau	716	716	1482	20	Kalimantan Tengah	1.128	1127	1395
5	Kepulauan Riau	88	88	245	21	Kalimantan Timur	636	636	1352
6	Jambi	805	805	1231	22	Kalimantan Selatan	1.187	1187	1957
7	Bangka Belitung	159	159	321	23	Sulawesi Selatan	905	359	2866
8	Bengkulu	997	997	1233	24	Sulawesi Barat	236	148	491
9	Sumatera Selatan	1.704	1704	2783	25	Sulawesi Tengah	744	145	1530
10	Lampung	767	767	2193	26	Sulawesi Tenggara	928	46	1705
11	Banten	682	682	1483	27	Sulawesi Utara	474	69	1280
12	Jawa Barat	1.187	1187	5808	28	Gorontalo	184	7	476
13	Jawa Tengah	1.552	1552	8566	29	Maluku	710	130	886
14	DI Yogyakarta	19	19	438	30	Maluku Utara	576	68	793
15	Jawa Timur	1.579	1579	8484	31	Papua Barat	768	115	1166
16	Bali	178	178	701	32	Papua	2.247	261	2442

Tingkat pencapaian program desa berdering antar propinsi menunjukkan bahwa pada sebagian besar propinsi, jumlah desa yang sudah *on air* sudah mencapai target yang sudah ditetapkan. Propinsi yang belum mencapai target *on air* adalah propinsi-propinsi di Sulawesi



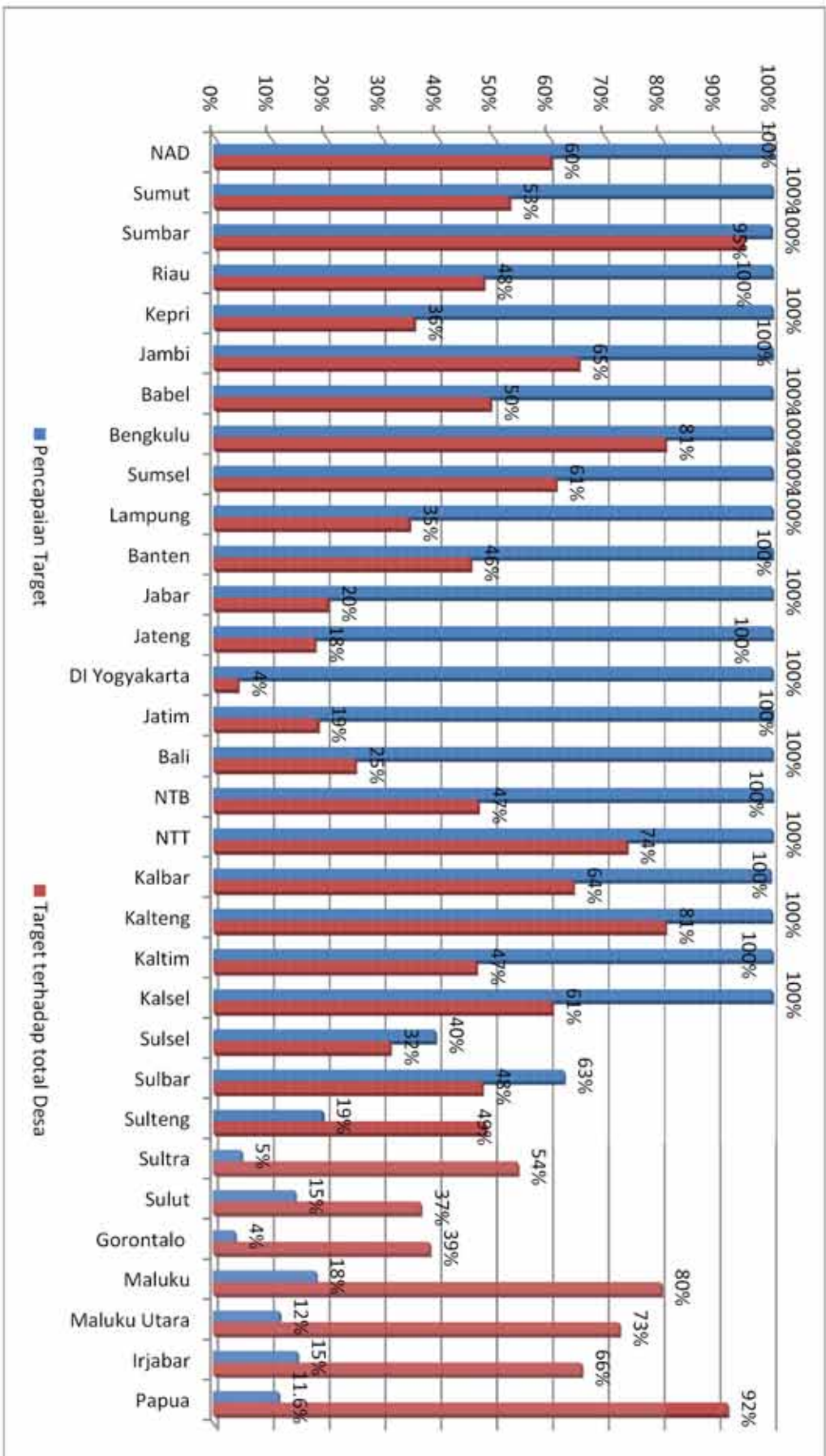
dan Kawasan Timur Indonesia. Tingkat pencapaian target di propinsi-propinsi di Sulawesi dan kawasan Timur Indonesia bahkan tergolong rendah yaitu kurang dari 50% kecuali di Sulawesi Barat yang mencapai 63%. Tingkat pencapaian target desa berdering yang sangat rendah terdapat di Gorontalo (4%) dan Sulawesi Tenggara (5%). Tingkat pencapaian target yang rendah juga terdapat di Papua (11,6%), Maluku Utara (12%) dan Papua Barat (15%).

Proporsi jumlah desa berdering dibandingkan dengan total desa yang paling tinggi terdapat di Sumatera Barat dan Papua yang masing-masing mencapai 95% dan 92%. Pada propinsi-propinsi di wilayah Sumatera, proporsi desa yang masuk target desa berdering terhadap total desa juga cukup besar kecuali di Kepulauan Riau dan Lampung yang hanya mencapai 36% dan 35% dari total desa yang ada di propinsi tersebut. Proporsi yang paling besar terdapat di Sumatera Barat dan Bengkulu yang mencapai 95% dan 81% dari total desa yang ada di propinsi tersebut. Proporsi desa yang masuk dalam program Desa berdering di Kalimantan dan Kawasan Timur Indonesia juga relatif cukup tinggi dibandingkan dengan propinsi-propinsi di Jawa dan Sulawesi.

Proporsi jumlah desa yang masuk program desa berdering terhadap total desanya di wilayah Jawa justru menunjukkan proporsi yang rendah. Secara total, jumlah desa di pulau Jawa yang masuk program desa berdering hanya 20,2% dari total desa yang ada. Proporsi paling terendah terdapat di DI Jogjakarta yang proporsinya hanya 4%, diikuti oleh Jawa Tengah dan Jawa Barat yang proporsinya masing-masing hanya 18% dan 20% dari total desa yang ada. Sebagaimana desa WPUT, proporsi desa yang masuk program Desa Berdering yang rendah di Jawa karena sebagian besar desa di Jawa sudah memiliki akses telekomunikasi yang baik sehingga dapat dilakukan melalui mekanisme pasar. Dengan jaringan infrastruktur khususnya infrastruktur telekomunikasi yang lebih baik, tidak diperlukan program khusus untuk meningkatkan penetrasi penggunaan telepon di desa-desa di Jawa.

Proporsi jumlah desa di wilayah Jawa yang masuk dalam program Desa Berdering dibanding total desa yang ada relatif rendah. Hal ini karena wilayah Jawa sudah memiliki infrastruktur telekomunikasi yang baik dan akses telekomunikasi yang sudah banyak menjangkau pedesaan sehingga tidak perlu melalui program khusus

Gambar 10.11. Pencapaian Target Desa Berdering dan Proporsi Desa Berdering Terhadap Total Desa di Tiap Propinsi sampai 31 Desember 2010



10.4.4. Desa PINTER (Punya Internet)*

Untuk meningkatkan akses internet di pedesaan dan sebagai sarana pengenalan dan pemasyarakatan teknologi internet, Ditjen Pos dan Telekomunikasi menempunya melalui program Desa Pinter (Desa Pakai Internet). Secara total telah ditetapkan target sebanyak 131 desa yang tersebar di 33 propinsi di seluruh Indonesia sebagai lokasi program Desa Pinter. Dari total 131 desa yang ditargetkan, realisasi pencapaian program Desa Pinter baru mencapai 101 desa atau baru 77,1% dari target yang ditetapkan. Propinsi yang paling banyak menjadi lokasi Desa Pinter adalah Jawa Tengah, Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera dengan masing-masing sebanyak 10,9 dan 7 desa. Selain jumlah Desa Pinter yang lebih banyak di ketiga propinsi tersebut, penyebaran jumlah Desa Pinter di tiap propinsi cenderung merata di tiap propinsi dengan rata-rata 3 sampai 4 desa di setiap propinsi.

Dari sisi realisasi pencapaiannya, program Desa Pinter di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Bali Nusa-Tenggara sudah seluruhnya terealisasi. Sementara untuk program Desa Pinter di wilayah Sulawesi justru belum ada yang terealisasi kecuali di Gorontalo yang baru terealisasi di satu desa dari target tiga desa. Program Desa Pinter yang juga belum ada realisasinya juga terjadi di wilayah kawasan Timur Indonesia seperti di Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua.

Tabel 10.11 Target dan Realisasi Jumlah Desa dalam Program Desa Pinter

No	Propinsi	Target	Realisasi	No	Propinsi	Target	Realisasi
1	NAD	9	9	17	NTT	6	6
2	Sumatera Utara	7	7	18	Jawa Timur	4	4
3	Sumatera Barat	4	4	19	Jawa Tengah	10	10
4	Riau	4	4	20	DI Yogyakarta	3	3
5	Jambi	3	3	21	Jawa Barat	6	6
6	Sumatera Selatan	3	3	22	Banten	4	4
7	Bengkulu	4	4	23	Sulawesi Utara	3	0
8	Lampung	3	3	24	Sulawesi Tengah	3	0
9	Bangka Belitung	4	4	25	Sulawesi Barat	3	0
10	Kepulauan Riau	4	4	26	Sulawesi Selatan	3	0
11	Kalimantan Barat	4	4	27	Sulawesi Tenggara	3	0
12	Kalimantan Tengah	4	4	28	Gorontalo	3	1
13	Kalimantan Selatan	3	3	29	Maluku Utara	3	0
14	Kalimantan Timur	5	5	30	Maluku	3	0
15	Bali	3	3	31	Papua Barat	4	0
16	NTB	3	3	32	Papua	3	0

10.4.5. Program Layanan Internet Kecamatan (PLIK)

Program Layanan Internet Kecamatan (PLIK) adalah upaya yang dilakukan Ditjen Pos dan Telekomunikasi untuk memberikan akses layanan internet sampai di tingkat kecamatan. Program ini dilakukan dengan menyediakan layanan akses internet pada tempat-tempat tertentu di kecamatan yang dikelola oleh suatu unit tertentu agar dapat dimanfaatkan masyarakat sekitarnya. Pengelolaan PLIK ini dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak dari berbagai bentuk organisasi seperti Koperasi, UKM, Sekolah, Pesantren, Yayasan dan sebagainya. Dalam program PLIK ini telah ditetapkan target pembentukan sebanyak 5748 unit PLIK yang tersebar di seluruh propinsi¹. Target terbesar ada di propinsi Jawa Timur yaitu sebanyak 538 unit PLIK, diikuti oleh Jawa Tengah 478 PLIK dan Jawa Barat sebanyak 448 PLIK. Pulau Jawa memang menjadi lokasi utama program PLIK dimana dari target jumlah PLIK ini mencapai 31% meskipun hanya terdiri dari 5 propinsi. Sementara di Sumatera yang terdiri dari 10 propinsi, proporsinya hanya 28,7% dari total target PLIK di seluruh Indonesia.

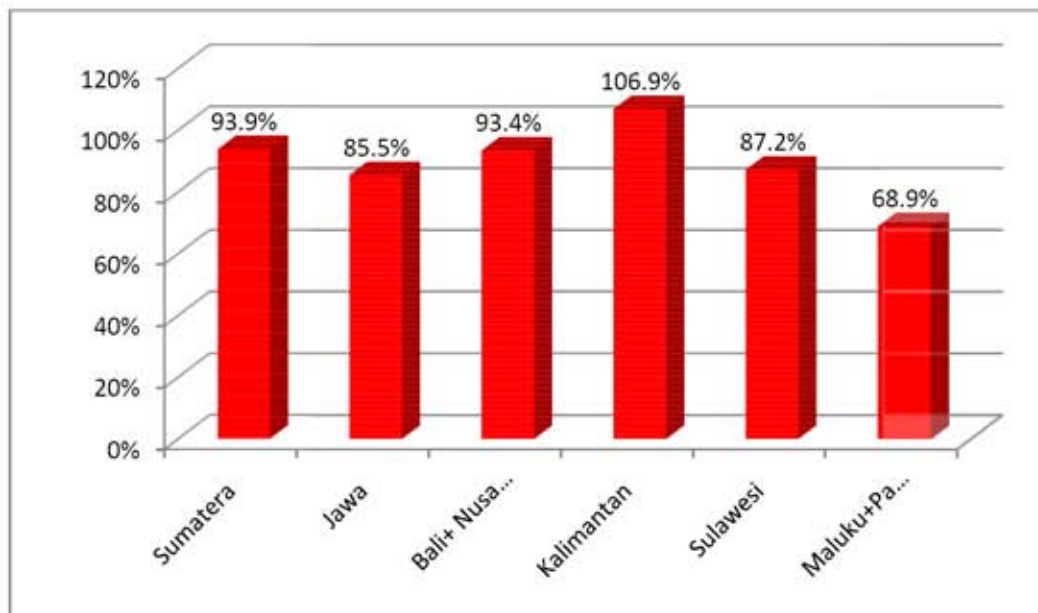
Tabel 10.12. Jumlah PLIK dan proporsinya terhadap total Kecamatan di Tiap Propinsi Tahun 2010

No	Propinsi	Target PLIK	Realisasi PLIK	Jumlah Kecamatan	No	Propinsi	Target PLIK	Realisasi PLIK	Jumlah Kecamatan
1	NAD	260	260	276	17	NTB	125	125	116
2	Sumatera Utara	337	337	407	18	NTT	213	213	285
3	Sumatera Barat	176	1	166	19	Kalimantan Barat	173	173	175
4	Riau	145	1	152	20	Kalimantan Tengah	132	132	119
5	Kepulauan Riau	78	0	59	21	Kalimantan Timur	158	158	136
6	Jambi	125	0	128	22	Kalimantan Selatan	156	156	149
7	Bangka Belitung	81	0	40	23	Sulawesi Selatan	224	224	304
8	Bengkulu	118	0	110	24	Sulawesi Barat	88	88	66
9	Sumatera Selatan	182	0	216	25	Sulawesi Tengah	135	135	147
10	Lampung	149	62	204	26	Sulawesi Tenggara	152	152	184
11	Banten	206	169	154	27	Sulawesi Utara	128	128	150
12	Jawa Barat	448	531	620	28	Gorontalo	72	72	65
13	Jawa Tengah	478	9	573	29	Maluku	84	84	70
14	DI Yogyakarta	113	46	78	30	Maluku Utara	74	74	110
15	Jawa Timur	538	543	661	31	Papua Barat	103	103	368
16	Bali	90	90	57	32	Papua	207	207	131

¹ Selain target yang ditetapkan dalam bentuk kewajiban penyediaan, juga ditetapkan target untuk UKP4 sebanyak 4218 PLIK yang harus terbangun.

Dari sisi jumlah pelaksanaan PLIK tersebut, proporsinya lokasi PLIK telah mencapai 88,8% dari total kecamatan yang ada di Indonesia. Pada beberapa propinsi, jumlah target unit PLIK lebih banyak dari jumlah kecamatan yang ada di Indonesia seperti di propinsi Sumatera Barat, Banten, DI Jogjakarta, Bali dan lainnya di Kawasan Barat, Tengah maupun Timur Indonesia. Hal ini berarti pada propinsi tersebut terdapat lebih dari satu unit PLIK pada satu kecamatan. Sementara pada beberapa propinsi lain, jumlah PLIK masih rendah dibanding jumlah kecamatan yang ada. Jika dilihat dari proporsi lokasinya menurut pulau, hanya di Kalimantan yang jumlah PLIK-nya sudah lebih besar daripada jumlah kecamatan yang ada seperti ditunjukkan pada gambar 10.12. Sementara untuk lima pulau besar lainnya, jumlah PLIK masih belum memenuhi jumlah kecamatan yang ada. Bahkan untuk Jawa, proporsi jumlah PLIK baru mencapai 85,5% dari jumlah kecamatan yang ada dan di Maluku dan Papua baru mencapai 68,9% dari jumlah kecamatan. Artinya, meskipun jumlah PLIK-nya paling banyak, namun sebenarnya proporsinya dibanding jumlah kecamatan yang ada masih relatif kecil. Namun untuk pulau Jawa, hal ini diduga lebih disebabkan banyak kecamatan yang sudah terakses internet sehingga tidak diperlukan lagi program PLIK.

Gambar 10.12. Proporsi Jumlah PLIK terhadap Total Kecamatan menurut Pulau Tahun 2010



Dari total target PLIK yang ditetapkan, sampai 31 Desember 2010 telah terealisasi 4273 unit PLIK atau sekitar 74,3% dari target yang direncanakan untuk dicapai. Realisasi PLIK ini juga

baru sekitar 65,9% dari total kecamatan yang ada di seluruh Indonesia. Tingkat pencapaian realisasi ini bervariasi antar propinsi dengan variasi yang sangat tinggi. Di Jawa Barat, realisasi PLIK bahkan lebih besar dari target yang direncanakan yaitu sebanyak 119% dan di Jawa Timur juga mencapai 101% dari target. Sebagian besar daerah terutama di Kalimantan, Sulawesi, Kawasan Timur Indonesia dan sebagian di Jawa, realisasi pengadaan PLIK ini sudah mencapai 100% dari target yang direncanakan. Namun beberapa propinsi di Jawa realisasi PLIK belum mencapai target seperti di Banten yang baru 82%, DI Yogyakarta baru 41% bahkan Jawa Tengah baru 2%. Di Sumatera juga terjadi pencapaian yang sangat kontras dimana NAD dan Sumatera Utara realisasi PLIK sudah mencapai target 100% tapi di beberapa propinsi seperti Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu dan Sumatera Selatan realisasinya masih nihil (0%) dan di Riau hanya 1%. Hanya di Lampung yang realisasinya sedikit baik yaitu 42%.

Jika dibandingkan antara target program PLIK dengan jumlah kecamatan di masing-masing propinsi, proporsi jumlah PLIK terhadap total kecamatan yang ada di propinsi sudah cukup tinggi dengan rata-rata diatas 80%. Bahkan di beberapa propinsi, jumlah PLIK lebih banyak daripada jumlah kecamatan yang ada seperti di Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, DI Yogyakarta, Bali, NTB, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku dan Papua. Hal ini berarti di beberapa kecamatan di propinsi tersebut ada lebih dari satu PLIK. Namun untuk Papua Barat proporsinya masih sangat rendah yaitu hanya 28% dari total kecamatan yang ada.

	Pencapaian Target	Target Terhadap Total Kecamatan
NA D mut	100	94%
Su mut	100	83%
Su mb ar	1%	106%
Ria u	1%	95%
Ke pri	0%	132%
Ja mbi	0%	98%
Ba bel	0%	203%
Be ngk ulu	0%	107%
Su ms el	0%	84%
Su mp ung	42%	73%
Ba nte n	82%	134%
Jab ar eng	119%	72%
Jat eng	2%	83%
DIY	41%	145%
Jati m	101%	81%
Bali	100%	158%
NT B	100%	108%
NT	100%	75%
Kal bar	100%	99%
Kal ten g	100%	111%
Kal tim sel	100%	116%
Kal sel sel	100%	105%
Sul sei	100%	74%
Sul bar	100%	133%
Sul ten g	100%	92%
Sul tra	100%	83%
Sul ut	100%	85%
Gor alo	100%	111%
Mal uku	100%	120%
Mal ut	100%	67%
Pa pua	100%	28%
Pa Bar at	100%	158%

10.5. UPT Monitoring Spektrum Frekuensi

UPT monitoring spektrum frekuensi memiliki fungsi utama melakukan monitoring terhadap penggunaan frekuensi oleh berbagai pihak dalam rangka pengaturan pemanfaatan frekuensi secara benar. Tugas ini dilakukan oleh keberadaan unit-unit monitoring di daerah yang berbentuk balai maupun loka dengan berbagai tingkatan. Terdapat 35 UPT monitoring yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk dua UPT yang baru beroperasi yaitu UPT Tahuna dan UPT Sorong.

10.5.1. Pegawai UPT Monitoring Spektrum Frekuensi

UPT Monitoring Spektrum Frekuensi adalah salah satu yang unit kerja yang mengalami peningkatan jumlah pegawai paling signifikan pada tahun 2010 dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2010, jumlah pegawai di UPT pada tahun 2010 meningkat sebesar 8,3% dibanding tahun sebelumnya menjadi 960 orang. Peningkatan jumlah pegawai pada tahun 2010 ini berasal dari rekrutmen pegawai baru di Ditjen Pos dan Telekomunikasi dan menjadi peningkatan terbesar kedua dalam tiga tahun terakhir.

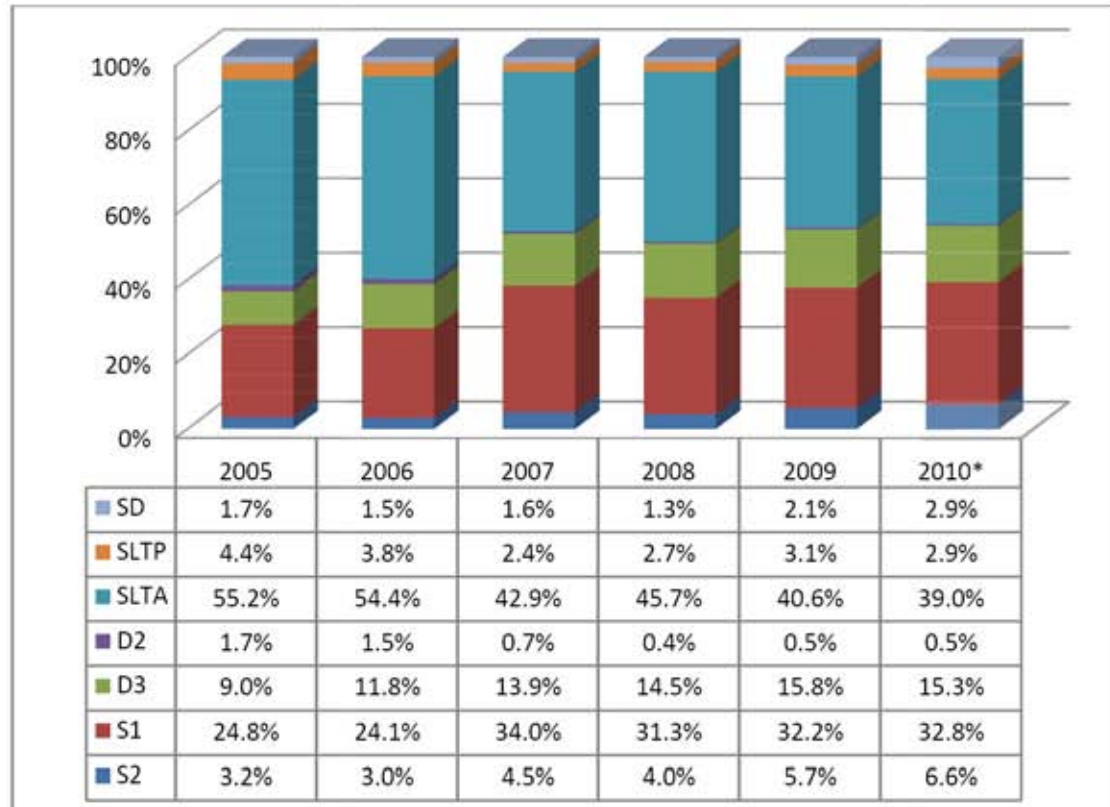
Tabel 10.13. Perkembangan Jumlah Pegawai UPT Ditjen Postel Menurut Tingkat Pendidikan.

No	Tahun	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	2005	18	147	72	9	331	23	9	609
2	2006	32	240	98	5	303	17	11	706
3	2007	27	211	98	3	308	18	9	674
4	2008	48	270	132	4	340	26	18	838
5	2009	58	290	135	4	344	26	26	883
6	2010	63	325	144	4	368	31	25	960

Dari sisi komposisinya, pada tahun 2010 pegawai dengan pendidikan SLTA masih merupakan yang terbesar di UPT dengan proporsi 39%, diikuti dengan pegawai dengan pendidikan Sarjana sebesar 32,8%. Meskipun proporsi jumlah pegawai dengan pendidikan SLTA masih yang terbesar, namun perkembangan dalam enam tahun terakhir menunjukkan proporsi ini semakin menurun dari 55,2% pada 2005 menjadi tinggal 39% pada tahun 2010. Sebaliknya pegawai dengan pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana justru meningkat dari total sebesar 28% pada tahun 2010 menjadi 48,1% pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan adanya upaya

di UPT untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawainya melalui peningkatan jenjang pendidikan pegawai.

Gambar 10.14. Perkembangan Komposisi Pegawai UPT menurut Tingkat Pendidikan 2005 - 2010



Distribusi jumlah pegawai menurut UPT menunjukkan adanya variasi jumlah pegawai antar UPT sesuai dengan kelas dari UPT Monitoring Spektrum Frekuensi di masing-masing daerah. UPT Balai Monitoring terdiri dari beberapa kelas yaitu Balai Monitoring Kelas 1, Kelas 2 dan Kelas 3 sesuai dengan beban kerja monitoringnya. UPT dengan beban kerja yang besar karena tingginya penggunaan frekuensi di daerah tersebut seperti UPT Jakarta, UPT Bandung, UPT Semarang dan UPT Surabaya memiliki jumlah pegawai yang juga lebih banyak (lebih dari 40 pegawai) dengan jumlah pegawai berpendidikan tinggi juga lebih besar. Sementara beberapa UPT lain pada daerah dengan tingkat penggunaan frekuensi yang tidak terlalu besar dengan dinamika sosial ekonomiserta tingkat kemajuan daerah yang tidak terlalu tinggi, jumlah pegawai di UPT tersebut juga cenderung tidak besar. UPT Kendari, UPT Jayapura, UPT Gorontalo, UPT Ternate dan UPT Banjarmasin memiliki jumlah pegawai yang sedikit (kurang dari 20). Hal ini terkait dengan beban monitoring frekuensi yang relatif lebih sedikit dibanding UPT lainnya. Tabel 10.14 yang memperlihatkan jumlah pegawai di masing-

masing UPT menurut tingkat pendidikan juga menunjukkan jumlah pegawai berpendidikan S1 yang proporsinya cukup signifikan. Pada beberapa UPT juga sudah terdapat pegawai berpendidikan magister. Sementara jumlah pegawai berpendidikan dasar relatif lebih rendah.

Tabel 10.14. Jumlah pegawai masing-masing UPT Monitoring Frekuensi menurut Tingkat Pendidikan

No	UPT	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	UPT NAD	0	8	5	0	10	0	0	23
2	UPT MEDAN	0	12		0	20	1	2	35
3	UPT PADANG	0	6	3	0	16	1	1	27
4	UPT PEKANBARU	2	5	6	0	7	0	1	21
5	UPT JAMBI	2	5	8	0	11	0	0	26
6	UPT BABEL	0	3	5	0	10	1	0	19
7	UPT BATAM	1	11	6	0	8	0	0	26
8	UPT PALEMBANG	3	15	2	0	6	0	0	26
9	UPT BENGKULU	1	8	7	0	4	0	1	21
10	UPT LAMPUNG	2	8	5	0	6	1	1	23
11	UPT DKI JAKARTA	4	10	1	1	23	5	1	45
12	UPT BANTEN	3	11	3	0	7	3	1	28
13	UPT BANDUNG	4	9	3	0	21	4	3	44
14	UPT YOGYAKARTA	3	11	1	1	20	3	1	40
15	UPT SEMARANG	5	19	4	0	11	1	2	42
16	UPT SURABAYA	3	16		0	19	2	3	43
17	UPT DENPASAR	1	10	6	0	12	0	1	30
18	UPT MATARAM	0	10	4	0	12	1	1	28
19	UPT KUPANG	1	8	5	1	11	2	2	30
20	UPT SAMARINDA	2	6	5	0	8	0	0	21
21	UPT BALIKPAPAN	1	8	4	0	8	0	0	21
22	UPT PONTIANAK	2	6	6	0	10	0	1	25
23	UPT PALANGKARAYA	1	2	6	0	8	1	0	18
24	UPT BANJARMASIN	1	5	3	1	7	2	0	19
25	UPT MANADO	1	12	3	0	6	0	0	22
26	UPT PALU	0	10	5	0	5	0	0	20
27	UPT MAKASAR	3	11	5	0	17	0	1	37
28	UPT AMBON	0	8	2	0	8	0	0	18
29	UPT GORONTALO	1	6	6	0	4	0	0	17
30	UPT TERNATE	0	5	4	0	8	0	1	18
31	UPT KENDARI	1	4	5	0	8	0	0	18
32	UPT JAYAPURA	0	6	4	0	8	0	0	18
33	UPT MERAUKE	0	4	4	0	7	1	0	16
34	UPT Tahuna	0	2	1	0	0	0	0	3
35	UPT Sorong	0	2	2	0	2	0	0	6
	Jumlah	48	282	139	4	348	29	24	874

10.5.2. Monitoring dan Penertiban Frekuensi oleh UPT

Kinerja UPT monitoring frekuensi salah satunya ditunjukkan oleh kegiatan penertiban yang dilakukan oleh UPT tersebut terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi yang dilakukan oleh *stakeholder* pengguna. Tabel 10.15 menunjukkan hasil kegiatan penertiban yang dilakukan oleh masing-masing UPT pada 2010 dan tindakan yang sudah dilakukan

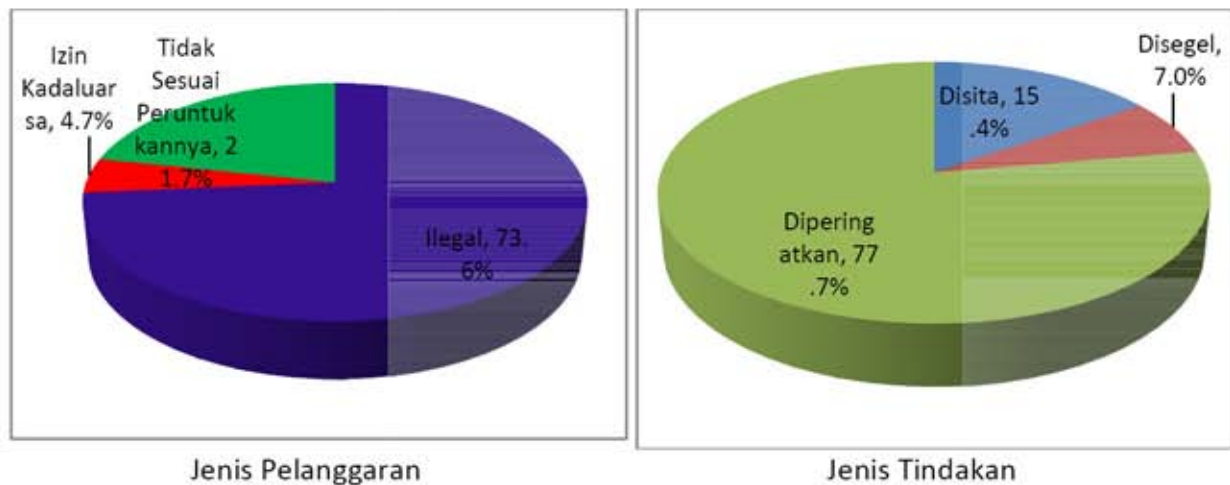
Tabel 10.15. Rekapitulasi Penertiban oleh masing-masing UPT Tahun 2010

No	WILAYAH PENERTIBAN	PELANGGARAN				TINDAKAN			
		Illegal	Izin Kada- luarsa	Tidak Sesuai Peruntuk- kannya	Jumlah	Disita	Disegel	Diperi- ngatkan	Jumlah
1	UPT NAD	45	1	25	71	22	6	43	71
2	UPT MEDAN	66	2	0	68	18	8	43	68
3	UPT PADANG	7	4	0	11	3	4	4	11
4	UPT PEKANBARU	7	4	0	11	0	0	4	4
5	UPT JAMBI	105	3	21	129	30	20	79	129
6	UPT BABEL	0	0	0	0	0	0	0	0
7	UPT BATAM	27	0	0	27	0	8	13	21
8	UPT PALEMBANG	15	0	0	15	0	0	15	15
9	UPT BENGKULU	1	0	0	1	0	0	1	1
10	UPT LAMPUNG	1	0	0	1	0	0	1	1
11	UPT DKI JAKARTA	7	0	0	7	0	0	7	7
12	UPT BANTEN	0	0	3	3	0	0	3	3
13	UPT BANDUNG	51	0	2	53	0	5	48	53
14	UPT YOGYAKARTA	4	0	0	4	0	0	4	4
15	UPT SEMARANG	49	0	0	49	4	0	29	33
16	UPT SURABAYA	8	0	1	9	0	0	9	9
17	UPT DENPASAR	33	0	4	37	3	0	34	37
18	UPT MATARAM	16	4	0	20	6	0	12	20
19	UPT KUPANG	30	15	96	144	0	0	144	144
20	UPT SAMARINDA	0	0	0	0	0	0	0	0
21	UPT BALIKPAPAN	15	0	3	18	0	0	18	18
22	UPT PONTIANAK	11	0	0	11	0	0	11	11
23	UPT PALANGKARAYA	12	1	0	13	0	0	13	13
24	UPT BANJARMASIN	1	0	0	1	0	0	1	1
25	UPT MANADO	13	4	7	21	6	0	15	21
26	UPT PALU	4	0	0	4	0	0	4	4
27	UPT MAKASAR	40	1	0	41	31	1	9	41
28	UPT AMBON	10	0	0	10	0	0	10	10
29	UPT GORONTALO	5	0	0	5	0	0	5	5
30	UPT TERNATE	2	0	0	2	0	0	2	2
31	UPT KENDARI	5	0	0	5	0	0	5	5
32	UPT JAYAPURA	17	0	2	19	0	5	14	19
33	UPT MERAUKE	9	1	20	30	0	0	30	30
34	UPT TAHUNA	9	0	0	9	3	0	6	9
35	UPT SORONG	0	0	0	0	0	0	0	0

Meskipun penggunaan frekuensi cenderung tinggi pada daerah-daerah perkotaan terutama di Pulau Jawa, namun pelanggaran penggunaan frekuensi justru tidak terjadi pada daerah dengan penggunaan frekuensi tinggi. Hasil penertiban penggunaan frekuensi menunjukkan bahwa pelanggaran penggunaan frekuensi paling banyak ditemukan oleh UPT Kupang sebanyak 144 pelanggaran dan UPT Jambi sebanyak 129 pelanggaran. Sementara pada UPT di pulau Jawa, penemuan pelanggaran yang cukup signifikan hanya terdapat di UPT Bandung (53 pelanggaran) dan UPT Semarang (49 pelanggaran). Penemuan pelanggaran yang tinggi disuatu daerah bisa berarti UPT di daerah tersebut (Kupang dan Jambi) yang lebih aktif dalam melakukan penertiban sehingga dapat lebih banyak menjaring pelaku penggunaan frekuensi. Pada saat yang sama di wilayah tersebut juga masih banyak terjadi pelanggaran penggunaan frekuensi karena tingkat kepatuhan dan kesadaran terhadap peraturan penggunaan yang rendah. Namun jumlah penemuan pelanggaran frekuensi yang rendah pada suatu daerah tidak selalu berarti UPT pada daerah tersebut tidak cukup aktif melakukan penertiban, namun bisa jadi hal tersebut disebabkan tingkat kepatuhan terhadap peraturan penggunaan frekuensi yang sudah cukup baik oleh pengguna frekuensi di daerah tersebut seperti di daerah perkotaan.

Dari jenis pelanggaran yang dilakukan, presentasi terbesar adalah pelanggaran dalam bentuk penggunaan frekuensi secara illegal. Secara total, sekitar 73,6% pelanggaran yang dilakukan adalah dalam bentuk penggunaan frekuensi secara illegal. Pelanggaran seperti ini biasanya terjadi pada daerah dengan wilayah geografis yang luas dan sulit dilakukan monitoring. Sementara pelanggaran dalam bentuk penggunaan frekuensi yang tidak sesuai peruntukkan mencapai 21,7% dan pelanggaran dalam bentuk izin penggunaan frekuensi yang kadaluarsa hanya 4,7%. Namun untuk wilayah yang diawasi oleh UPT Kupang, pelanggaran terbesar justru dalam bentuk penggunaan frekuensi yang tidak sesuai peruntukan. Sekitar 66,7% pelanggaran penggunaan frekuensi di wilayah kerja UPT Kupang adalah dalam bentuk penggunaan yang tidak sesuai dengan penggunaan frekuensi. Tingginya pelanggaran jenis ini diduga karena wilayah pengawasannya yang luas dan berbentuk kepulauan serta adanya kepentingan penggunaan khusus penggunaan frekuensi di wilayah tersebut. Sementara pelanggaran dalam bentuk penggunaan frekuensi secara illegal proporsinya hanya 20,8%.

Gambar 10.15. Komposisi Jenis Pelanggaran dan Tindakan Penertiban oleh UPT Tahun 2010



Mengingat bentuk pelanggaran yang terjadi paling banyak adalah dalam bentuk penggunaan frekuensi secara ilegal, maka bentuk tindakan yang paling banyak dilakukan masih dalam bentuk diberikan peringatan terhadap pelanggaran tersebut. Sekitar 77,7% tindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi adalah dalam bentuk diberikan peringatan. UPT cenderung melakukan pendekatan persuasif dalam penindakan pelanggar penggunaan frekuensi yang diduga pelanggaran disebabkan pada kekurangtahuan terhadap peraturan atau kurangnya kesadaran dalam mematuhi peraturan penggunaan frekuensi. Tindakan dalam bentuk penyitaan perangkat proporsinya hanya 15,4% dan tindakan dalam bentuk penyegelan juga proporsinya hanya 7,0%.

10.5.3. Kinerja UPT

Kinerja dan kapasitas UPT monitoring spektrum frekuensi juga dapat dilihat dari sumberdaya yang dimiliki dan beban kerja pengawasan yang harus dilakukan. Sumberdaya yang dimiliki dapat terlihat dari jumlah petugas/pegawai yang ada di UPT tersebut dan perangkat monitoring yang dimiliki serta jenis layanan stasiun monitor yang diberikan. Sementara beban kerja tergambar dari luas wilayah dan kondisi geografis wilayah monitoring serta jumlah objek yang harus dimonitor yaitu dalam bentuk jumlah stasiun, jumlah BTS, jumlah radio siaran dan jumlah TV siaran. Tabel 10.16 menggambarkan kondisi kapasitas dan beban kerja masing-masing UPT untuk menggambarkan kinerja dan beban kerja yang dihadapi UPT.

Tabel 10.16. Kondisi sumberdaya dan beban kerja masing-masing UPT Monitoring Frekuensi di Indonesia per 31 Desember 2011

No	UPT	Jumlah Pegawai	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kondisi Geografis	Perangkat monitoring yang dimiliki	Jenis layanan stasiun monitor	Jumlah Stasiun	Jumlah BTS	Jumlah Radio Siaran	Jumlah Telev Siare
1	UPT NAD	23	57956	4.432.400	Daratan	MOB: 2	MOB : H/V/UHF	7.193,00	48	9	2.1
2	UPT MEDAN	35	72981,23	13.452.400	Daratan	FIX : 5 MOB: 5	FIX : L/H/V/UHF MOB : H/V/UHF	21.124,00	108	12	5.6
3	UPT PADANG	27	42012,89	4.892.400	Daratan	MOB: 3	MOB : H/V/UHF	6.952,00	43	17	20
4	UPT PEKANBARU	21	87023,66	5.423.000	Daratan	MOB: 3	MOB : H/V/UHF	15.030,00	32	21	35
5	UPT JAMBI	26	50058,16	2.879.900	Daratan	MOB: 2	MOB : V/UHF	4.381,00	21	17	11
6	UPT BABEL	19	16424,06	1.153.500	Daratan	PORT : 1	MOB : V/UHF	2.292,00	13	8	6
7	UPT BATAM	26	8201,72	1.579.600	Kepulauan	MOB: 2	MOB : V/UHF	5.384,00	11	12	13
8	UPT PALEMBANG	26	91492,43	7.732.500	Daratan	MOB: 3	MOB : H/V/UHF	9.132,00	51	27	22
9	UPT BENGKULU	21	19919,33	1.691.600	Daratan	MOB: 2	MOB : V/UHF	1.951,00	18	5	5
10	UPT LAMPUNG	23	34623,8	7.592.200	Daratan	MOB: 4	MOB : H/V/UHF	8.278,00	53	14	26
11	UPT DKI JAKARTA	45	664,01	9.294.900	Daratan	FIX : 4 MOB: 4	FIX : V/UHF MOB : H/V/UHF	33.484,00	52	13	72
12	UPT BANTEN	28	9662,92	9.964.300	Daratan	FIX : 2 MOB: 1	FIX : L/HF,SHF MOB : V/UHF	14.306,00	30	7	35
13	UPT BANDUNG	44	35377,76	42.081.600	Daratan	FIX : 4 MOB: 3	FIX : V/UHF MOB : H/V/UHF	47.927,00	191	31	122
14	UPT YOGYAKARTA	40	3133,15	3.534.600	Daratan	MOB: 2	MOB : V/UHF	6.275,00	40	14	17
15	UPT SEMARANG	42	32800,69	33.094.600	Daratan	FIX : 4 MOB: 3	FIX : V/UHF MOB : H/V/UHF	28.587,00	207	25	86
16	UPT SURABAYA	43	47799,75	37.469.700	Daratan	FIX : 4 MOB: 4	FIX : V/UHF MOB : H/V/UHF	38.922,00	149	44	106
17	UPT DENPASAR	30	5780,06	3.548.800	Daratan	MOB: 3	MOB : H/V/UHF	8.965,00	45	14	24



No	UPT	Jumlah Pegawai	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kondisi Geografis	Perangkat monitoring yang dimiliki	Jenis layanan stasiun monitor	Jumlah Stasiun	Jumlah BTS	Jumlah Radio Siaran	Jumlah Televisi Siaran
18	UPT MATARAM	28	18572,32	4.503.200	Daratan	MOB: 2	MOB : V/UHF	5.279,00	20	6	1602
19	UPT KUPANG	30	48718,1	4.704.800	Daratan dg Kepulauan	FIX : 1 MOB: 5	FIX : L/HF MOB : H/V/UHF	3.529,00	34	7	713
20	UPT SAMARINDA	21	204534,34	3.235.100	Daratan	FIX : 1	FIX : L/HF		42	14	2198
21	UPT BALIKPAPAN	21			Daratan	MOB: 2	MOB : V/UHF	12.357,00			
22	UPT PONTIANAK	25	147307	4.388.500	Daratan	MOB: 2	MOB : H/V/UHF	6.254,00	37	30	1617
23	UPT PALANGKARAYA	18	153564,5	2.113.800	Daratan	MOB: 1	MOB : V/UHF	4.596,00	30	15	1151
24	UPT BANJARMASIN	19	38744,23	3.545.100	Daratan	MOB: 3	MOB : H/V/UHF	6.294,00	43	26	1290
25	UPT MANADO	22	13851,64	2.249.300	Daratan Pegunungan	MOB: 3	MOB : H/V/UHF	3.591,00	21	25	937
26	UPT Tahuna	3			Kepulauan	-	-				
27	UPT PALU	20	61841,29	2.528.800	Daratan Pegunungan	MOB: 4	MOB : H/V/UHF	2.466,00	16	29	633
28	UPT MAKASAR	37	63504,66	9.073.800	Daratan	MOB: 4	MOB : H/V/UHF	9.132,00	37	28	2304
29	UPT AMBON	18	46914,03	2.358.300	Kepulauan	MOB: 5	MOB : H/V/UHF	1.459,00	53	14	2602
30	UPT GORONTALO	17	11257,07	995.500	Daratan Pegunungan	PORT : 1	MOB : V/UHF	680,00	4	2	145
31	UPT TERNATE	18	31982,5	990.500	Kepulauan	PORT : 1	MOB : V/UHF	431,00	11	6	250
32	UPT KENDARI	18	38067,7	2.161.400	Daratan	PORT : 1	MOB : V/UHF	1948,00	14	16	560
33	UPT JAYAPURA	18	319036,05	2.138.500	Daratan Pegunungan	MOB: 3	MOB : H/V/UHF		16	26	476
34	UPT MERAUKE	16			Daratan Pegunungan	FIX : 1 MOB: 2	FIX : L/HF MOB : HF	2.703,00			
35	UPT Sorong	6	97024,27	757.500	Daratan Pegunungan	-	-	79,00	0	0	48

Dari tabel 10.16 terlihat bahwa terdapat variasi yang beragam antar UPT dalam kapasitas dan beban kerja yang dimiliki. UPT monitoring di pulau Jawa meskipun memiliki wilayah kerja yang relatif lebih kecil dan geografis yang tidak terlalu berat, namun memiliki beban kerja lain yang lebih besar. Hal ini disebabkan kepadatan penggunaan frekuensi di wilayah ini jauh lebih tinggi dan variasi penggunaan jenis frekuensinya juga lebih banyak khususnya di daerah perkotaan dibanding daerah-daerah di luar Jawa. Jumlah stasiun yang harus diawasi serta jumlah penggunaan frekuensi yang tercermin dari jumlah BTS, jumlah radio siaran dan TV siaran di daerah-daerah di Pulau Jawa lebih banyak daripada daerah lain.

UPT di daerah lain yang menunjukkan jumlah stasiun yang besar juga menunjukkan ciri banyak daerah perkotaan disamping juga geografis yang luas seperti Sumatera Utara, Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur. Pada ketiga propinsi tersebut juga menunjukkan perangkat monitoring dan jenis layanan stasiun monitor yang relatif lebih banyak dibanding UPT lain, Meskipun demikian, pada beberapa UPT juga memiliki jenis layanan stasiun monitor yang banyak meskipun jumlah stasiun yang ada tidak terlalu besar seperti di UPT Kupang dan UPT di wilayah Papua. Hal ini menunjukkan peningkatan kapasitas perangkat agar lebih baik juga dilakukan dengan mempertimbangkan cakupan dan kondisi geografis wilayah penertiban. UPT Kupang, UPT Jayapura dan UPT Merauke memiliki perangkat monitoring yang lebih banyak dan beragam karena wilayah kerja monitoring kondisi geografis yang sulit yang membutuhkan tambahan perangkat untuk tugas monitoring yang dilakukan. Sementara UPT lain dengan kondisi kondisi geografis wilayah kerja yang tidak terlalu berat atau wilayah kerja yang masih terjangkau serta penggunaan frekuensi sebagai objek monitoring yang tidak terlalu banyak, memiliki sumberdaya pendukung khususnya perangkat monitoring yang standar.



Bab 11

Analisa Ekonomi Bidang Pos dan Telekomunikasi

Industri jasa telekomunikasi dan industri ikutannya yang berkembang dengan sangat pesat dan menjadi *new emerging industries* tak pelak memberi dampak yang signifikan terhadap perekonomian. Meskipun dalam perekonomian Indonesia yang agraris, kontribusinya masih kalah dibanding sektor-sektor primer, namun perkembangan industri telekomunikasi menjadi bagian penting dari proses transformasi perekonomian dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Bahkan untuk daerah perkotaan, perkembangan sektor telekomunikasi ini menjadi bagian penting pengembangan sektor jasa yang kedepan menjadi sektor utama perekonomian.

Perkembangan pesat dari industri pos dan telekomunikasi sektor perekonomian ini dapat dilihat dari perannya yang semakin lama semakin meningkat dalam struktur perekonomian. Dengan sendirinya, hal ini berdampak bukan hanya pada *output*, tapi juga penyerapan tenaga kerja, bahkan proporsi pendapatan rumah tangga yang dibelanjakan di sektor telekomunikasi ini. Dari sisi pemerintah, perkembangan ini juga ditandai dengan sumbangan bagi penerimaan negara dari jasa-jasa pemerintah yang disediakan dalam bidang telekomunikasi.

11.1. Ruang Lingkup

Analisis ekonomi dalam data statistik bidang pos dan telekomunikasi ini akan melihat peran dari kegiatan dan industri bidang pos dan telekomunikasi termasuk jasa yang disediakan pemerintah dalam mendukung pengembangan industri pos dan telekomunikasi terhadap perekonomian nasional. Peran dan kontribusi ini dilihat dari dua aspek yaitu kontribusi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi terhadap penerimaan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan dari penyediaan jasa pendukung oleh unit kerja di Ditjen Postel bagi industri pos dan telekomunikasi. PNBP Bidang Postel

adalah penerimaan negara bukan pajak yang dihasilkan oleh unit-unit kerja di lingkup Ditjen Postel yang mencakup PNPB dari jasa titipan, PNPB dari penyelenggaraan telekomunikasi, PNPB dari penerbitan sertifikat perangkat telekomunikasi (termasuk pendapatan Negara bukan pajak pada biaya pengujian perangkat telekomunikasi) dan PNPB dari Frekuensi yang meliputi PNPB dari PREOR dan SKOR dan PNPB dari BHP Frekuensi. PNPB dari bidang Postel ini menjadi bagian dari penerimaan negara yang masuk dalam pos penerimaan dalam negeri pada pos PNPB lainnya. Dengan demikian, PNPB dari bidang Postel ini turut memperkuat juga penerimaan negara dalam negeri khususnya penerimaan diluar pajak.

Bagian kedua adalah kontribusi kegiatan bidang pos dan telekomunikasi terhadap pendapatan domestik nasional yang dicerminkan oleh Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. PDB adalah ukuran *output* dari semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara pada sektor-sektor ekonomi yang ada di negara tersebut, termasuk didalamnya sektor komunikasi. Sementara kontribusi dari bidang postel adalah dalam bentuk *output* yang dihasilkan dari kegiatan jasa bidang pos dan telekomunikasi yang memberi kontribusi terhadap *output* nasional. Namun dalam analisa ini, kontribusi bidang komunikasi belum termasuk *output* dari industri manufaktur bidang telekomunikasi atau yang menghasilkan perangkat telekomunikasi, yang berada dalam *output* pada sektor industri pengolahan.

Sumber data untuk analisa ini berasal dari internal Ditjen Postel berupa data PNPB yang dihasilkan dari kegiatan di masing-masing satuan kerja (Satker) di lingkup Ditjen Postel. Sementara data pembanding untuk data penerimaan negara adalah data yang berasal dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan untuk data penerimaan negara dari masing-masing sumber penerimaan. Untuk analisa *output* sektor jasa telekomunikasi, sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik untuk data PDB berdasarkan lapangan usaha dan sektor usaha. Keseluruhan data ini adalah data yang sudah dipublikasikan maupun data yang belum dipublikasikan.

11.2. Konsep dan Definisi

Dalam analisa statistika ekonomi ini, beberapa istilah yang digunakan dan penjelasannya adalah sebagai berikut :



- 1). PNBPN adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu penerimaan yang didapat oleh instansi pemerintah pusat atas jasa-jasa yang diselenggarakan atau yang berupa pungutan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan termasuk pajak dan retribusi dan masuk dalam kas negara.
- 2). PNDN adalah Penerimaan Negara Dalam Negeri yaitu keseluruhan penerimaan yang didapat oleh negara yang terdiri dari penerimaan dari pajak yaitu penerimaan dari pajak dalam negeri, penerimaan dari pajak perdagangan internasional, serta penerimaan dari bukan pajak yang terdiri dari penerimaan dari sumberdaya alam, bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNBPN lainnya dan pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU) milik pemerintah yang masuk dalam kas negara sebagai komponen penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- 3). PNBPN lainnya adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBPN) selain yang berasal dari penerimaan dari sumberdaya alam, bagian laba BUMN dan pendapatan dari Badan Layanan Umum milik negara.
- 4). PNBPN bidang Postel adalah PNBPN yang berasal dari penyelenggaraan jasa-jasa bidang Pos dan Telekomunikasi yang dilakukan oleh unit-unit kerja di lingkungan Ditjen Postel dan masuk dalam kas negara.
- 5). PDB adalah produk domestik bruto yaitu keseluruhan (total) output yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara melalui sektor-sektor ekonomi di negara tersebut.

11.3. Peran Ditjen Postel dalam Penerimaan Negara

Dalam mengelola kegiatan dan kebijakan dalam bidang pos dan telekomunikasi, Ditjen Pos dan Telekomunikasi memperoleh penerimaan dari jasa yang diberikan dalam pengelolaan sumberdaya telekomunikasi maupun jasa lainnya. Penerimaan tersebut masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBPN) yang akan disetorkan kas negara. PNBPN yang diterima Ditjen Postel berasal dari beberapa bidang yaitu PNBPN dari (i) PNBPN dari penerbitan ijin usaha jasa titipan (bidang pos), (ii) PNBPN dari jasa-jasa yang terkait dengan penyelenggaraan bidang telekomunikasi, (iii) PNBPN dari pengujian dan sertifikasi alat atau perangkat telekomunikasi (bidang standarisasi), (iv) PNBPN dari BHP Frekuensi (bidang frekuensi), (v) PNBPN dari PREOR dan SKOR (bidang frekuensi) dan PNBPN dari Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi.

Kontribusi Ditjen Postel dalam penerimaan negara dianalisis dari besaran PNBP yang dihasilkan dari jasa-jasa di bidang pos dan telekomunikasi yang diberikan oleh unit-unit kerja di lingkungan Ditjen Postel tersebut dan kontribusinya terhadap penerimaan negara yang tercatat dalam APBN. Pada bagian awal akan dipaparkan perkembangan penerimaan Ditjen Postel dalam bentuk PNBP dari masing-masing unit/bidang kerja, pertumbuhan penerimaan tersebut dan tingkat pencapaian dari target yang ditetapkan. Selanjutnya akan dilakukan analisis kontribusi dari total penerimaan PNBP tersebut terhadap penerimaan negara dari tiga jenis yaitu total penerimaan negara dalam negeri (PNDN), total penerimaan negara bukan pajak dan total penerimaan negara bukan pajak lainnya (PNBP lainnya).

11.3.1. PNBP Bidang Perposan

PNBP bidang perposan berasal dari penerimaan dari ijin usaha jasa titipan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pos di Ditjen Pos dan Telekomunikasi. Realisasi penerimaan PNBP dari bidang perposan ini menunjukkan peningkatan sebesar 36% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan PNBP ini masih lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 38,5%. Namun karena target penerimaan PNBP pada tahun ini tidak dinaikkan, maka pencapaian penerimaan pada tahun 2010 ini juga telah melebihi target yang ditetapkan. Pencapaian penerimaan PNBP pada tahun 2010 mencapai 196% dari targetnya.

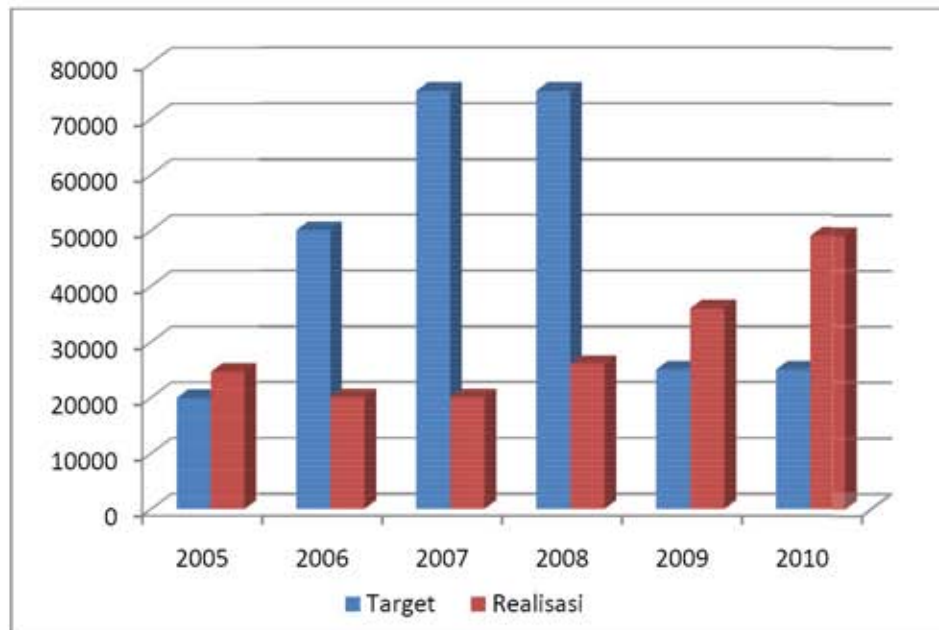
Tabel 11.1. Perkembangan PNBP dari Jasa Titipan Tahun 2005-2010

No	Tahun	Target (Ribu Rp.)	Realisasi (Ribu Rp.)	Pertumbuhan Target (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Tingkat Pencapaian Target
1	2005	20.000	24.700	N.A.	2066,7%	123,5%
2	2006	50.000	20.000	150,0%	-19,0%	40,0%
3	2007	75.000	20.000	50,0%	0,0%	26,7%
4	2008	75.000	26.000	0,0%	30,0%	34,7%
5	2009	25000	36.000	-66,7%	38,5%	144,0%
6	2010	25000	49.000	0,0%	36,1%	196,0%

Melihat kecenderungan peningkatan realisasi penerimaan PNBP serta usaha jasa titipan yang masih memiliki prospek yang tinggi, maka target penerimaan PNBP dari jasa titipan ini sudah layak untuk dinaikkan. Apalagi penurunan target pada tahun 2009 cukup tinggi

sementara realisasi penerimaannya justru menunjukkan trend meningkat. Dalam lima tahun terakhir, realisasi penerimaan PNBP ini telah meningkat rata-rata 26% per tahun. Sementara penurunan target penerimaan yang ditetapkan pada tahun 2009 mencapai 66%.

Gambar 11.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi PNBP Sektor Jasa Titipan



11.3.2. PNBP Bidang Telekomunikasi

PNBP bidang telekomunikasi berasal dari beberapa sumber dari Biaya Hak Penggunaan (BHP) Telekomunikasi yang dikelola oleh Direktorat Telekomunikasi Ditjen Pos dan Telekomunikasi. PNBP bidang telekomunikasi pada tahun 2010 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dengan penurunan yang mencapai 11%. Penurunan ini mengikuti penurunan yang terjadi tahun sebelumnya yang menurun sebesar 32%. Namun penurunan PNBP tahun 2009 lebih disebabkan oleh penurunan pungutan BHP dari 1% menjadi 0,5%. Sehingga pada tahun 2009 target penerimaannya juga diturunkan 47,6% dan realisasi penerimaan pada tahun 2009 tersebut masih melebihi target yang ditetapkan dengan tingkat pencapaian sebesar 115% dari target.

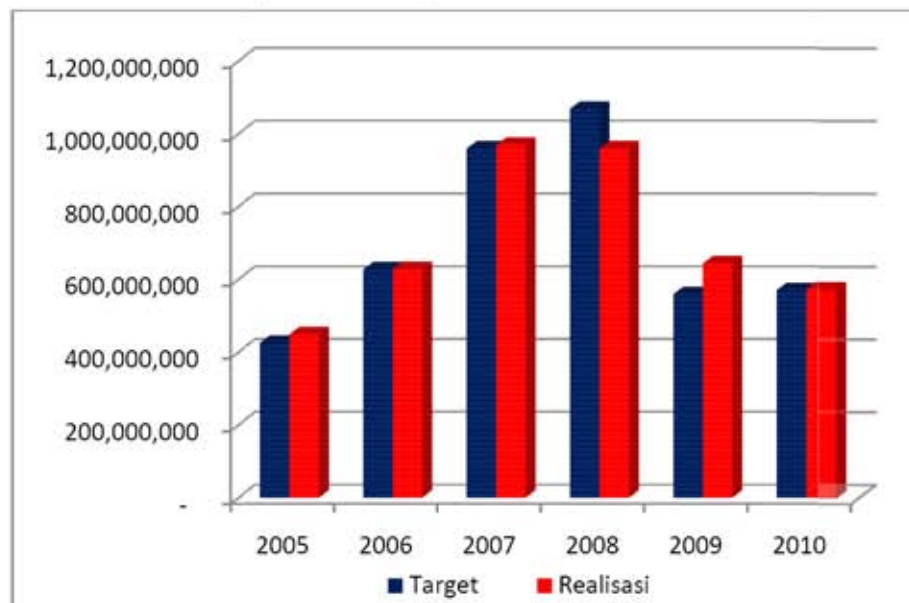
Pada tahun 2010, dengan target penerimaan yang ditingkatkan 2% dari tahun sebelumnya, penurunan realisasi penerimaan ini menyebabkan tingkat pencapaian penerimaan ini hanya 0,5% diatas target yang ditetapkan. Artinya, meskipun masih tetap melampaui target penerimaan, namun kelebihan tersebut sangat kecil. Penurunan penerimaan dari BHP

Telekomunikasi ini patut untuk dicermati ketika pertumbuhan telekomunikasi seluler di Indonesia juga masih menunjukkan pertumbuhan yang pesat dengan berbagai variasi layanan yang ditawarkan oleh operator. Namun perkembangan selama ini dalam penerimaan PNB dari Telekomunikasi ini memang menunjukkan realisasi penerimaan yang hanya sedikit melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2008 bahkan realisasi penerimaan dari PNB sektor telekomunikasi ini hanya 89,9% dari target yang ditetapkan.

Tabel 11.2. Perkembangan PNB dari Sektor Telekomunikasi Tahun 2005- 2010

No	Tahun	Target (Ribu Rp.)	Realisasi (Ribu Rp.)	Pertumbuhan Target (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Tingkat Pencapaian
1	2005	426.000.000	449.845.483,1	19,9%	16,2%	105,6%
2	2006	627.821.671	628.767.084,2	47,4%	39,8%	100,2%
3	2007	960.000.000	970.360.150,6	52,9%	54,3%	101,1%
4	2008	1.069.340.072	960.272.968,3	11,4%	-1,0%	89,8%
5	2009	559.908.621	644.619.476,0	-47,6%	-32,9%	115,1%
6	2010	571.106.793	574.012.243,6	2,0%	-11%	100,5%

Gambar 11.2. Perbandingan antara Target dan Realisasi PNB Sektor Telekomunikasi



11.3.3. PNB Bidang Standardisasi

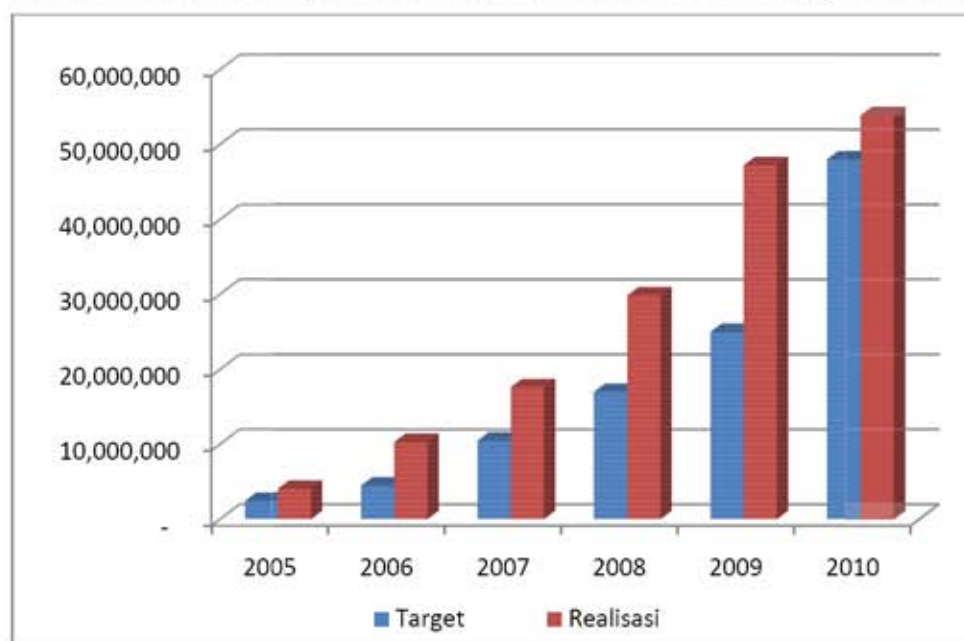
PNB Bidang Standardisasi berasal dari penerimaan dari biaya penerbitan sertifikat perangkat dari hasil pengujian perangkat yang dilakukan terhadap perangkat telekomunikasi yang masuk ke Indonesia. Pada tahun 2010, penerimaan PNB dari bidang

standardisasi masih menunjukkan peningkatan meskipun dengan pertumbuhan penerimaan yang relatif rendah. Peningkatan penerimaan PNB Standardisasi pada tahun 2010 ini hanya meningkat 14,1%, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang meningkat sebesar 58,2%. Sementara pada periode yang sama (2010) target penerimaan yang ditetapkan justru ditingkatkan sebesar 92% karena trend peningkatan realisasi penerimaan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 11.3. Perkembangan PNB dari Bidang Standarisasi Tahun 2005-2010

No	Tahun	Target (Ribu Rp.)	Realisasi (Ribu Rp.)	Pertumbuhan Target	Pertumbuhan Realisasi	Tingkat Pencapaian Target
1	2005	2.460.000	4.072.935,5	53,7%	48,7%	165,6%
2	2006	4.500.000	10.316.936,1	82,9%	153,3%	229,3%
3	2007	10.500.000	17.609.534,0	133,3%	70,7%	167,7%
4	2008	17.000.000	29.862.510,0	61,9%	69,6%	175,7%
5	2009	25.000.000	47.233.912,0	47,1%	58,2%	188,9%
6	2010	48.000.000	53.883.832,0	92,0%	14,1%	112,3%

Gambar 11.3. Perbandingan antara Target dan Realisasi PNB Bidang Standarisasi



Akibat peningkatan realisasi penerimaan yang lebih rendah daripada target yang ditetapkan, tingkat pencapaian realisasi penerimaan PNB dari Standardisasi ini juga hanya sedikit lebih tinggi dari target penerimaannya. Jika pada tahun-tahun sebelumnya realisasi penerimaan ini bisa lebih tinggi 65% sampai 130% diatas targetnya, maka pada tahun 2010 realisasi

penerimaan hanya 112% dari target penerimaan yang ditetapkan. Pencapaian yang relatif tidak besar juga disebabkan oleh target yang ditetapkan yang meningkat cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 200 target penerimaan PNBPN standarisasi ditingkatkan sebesar 92% dibanding tahun sebelumnya. Sementara dalam pelaksanaannya, realisasi penerimaan hanya meningkat sebesar 14,1% dibanding tahun sebelumnya.

11.3.4. PNBPN Bidang Frekuensi

Penerimaan PNBPN dari bidang frekuensi berasal dari dua sumber yaitu penerimaan PNBPN dari BHP frekuensi dan penerimaan PNBPN dari PREOR dan SKOR yang keduanya ditangani oleh Direktorat Frekuensi di Ditjen Pos dan Telekomunikasi. Penerimaan yang bersumber dari BHP Frekuensi pada tahun 2010 masih mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 31,9%. Peningkatan ini tidak jauh berbeda dengan peningkatan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Namun dengan target penerimaan BHP Frekuensi ini yang dinaikkan sebesar 55,7% dibanding tahun sebelumnya, realisasi penerimaan PNBPN dari frekuensi ini hanya sebesar 130% dari targetnya meskipun masih tetap melampaui target yang ditetapkan.

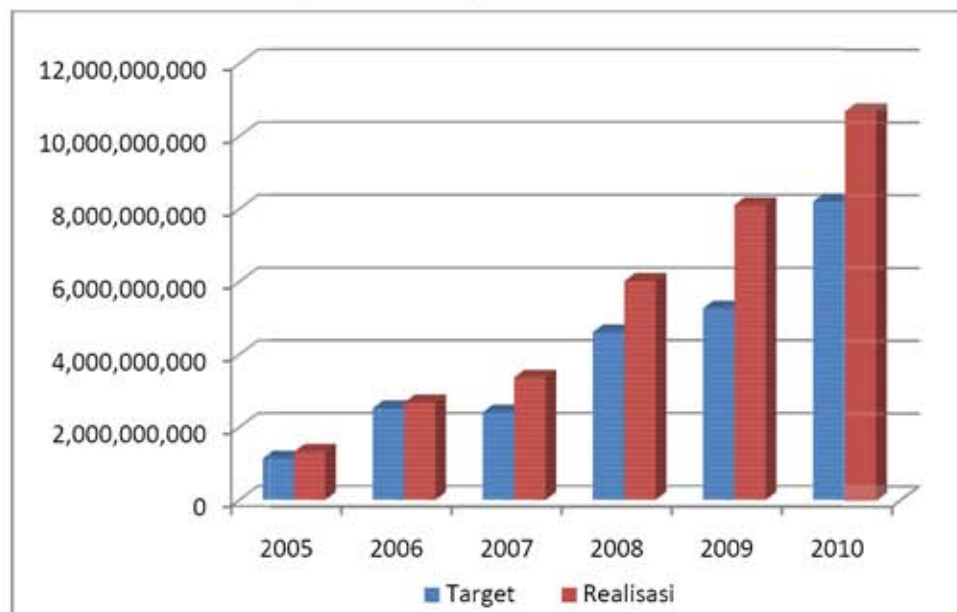
Tabel 11.4. Perkembangan PNBPN dari BHP Frekuensi Tahun 2005- 2010

No	Tahun	Target (Ribu Rp.)	Realisasi (Ribu Rp.)	Pertumbu- han Target (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Tingkat Pencapaian Target
1	2005	1.143.350.890	1.322.607.170,9	50,4%	37,6%	115,7%
2	2006	2.516.907.000	2.675.569.428,2	120,1%	102,3%	106,3%
3	2007	2.409.289.000	3.368.167.814,7	-4,3%	25,9%	139,8%
4	2008	4.612.975.824	6.016.990.913,7	91,5%	78,6%	130,4%
5	2009	5.269.827.618	8.109.402.315,9	14,2%	34,8%	153,9%
6	2010	8.202.947.427	10.693.583.819,4	55,7%	31,9%	130,4%

Dalam enam tahun terakhir, realisasi penerimaan PNBPN dari BHP frekuensi ini memang selalu lebih tinggi dari targetnya. Bahkan ketika target penerimaan frekuensi ini dinaikkan cukup signifikan seperti pada tahun 2008 dan 2010, realisasi penerimaannya selalu dapat melebihi target penerimaannya. Pada empat tahun terakhir, realisasi penerimaan dari BHP frekuensi ini mencapai rata-rata 138% dari target yang ditetapkan. Pertumbuhan industri telekomunikasi yang sangat pesat dengan berbagai aplikasi dan fasilitas yang ditawarkan

membuat penggunaan frekuensi terus meningkat dan berdampak pada penerimaan PNB dari BHP Frekuensi yang juga terus meningkat.

Gambar 11.4. Perbandingan antara Target dan Realisasi PNB dari BHP Frekuensi

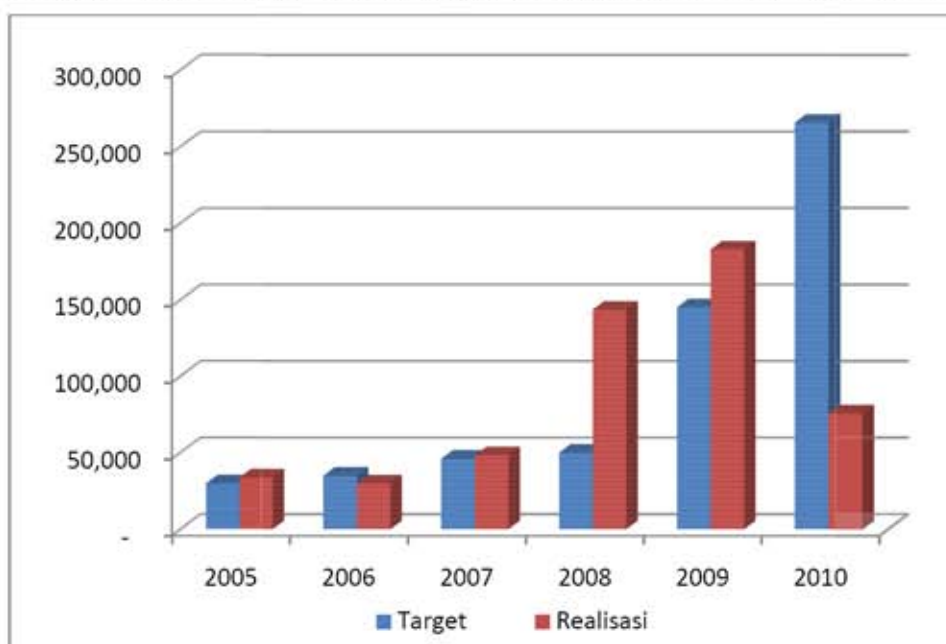


Sumber penerimaan PNB dari bidang frekuensi yang lain yaitu dari PREOR dan SKOR justru mengalami penurunan yang sangat tajam. Pada tahun 2010 ini, penerimaan PNB dari PREOR dan SKOR mencapai 58,7%, meskipun pada tiga tahun sebelumnya realisasi penerimaannya meningkat rata-rata 95,1% per tahun. Bahkan ketika target penerimaan ditingkatkan sangat tinggi pada tahun 2009, realisasi penerimaan PNB PREOR dan SKOR ini juga meningkat lebih tinggi lagi. Namun pada tahun 2010 ini, ketika target penerimaan dinaikkan sebesar 83%, realisasi penerimaannya justru menurun 58,7%. Akibatnya tingkat pencapaian penerimaan PNB dari SKOR dan PREOR ini sangat rendah pada tahun 2010 yaitu hanya 28,5% dari target.

Tabel 11.5. PNB dari PREOR dan SKOR (Frekuensi) Tahun 2005 - 2010

No	Tahun	Target (Ribu Rp.)	Realisasi (Ribu Rp.)	Pertumbuhan Target (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Tingkat Pencapaian Target
1	2005	30.000	33.825	50,0%	2,1%	112,8%
2	2006	35.000	30.040	16,7%	-11,2%	85,8%
3	2007	46.000	48.250	31,4%	60,6%	104,9%
4	2008	50.000	143.467	8,7%	197,3%	286,9%
5	2009	145.000	182.875	190,0%	27,5%	126,1%
6	2010	265.725	75.600	83,3%	-58,7%	28,5%

Gambar 11.5. Perbandingan antara Target dan Realisasi PNB dari PREOR dan SKOR



11.3.5. PNB dari Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi

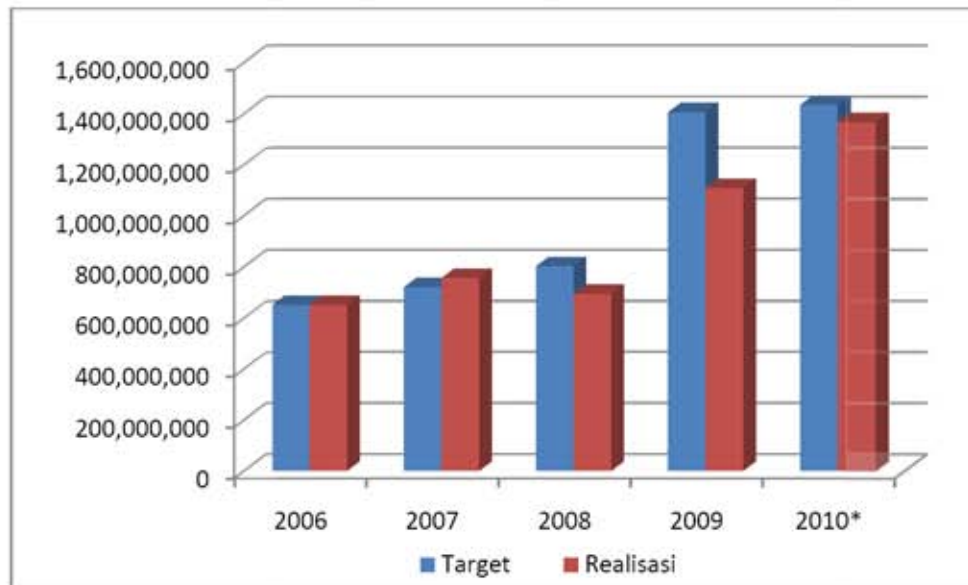
PNBP dari kewajiban pelayanan universal (USO) berasal dari pendapatan kotor dari operator telekomunikasi yang dikelola oleh BTIP. Penerimaan dari BTIP ini pada tahun 2010 mampu meningkat sebesar 24,3% dari tahun sebelumnya, sementara target penerimaannya hanya ditingkatkan sebesar 2%. Namun peningkatan ini lebih rendah dari peningkatan yang terjadi pada tahun sebelumnya yang mencapai 23,4%. Meskipun realisasi penerimaan PNB dari USO ini meningkat lebih tinggi daripada peningkatan target penerimaannya, pencapaian realisasi penerimaan ini masih belum mencapai targetnya, yaitu hanya 95,4%. Namun demikian, tingkat pencapaian pada tahun ini meningkat dibanding pencapaian tahun sebelumnya.

Tabel 11.6. PNB dari Kewajiban Pelayanan Universal (USO) Tahun 2006-2010

N o	Tahun	Target (Ribu Rp.)	Realisasi (Ribu Rp.)	Pertumbuh an Target (%)	Pertumbuha n Realisasi (%)	Tingkat Pencapaian Target
1	2006	649.862.074	650.073.748	N.A.	N.A.	100,0%
2	2007	720.000.000	756.447.662	10,8%	16,4%	105,1%
3	2008	802.005.054	693.502.957	11,4%	-8,3%	86,5%
4	2009	1.405.003.761	1.107.276.107	75,2%	59,7%	78,8%
5	2010	1.433.103.836	1.366.551.545	2,0%	23,4%	95,4%

Sejak tahun 2008 realisasi penerimaan PNBPN dari USO memang selalu lebih rendah atau belum mencapai target yang ditetapkan. Peningkatan target penerimaan yang mencapai 75% pada tahun 2009 semakin membuat realisasi penerimaan ini tidak mencapai target. Sehingga ketika pada tahun 2010 target penerimaan hanya dinaikkan sebesar 2%, realisasi penerimaannya tetap masih belum mencapai target penerimaan tersebut.

Gambar 11.6. Perbandingan antara Target dan Realisasi PNBPN dari USO



11.3.6. PNBPN dari Sumber Lainnya (IAR, KRAP, Sewa Rumah Dinas)

Sumber penerimaan PNBPN bidang pos dan telekomunikasi lainnya adalah penerimaan dari biaya penerbitan sertifikat IAR, KRAP dan penerimaan dari sewa rumah dinas. Total penerimaan dari ketiga sumber ini pada tahun 2010 mencapai Rp. 1,18 milyar atau meningkat cukup tinggi yaitu mencapai 591% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan yang sangat besar ini menjadikan tingkat pencapaian target penerimaan PNBPN dari ketiga sumber ini juga jauh melampaui target yang ditetapkan. Realisasi pencapaian penerimaan PNBPN dari IAR, KRAP dan sewa rumah dinas ini mencapai 744,7% dari target yang ditetapkan karena target penerimaan PNBPN dari ketiga sumber ini hanya ditingkatkan sebesar 59,2%.

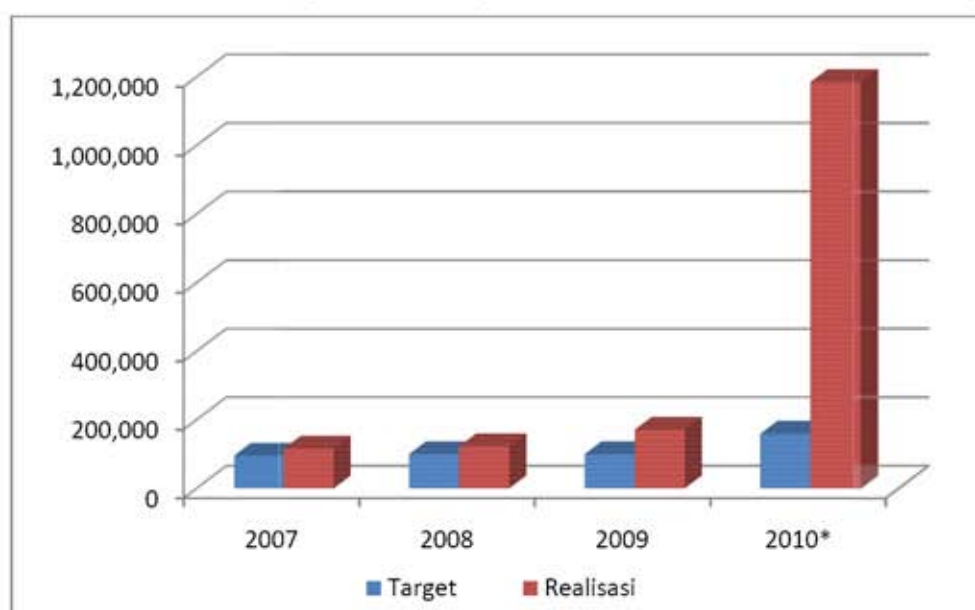
Peningkatan realisasi penerimaan yang besar ini terutama berasal dari penerimaan PNBPN dari IAR dan KRAP. Peningkatan yang sangat besar ini disebabkan oleh dua hal yaitu permintaan penggunaan frekuensi radio amatir yang meningkat tinggi pada tahun 2010 dan

adanya pengalihan pemungutan PNBPN untuk IAR dan KRAP yang sebelumnya oleh dinas teknis di daerah kepada Ditjen Pos dan Telekomunikasi. Sejak tahun 2008 penerimaan PNBPN dari ketiga sumber ini terus meningkat dengan trend peningkatan yang semakin tinggi. Sementara target penerimaan yang ditetapkan justru tidak terlalu tinggi. Dengan peningkatan realisasi penerimaan yang sangat besar pada tahun 2010, maka target penerimaan PNBPN dari ketiga sumber ini sangat layak untuk ditingkatkan.

Tabel 11.7. PNBPN dari Sumber Lainnya Tahun 2007- 2010

No	Tahun	Target (Ribu Rp.)	Realisasi (Ribu Rp.)	Pertumbuhan Target (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Tingkat Pencapaian Target
1	2007	96.000	116.012	N.A.	N.A.	120,8%
2	2008	100.000	123.206	4,2%	6,2%	123,2%
3	2009	100.000	171.479	0,0%	39,2%	171,5%
4	2010	159.150	1.185.129	59,2%	591,1%	744,7%

Gambar 11.7. Perbandingan antara Target dan Realisasi PNBPN dari Sumber Lainnya



Rekapitulasi penerimaan PNBPN dari berbagai sumber seperti pada tabel 11.8 menunjukkan bahwa secara umum penerimaan PNBPN dari semua sumber menunjukkan trend kenaikan kecuali untuk PNBPN dari telekomunikasi yang mengalami penurunan. Secara total, PNBPN dari bidang Pos dan telekomunikasi tahun 2010 ini meningkat sebesar 28% dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini tidak berbeda jauh dengan peningkatan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Peningkatan PNBPN yang terbesar pada tahun 2010 ini terdapat pada



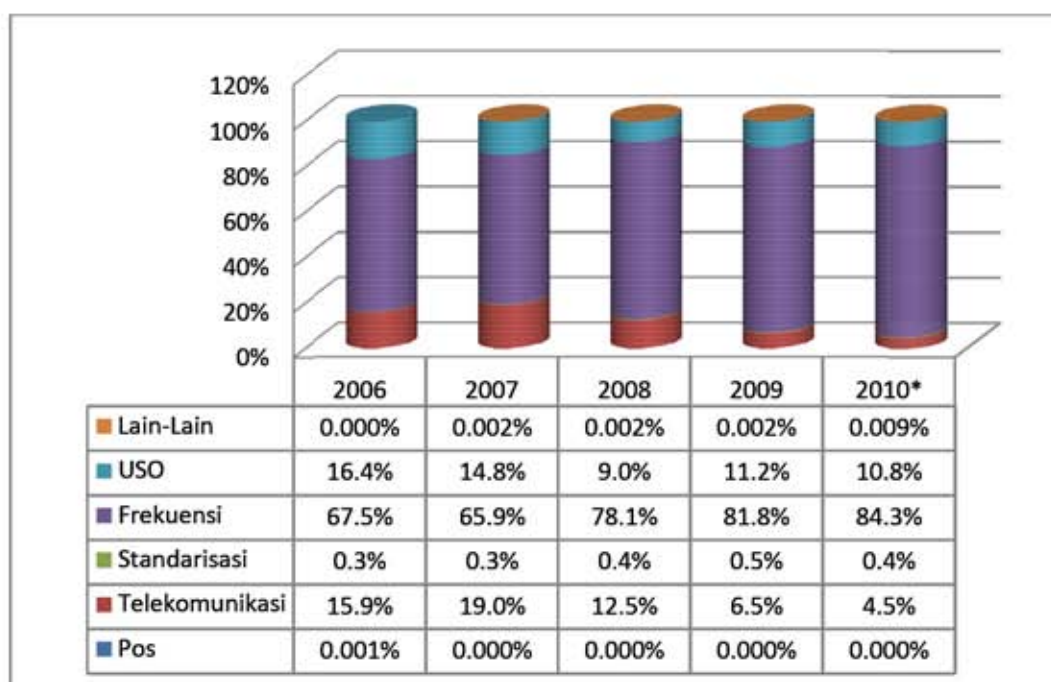
PNBP yang berasal dari IAR, KRAP dan sewa rumah (lain-lain). Namun karena proporsi penerimaan PNBP dari sumber ini relatif kecil, maka tidak memberikan dampak signifikan pada peningkatan PNBP total.

Tabel 11.8. Realisasi PNBP Bidang Pos dan Telekomunikasi Tahun 2005- 2010

No	Tahun	Pos	Telekomuni kasi	Standaris asi	Frekuensi	USO	Lain-Lain	Total PNBP
3	2005	24.700	449.845.483	4.072.936	1.322.640.996	N.A.	N.A.	1.776.584.115
4	2006	20.000	628.767.084	10.316.936	2.675.599.468	650.073.748	N.A.	3.964.777.236
5	2007	20.000	970.360.151	17.609.534	3.368.216.065	756.447.662	116.012	5.112.653.411
6	2008	26.000	960.272.968	29.862.510	6.017.134.381	693.502.957	123.206	7.700.798.816
7	2009	36.000	644.619.476	47.233.912	8.109.585.191	1.107.276.107	171.479	9.908.750.686
8	2010	49.000	574.012.244	53.883.832	10.693.659.419	1.366.551.545	1.185.129	12.688.156.040

Dari komposisi sumber penerimaannya, proporsi terbesar penerimaan PNBP berasal dari PNBP bidang frekuensi, diikuti oleh PNBP dari kegiatan USO. Proporsi penerimaan PNBP dari bidang frekuensi ini pada tahun 2010 mencapai 84,3% dari total penerimaan PNBP bidang pos dan telekomunikasi. Sementara PNBP dari kegiatan USO mencapai 10,8%. Perkembangan komposisi penerimaan PNBP ini menunjukkan hal yang menarik dimana proporsi PNBP dari bidang telekomunikasi menunjukkan penurunan yang sangat tajam dari 15,9% pada 2006 menjadi tinggal 4,5% pada 2010. Penurunan ini disebabkan penerimaan PNBP dari bidang telekomunikasi yang mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir, sementara PNBP dari sumber lain terutama dari bidang frekuensi dan dari kegiatan USO justru mengalami peningkatan. Sehingga, PNBP bidang telekomunikasi yang pada tahun 2007 merupakan penyumbang terbesar kedua setelah frekuensi, sekarang proporsinya hanya terbesar ketiga dibawah PNBP dari kegiatan USO. Sementara dengan peningkatan penerimaan yang semakin tinggi, PNBP dari bidang frekuensi menunjukkan proporsi yang semakin besar.

Gambar 11.8. Proporsi penerimaan PNBPN antar Bidang dalam PNBPN Pos dan Telekomunikasi

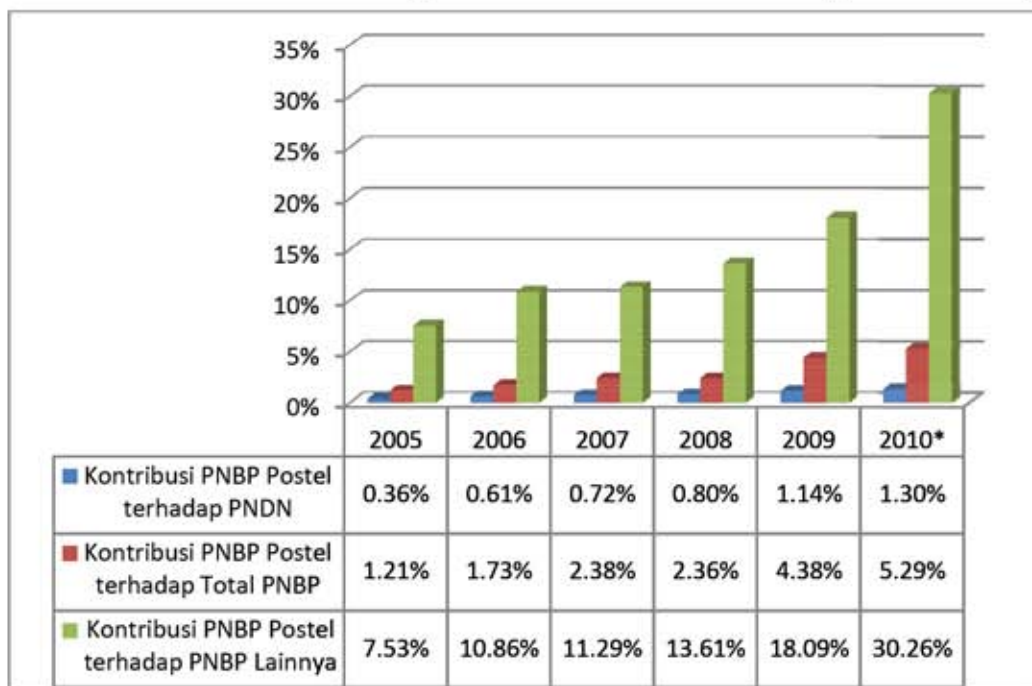


Peningkatan penerimaan PNBPN bidang Pos dan Telekomunikasi ini memberi dampak terhadap peningkatan kontribusi penerimaan PNBPN bidang pos dan telekomunikasi terhadap penerimaan negara. Pada tahun 2010 ini, PNBPN dari bidang pos dan teekomunikasi ini menyumbang sebesar 1,3% terhadap total penerimaan dalam negeri (PNDN) dalam APBN. Kontribusi ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,14%. Jika dibandingkan dengan total Penerimaan Negara Bukan Pajak dari berbagai sumber termasuk dari kontrak pengelolaan sumberdaya alam, maka PNBPN dari Ditjen Pos dan Telekomunikasi ini pada tahun 2010 memberikan kontribusi sebesar 5,29% terhadap total PNBPN. Kontribusi ini juga meningkat dibanding tahun sebelumnya yang baru mencapai 4,38%.

Sementara jika PNBPN dari Diten Pos dan Telekomunikasi ini dibandingkan dengan PNBPN yang berasal dari seluruh Kementerian dan Lembaga, maka kontribusi PNBPN dari Ditjen Pos dan Telekomunikasi mencapai 30,26%. Kontribusi ini bahkan meningkat tajam dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 18,09%. Perkembangan teknologi dan pemanfaatan yang semakin tinggi dari bidang pos dan khususnya telekomunikasi ternyata juga memberikan dampak yang signifikan bagi penerimaan negara yang berasal dari bidang pos dan telekomunikasi dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak. Ketika beberapa sektor

ekonomi lain mengalami pertumbuhan yang lambat karena berbagai faktor yang menyebabkan kontribusinya terhadap penerimaan negara juga menurun, bidang pos dan telekomunikasi masih menunjukkan kinerja yang tinggi dan memberikan kontribusi penerimaan negara yang cukup signifikan.

Gambar 11.9. Kontribusi PNBPN Bidang Pos dan Telekomunikasi terhadap penerimaan negara



*) Dibandingkan dengan data dalam R-APBN-P di Nota Keuangan 2010

Bidang pos dan telekomunikasi masih menunjukkan kinerja yang tinggi dan memberikan kontribusi penerimaan negara yang cukup signifikan, pada saat sektor ekonomi lain menunjukkan pertumbuhan yang rendah

11.4. Peran Industri Pos dan Telekomunikasi dalam Pendapatan Nasional

Analisis lainnya tentang peran ekonomi dari bidang pos dan telekomunikasi terhadap perekonomian secara makro dilakukan dengan pendekatan *output*. Kontribusi bidang pos dan telekomunikasi terhadap perekonomian dengan pendekatan *output* ditunjukkan oleh peran sektor pos dan telekomunikasi terhadap pembentukan pendapatan domestik bruto

(PDB) nasional. Perkembangan produk domestik bruto Indonesia dari tahun 2005 sampai kuartal ke-3 tahun 2009 menurut lapangan usaha termasuk bidang telekomunikasi ditunjukkan oleh tabel 11.8. PDB bidang komunikasi tergabung dalam lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi.

Tabel 11.9. PDB atas dasar harga Berlaku Tahun 2006 –2010 (Rp. Milyar)

LAPANGAN USAHA	2006	2007	2008	2009*	2010**
1. Pertanian	433.223,4	547.235,60	713.291,40	857.241,4	985.143,6
2. Pertambangan dan Penggalan	366.505,4	440.826,20	543.363,80	591.912,7	716.391,2
3. Industri Pengolahan	919.532,7	1.068.806,40	1.380.731,50	1.477.674,3	1.594.330,4
4. Listrik, Gas Air & Bersih	30.354,8	34.726,20	40.846,70	47.165,9	50.042,2
5. Bangunan	251.132,3	305.215,70	419.321,60	555.201,4	660.967,5
6. Perdagangan Hotel & Restoran	501.542,1	590.822,30	692.118,80	744.122,2	881.108,5
7. Pengangkutan dan Komunikasi	231.808,6	265.256,90	312.454,10	352.423,4	417.466,0
a. P e n g a n g k u t a n	142.799,0	149.926,60	171.203,00	181.896,0	211.771,4
b. K o m u n i k a s i	89.009,6	115.330,30	141.251,10	170.527,4	205.694,6
1. Pos dan Telekomunikasi	79.806,0	103.324,40	126.532,70	152.949,4	184.491,6
2. Jasa Penunjang Komunikasi	9.203,6	12.005,90	14.718,40	17.577,98	21.203,02
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	269.121,4	305.216,00	368.129,70	404.013,4	462.788,8
9. Jasa-Jasa	336.258,9	399.298,60	483.771,30	574.116,5	654.680,0
PDB	3.339.479,6	3.957.403,90	4.954.028,90	5.603.871,2	6.422.918,2
PDB Tanpa Migas	2.967.303,1	3.540.950,10	4.426.384,70	5.138.955,2	5.924.008,2

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

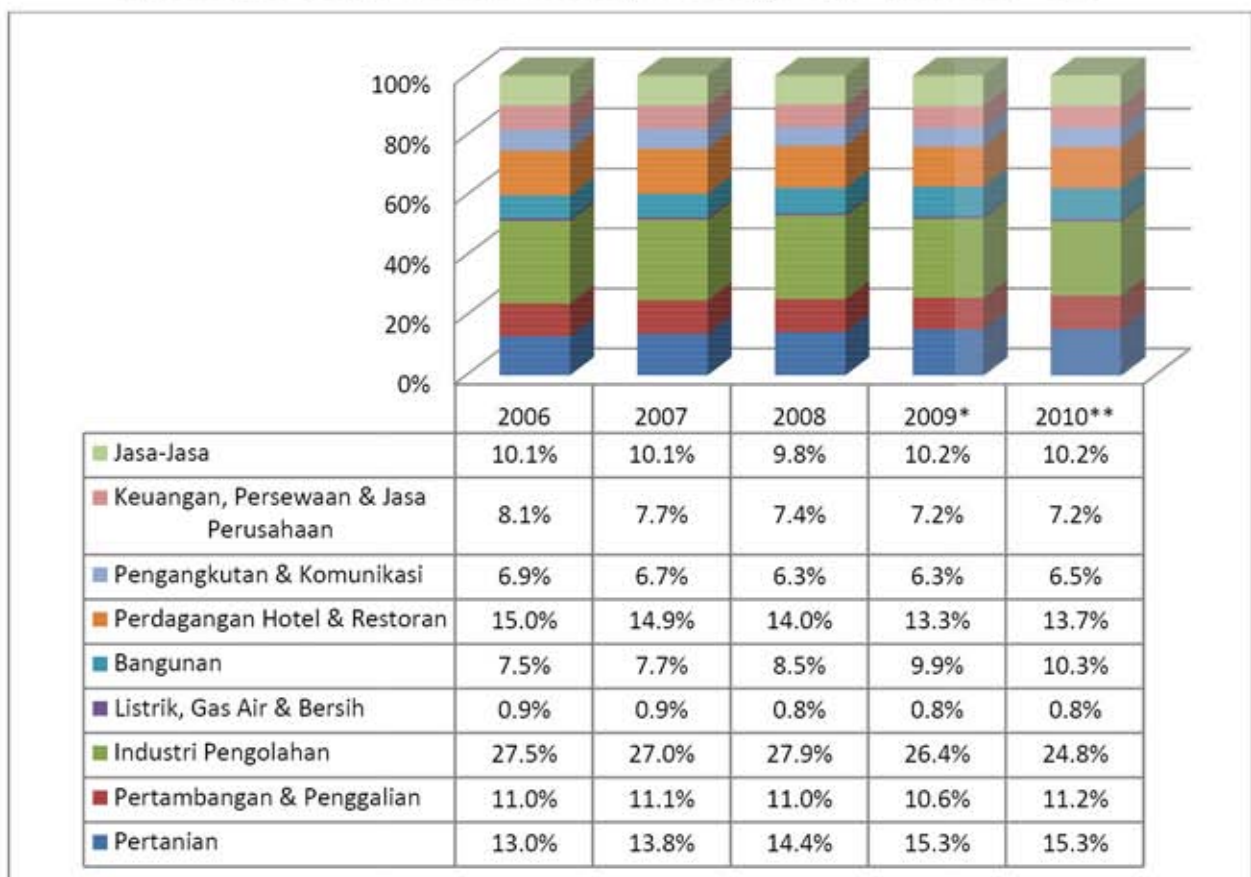
*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Output atau produk domestik bruto (PDB) dari subsektor komunikasi menunjukkan trend yang terus meningkat dalam struktur PDB nasional. Pada tahun 2010, *output* dari sub sektor komunikasi mencapai Rp. 205,7 triliun, meningkat 21% dibanding tahun sebelumnya. *Output* dari subsektor komunikasi ini terdiri dari unsur *output* dari bidang pos dan telekomunikasi sebesar Rp. 184,5 triliun dan *output* dari bidang jasa penunjang komunikasi yang mencapai Rp 21,2 triliun. Sementara total *output* untuk sektor pengangkutan dan komunikasi dimana bidang pos dan telekomunikasi berada didalamnya, *output*nya pada tahun 2010 mencapai Rp. 417 triliun atau meningkat 18% dibanding taun sebelumnya. Hal ini menunjukkan peningkatan *output* subsektor komunikasi lebih tinggi dari peningkatan *output* sektornya.

Jika dilihat dari kontribusi masing-masing sektor dalam perekonomian Indonesia, gambar 11.9 menunjukkan sektor industri pengolahan masih menjadi sektor yang paling berperan dalam perekonomian Indonesia. Pangsa output dari sektor industri pengolahan ini pada tahun 2010 mencapai 24,8%, yang menurun dari tahun sebelumnya sebesar 26,4%. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar berikutnya adalah sektor pertanian dengan kontribusi 15,3% dan sektor perdagangan hotel dan restoran dengan kontribusi 13,7%. Sektor pengangkutan dan komunikasi dimana bidang pos dan telekomunikasi berada di dalamnya, belum memberikan peran yang signifikan. Kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi pada tahun 2010 baru mencapai 6,5%.

Gambar 11.10. Kontribusi Sektoral Terhadap PDB dengan Migas Tahun 2006- 2010



Jika dilihat perkembangan kontribusi dari masing-masing sektor, tabel 11.9 menunjukkan Sektor industri pengolahan menunjukkan kontribusi yang semakin menurun sejak tahun 2006. Kecenderungan yang sama juga terjadi untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor keuangan dan jasa perusahaan. Sektor yang memiliki kecenderungan peningkatan kontribusi adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian dan

sektor konstruksi. Sektor transportasi dan komunikasi cenderung memiliki kontribusi yang stabil dari tahun ke tahun pada kisaran 6,3% hingga 6,9%. Namun jika dilihat secara khusus pada subsektor komunikasi, menunjukkan kontribusi yang semakin meningkat. Kontribusi subsektor komunikasi yang pada tahun 2006 baru sebesar 2,67%, meningkat menjadi 3,2% pada tahun 2010. Kontribusi sektor komunikasi ini secara perlahan mulai menggeser kontribusi sektor transportasi. Kemudian jika dilihat lebih dalam kepada bidang pos dan telekomunikasi, juga menunjukkan kontribusi yang semakin meningkat terhadap PDB nasional. Kontribusi bidang pos dan telekomunikasi meningkat dari 2,39% pada tahun 2006 menjadi 2,87% pada tahun 2010.

Tabel 11.10. Peran Sektor Pos dan Telekomunikasi Terhadap PDB Tahun 2006 - 2010

LAPANGAN USAHA	2006	2007	2008	2009*	2010**
1. Pertanian	12,97%	13,83%	14,40%	15,30%	15,34%
2. Pertambangan dan Penggalian	10,97%	11,14%	10,97%	10,56%	11,15%
3. Industri Pengolahan	27,54%	27,01%	27,87%	26,37%	24,82%
4. Listrik, Gas Air & Bersih	0,91%	0,88%	0,82%	0,84%	0,78%
5. Bangunan	7,52%	7,71%	8,46%	9,91%	10,29%
6. Perdagangan Hotel & Restoran	15,02%	14,93%	13,97%	13,28%	13,72%
7. Pengangkutan dan Komunikasi	6,94%	6,70%	6,31%	6,29%	6,50%
- Pengangkutan	4,28%	3,79%	3,46%	3,25%	3,30%
- Komunikasi	2,67%	2,91%	2,85%	3,04%	3,20%
* Pos dan Telekomunikasi	2,39%	2,61%	2,55%	2,73%	2,87%
* Jasa Penunjang Komunikasi	0,28%	0,30%	0,30%	0,31%	0,33%
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	8,06%	7,71%	7,43%	7,21%	7,21%
9. Jasa-Jasa	10,07%	10,09%	9,77%	10,24%	10,19%

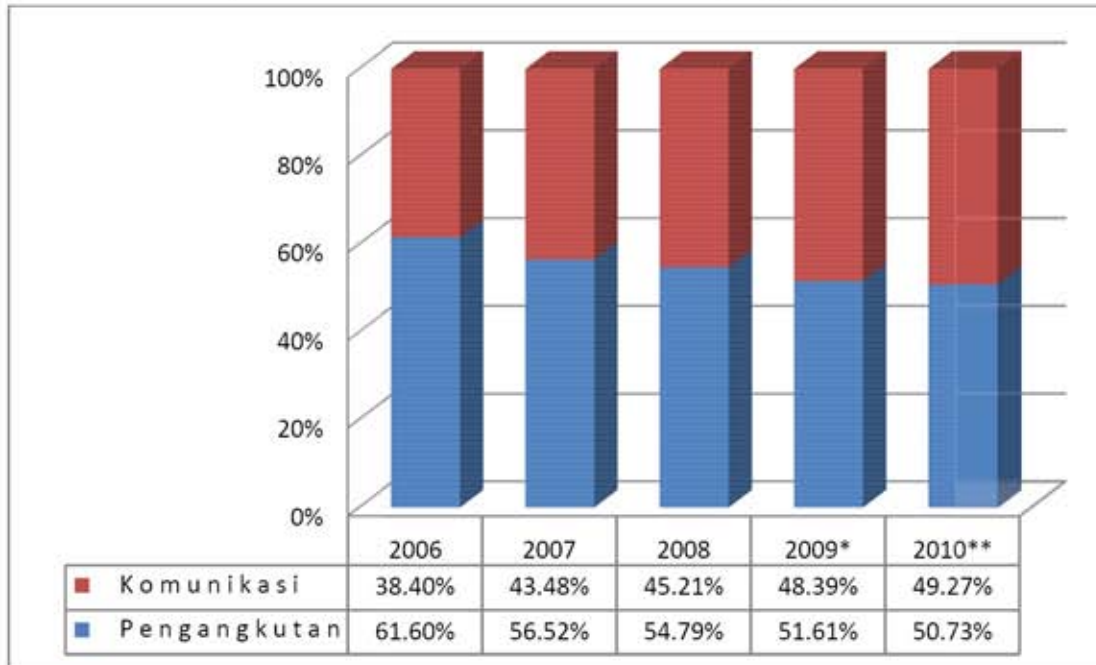
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

*) Angka sementara

Pergeseran kontribusi diantara sektor pengangkutan dan komunikasi semakin terlihat dari gambar 11.10 dimana secara perlahan komposisi pada sektor ini menunjukkan perubahan proporsi antara subsektor pengangkutan dengan subsektor komunikasi. Pada tahun 2006, pangsa subsektor pengangkutan mencapai 61,6% dan subsektor komunikasi baru mencapai 38,4%. Namun sejalan dengan peningkatan output di subsektor komunikasi, pangsa subsektor komunikasi juga mengalami peningkatan terhadap sektor induknya. Pada tahun 2008 pangsa subsektor komunikasi sudah mencapai 45,2% dan pada 2010 sudah mencapai

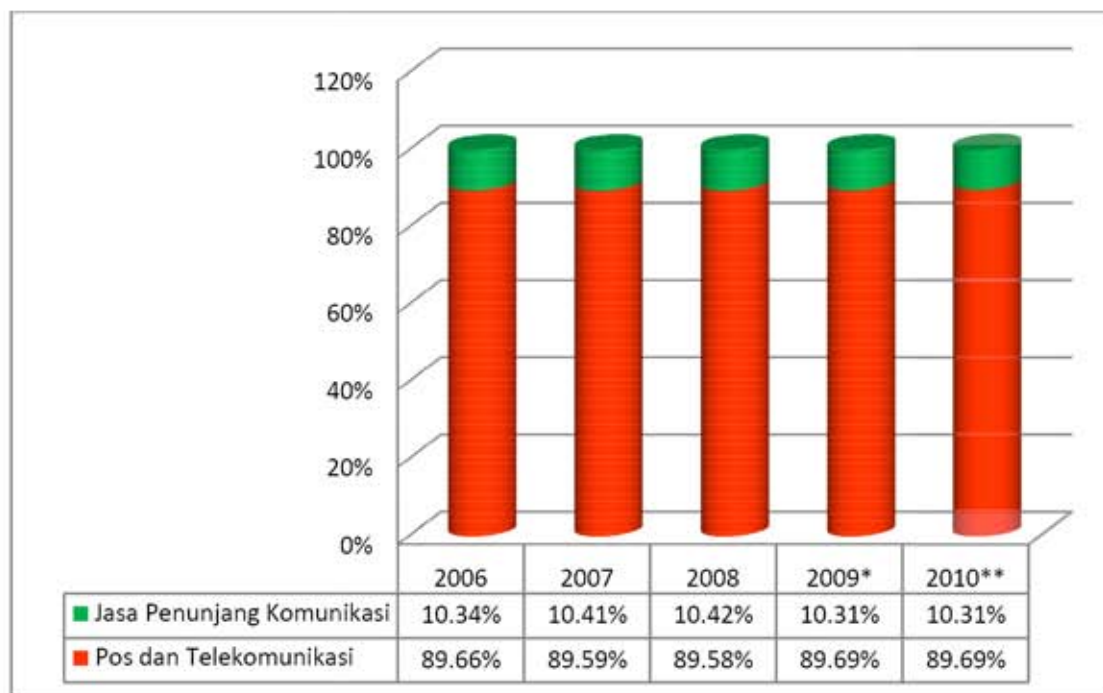
49,27%. Sementara pangsa subsektor pengangkutan mengalami penurunan dimana pada tahun 2008 menjadi 54,8% dan pada 2010 menjadi 50,7%.

Gambar 11.11. Proporsi subsektor komunikasi dalam sektor pengangkutan dan komunikasi



Komposisi antara bidang pos dan telekomunikasi dengan bidang jasa penunjang telekomunikasi pada subsektor komunikasi di PDB nasional ditunjukkan oleh gambar 11.11. Dari grafik tersebut terlihat bahwa pada subsektor komunikasi, bidang pos dan telekomunikasi menunjukkan pangsa yang dominan namun dengan komposisi yang cenderung stabil. Bidang pos dan telekomunikasi memberi kontribusi sampai 89,7% terhadap total *output* subsektor telekomunikasi. Hal ini menunjukkan sangat besar dan dominannya bidang pos dan telekomunikasi di subsektor komunikasi. Proporsi antara bidang pos dan telekomunikasi dengan bidang jasa penunjang telekomunikasi menunjukkan proporsi yang cenderung tidak banyak terjadi pergeseran dalam lima tahun terakhir.

Gambar 11.12. Proporsi bidang dalam subsektor komunikasi pada PDB Tahun 2006-2010



Jika dilihat dari pertumbuhan sektoralnya, sektor menunjukkan pertumbuhan paling tinggi dalam struktur PDB nasional dibanding sektor lainnya. Meskipun secara umum tahun 2010 ditandai dengan penurunan pertumbuhan *output* pada semua sektor, namun sektor pengangkutan dan komunikasi masih menunjukkan pertumbuhan yang tinggi. Pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi mencapai 13,45% ketika sektor lain hanya tumbuh dibawah 10%. Sumber pertumbuhan yang tinggi dari sektor pengangkutan dan komunikasi ini adalah dari subsektor komunikasi. Subsektor komunikasi pada tahun 2010 ini masih tumbuh sebesar 18,1% meskipun menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 23,61%. Pertumbuhan subsektor komunikasi ini juga menurun tajam dibanding tahun 2007 yang tumbuh 29,5%. Penurunan pertumbuhan pada tahun 2010 ini disebabkan adanya penurunan pertumbuhan secara global akibat kondisi ekonomi global yang juga mengalami kelesuan.

Tabel 11.11. Laju Pertumbuhan Sektoral PDB di Indonesia 2006-2010 (%)

LAPANGAN USAHA	2006	2007	2008	2009*	2010**
1. Pertanian	3,36%	3,50%	4,80%	3,98%	2,86%
2. Pertambangan dan Penggalian	1,70%	1,98%	0,66%	4,44%	3,48%
3. Industri Pengolahan	4,59%	4,66%	3,66%	2,16%	4,48%
4. Listrik, Gas Air & Bersih	5,76%	10,40%	10,86%	14,29%	5,31%
5. Bangunan	8,34%	8,61%	7,47%	7,07%	6,98%
6. Perdagangan Hotel & Restoran	6,42%	8,46%	7,34%	1,30%	8,69%
7. Pengangkutan dan Komunikasi	14,38%	14,38%	16,06%	15,50%	13,45%
a. P e n g a n g k u t a n	6,63%	2,78%	2,76%	5,62%	6,83%
b. K o m u n i k a s i	26,39%	29,54%	29,86%	23,61%	18,10%
1. Pos dan Telekomunikasi	25,82%	29,44%	30,05%	23,65%	18,12%
2. Jasa Penunjang Komunikasi	31,61%	30,41%	28,24%	23,24%	17,87%
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	5,47%	7,99%	8,24%	5,05%	5,65%
9. Jasa-Jasa	6,16%	6,60%	6,09%	6,42%	6,01%
PDB	5,51%	6,32%	6,03%	4,58%	6,10%
PDB Tanpa Migas	6,13%	6,92%	6,49%	4,96%	6,56%

Sumber: Diolah dari data BPS

Jika dilihat lebih dalam pada bidang pos dan telekomunikasi di sektor telekomunikasi, bidang pos dan telekomunikasi juga masih mencetak pertumbuhan yang tinggi dan paling tinggi diantara bidang atau subsektor ekonomi lainnya. Pada tahun 2010, bidang pos dan telekomunikasi ini tumbuh sebesar 18,12% meskipun menurun dibanding tahun sebelumnya yang mampu tumbuh sebesar 23,65%.

Trend pertumbuhan pada sektor pengangkutan dan komunikasi, subsektor komunikasi dan bidang pos dan telekomunikasi dibandingkan dengan pertumbuhan PDB menunjukkan subsektor telekomunikasi memang tumbuh jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan PDB dan subsektor pengangkutan. Kedua bidang pada subsektor ini yaitu bidang pos dan telekomunikasi dan bidang jasa penunjang telekomunikasi ini juga menunjukkan pertumbuhan yang tinggi. Pertumbuhan subsektor dan bidang komunikasi ini meningkat pada tahun 2007 dan 2008, namun mengalami penurunan pertumbuhan memasuki tahun 2009. Penurunan pertumbuhan pada subsektor telekomunikasi dan bidang pos dan telekomunikasi diduga karena mulai mendekati titik jenuhnya pasar dan industri telekomunikasi yang dimotori oleh telekomunikasi seluler yang menyebabkan pertumbuhannya mulai menurun. Namun mulai meluasnya pertumbuhan *broadband* dan akan menjadi andalan sektor telekomunikasi, diduga akan mendorong kembali

pertumbuhan subsektor telekomunikasi ini. Peran telekomunikasi seluler akan mulai digeser oleh *broadband* sebagai motor utama penggerak sektor telekomunikasi di Indonesia.

Gambar 11.13. Trend pertumbuhan sektor telekomunikasi pada PDB Tahun 2005-2010

